



UNIVERSITAS INDONESIA

**BUDAYA PENJARA
(STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BOGOR)**

DISERTASI

**A. Josias Simon R.
NPM: 0606028312**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI PASCASARJANA
UNIVERSITAS INDONESIA**

**DEPOK
DESEMBER 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**BUDAYA PENJARA
(STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BOGOR)**

DISERTASI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai
gelar Doktor dalam Bidang Antropologi**

**A. Josias Simon R
NPM: 0606028312**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI PASCASARJANA
UNIVERSITAS INDONESIA**

**DEPOK
DESEMBER 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri.
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : A. Josias Simon R

NPM : 0606028312

Tanda Tangan :



Tanggal : 20 Desember 2011

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A Josias Simon R
NPM : 0606028312
Program Studi : Pascasarjana
Departemen : Antropologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Disertasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

BUDAYA PENJARA (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BOGOR)

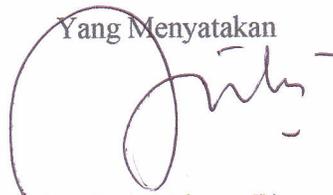
Dengan Hak Bebas Royalty Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Universitas Indonesia – Depok – Jakarta

Pada Tanggal : 20 Desember 2011

Yang Menyatakan



(A. Josias Simon R)



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ANTROPOLOGI
PROGRAM STUDI PASCASARJANA

Gedung B (Prof. Dr. T.O Ihromi) Lt. 1 Kampus Baru UI, Depok 16424 Telp/Fax : (021) 78849022
E-mail: pascant@gmail.com

HALAMAN PENGESAHAN

Disertasi ini diajukan oleh:

Nama : Arthur Josias Simon Runturambi
NPM : 0606028312
Program Studi : Antropologi
Judul Disertasi : Budaya Penjara Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Bogor

Telah berhasil telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

| NAMA PENGUJI | JABATAN | TANDA TANGAN |
|---|-------------|--------------|
| Edy Prasetyono, S.Sos, M.I.S., Ph.D | Ketua | 1. |
| Prof.Dr.Dra. Sulistyowati Suwarno, MA | Promotor | 2. |
| Prof. Adrianus Eliasta Meliala, M.Si, M.Sc, Ph.D | Ko-Promotor | 3. |
| Prof. Dr. Achmad Fedyani Saifuddin, MA; SS | Anggota | 4. |
| Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan | Anggota | 5. |
| Iwan Tjitradjaja, Ph.D | Anggota | 6. |
| Dr. Tony Rudyansjah, MA | Anggota | 7. |

Di tetapkan di : Depok
Tanggal : 16 Desember 2011

ABSTRAK

Hasil penelitian ini merupakan studi etnografi yang penulis lakukan selama tiga tahun di Lapas Bogor. Tujuan penelitian ini secara khusus untuk menambah pengertian tentang keberadaan masyarakat di balik tembok penjara dari pengalaman narapidana yang berdiam serta petugas yang bekerja dalam Lapas. Penelitian dilandasi pemikiran antropologis bahwa Lapas adalah *semi autonomous social field* (SASF) sehingga memungkinkan teknik-teknik penelitian dan observasi etnografis diterapkan dalam Lapas.

Fokus utama penelitian adalah memahami keberlangsungan budaya penjara di Lapas. Penulis meneliti realitas kehidupan sehari-hari di Lapas dengan berpartisipasi secara langsung, melalui interaksi intens, mengamati aktivitas, perilaku, menelusuri kesepakatan yang ditemui di lapangan. Realitas ini menjadi gambaran budaya penjara, sekaligus memperlihatkan cara pandang yang berbeda dalam memahami budaya penjara di Lapas.

Telaah pustaka secara garis besar mengurai budaya penjara sebagai upaya menghadapi berbagai keterbatasan dan deprivasi dalam lembaga. Selanjutnya hasil telusuran lapangan menunjukkan keterbatasan dan deprivasi muncul sebagai tafsir aktor bukan lembaga, yang muncul dalam bentuk kesepakatan-kesepakatan informal yang berlaku sesuai konteks tertentu. Budaya penjara tidak hanya mempersoalkan kesepakatan-kesepakatan (informal) tapi bagaimana kesepakatan-kesepakatan tersebut dipertahankan para aktor dalam kehidupan rutinitas sehari-hari, dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan.

Analisis penelitian memperlihatkan peran aktor dan konteks menampilkan budaya penjara di Lapas berlangsung dinamis, tidak statis. Dinamis karena perubahan memandang budaya penjara dari pemahaman budaya sistemik kearah aktor dan konteks. Analisis penelitian menggarisbawahi budaya penjara tidak lagi mengikuti bingkai institusi atau lembaga, tapi menekankan sisi individu atau aktor yang berperan memelihara berbagai kesepakatan informal berdasar konteks-konteks tertentu.

Kata Kunci: Budaya Penjara, Lembaga Pemasyarakatan

ABSTRACT

The result of this research forms an ethnographic study the writer has studied for three years in the correctional institutions (Lapas) in Bogor. The purpose of this research is especially to increase understanding about the existence of the community behind the wall of the prison, the experience of the prisoners, working along with officials in the institution. This research is based on anthropological thinking that the institution (Lapas) is a semi autonomous social fields (SASF), so that technical and ethnographic observation could be applied in the institution.

The principal research are to appreciate the facts of the prison's culture in the institution. The writer has examined carefully the way of living day by day directly by participating interaction intense, by monitoring their behaviour, by following the reach of agreement, found in the field. This realization becomes at the same time prison illustration that shows the difference to understand the prison's culture in the institution.

The study of the devining manual in general explains the prison's culture as an effort in facing various involvements and deprivations in the institution. Futhermore the result in the investigation field, shows the limit and deprivation that appears as an interpretation actor, not the institution, that appears in informal agreements that occur according certain contexts. The prison's culture not only discuss informal agreement, but how the agreements can be maintained by the actors in everyday's life utilization, in fulfilling the needs and self-interests.

The analytical research shows the actor's role and contexts to bring forward prison's culture in the institution goes on dynamic, not static. Dynamic because of the change of view of the prison's culture from the systemic culture to the actor's direction and contexts. The analytical research underlines that prison's culture doesn't follow the institution's frame or organization, but emphasized the individual side or actor who has taken a role to take care in various informal agreements in accordance with certain contexts.

Keyword: Prison's Culture, Correctional Institution

Universitas Indonesia

BAB 1 PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan studi etnografi yang berfokus pada budaya penjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Paledang Bogor. Tujuan etnografi ini secara khusus untuk menambah pengertian tentang keberadaan masyarakat di balik tembok penjara dari pengalaman narapidana yang hidup serta petugas yang bekerja dalam Lapas. Diharapkan studi ini dapat menunjukkan bagaimana budaya penjara terbangun dan melandasi bekerjanya Lapas pada kenyataan.

Hasil penelitian ini menunjukkan budaya penjara dipahami tidak lagi berbasis pada institusi atau lembaga sebagaimana dipergunakan penelitian-penelitian tentang penjara selama ini, tetapi berbasis pada peran aktor dan konteks. Perubahan cara pandang budaya penjara ini dilandasi temuan lapangan dan analisis kehidupan sosial di Lapas Bogor. Sebelum mendeskripsikan budaya penjara yang ditemukan di Lapas Paledang Bogor, penulis terlebih dahulu mengangkat gambaran budaya penjara sebagaimana dimaksud penelitian-penelitian terdahulu.

Pengertian budaya penjara awalnya didapat bersumber dari literatur-literatur dan penelitian sebelumnya. Beragam uraian melandasi penelitian mula-mula penulis. Pentingnya topik bahasan budaya penjara muncul saat penulis melihat perbedaan yang menonjol antara apa yang diuraikan literatur dan penelitian terdahulu tentang kehidupan penjara, dengan kenyataan yang diamati dan dialami penulis saat meneliti di Lapas Bogor.

Telaah literatur dan penelitian sebelumnya telah mempengaruhi dan mendorong penulis untuk memahami bagaimana seharusnya kehidupan sosial di Lapas. Tetapi pengalaman lapangan menunjukkan tiap langkah penelitian mengarahkan cara pandang tertentu terhadap kehidupan sosial penjara. Prosedur kaku dan baku yang berlaku di lokasi penelitian mau tidak mau mewarnai hasil pengamatan di lapangan. Keadaan ini dimungkinkan karena penelitian penulis merupakan suatu proses, sehingga tak heran terus berubah dalam pengolahan dan penulisannya, beberapa kali bergeser penekanannya dikarenakan temuan demi temuan di lapangan.

Berperan serta sebagai petugas pemasyarakatan menjadi langkah penting mengangkat substansi budaya penjara di Lapas. Walau mula-mula sulit menjauhkan diri dari cara pandang melihat Lapas berdasar aturan formal, sebab selama ini penelitian Lapas identik dengan

ketentuan formal dalam Undang Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Penelitian Lapas sebelumnya mengungkapkan memahami budaya penjara dalam konteks Indonesia mengacu pada keberadaan institusi Lapas atau Rutan. Aturan formal secara organisatoris dijadikan pedoman untuk menata dan mengelola Lapas, semua penghuni Lapas *diwajibkan* mengikuti dan melaksanakan aturan-aturan formal tersebut. Beberapa penelitian Lapas lain, meskipun sudah tidak lagi mendasarkan uraian pada ketentuan formal, tapi konsepsi dan pemahaman budaya penjara yang diacu belum berubah, masih mengikuti literatur terdahulu tentang kehidupan penjara. Hal ini melatarbelakangi penulis untuk menelaah lebih jauh situasi terkini budaya penjara dengan mengambil studi kasus di Lapas Bogor.

Berbagai literatur dan penelitian terdahulu secara garis besar membicarakan budaya penjara berangkat dari pertanyaan utama: adakah budaya dalam penjara dan adakah tiap penjara mempunyai budaya berbeda. Ahli sosial Erving Goffman dalam buku *Asylum* (1961) mengatakan mereka yang masuk ke dalam penjara baik itu petugas (tertentu) maupun para terhukum, memasuki institusi penjara dengan "*presenting culture derived from his home world*" (Goffman, 1961:13). Dalam uraian ini Goffman mengemukakan bahwa *adaptasi institusional* pada institusi total sebagai *disculturation*, secara tegas Goffman menjelaskan tidak terjadi akulturasi budaya dalam penjara, meskipun petugas dan terhukum menghadirkan budaya masing-masing dari luar penjara. Uraian Goffman tidak disetujui kebanyakan ahli sosial, mereka memandang dalam penjara justru berlangsung akulturasi budaya. Budaya penjara muncul karena keterbatasan-keterbatasan dan deprivasi dalam penjara (*pain of imprisonment*), budaya penjara timbul sebagai upaya menghadapi berbagai keterbatasan dan deprivasi selama berada dalam penjara.

Budaya penjara menurut beberapa literatur menggambarkan munculnya kesepakatan-kesepakatan informal dalam masyarakat penjara akibat keterbatasan dan deprivasi selama di penjara. Pengertian ini dikemukakan Donald Clemer (1940) dengan konsep *prison community (inmates subculture)*, Gresham M Sykes (1958) dengan konsep *society of captives*, Irwin & Cressey (1964) dalam *prison subculture*, maupun Ellis Finkelstein (1993) dalam *rules of relationship (prison rules)*. Dari pengertian ini diperoleh penjelasan bahwa masyarakat penjara terdiri para terhukum yang membentuk budaya penjara karena lilitan keterbatasan dan deprivasi yang dihadapi. Sementara, Lawrence M. Friedman (1977) menambahkan timbulnya kesepakatan-kesepakatan informal tak lepas dari budaya hukum pada sistim peradilan dimana penjara hanya menjadi salah satu subsistem didalamnya, apa

yang terjadi di penjara sangat tergantung kondisi yang berlangsung dalam proses peradilan. Budaya hukum disini menjadi kekuatan-kekuatan sosial, ide-ide, sikap-sikap, kepercayaan, harapan dan pandangan tentang penjara, serta memberi masukan, menjadi penggerak, dan memberi output kepada penjara, menjadi pengaruh eksternal terhadap bekerjanya aturan-aturan yang telah dirumuskan penjara. Penulis tidak lebih jauh membahas budaya hukum, tapi uraian Friedman menunjukkan kaitan erat antara budaya hukum dengan budaya penjara sebagai acuan yang dipergunakan para ahli sosial terdahulu melihat kehidupan sosial penjara.

Para pengamat terdahulu menguraikan budaya penjara sebagai kesepakatan-kesepakatan yang berlangsung secara internal dan dipengaruhi keadaan eksternal. Dalam perkembangan berikut, budaya penjara tidak hanya mengulas kesepakatan-kesepakatan informal dalam kehidupan penjara, tapi bagaimana kesepakatan-kesepakatan tersebut dipertahankan, dilanggengkan atau diwariskan diantara anggota dalam masyarakat penjara. Masyarakat penjara kemudian tidak mencakup terhukum (*inmates*) semata, tapi melibatkan petugas (*officer*) dalam mempertahankan kesepakatan-kesepakatan informal agar terus eksist. Upaya pelanggengan ini tentu tidak bisa dilakukan sepihak, harus melibatkan pihak lain. Kiran Bedi (2003) secara tegas menyebutkan subbudaya penjara terkait pelanggengan perilaku dimana semua pihak terlibat, ikut serta membentuk kehidupan sosial di dalam penjara.

Pelanggengan berbagai kesepakatan informal tumbuh dalam penjara, mendorong cara pandang melihat budaya penjara tidak lagi memakai bingkai institusi atau lembaga, tapi mengarah pada individu atau aktor yang berperan melanggengkan berbagai kesepakatan tersebut dalam penjara. Pentingnya aktor dalam kehidupan penjara didukung beberapa pemikiran ahli sosial seperti Foucault (1977), Rhodes (2001) dan Kip Coggins (1996). Adapun inti beberapa pemikiran ini diuraikan berikut.

Foucault (1977) mengulas penjara dengan mengemukakan konsepsi panoptikon sebagai bentuk penaklukan nonkorporal dalam penjara yang tidak memerlukan pemaksaan fisik, menginternalisasi kuasa penaklukan ke dalam diri terhukum, Panoptikon bagi Foucault mampu mengintervensi semua individu terhukum setiap saat tanpa merasa diintervensi hanya dengan pengaturan cahaya dan tata geometri. Foucault memang tidak secara spesifik membicarakan aktor, tapi sistim carceral yang tersebar menyentuh individu terpidana sebagai bagian penghukuman dan menyebar melalui jaringan *carceral* (*carceral network*). Uraian Foucault melandasi cara pandang penulis melihat penjara dari pandangan kelembagaan (formal) menuju pandangan yang menekankan individu atau terhukum. Selain Foucault,

penulis menggunakan uraian Rhodes (2001) yang mengangkat persoalan penjara berfokus pada perhatian politik dimana dalam uraiannya dikatakan hampir setengah isi penjara di Amerika Serikat dihuni kulit berwarna. Menurut Rhodes (2001) penjara bukan lembaga koreksi tapi tempat penghukuman individu-individu pelanggar kebijakan kriminal yang mayoritas berasal dari kelompok sosial tertentu. Disini Rhodes menekankan perhatian pada terhukum sebagai individu yang mewakili identitas kelompok sosial tertentu. Uraian Foucault dan Rhodes menjembatani pentingnya melihat aktor dalam kehidupan sosial penjara.

Selanjutnya, penulis mencatat penjelasan menarik Kip Coggins (1996) bahwa masyarakat di balik tembok penjara mempunyai budaya nyata (*true culture*) dimana terhukum dan petugas *familiar* dengan nilai dan norma penjara, meliputi pengetahuan dan tingkah laku yang diharapkan, internalisasi nilai-nilai, *beliefs* dan sikap. Coggins (1996) secara spesifik membicarakan budaya penjara terkait posisi terhukum dan petugas sebagai individu (aktor) yang membentuk dan menjadi bagian dari budaya dalam penjara itu sendiri. Kip Coggins (1996) mengingatkan tidak akurat menyamakan budaya yang terbentuk diantara terhukum dan petugas dalam institusi penjara dengan masyarakat di luar penjara, karena kondisi masyarakat terhukum dan petugas dalam institusi penjara berbeda landasan fundamentalnya. Lima landasan fundamental dikemukakan Coggins (1996: 3) yaitu: Pertama, masyarakat di balik tembok penjara adalah masyarakat yang dibentuk, bukan terbentuk secara alami. Kedua, merupakan masyarakat *non-voluntary*. Ketiga, semua yang masuk institusi penjara mengalami akulturasi. Keempat, semua partisipan dalam penjara adalah pendatang baru (*newcomers*) dengan membawa elemen-elemen budaya masyarakat mereka sendiri. Kelima, inti utama masyarakat penjara adalah para terhukum (*inmates*). Kip Coggins menitikberatkan uraian budaya penjara pada tekanan individu (aktor) sebagai bagian masyarakat penjara yang tidak dibentuk secara alami tapi terbentuk dalam interaksi dan bersifat *non-voluntary* (konteks).

Uraian Foucault, Rhodes dan Coggins menginspirasi dan menjadi landasan bagi penulis menelusuri perubahan cara pandang melihat penjara dari basis institusi kearah aktor. Penulis sendiri melihat budaya menjadi penting memahami pergeseran kehidupan sosial penjara. Konsepsi budaya jarang mendapat perhatian ditelaah bersama perkembangan penjara, padahal perkembangan konsepsi budaya begitu kompleks dan beragam. Budaya merupakan istilah khas antropologi dimana pengertian dan definisi budaya (*culture*) sendiri sangat rumit. Kroeber dan C. Kluckhohn pernah mengumpulkan dan mengklasifikasi definisi

kebudayaan secara keseluruhan dari berbagai sudut pandang dan mendapatkan lebih dari 160 buah definisi (Koentjaraningrat, 1987: 130).¹

Hasil penelitian penulis menunjukkan perkembangan konsepsi budaya berjalan simultan dengan pemahaman konsepsi budaya penjara. Budaya penjara terdahulu mengacu pada definisi kebudayaan sebagai suatu konsep yang terintegrasi (*integrated*), keseluruhan (*as a whole*), sistemik dan fungsional, berkembang kemudian sampai pada arus pemikiran budaya merujuk uraian Geertz, dimana kebudayaan diartikan sebagai dialektika diantara *model of* dan *model for*. *Model of* mengakomodasikan penjara sebagai struktur ideal (penyesuaian simbolik dengan nonsimbolik) dan *model for* mengacu pada kenyataan (kesepakatan informal) yang berlangsung dalam penjara (penyesuaian nonsimbolik dengan simbolik). Pemahaman konsepsi budaya Geertz, menurut penulis menjadi jembatan memahami kehidupan sosial penjara (Lapas) berdasar aturan yang menjadi acuan. Aturan ideal mewarnai *panggung depan* kehidupan *seharusnya* di Lapas, sedangkan realitas budaya penjara merupakan *panggung belakang* kehidupan *sehari-hari* dalam Lapas. Semakin intens dan sering seorang peneliti lapangan terlibat langsung dalam rutinitas kehidupan Lapas, maka *panggung belakang* menjadi arena penelitian dan pengamatan yang sarat dengan relasi-relasi sosial dalam kehidupan penjara. *Panggung belakang* mendasari cara pandang terhadap penjara yang menjauh dari aturan ideal, tapi bukan berarti dapat ditiadakan begitu saja. Aturan yang berlaku senyatanya terwujud dalam kesepakatan-kesepakatan informal, para aktor mendukung terbentuknya budaya penjara di Lapas. Pengertian Geertz tentang *model of* dan *model for* mengilhami penulis membangun pemahaman budaya penjara, tapi proses penelitian lanjut mengisyaratkan penulis untuk mengutamakan aturan yang berlaku senyatanya (*model for*), mengikuti apa yang dialami dan dirasakan langsung selama penelitian dalam Lapas. Sudut pandang antropologi memahami budaya sebagai suatu kenyataan yang dirasakan dan dialami, mendasari penulis mengangkat kehidupan sosial secara intens dalam Lapas.

Seiring perubahan masyarakat saat ini, sejumlah persoalan kompleks dihadapi lembaga pemasyarakatan. Perubahan cara pandang diperlukan, karena pengertian budaya penjara dikemukakan literatur sebelumnya, mengalami kesulitan dan ketidakmampuan menjelaskan berbagai hal terkait perkembangan dan kehidupan penjara saat ini, sebagai contoh fenomena overkapasitas, meningkatnya jumlah narapidana tertentu (narkoba),

¹ Konsep budaya dalam sejarah antropologi dapat dipelajari mulai dari Taylor (1871), Linton (1940), Kroeber & Kluckhohn (1952) sampai Clifford Geertz (1973) dan seterusnya (Roger M Keesing: 1992: 68-73).

pembinaan narapidana yang berjalan di tempat, *penghukuman* narapidana lebih menonjol, terhukum pidana kontemporer, sampai peristiwa pungutan dan peredaran barang terlarang dalam Lapas. Berbagai persoalan nyata dihadapi Lapas saat ini semakin mengangkat kelemahan-kelemahan pengertian budaya penjara sebelumnya. Kelemahan ini identik dengan sudut pandang institusi, yang selalu dijadikan acuan atau disampaikan pada tiap terhukum yang baru memasuki Lapas. Hal sama penulis rasakan saat turun lapangan, berulang kali diyakinkan petugas atau narapidana pembantu terhadap keberlakuan sudut pandang institusi ini.

Sudut pandang institusional menjelaskan Lapas adalah lembaga yang menjalankan vonis hakim berupa hukuman penjara dalam tembok tinggi, pengamanan berlapis, bangunan kokoh, dan berpagar duri. Tapi prakteknya ditentukan interaksi hubungan dan kesepakatan-kesepakatan diantara masyarakat di balik tembok Lapas. Interaksi ini mewarnai kehidupan sosial senyatanya dalam Lapas. Sudirman (2007) menambahkan makin besar jumlah narapidana dan terisi penuh sesak dalam Lapas, berperan meningkatkan pelanggaran-pelanggaran aturan dan penyimpangan oleh terhukum. Sikap dan perilaku petugas ikut menumbuh-suburkan perilaku pelanggaran (Sudirman, 2007: 205-230). Masuknya penghuni dengan beragam jenis kejahatan terkini memberi bentuk relasi hubungan baru diantara para anggota masyarakat di balik tembok Lapas. Relasi hubungan ini menciptakan aktor yang mendasari relasi-relasi saling membutuhkan sekaligus melandasi pemenuhan kepentingan timbal-balik diantara sesama mereka.

Kelemahan sudut pandang institusi dibahas khusus dalam tulisan Geoffrey Hunt dan kawan-kawan (1993), bahwa dinamika kompleks kehidupan masyarakat penjara dilandasi sejumlah persoalan. Penjara saat ini berada dalam ketidakpastian, persoalan bertambah seiring meningkatnya fragmentasi narapidana dan ketidakaturan, bahkan mereka yang berulang kali masuk penjara berhadapan dengan budaya penjara yang berubah (*arbitrary*) dan peristiwa-peristiwa yang bersifat sementara (*ad hoc events*). Pendekatan teoritis yang mendikotomikan sumber-sumber perubahan budaya penjara dianggap telah gagal mengungkap kompleksitas dan keterbatasan situasi yang berlaku di penjara (Geoffrey Hunt, Stephanie Riegel, Tomas Morales, Dan Waldorf, 1993:398-409).

Tulisan budaya penjara yang dikemukakan Geoffrey Hunt dan kawan-kawan (1993) sejalan dengan pendapat penulis, dengan melihat budaya penjara dari sisi aktor maka perhatian dan fokus utama bersandar pada bagaimana proses pembentukan, penafsiran, pelanggaran kesepakatan-kesepakatan informal oleh individu. Kesepakatan-kesepakatan ini

dibentuk bukan berdasarkan keterbatasan-keterbatasan atau deprivasi yang diberikan lembaga atas dasar undang-undang, tapi dipengaruhi perilaku para aktor sendiri yang mengadakan tafsir atas berbagai aturan formal tersebut. Konsepsi budaya penjara berubah lebih menekankan proses, mengacu pada aktor dan konteks, memberi tawaran mengatasi kelemahan memahami dinamika kehidupan sosial penjara.

Untuk mendalami bagaimana para aktor menafsirkan dan menampilkan kesepakatan-kesepakatan informal, penulis menggunakan *semi autonomous social field* (SASF) sebagai pendekatan yang muncul dan mewarnai keilmuan antropologi. Pendekatan ini ditujukan menelaah bidang sosial yang dapat diamati untuk dipelajari seorang antropolog sebagai suatu kenyataan. Bidang semi otonom itu menghasilkan aturan-aturan (*rules*), kebiasaan (*custom*) dan simbol simbol secara internal, meskipun rentan terhadap aturan-aturan dan kekuatan lain yang berasal dari luar (*larger world*) (Moore, 1973:722, Moore, 1983: 57). SASF secara metodologis memberi cara yang tajam menggambarkan setting sosial suatu penelitian dimana dalam arena-arena tersebut sekelompok orang saling berinteraksi dan dari proses interaksi tersebut muncul aturan-aturan yang mereka ciptakan dan pertahankan sendiri. Aturan-aturan itu lalu dimodifikasi, diubah atau ditinggalkan sesuai tuntutan kepentingan termasuk aturan-aturan di luar SASF masuk dan memberi pengaruh terhadap interaksi mereka (Sulistiyowati Irianto, 2005: 70).

SASF memungkinkan penulis menelaah kesepakatan-kesepakatan informal dan upaya melanggengkan dalam Lapas. Untuk itu, penulis mulai dengan menelusuri pelaksanaan aturan normatif prosedur tetap (protap) Lapas, lalu menelusuri kesepakatan-kesepakatan informal yang disepakati, dan konteks-konteks yang melandasinya. Penulis melihat aturan formal dan kesepakatan informal bisa berjalan secara bersamaan tanpa saling bertentangan, meskipun secara substantif terdapat perbedaan mendasar, kedua aturan ini berfungsi menjaga keteraturan sosial dalam Lapas, tapi bisa juga sebaliknya menimbulkan ketidakteraturan dalam Lapas. Situasi ini menunjukkan Lapas adalah SASF atau bidang sosial yang semi otonom.

Penulis tidak menutup mata akan kenyataan kehidupan Lapas berulang kali menjadi sorotan atau tayangan media visual atau ulasan beberapa media cetak. Opini negatif bermunculan tentang keberadaan Lapas. Berbagai ulasan media massa ini ikut mengarahkan penulis meneliti dan memahami Lapas lebih intens berdasar cara pandang yang menekankan aktor dan konteks, sebagai alternatif atas ketidakpuasan jawaban yang disampaikan sudut pandang institusional. Berkaitan hal ini, penulis menyorot terhukum atau narapidana serta

petugas sebagai para aktor yang aktif menafsirkan kembali aturan-aturan baku sesuai kebutuhan dan kepentingan masing-masing, sehingga kehidupan sosial Lapas bukan sesuatu yang terinstitusionalisasi sebagaimana ketentuan aturan normatif, tapi dinamis tergantung aktivitas dan perilaku aktor yang terlibat mengikuti sesuai konteksnya.

1.1. Memasuki Lapas

Ketertarikan meneropong narapidana dan petugas dalam Lapas didukung keberadaan penulis sebagai pengajar Departemen Kriminologi FISIP UI. Studi S3 di Pascasarjana Antropologi UI memaksa penulis mencari pemahaman lebih dalam budaya penjara kaitannya dengan kajian penjara dan implementasinya dalam Lapas. Untuk memenuhi hal ini, penulis melaksanakan penelitian secara terlibat di Lapas Bogor, berinteraksi secara intens dan mengamati secara kasat mata selama tiga tahun.

Cara pandang berbeda sebagaimana dikemukakan di atas, membuat penulis tidak bisa asal memasuki Lapas menggunakan prosedur biasa, meskipun tetap digunakan. Awal memasuki Lapas, budaya penjara (sudut pandang institusi) sempat mengombang-ambingkan penulis memastikan keadaan sebenarnya di Lapas. Tapi akhirnya, penulis dapat menetapkan keberadaan budaya penjara di Lapas terbangun atas peran aktor petugas dan narapidana, dimana para aktor ini saling membentuk relasi sosial erat dilandasi konteks-konteks tertentu, tidak terlihat sepiantas dan spontan. Untuk menelusuri hal ini penulis mengikuti gerak-gerik, aktivitas serta berbaur dengan para aktor tersebut.

Penelitian lapangan yang dilakukan penulis, pelan tapi pasti, membuat kedekatan hubungan penulis dengan para aktor terjalin dan terpenuhi. Beberapa aktor menjadi informan penulis. Tidak mudah menjalin hubungan akrab dengan para aktor dari narapidana maupun petugas, berbagai kesulitan dihadapi apalagi di teritori Lapas, ruang-ruang, blok dan kamar hanya dihuni individu yang berstatus petugas atau narapidana (tahanan) saja, sedangkan penulis bukan keduanya, banyak pihak mencurigai penulis beserta tindak-tanduknya. Untunglah interaksi ajeg dan intens mengikis kecurigaan ini, bahkan mengubah kecurigaan menjadi rasa saling percaya, berteman, ngebrol dan berceritera (*curhat*) antara penulis, narapidana maupun petugas.

Penelitian dengan berpartisipasi langsung ke blok dan ruang-ruang kamar narapidana baru kali ini terjadi di Lapas Bogor. Hal ini menimbulkan keraguan dan ketidakpastian suasana bagi penghuni di kamar dan blok, termasuk bagi penulis sendiri, yang saat itu masih berpakaian bebas. Sebagian besar petugas dan narapidana tidak terus terang, mereka berusaha

menyembunyikan hal-hal kurang baik yang terjadi di Lapas, seakan melindungi keadaan ini agar tak diketahui orang luar. Beberapa narapidana tampak *takut-takut* karena mengira penulis adalah seorang wartawan atau wakil pihak keluarga korban. Sejumlah narapidana lain bahkan menganggap penulis sebagai *cepu*, mata-mata polisi yang sedang mengawasi narapidana tertentu, sehingga banyak dari mereka menjauh saat penulis dekati. Keadaan ini membuat penulis harus pintar-pintar mendekati, mengajak bicara, memberi keterangan atau penjelasan tentang siapa dan dari mana penulis, serta selektif memilih dan menentukan informan. Di Lapas ada istilah *tembok bisa bicara*, masing-masing narapidana umumnya mempunyai *pegangan* petugas tertentu, mereka selalu memberi laporan dan informasi pada *pegangannya* kalau ada sesuatu yang baru, berbeda dan mencurigakan. Penulis termasuk yang *dilapori* atau diikuti kegiatannya oleh beberapa narapidana pembantu. Hal ini penulis ketahui dari beberapa petugas keamanan yang menceritakan banyak narapidana di blok dan kamar melapor pada petugas-jaga terkait tindak-tanduk penulis di dalam Lapas. Meskipun begitu penulis tetap ramah terhadap para narapidana, menganggap mereka sebagai teman saja. Setelah mengetahui seluk beluk hubungan sosial dan ruangan fisik Lapas secara menyeluruh, penulis mulai mencari dan menetapkan siapa saja diantara para narapidana dan petugas yang memenuhi kriteria sebagai informan di lapangan.

Tidak semua kehidupan Lapas mau diungkap narapidana dan petugas secara transparan, sebagian besar realitas ditutupi, apa yang dilihat penulis dengan mata kepala sendiri saja seringkali dibantah petugas maupun tamping melalui jawaban berbelit-belit atau normatif. Penulis saat itu masih dianggap *orang luar* dengan ciri menggunakan pakaian bebas, rapih, dan membawa kartu identitas tamu. Tampilan penulis sangat kontras dibanding para narapidana yang berpakaian seadanya, maupun petugas yang berpakaian seragam dinas.

Berbeda sejak penulis melakukan penelitian menggunakan pakaian seragam pemasyarakatan, respon menghargai diberikan petugas maupun narapidana pada penulis. Mulai saat itu penulis dianggap *orang dalam*, kalau dulu tiap ada transaksi keuangan diantara narapidana dan petugas selalu disembunyikan dihadapan penulis, sekarang tidak lagi, bahkan penulis bisa melihat langsung di depan mata transaksi yang berlangsung. Dalam kegiatan keseharian tak jarang narapidana maupun petugas menyampaikan tanda persahabatan kepada penulis, memberi sebungkus rokok, minuman kaleng, segelas kopi, sebuah roti maupun sekedar basa-basi mengucapkan salam atau mencium tangan penulis. Apa yang dialami dan dirasakan penulis di lapangan tidak banyak berbeda dengan apa yang rutin diterima petugas dan dijalankan narapidana.

Sudut pandang institusional mendorong siapapun yang pertama kali masuk Lapas dianggap orang luar dan berbeda. Sikap masyarakat di balik tembok Lapas tidak begitu toleran terhadap *orang luar*. *Orang luar* dibuat mengiyakan kondisi Lapas adalah tempat pembinaan bagi terhukum, meskipun penelitian etnografi penulis memperlihatkan kenyataan berbeda. Pada tahap awal penelitian, tak terhindarkan penulis dipengaruhi sudut pandang institusi saat menelaah Lapas, tapi makin intens langkah penelitian dilakukan, mendorong pergeseran melihat realitas kehidupan sosial dalam Lapas. Penulis awalnya melihat Lapas sebagai lembaga penghukuman, tapi setelah interaksi ajeg dengan informan, penulis sepakat mengambil fokus tidak hanya gambaran kesepakatan-kesepakatan informal dalam Lapas, tapi bagaimana upaya memelihara dan melanggengkan kesepakatan-kesepakatan tersebut. Bagi penulis, budaya penjara tidak sekedar menggambarkan masyarakat statis atau masyarakat yang diharapkan jera/tobat, tapi dinamis, bergerak mengikuti kebutuhan dan kepentingan masing-masing selama berada di dalam Lapas.

Kesepakatan-kesepakatan informal terbentuk dan berlangsung dalam Lapas tidak berhenti atau diam begitu saja, tapi digerakkan, diperlihara dan dipertahankan para aktor narapidana maupun petugas. Upaya menjaga dan mempertahankan kesepakatan informal dilakukan dengan membentuk relasi-relasi tertentu. Hubungan-hubungan ini memainkan peranan penting melandasi kehidupan rutinitas di Lapas, seringkali diaktifkan saat pemenuhan kebutuhan dan kepentingan, tidak terhalangi syarat substantif seperti ikatan tradisonal yang dimiliki individu atau kelompok tertentu. Relasi-relasi ini mewarnai pola-pola hubungan, aturan, kesepakatan, dan ditransfer dari tamping lama kepada yang baru, dari petugas satu kepada yang lain. Relasi-relasi sosial tercipta dan terpelihara menjadi cermin berlakunya budaya penjara yang nyata, kontinyu dan terpelihara.

Relasi-relasi ajeg dalam kamar dan blok melandasi hubungan intens petugas dan narapidana menghadapi sulitnya pemenuhan sumber daya dalam lingkungan Lapas. Relasi-relasi ini dipergunakan dan dimanfaatkan mencapai tujuan tertentu dalam rangka *survival*. Lingkungan Lapas sempit dan terbatas membuat aktor narapidana dan petugas menciptakan dan memelihara kesepakatan-kesepakatan tertentu untuk *survive*, selain untuk menghabiskan waktu luang sesuai masa hukuman yang telah ditetapkan. Petugas bekerja sama dengan narapidana dalam menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kenyamanan Lapas termasuk menutupi berbagai kekurangan sumber daya yang disediakan lembaga. Aktor petugas dan narapidana tidak selalu mematuhi pengaturan formal secara mutlak, melainkan

melakukan tafsiran, modifikasi atau inovasi dalam berinteraksi agar bisa mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak.

1.2. Lapas Sebagai Institusi

Keberadaan Lapas di Indonesia secara umum telah berlangsung hampir empat dekade, dahulu dikenal dengan sebutan penjara. Lembaga ini telah menjadi saksi pasang surutnya kehidupan di negeri ini dan menjadi cerminan kebijakan politik pemerintah pada tiap masa. Di masa pemerintahan kolonial misalnya, penjara dijejali pejuang Indonesia yang dianggap musuh. Bahkan hampir semua pemimpin perjuangan pernah merasakan menjadi tahanan termasuk para Proklamator Indonesia Soekarno dan Muhammad Hatta (Menteri Hukum dan HAM, 2007).

Selama ini Lapas diidentikkan dengan tempat penghukuman kejahatan dan pelakunya disebut penjahat. Menurut Roeslan Saleh, tidak ada kejahatan tanpa penjahat dan sebaliknya tak ada penjahat tanpa kejahatan, terlalu sederhana menganggap kejahatan suatu kecelakaan belaka. Kejahatan bila hanya ditengok dari sisi kaca mata hukum pidana menyerupai "*hukum tanpa kepala*", tak jelas pandangan kemasyarakatannya (Saleh, 1988: 117). Seorang kriminal atau narapidana ada, bukan karena dibentuk secara lahiriah tapi merupakan produk kondisi sosial dimana ia berada. Penghukuman bukanlah sesuatu yang lahiriah tapi bagian dari konstruksi sosial dalam masyarakat. Para praktisi lembaga pemasyarakatan sering mengungkapkan bahwa proses penghukuman pada tataran operasional awal, mulanya dilakukan polisi, jaksa dan hakim, namun fungsi penghukuman-lanjut menjadi tanggung jawab lembaga pemasyarakatan (Lapas). Lapas sebagai lembaga dibebani peran melayani kepentingan masyarakat terkait dampak penghukuman. Disatu sisi, Lapas diharuskan bisa menimbulkan efek jera atau fungsi preventif, disisi lain diharap bisa memenuhi harapan atau tuntutan pihak korban kejahatan serta keluarganya. Petugas Lapas tak jarang dihadapkan pada peran dilematis dan paradoksal (Adi Sujatno & Didin Sudirman, 2008: 89-96).

Kondisi Lapas di Indonesia menurut Laporan Penelitian *Sub Kultur Penghuni Lapas dan Rutan di Indonesia* (Puslitbang Departemen Hukum & HAM RI, 2008), memiliki beberapa persoalan khas antara lain jumlah penghuni melebihi daya tampung semestinya, kamar untuk maksimal empat orang diisi sampai sepuluh orang, penghuni tidur bergantian, petugas tidak begitu memikirkan pembinaan, mengutamakan pendekatan keamanan, warung-warung tumbuh untuk memenuhi kebutuhan narapidana, penjaja makanan berkeliling demi menambah kebutuhan lauk-pauk narapidana/tahanan. Persoalan-persoalan ini bagai fenomena

gunung es, tidak terdeskripsikan secara baik dan menyeluruh, terabaikan, dan tertutupi pandangan institusional tentang Lapas. Lebih jauh dijelaskan dalam laporan penelitian ini (Puslitbang Departemen Hukum & HAM RI, 2008), beberapa pimpinan Lapas mengaku terpaksa mencari “cara” memenuhi kebutuhan dana untuk keberlangsungan lembaga, termasuk “*memungut biaya*” pada pengunjung dan pungutan biaya terhadap narapidana. Bukan rahasia umum lagi, untuk narapidana “*kelas elite*” atau mampu secara finansial, terdapat perlakuan tersendiri, mendapat fasilitas lebih nyaman dalam pemenuhan kebutuhannya. Berbeda dengan narapidana biasa atau tidak mampu secara ekonomi, harus berusaha sendiri memenuhi kebutuhannya. Narapidana “*kelas elite*” mempunyai pengaruh tersendiri bagi petugas maupun narapidana lain. Interaksi hubungan berlangsung secara tetap membentuk relasi individual maupun kolektif, memunculkan “*tokoh-tokoh*” berpengaruh secara formal dan informal yang berasal dari para petugas maupun narapidana. “*Tokoh-tokoh*” ini menjaga keseimbangan dan stabilitas kehidupan dalam lembaga serta pelaksanaan tugas sehari-hari petugas dan narapidana (Puslitbang Departemen Hukum & HAM RI, 2008). Keadaan ini memperkuat perlunya penelitian terhadap realitas Lapas menggunakan cara pandang berbeda, tidak hanya secara institusional.

Lapas sebagai institusi memiliki keterbatasan-keterbatasan. Akses memasuki, meneliti dan mengamati masyarakat di balik tembok Lapas sangat terbatas. Untuk itu, harus memperoleh izin dari pihak berwenang agar bisa masuk dan meneliti ke dalam bangunan Lapas. Lapas tidak saja dibatasi batas-batas fisik tapi mempunyai batas-batas sosial. Batas fisik seperti pagar, tembok, jeruji diberlakukan terhadap terdakwa, untuk tidak saling berinteraksi secara bebas seperti umumnya masyarakat di luar penjara. Pembatasan fisik atas ruang gerak ini dilaksanakan sesuai aturan penghukuman, yang dibuat para ahli hukum di luar penjara (legislator dan yudikator). Para terdakwa sendiri menjadi bagian masyarakat penjara yang mempunyai kontrol kecil terhadap determinasi batas-batas fisik dalam institusi Lapas, berbeda dengan para petugas mempunyai kontrol lebih besar terhadap pelaksanaan batas-batas fisik ini. Jika batas-batas fisik dapat diamati secara kasat mata, maka batas-batas sosial dalam Lapas pun begitu. Dalam praktek, batas-batas sosial dan kewenangan mengaturnya diciptakan dan dimiliki bersama oleh aktor petugas dan narapidana. Batas-batas fisik dan sosial menimbulkan kesepakatan-kesepakatan diantara petugas dan narapidana, untuk saling bekerja sama menafsirkan kembali pelaksanaan batas-batas tersebut sesuai kebutuhan dan kepentingan masing-masing.

Tafsiran dan keputusan aktor atas batas fisik dan batas sosial, menciptakan struktur-struktur fisik dan sosial dalam kamar, blok, maupun area perkantoran dalam Lapas. Batas-batas ini memperlihatkan struktur masyarakat di balik tembok Lapas tak jauh berbeda dengan struktur masyarakat di luar Lapas. Struktur fisik dan sosial tampak dari perbedaan kategori *pangeran* dan *dayak*, *pengurus kamar* dan *anak kamar*, petugas dan tamping, beserta berbagai fasilitas yang diperoleh. Kenyataan ini makin menunjukkan pentingnya meneliti Lapas berdasarkan pada aktor dan relasi yang timbul atau konteks, dibandingkan hanya melihat masyarakat di balik tembok Lapas sekedar dikelompokkan dalam ruang-ruang fisik, kamar-kamar atau area terbatas, dikelilingi tembok tinggi, dibedakan status tahanan atau narapidana, serta berada dibawah penjagaan ketat petugas pengamanan.

Bila penghuni penjara dahulu sering disamakan dengan sebutan sampah masyarakat, penjahat besar, penyakit masyarakat, rentan diperlakukan buruk sampai tinggal dalam tempat tahanan yang tidak manusiawi, maka sekarang pra-anggapan ini telah mengalami perubahan. Dipicu persoalan kompleks masyarakat saat ini, berimbas meningkatnya jumlah kejahatan konvensional maupun inkonvensional seperti korupsi, narkoba, *trafficking*, terorisme maupun kejahatan terkait teknologi. Peningkatan jumlah kejahatan ini memberi akibat meningkatnya penghuni Lapas rata-rata 10% per tahun terutama di kota-kota besar dan sekitarnya. Penghuni Lapas menjadi sangat variatif, tidak saja dihuni oleh perampok, penipu, pembunuh, pemerkosa, tapi berkumpul bersama dengan para pengedar narkoba, bandar judi, pejabat negara, direksi bank, intelektual, bankir, pengusaha dan para profesional lain.

1.3. Penelitian Tentang Lapas

Penelitian budaya penjara yang dilakukan penulis di Lapas tidak timbul secara tiba-tiba. Sebelumnya penulis mengkaji terlebih dahulu bagaimana penelitian-penelitian yang telah ada melukiskan budaya penjara di Lapas dan Rutan di Indonesia. Beberapa penelitian telah mendorong penulis melakukan hal yang sama yaitu meneliti langsung ke Lapas, untuk melihat, mengalami, merasakan, dan berada serta tinggal dalam Lapas pada kurun waktu tertentu. Beberapa penelitian tentang budaya penjara di Lapas (Rutan) tersebut dapat disebut mulai dari penelitian Catur Fatayatin (2005), Mardi Santoso (2005), Samsun (2005) dan Saifullah (2005).

Catur Fatayatin (2005: 3-4) menggambarkan budaya penjara di Rutan Salemba dikaitkan dengan stratifikasi dan kesenjangan sosial dimana para terhukum dalam kamar (sel) dibagi atas kelas-kelas sosial tertentu. Terhukum *kelas atas* (berduit/berpangkat)

memposisikan diri sejajar dengan pegawai kelas atas bahkan merasa lebih, sedang tahanan *kelas menengah* memposisikan diri sebagai masyarakat *kelas dua* (berduit) cenderung bergaul dengan tahanan *kelas atas*, menempatkan diri sebagai majikan bagi tahanan *kelas bawah*. Sedangkan tahanan *kelas bawah* (tak mampu) berada pada posisi tidak menguntungkan, selalu dijadikan obyek dan sasaran berbagai kalangan, banyak diantara mereka (narapidana *kelas bawah*) menjadi korban dilakukan oleh pegawai maupun sesama tahanan. Disini, perbedaan status menjadi ajang eksploitasi, tidak hanya status narapidana tapi juga status pegawai terutama pegawai berstatus *ekonomi tinggi* dalam pangkat/jabatan, akan lebih mudah mengakses tahanan *kelas atas*, sebaliknya pegawai *kelas bawah* mengalami kesulitan mengakses tahanan *kelas atas*, sehingga lebih mudah mendekati tahanan kelas bawah. Budaya penjara dalam kehidupan Rutan, bagi Catur Fatayin (2005), penuh dengan persaingan karena status pegawai maupun tahanan mempengaruhi kehidupan sehari-hari, mempengaruhi pertukaran sosial yang berlangsung. Para terhukum yang mempunyai kekuatan keuangan lebih menguasai kelompok tahanan *kurang mampu*. Begitu pula kebijakan atau tindakan petugas, tak jarang mendapat dukungan para terhukum yang mempunyai kekuatan keuangan tersebut dan sebaliknya para petugas tak bisa berkutik jika tak didukung para terhukum ini. Disinilah terjadilah konflik kepentingan secara langsung maupun tidak langsung, memicu terjadinya konflik fisik yang berbuntut pada kekerasan dan pemerasan dalam lembaga (Catur Fatayatin, 2005: 3-4).

Uraian tak berbeda jauh dengan Catur Fatayatin, dilakukan Mardi Santoso (2005: 60-87) mengambil lokasi penelitian di Lapas kelas satu Cipinang Jakarta Timur. Santoso menjelaskan budaya penjara di Lapas diwarnai stratifikasi sosial yaitu narapidana ditempatkan pada lapisan atas, tengah dan bawah. Pada lapisan atas (*anak atas*) biasanya berisi narapidana berstatus mantan pejabat, dosen, polisi, tentara dan lainnya. Pada lapisan tengah (*anak tengah*) umumnya dihuni jenis narapidana yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri namun tidak memiliki kemampuan memberikan uang (yang dimiliki) kepada para petugas atau sesama narapidana. Pada lapisan bawah (*anak bawah*) terdiri dari narapidana yang menggantungkan kehidupan dan kebutuhan hidupnya seratus persen pada fasilitas yang disediakan negara. Santoso menjelaskan narapidana lapisan atas sangat dihormati dalam pergaulan sehari-hari di Lembaga Pemasyarakatan baik oleh petugas maupun sesama narapidana. Penghormatan tersebut dapat diberikan berupa sapaan, salam dan bentuk-bentuk penghormatan lain. Stratifikasi sosial ini membentuk tipe-tipe narapidana yang dikenal memiliki kekuasaan formal seperti *pemuka*, *tamping*, *korve*,

mempunyai tugas membantu petugas pada unit kerja tertentu, dan narapidana pemilik kekuasaan non-formal seperti narapidana yang memiliki kemampuan lebih, contohnya mereka memiliki tingkat ekonomi tinggi, ilmu agama, ilmu pengetahuan, ilmu mistis dan lain sebagainya (Mardi Santoso, 2005: 62-66).

Berikut, dengan mengambil lokasi penelitian sama di Cipinang, budaya penjara dalam Lapas dilukiskan Samsun (2005: 152-155) mencakup pengelompokan berdasar etnis, hal ini menyebabkan konflik antar kelompok terutama antara kelompok *Arek* (mayoritas) dengan kelompok *Ambon* dan kelompok *Medan* atau *Korea*. Pembentukan kelompok ini mempertahankan identitas dan kelangsungan kelompok yang ditandai perebutan status sosial menjadi *pemuka*, *kepala kamar*, *juru kunci*, *tamping* atau *korve*. Samsun dalam uraiannya menekankan narapidana yang masuk lingkungan lembaga pemasyarakatan dihadapkan pada kondisi tidak menyenangkan, didera berbagai permasalahan. Hal ini disebabkan karena adanya pembatasan ruang gerak, fasilitas dan sarana, memicu arena konflik antar pribadi, sesama narapidana, narapidana dengan petugas, maupun kelompok narapidana satu dengan narapidana lain (Samsun, 2005:17). Penulis melihat uraian Samsun menitikberatkan bahasan budaya pada munculnya pengelompokan berdasarkan etnis yang memicu konflik antar kelompok dalam mempertahankan identitas masing-masing.

Berbeda dengan Samsun, Santoso dan Fatayatin, Saifullah (2005) mengambil lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Bekasi, mengurai budaya dalam interaksi intens antara petugas dan narapidana (warga binaan). Petugas secara intensif menjalin hubungan timbal balik dengan warga binaan baik langsung atau tidak langsung termasuk orang-orang di luar lembaga pemasyarakatan secara tentatif. Hubungan intensif ini membentuk jaringan sosial diantara petugas dan narapidana berfungsi secara ekonomis. Jaringan sosial bagi petugas pemasyarakatan merupakan alat penting untuk pencapaian sumber daya berupa uang alternatif selain gaji sebagai pegawai. Jaringan merupakan strategi menjaga kelangsungan hidup petugas pemasyarakatan dan keluarga, demi peningkatan kualitas kesejahteraan lebih baik, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terbentuknya jaringan sosial petugas pemasyarakatan dan narapidana selain dilandasi keterbatasan sumber daya dan tuntutan kebutuhan petugas, didukung pula peluang mensiasati kekurangan sumber daya tersebut. Saifullah menjelaskan eksistensi jaringan sosial dipandang sebagai sesuatu yang lazim dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan cenderung mempunyai ketergantungan, memandang warga binaan sebagai peluang menjanjikan bagi pencapaian sumber daya ekonomi sehari-hari (Saifullah, 2005:106-108).

Penelitian yang dilakukan Fatayatin, Samsun, Mardi Santoso dan Saifullah, menurut penulis, mengedepankan topik dan bahasan berbeda, secara bersamaan mengungkap bagaimana kekhasan dan keunikan kehidupan sosial masing-masing Lapas/Rutan. Mendasarkan uraian keempat peneliti ini, dapat dikatakan tiap Lapas/Rutan menampilkan deskripsi budaya penjara berbeda, meskipun tidak secara spesifik budaya penjara itu diteliti dalam Lapas/Rutan. Keunikan dan kekhasan budaya ini memberi masukan dan ilham bagi penulis melihat kehidupan sosial di Lapas Paledang Bogor. Penulis beranggapan keunikan di Lapas Bogor tentu tidak sama dengan di Lapas Cipinang, Rutan Salemba atau Lapas Bekasi. Keragaman ini meyakinkan penulis menelusuri kekhasan tersendiri kehidupan sosial di Lapas Bogor. Perlu dikemukakan, latar belakang penulis dalam penelitian ini adalah orang luar, tidak sama dengan keempat penulis tadi yang memang pegawai Lapas, sehingga tak begitu persoalan tentang akses dan izin memasuki Lapas/Rutan. Penulis mengakui masih banyak penelitian lain terkait budaya penjara dalam Lapas, tapi terbatasnya literatur yang tersedia, akses dan waktu mengakses, membuat penulis hanya memilah dan memilih beberapa penelitian ini sebagai dasar menelusuri lebih jauh budaya penjara dalam Lapas Bogor.

1.4. Studi di Lapas Bogor

Alasan pemilihan lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Bogor sebagai berikut: Pertama, mengikuti kerangka teoritik yang telah ditetapkan, dimana penulis memfokuskan penelitian budaya penjara dengan menekankan pada aktor dan konteks bukan pandangan institusi/lembaga. Untuk itu, penulis melakukan turun lapangan di Lapas awalnya dengan melakukan kunjungan bersama seorang pejabat di Departemen Hukum dan HAM sebagai *gatekeeper* pada awal September 2007. Kunjungan ini membuka jalan bagi penulis untuk memasuki Lapas Bogor. Hal ini sejalan uraian Carol Martin (2000:222) yang mengingatkan untuk mendapatkan akses dalam penelitian penjara maka peneliti harus melakukan *negotiating gatekeeper*. Setelah mendapatkan izin, baru menentukan level akses penjara. Latar belakang dan pengalaman seorang peneliti sangat berpengaruh memperoleh kesempatan memasuki bangunan penjara yang diawasi secara ketat. Kemampuan dan ketrampilan peneliti menegosiasi penerimaan kehadirannya serta menyampaikan tujuan penelitian, akan menentukan gagal tidaknya penelitian lapangan dilakukan (Carol Martin, 2000:222).

Berangkat dari studi literatur dan penelitian Lapas sebelumnya, penulis melihat penelitian di Lapas Bogor masih terbatas, hanya mengangkat persoalan institusi saja. Penulis menemukan beberapa penelitian yang pernah dilakukan di Lapas Bogor seperti diteliti Agun Gunanjar Sudarsa (2006) membahas tunjangan pelayan masyarakat petugas Lapas, MP Siagian (2007) tentang strategi pengamanan Lapas, dan Yudi Suseno (2006) tentang program reintegrasi sosial bagi narapidana. Ketiga peneliti ini menggunakan lokasi penelitian di Lapas Bogor tapi mengangkat topik penelitian berbeda, mereka mengangkat persoalan manajemen pengelolaan Lapas, sedang penulis mengangkat kehidupan rutinitas sehari-hari yang bagi narapidana dan pegawai Lapas merupakan suatu hal biasa dan rutin.

Penelitian lapangan di Lapas membuat penulis mendasarkan pemahaman pada cara pandang tidak sama dengan peneliti Lapas pada umumnya, yang adalah pegawai Lapas itu sendiri. Kerangka teoritik dipergunakan mengikuti sudut pandang budaya penjara dan perubahannya dari pandangan institusi ke aktor. Landasan ini mendukung penulis mengutamakan telusuran aktor terlebih dahulu sebelum menentukan lembaga mana yang dijadikan lokasi penelitian. Keadaan ini berimbas pula pada cara meneliti di Lapas Bogor. Menemukan aktor dilakukan penulis secara bertahap, berasal dari informasi awal yang diberikan narapidana dan petugas saat melakukan kunjungan pertama kali ke Lapas Bogor bersama seorang pejabat Departemen Hukum dan HAM. Dukungan beberapa narapidana maupun petugas yang bersedia menjadi informan memastikan Lapas Bogor sebagai pertimbangan utama lokasi penelitian. Selanjutnya, melalui *rapport* yang baik dengan beberapa aktor, akhirnya Lapas Bogor dipastikan dan ditetapkan sebagai lokasi penelitian.

Keberadaan aktor menjadi kunci utama meneliti Lapas karena melalui aktor inilah gambaran kehidupan sosial Lapas terdeskripsikan secara nyata, bukan seperti penelitian Lapas selama ini yang dilakukan dengan menentukan lokasi lembaga terlebih dahulu, kemudian meneliti kehidupan didalamnya. Keadaan ini membuat seorang peneliti dipengaruhi aturan seharusnya, bukan senyatanya dalam Lapas. Hal ini berlangsung akibat kuatnya keberlakuan cara pandang institusional memahami budaya penjara.

Disamping persoalan landasan cara pandang (teoritik), penentuan lokasi penelitian di Lapas Bogor didasarkan pada hal-hal praktis seperti Lapas Bogor termasuk salah satu Lapas problematik yang terletak di tengah-tengah Kota Bogor. Berbagai problema praktis muncul seperti overkapasitas meningkat tiga kali lipat dari kapasitas seharusnya, jumlah narapidana/tahanan = 1480 orang melebihi daya tampungnya 500 orang, jumlah tahanan (719 orang) dan narapidana (766 orang) hampir berimbang tidak sesuai fungsi Lapas sebagai

tempat pembinaan, meningkatnya jumlah kasus narapidana/tahanan narkoba hampir 65% dari keseluruhan jumlah narapidana/tahanan padahal Lapas Bogor merupakan Lapas umum. Ditambah jumlah narapidana/tahanan meninggal tahun 2008 cukup besar yakni 21 orang, memperlihatkan kondisi kesehatan Lapas kurang baik, kurang ventilasi, lembab dan mudah terjadi penularan penyakit. Menurut Laporan Ditjenpas (2008) Lapas Bogor termasuk salah satu Lapas yang sering mengusulkan berbagai program bebas bagi para warga binaan pemasyarakatan (WBP) nya dibandingkan Lapas lain, tapi dalam praktek jumlah tahanan yang keluar dan masuk tetap tak sebanding, rasio perbandingannya adalah 1:10 (satu keluar tapi sepuluh yang masuk). Selain itu, secara geografis Lapas Bogor menjadi tempat penghukuman para narapidana/tahanan atau pelaku kejahatan yang berasal dari wilayah penyangga Ibukota Jakarta, menjadi tempat transit atau bersembunyi pelaku kejahatan dari wilayah Jakarta dan sekitar.

Wilayah Lapas Bogor mencakup area Depok, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Lapas Bogor ditetapkan menjadi lokasi penelitian ditunjang kemudahan mendapat akses, perijinan, serta ketersediaan fasilitas selama melakukan penelitian. Keuntungan meneliti di Lapas Bogor adalah areal Lapas tidak begitu luas mendukung mobilitas penulis mengamati kondisi kehidupan sosial dari semua sisi dan sudut ruang Lapas. Berbeda dengan Lapas yang luas tentu akan menyulitkan menembus dan menelusuri semua ruang fisik secara komprehensif. Kelebihan lain meneliti di Lapas Bogor adalah merupakan Lapas umum, berisi narapidana/tahanan dewasa, anak dan perempuan, memiliki beragam penghuni dan pengaturan ruang-ruang fisik dalam Lapas. Situasi ini memberi gambaran kehidupan di balik tembok Lapas mendekati kehidupan nyata di luar Lapas, meskipun dibatasi berbagai halangan dan penghalang fisik. Keuntungan lain diperoleh penulis di Lapas Bogor adalah bisa masuk, dan mendapat kebolehan berinteraksi langsung dengan masyarakat di balik Lapas, melihat aktivitas mereka, mendengar cerita, tuturan, persoalan yang dihadapi, menyaksikan pertikaian, perselisihan, sampai ikut merasakan suasana kamar narapidana dan merasakan beban seorang petugas. Keuntungan berikut meneliti di Lapas Bogor adalah penulis memperoleh banyak kawan dan teman untuk berbagi cerita tentang dunia kriminal mereka maupun pengalaman unik para petugas. Tak jarang penulis ikut menghadapi keadaan-keadaan kritis bersama petugas pengamanan dan narapidana pembantu, seperti ada pelarian, pemukulan, keributan maupun mati lampu, kekurangan air, dan narapidana sakit. Tak terlupakan, awal masuk Lapas, penulis sempat kaget diselingi takut melihat para narapidana bergerombol di koridor dan blok dengan tampang menyeramkan, bertato, serta melotot ke

arah penulis. Berbagai ketakutan menghantui penulis seperti adanya pra-anggapan Lapas itu kotor, bau dan sumber penyakit, tapi setelah mengikuti dan mengalami tugas sebagai anggota regu pengamanan, pra-anggapan itu berubah. Lapas tampak bersih karena dibersihkan mulai dari ruang kamar, blok, ruang kantor, oleh *korve*, tamping maupun petugas. Bau dalam Lapas terasa saat pagi hari, tercium bau keringat menyengat di kamar. Tapi siang hari mulai berkurang karena telah dibersihkan. Bagi penulis cukup menyesak dada bila mencium bau tersebut tapi lama-lama menjadi biasa dan maklum. Penulis juga melihat kondisi *overcapacity*, jumlah ruang terbatas, tak pelak membuat penyakit seperti paru-paru, HIV-AIDS, gatal-gatal, mudah tumbuh. Berbagai keadaan ini harus terus diwaspadai penulis saat melakukan penelitian, penulis membatasi diri bertemu dengan para penderita di klinik, tapi bila sangat perlu bertemu, maka penulis harus meningkatkan kondisi fisik dan psikis sendiri.

Penulis meneliti di Lapas Bogor secara etnografis, mengangkat realitas kehidupan sosial dalam Lapas. Etnografi merupakan *a body of knowledge* mencakup teknik-teknik penelitian, teori-teori etnografik dari ratusan deskripsi kebudayaan. Etnografi membangun pengertian sistematis kebudayaan manusia dari perspektif mereka yang telah mempelajari hal tersebut. Satu hal menarik dalam etnografi “*sebelum peneliti menggunakan teorinya terhadap orang-orang yang diteliti, temukan dahulu bagaimana orang-orang yang diteliti memandang dunianya*” (James P. Spradley, 1979:1-7). Pernyataan ini mengingatkan penulis pada tulisan James P. Spradley (1997) yang mengatakan seringkali informasi yang diberikan seorang informan lebih baik mengidentifikasi fokus penelitian dibandingkan seorang etnografer. Dalam studinya tentang kaum gelandangan, Spradley awalnya memperhatikan struktur sosial pada pusat penyembuhan alkoholisme, tapi para peminum kawakan di lembaga itu yang sedang menjalani hukuman penjara, menegaskan mengapa tidak mempelajari hal-hal yang terjadi dalam penjara saja. Lalu Spradley mengubah arah penelitian dengan meneliti penjara dan struktur sosial, bagaimana para peminum itu ditekan oleh sistem penjara. Disini Spradley memulai penelitian dengan tidak terpaku pada masalah-masalah teoritis tapi menyesuaikan dengan persoalan krusial yang dikemukakan para aktor di lapangan, kemudian mengembangkan suatu agenda penelitian dan menghubungkannya dengan topik pembahasan ilmu sosial (James P. Spradley, 1997: 19). Pengalaman Spradley ini menginspirasi penulis, sehingga penulis memastikan meneliti di Lapas Bogor. Sebagai contoh awal masuk Lapas, penulis mengamati dan membaca berbagai aturan ketat terpampang dalam ruang besukan Lapas, dan tertulis *HP dan kamera tak diperbolehkan masuk*, tapi justru di kamar narapidana penulis mendapat nomor kontak dari salah satu narapidana, yang kemudian menjadi informan

untuk bisa berhubungan dan meneruskan komunikasi lebih intens. Kontradiksi-kontradiksi antara apa yang dilihat dan dirasakan saat berinteraksi di lapangan membuat ketertarikan meneliti di Lapas Bogor semakin besar.

Etnografi sendiri bukanlah merupakan cara baru mengungkapkan berbagai realitas yang tersembunyi atau terselubung di masyarakat. Etnografi-etnografi yang ditulis Geertz (1973) dalam *Deep Play: Notes on The Balinese Cockfight*, dan Hegman Gregg (1972) dalam *Ethnography of A Car Theft Ring* mendukung dan mendasari pengungkapan relasi-relasi sosial tersembunyi dan terselubung dalam masyarakat, khususnya bagi penelitian penulis di Lapas Bogor ini.

Pada bagian lain, Kig Koggin (1996) menyampaikan pendapat tentang meneliti penjara bahwa tidak akurat menyamakan budaya yang terbentuk diantara masyarakat penjara dengan masyarakat di luar penjara, karena kondisi masyarakat yang dibangun para narapidana dan petugas berbeda dibandingkan organisasi sosial masyarakat secara umum, seperti dilukiskan saat membicarakan definisi budaya (*culture*) terdahulu. Marcus dan Fischer (1986) mencatat landasan dasar antropologi budaya saat ini berbeda, tidak lagi dikaitkan dengan studi masyarakat primitif dan terisolasi, tapi telah berubah. Seorang antropolog bisa mengaplikasikan penelitian terhadap masyarakat non-tradisional, salah satunya pada masyarakat di balik tembok penjara (Kig Koggin, 1996:2).

Beberapa persoalan etnografis dihadapi seorang peneliti terutama bagaimana cara memasuki lembaga penjara. Hal ini diingatkan Carol Martin (2000) dalam *Doing Research in a Prison Setting*, yaitu pertama, penelitian penjara hanya dapat dilakukan berdasarkan riset proyek melalui penelitian universitas setelah mendapat ijin pimpinan lembaga. Kedua, penelitian dapat dilakukan dengan menjadi guru, petugas bapas atau staf penjara. Ketiga, meneliti dapat dilakukan dengan bekerja untuk institusi penelitian dalam agenda kerja departemen pemerintah. Penulis mengikuti saran Carol Martin yaitu meneliti di Lapas pertama kali dengan mengikuti riset proyek yang rutin diselenggarakan Departemen Hukum dan HAM, dan selanjutnya meminta ijin untuk meneliti di Lapas Bogor secara intens dengan berperan serta sebagai petugas Lapas.

Carol Martin (2000) menambahkan, dalam penelitian penjara sebagian besar melibatkan keberuntungan dan kesabaran hati karena peneliti terhalang persoalan keamanan penjara. Kontrak penelitian penjara jarang diberikan pada orang baru, dan sulit mendapatkan pekerjaan sebagai peneliti penjara tanpa ada pengalaman dan akses. Ini adalah dunia yang sulit dimasuki, bahkan untuk tiba di pintu portir penjara sekalipun. Penjara adalah *unpleasant*

world, tak ada film-film televisi yang dapat menggambarkan perasaan nyata sebuah sudut penjara, baik suara, bau atau rasa *claustrophobia* maupun rasa takut terhadap sekat-sekat tembok tinggi (Carol Martin, 2000:12).

1.5. Rumusan Permasalahan

Permasalahan utama yang diteliti di Lapas Bogor adalah bagaimana budaya penjara menjadi acuan atau pedoman dalam kehidupan keseharian penghuni. Berbagai uraian diatas mendasari penulis menetapkan cara pandang berbeda melihat kehidupan sosial masyarakat di balik Lapas dari cara pandang lembaga (institusional) kearah aktor dan relasi-relasi yang terbentuk. Kenyataan ini mengindikasikan dua hal, pertama, adanya kesepakatan-kesepakatan informal yang ditetapkan aktor sebagai standar dalam berperilaku, dan kedua, adanya upaya memelihara dan mempertahankan kesepakatan-kesepakatan sesuai kebutuhan dan kepentingan. Sepintas tampak sama bahasan antara kesepakatan-kesepakatan informal dan upaya pelanggaran, tetapi cara pandang yang dipergunakan penulis membedakan cara melihat fenomena ini.

Cara pandang berbeda memahami budaya penjara di Lapas Bogor menjadi tesis utama penulisan disertasi ini. Keadaan ini didukung landasan teoritik dan temuan yang diperoleh penulis di lapangan. Untuk menjelaskan hal ini penulis mensistimatisasi dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana realitas budaya penjara berlangsung dalam Lapas ?
2. Bagaimana gambaran kesepakatan-kesepakatan informal berlaku dalam kehidupan Lapas ? Apa saja konteks-konteks dasar pemenuhan kebutuhan dan kepentingan di Lapas ?
3. Bagaimana relasi-relasi sosial terbentuk dalam memelihara dan mempertahankan kesepakatan-kesepakatan informal ? Siapa saja para aktor yang terlibat ?
4. Bagaimana implikasi budaya penjara terhadap kesinambungan Lapas ?

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan disertasi ini dibagi menjadi beberapa bagian yaitu: Bab 1 berisi pendahuluan, menguraikan latar belakang penulis mengambil topik budaya penjara, ketertarikan penulis memilih topik ini, kemungkinan budaya penjara diimplementasikan di Lapas, menyoroti persoalan Lapas, mengangkat penelitian-penelitian tentang Lapas, serta

pertimbangan-pertimbangan Lapas mana yang dijadikan studi atau penelitian lapangan. Pada bab ini juga disinggung pemikiran dan cara pandang budaya penjara secara berbeda, yang dituangkan dalam permasalahan dan dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian, dengan mengambil studi kasus di Lapas Bogor. Bab 2 berisi telaah pustaka, menguraikan kajian-kajian yang telah eksist tentang kehidupan sosial penjara, kajian budaya penjara secara konsepsional, menelaah beberapa sudut pandang tentang Lapas, mengangkat bahasan Lapas sebagai arena sosial semi otonom. Bab 3 berisi telusuran lapangan atas realitas budaya penjara di Lapas, mendeskripsikan berbagai cara dan upaya yang dilakukan penulis dalam rangka menembus ruang-ruang fisik di Lapas, menguraikan proses pengumpulan data mulai dari mengamati di tempat besukan sampai berperan serta sebagai petugas masyarakat. Bab 4 berisi deskripsi aturan formal dan pengaturan Lapas, menguraikan berbagai aturan formal yang mengatur tugas Lapas, prosedur tetap (protap) yang diberlakukan dalam Lapas, serta pengaturan lingkungan Lapas Bogor meliputi ruang fisik, lokasi dan struktur, profil petugas dan narapidana serta struktur bangunan Lapas. Bab 5 berisi gambaran kesepakatan-kesepakatan informal sebagai simbol kerjasama, pemenuhan kebutuhan & kepentingan, menguraikan kesepakatan-kesepakatan informal dalam rangka adaptasi mencakup kesepakatan masuk kamar, aturan kamar dan bahasa pergaulan yang dipergunakan, serta kesepakatan-kesepakatan informal dalam rangka resistensi mencakup kepemilikan barang terlarang dan pelanggaran prosedur rutin, termasuk sanksi informal yang berlaku. Bab 6 berisi deskripsi relasi-relasi sosial yang terbentuk dalam memelihara dan mempertahankan kesepakatan-kesepakatan informal di Lapas, mencakup identifikasi relasi-relasi sosial antara petugas dan tamping, *pengurus kamar* dan *anak kamar*. Bab 7 berisi diskusi dan analisis pemikiran budaya penjara di Lapas mencakup bahasan perubahan budaya penjara statis kearah dinamis, implikasi budaya penjara, kontradiksi-kontradiksi meneliti di Lapas serta kontribusi pemikiran bagi studi antropologi dan kriminologi. Bab 8 berisi kesimpulan atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ditetapkan dalam bab pendahuluan.

BAB 2

TELAAHAN PUSTAKA

Konsep budaya penjara secara umum menggambarkan kehidupan sosial penjara. Konsepsi ini tidak hanya mendeskripsikan kesepakatan-kesepakatan informal tapi menjelaskan pelanggaran terhadap berbagai kesepakatan informal dalam penjara. Tak mengherankan jika pelanggaran ini menimbulkan berbagai peristiwa pelanggaran dalam penjara, seperti seolah dibiarkan, berlangsung tanpa bisa dikontrol secara optimal. Keadaan serupa juga berlaku dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) bahkan opini negatif melekat pada beberapa Lapas di Indonesia. Untuk menjelaskan uraian budaya penjara dalam Lapas, maka bab ini dibagi tiga bagian. Bagian pertama menguraikan telaah pustaka mengenai kehidupan sosial penjara. Bagian kedua menguraikan beberapa telaah tentang lembaga pemasyarakatan (Lapas). Bagian ketiga menguraikan Lapas sebagai *semi autonomous social fields* (SASF).

2.1. Kehidupan Sosial Penjara dan Budaya Penjara

Gerald Leinwald (1972) dalam bukunya *Prisons* melukiskan kehidupan di balik tembok penjara bervariasi antara satu institusi penjara dengan lainnya. Leinwald mengatakan persoalan besar penjara (*prisons*) dan tempat penahanan (*jail*) adalah overkapasitas serius yang membuat tiap program rehabilitasi menjadi gagal, sehingga pengamanan (*security*) dan keteraturan (*order*) menjadi perhatian utama, tidak lagi pada koreksi (*correction*). Kehidupan sosial penjara dilakukan penghuni mulai dari penyesuaian diri saat makan, minum, nonton TV, berjalan, beraktivitas, memandang, sampai berbicara dan berinteraksi satu sama lain. Aturan-aturan kehidupan sosial penjara mengarahkan cara melihat penjara lebih sebagai tempat retributif daripada rehabilitatif, penjara menjadi gudang degradasi dan kuburan besar kehidupan (Gerald Leinwald, 1972: 30-35). Lebih lanjut Ramsey dalam buku Leinwald (1972) mengambil contoh keadaan penjara di Amerika yang berbentuk seperti asrama besar dengan ratusan tempat tidur, tanpa penjagaan di malam hari sehingga mudah terjadi pemukulan, kematian, bunuh diri, perkosaan, homoseksual, yang menjangkiti para penghuni (*inmates*) lewat paksaan. Penjara dipandang sebagai tempat kejahatan, kekerasan dan keputusasaan (Gerald Leinwald, 1972: 30-35).

Tulisan kehidupan sosial penjara tidak semata dilatarbelakangi keadaan fisik penjara, tapi juga keadaan sosial di dalam penjara, sebagaimana dirujuk beberapa pengertian budaya penjara seperti dikemukakan Donald Clemer (1965), Gresham M Sykes (1958), Ellis Finskelstein (1993), John Dulilio (1987), Irwin & Cressey (1964), Lawrence M Friedman (1977), Foucault (1977) dan Kiran Bedi (2003).

Konsepsi budaya penjara (*the culture of prisons*) mulai dibahas sejak Donald Clemer mempublikasikan *The Prison Community* tahun 1940. Clemer (1940) menguraikan tidak ada jawaban yang tepat menggambarkan apa itu budaya penjara (*prison culture*), tapi hal itu dapat dijelaskan dengan merujuk pada suatu keadaan kompleks ketika seseorang melihat begitu banyak corak sikap (*attitudes*) dan opini yang eksis dalam penjara. Untuk menggali sikap-sikap (*attitudes*) secara individual, maka harus berpikir tentang struktur sosial (*structure of society*) dan fungsi-fungsi sosial (*social functions*) secara resiprosikal (Clemer, 1940: 295). Untuk mendalami budaya penjara maka pengetahuan tentang proses-proses fundamental interaksi manusia diperlukan. Penjara seperti kelompok sosial lain mempunyai budaya (*culture*), budaya adalah supra-individual, individu menjadi pembawa, pen-transmisi dan pemodifikasi, tapi tak membuat lebih dari bagian sangat kecil dari budaya yang diperoleh dalam keanggotaan suatu kelompok. Tembok tinggi dan pintu besi kokoh juga bukan bagian dari budaya, tapi ikut menyebabkan terjadinya budaya. Perasaan orang-orang untuk mengikuti atau melawan keadaan material di penjara adalah bagian nyata dari budaya (*definite phase of the culture*). Ini menjadi bukti bahwa budaya penjara (*the prison culture*) adalah tidak tampak atau bahkan sangat berbeda dengan budaya dari masyarakat bebas (Clemer, 1940:85-86). Dunia penjara merupakan *atomized world* dimana individu-individu merupakan atom-atom yang saling berinteraksi dalam kebingungan dan hubungan kesehariannya adalah impersonal, dibedakan antara saya (*I, me, mine*) dan (*yours, theirs, his*), melekat berbagai label negatif. Dunia penjara adalah dunia yang keras, sebagian besar mereka yang masuk penjara mengalami kebingungan dan ketidakpastian tentang dunia sosial yang ditinggalkannya di luar penjara. Di dalam penjara mereka hanya memikirkan diri sendiri dan pergumulannya. Ini merupakan kesengsaraan-kesengsaraan dalam penghukuman (*pains in punishment*) (Clemer, 1940: 298).

Kehidupan sosial dalam penjara lebih jauh digambarkan Clemer dalam *The Prison Community* sebagai budaya penjara yang mencakup tiga aspek penting dalam kehidupan penjara yakni adanya: a. *The "inmate code", the norms that are presumed to rule prison*

relations (norma-norma yang mengatur hubungan-hubungan dalam penjara). b. "*Argot roles*", *the social roles that are to described by prison slang and are assumed to organize the responses of prisoners to the problems of prison life* (bahasa penjara yang mengatur respon terhukum menghadapi masalah kehidupan penjara). c. "*Prisonization*", *the sosialization experience that accompanies time spent in prison* (sosialisasi pengalaman selama menghabiskan waktu di penjara). Ketiga aspek ini mendominasi pergaulan dan kehidupan sosial dalam penjara melalui kode khas, bahasa dan pengalaman, yang hanya dapat dimengerti para narapidana atau sesama mereka yang berada dalam penjara (Hagan, 1999 : 298).

Kehidupan sosial penjara berikutnya digambarkan Gresham M Sykes (1958) dalam bukunya *Society of Captives*. Sykes tidak secara spesifik menyebutkan istilah budaya penjara dalam tulisannya, tapi menyebut kata budaya mengacu pada berbagai penderitaan kehidupan penjara. Gresham M Sykes secara spesifik menjelaskan lima penderitaan (*pains*) yang diperoleh dalam kehidupan sosial penjara yakni: 1. Kehilangan kebebasan (*loss of Liberty*) yaitu penderitaan paling nyata dirasakan di penjara dimana seorang terhukum harus hidup dalam dunia yang mengecil, dibatasi area terbatas, aturan ketat, keluar-masuk dibatasi, dan harus ijin untuk melakukan suatu tindakan. Hal ini membuat terputusnya hubungan dengan pihak keluarga, kerabat dan teman-teman, hidup menjadi terisolasi dan teralienasi. 2. Kehilangan barang dan jasa (*deprivation of Goods and Services*) yaitu terhukum kehilangan kepemilikan barang dan jasa sebagaimana biasanya kehidupan dalam masyarakat bebas. Standar kehidupan penjara berbeda dengan masyarakat bebas, hanya memenuhi kebutuhan material dasar seperti makan saja, agar tidak lapar, selimut agar tidak kedinginan, tapi tidak untuk kebutuhan lain seperti kesehatan, rekreasi dan seterusnya. 3. Kehilangan hubungan heteroseksual (*deprivation of Heterosexual Relationsip*) yaitu penurunan hasrat seksual dan frustasi seksual dibanding sebelum masuk penjara, ketiadaan hubungan heteroseksual menumbuhkan perilaku homoseksual dalam penjara. 4. Kehilangan otonomi (*deprivation of Autonomy*) yaitu kehilangan privasi, fasilitas-fasilitas dan kenyamanan seperti dirasakan di luar penjara.

Selanjutnya John Dulilio (1987) dalam bukunya *Governing Prisons: A Comparative Study of Correctional Management* mengikuti pendapat Gresham M Sykes yang mengatakan bahwa sistim sosial penghuni (*prisoner*) tidak sekedar pengaturan penjaga penjara saja, tapi meliputi *pengaturan informal* sebagai interaksi bertemunya masalah-masalah dalam suatu

lingkungan spesifik. Penjara adalah masyarakat dalam masyarakat (*society within a society*) yang dikenal dengan sebutan *prison community*, *society of captives* atau *prisoner subculture*. Pengaturan masyarakat terhukum (*inmate society*) tak berbeda dengan organisasi sosial lain, mereka merupakan *a social microcosm* (mikrokosmos sosial) dengan ciri bahasa, kepemimpinan, aturan, upacara dan ritual-ritual (*ethos*) sendiri. Anggota kelompok *masyarakat penjara* adalah terhukum yang berinteraksi dengan ungkapan tersendiri (*argot*), mempunyai perbendaharaan kata untuk setiap peran yang dilakukan saat berhadapan dengan sesama maupun petugas (John Dillulio, 1987:16). Dasar kehidupan sosial penjara membentuk budaya penjara sebagai sebuah realitas kehidupan di penjara yang tak terlihat nyata bagi orang awam (*untrained eye*), sebagaimana Donald Clemer mengatakan penjara adalah lingkungan tertutup atau sistim sosial para narapidana (*inmate social system*) (John Dulilio, 1987: 15-19).

Donald R Cressey dalam buku "*Prison Community*", mengatakan tujuan penjara (*prison*) dan cara mencapainya ditentukan dari luar institusi. Penjara tumbuh bersama pemahaman masyarakat tentang fungsi, pelayanan dan peran penjara yang berubah. Sebagai contoh penjara selama ini diharapkan menjaga para terpidana secara tenang dan aman. Kesuksesan pengelolaan penjara diukur dari ketiadaan masalah dalam bentuk pelarian, kerusuhan atau kekerasan. Di awal sejarah penjara, tujuan organisasional ini muncul dimana masyarakat mengharap ada pembatasan terhadap penghuni penjara, dan selama itu pula diijinkan menggunakan cara-cara efektif mencapai tujuan ini. Karena itu, semua terhukum ditempatkan dalam pengurungan tersendiri (*solitary confinement*) atau institusi seperti *Walnut Street Jail* yang dikelilingi pengawasan ketat. Harapan masyarakat lama kelamaan berubah, masyarakat mengharap penjara (*prisons*) mempunyai program-program rehabilitasi. Penjara sekarang diharapkan melibatkan penghuni dalam akitivitas produktif meskipun pada waktu yang sama menekan penghuni (Clemer, 1965: VI-XI).

Pengelolaan kehidupan penjara menurut Clemer (1940) dilakukan dengan cara pegawai penjara melaksanakan dua prinsip dasar: Pertama, menjaga masyarakat penjara agar tidak terorganisasi membentuk kekuatan, mengijinkan mereka bekerja, dan berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas yang sesuai untuk mengurangi bahaya kekerasan, pemberontakan dan kerusuhan, kemudian membiarkan mereka "menghabiskan waktu sendiri" maupun secara konsisten memberi penghargaan seperti pembebasan bersyarat (*parole*) atau pemberian potongan hari (*good-time allowance*). Tingginya presentasi penghuni yang tidak terorganisir

(*unorganized*) dapat dipergunakan mempertahankan kontrol bagi sistem yang berlaku (resmi). Kedua, secara tidak resmi, membantu para terhukum itu sendiri karena dari segi jumlah mereka lebih banyak dari petugas. Disini kontrol difasilitasi melalui elit-elit penghuni yang ikut menyebarkan, menegakkan norma dan nilai-nilai yang mendukung isolasi psikologis bagi penghuni lain. Budaya narapidana (*inmate culture*) membentuk fungsi administratif yang bermanfaat. Meskipun aturan narapidana mengandung peraturan informal yang bertentangan dengan peraturan resmi, diarahkan petunjuk-petunjuk tertentu untuk menjadi rasional, tidak melawan petugas, tidak membuat masalah terhadap sesama penghuni meskipun jelas melanggar ketentuan normatif. Clemer (1940) menjelaskan dalam rangka memperkuat keadaan ini, elit-elit penghuni melaksanakan aturan formal tersebut sekaligus melanggarnya. Walau sebagian besar terhukum merasa budaya narapidana (*inmate culture*) sebagai *anti-administrasi*, tapi para narapidana menegakkan itu sesuai dan mengikuti aturan (petugas) dalam mengontrol narapidana. Meski aturan formal sering dilanggar, terbentuk aliansi antara organisasi resmi penjara dengan pengaturan organisasi penghuni secara informal.

Donald Clemer dalam *Prison Community* menambahkan beberapa fenomena terkait kehidupan sosial masyarakat penjara (*prison community*) yaitu adanya stratifikasi penghuni, kedudukan penghuni dalam kelompok dan kumpulan-kumpulan penghuni. Kehidupan sosial penjara melandasi kesetiaan (*loyalty*) dan ketidaksetiaan (*disloyalty*) sebagai produk kebijakan administratif resmi (*official*) & tidak resmi (*unofficial*). (Donald Clemer, 1965 : VIII-X).

Berikutnya Irwin & Cressey (Becker, 1964) menguraikan kehidupan sosial penjara dengan mengemukakan konsep *prison culture/inmate culture* yang ditujukan pada bermacam perilaku yang dilakukan terhukum pada kondisi pemenjaraan. Irwin dan Cressey memunculkan tiga bentuk subbudaya penghuni penjara yakni pertama subbudaya penjara (*prison sub-culture*), kedua subbudaya kriminal (*criminal sub-culture*) dan ketiga subbudaya yang sah (*legitimate sub-culture*). Diantara ketiga subbudaya ini, bagi Irwin dan Cressey, *criminal subculture* dan *legitimate subculture* paling mempengaruhi individu di penjara, untuk hidup seperti di luar penjara. Berbeda dengan subbudaya penjara (*prison subculture*) yang memang menekankan nilai-nilai sosial di dalam penjara (Howard S. Becker, 1964: 230-233).

Uraian kehidupan sosial penjara tidak saja menjelaskan perilaku terhukum (*inmates*) tapi juga mengangkat perilaku petugas sebagai sisi lain kehidupan sosial di penjara, dikenal dengan subbudaya petugas (*prison staff culture*). Dalam bukunya *Correction Management: Function, Surveillance Systems*, Houston (1999) mengutip Lombardo yang mengemukakan bahwa petugas mempelajari tugasnya selain dalam kelompok mereka sendiri, juga dari para kelompok narapidana. Para petugas berusaha memperoleh penugasan yang dapat mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan mereka, sebagai contoh, mendapatkannya dari para narapidana dalam penjara. Hal ini merupakan refleksi pilihan-pilihan personal dalam interaksi di penjara (Houston, 1999:13-14).

Secara lebih spesifik Ellis Finkelstein (1993) dalam bukunya *Prison Culture: An Inside View* menguraikan budaya penjara (*prison culture*) sebagai isu penting membahas manajemen penjara (*prison management*). Budaya penjara ditandai dengan adanya perbedaan struktural antara pegawai penjara (*prison officers*) dan narapidana (*prisoners*). Pengalaman spesifik pegawai penjara dalam mengontrol dan memberi pelayanan terhadap narapidana mengarah pada ketergantungan mutual. Keterkurungan dalam penjara menimbulkan hubungan kerja dan komunikasi akrab diantara pegawai dan narapidana. Seringkali pegawai penjara dibatasi pertimbangan bahwa ia lebih superior dibandingkan narapidana yang diawasinya sehingga membentuk sistim nilai sendiri (*rules of task*) dalam memperlakukan narapidana (*prison rules*). Sementara narapidana juga mempunyai nilai sendiri tentang apa yang sepantasnya mereka dapatkan dalam penjara, membentuk nilai sendiri saat menghadapi petugas maupun antar sesama mereka sendiri yang dikenal dengan *rules of relationship*. Ellis Finskelstein menekankan inti budaya penjara adalah perbedaan spesifik pengaturan-pengaturan hubungan (*rules of relationship*) diantara narapidana dan aturan-aturan formal penjara yang diterapkan (Ellis Finkelstein, 1993: 3).

Finskelstein (1993) menekankan budaya narapidana terbentuk terpisah dengan budaya petugas, masing-masing berlangsung sepihak. Bila Finkelstein mengutamakan faktor internal mendasari terbentuknya budaya penjara, maka kebalikannya Lawrence M. Friedman (1977) dalam bukunya *Law and Society* menguraikan budaya (penjara) dipengaruhi faktor eksternal dan tidak sepihak. Friedman (1977) menjelaskan beberapa komponen dapat dipergunakan melihat bekerjanya sistim hukum (penjara) yaitu komponen struktural, kultural dan substantif. Diantara ketiga komponen ini komponen budaya hukum (*legal culture*) merupakan konsep terpenting, menjadi kunci memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat

didalam pelaksanaan sistim hukum (penjara). Budaya hukum merupakan seperangkat nilai-nilai dan sikap-sikap berkaitan dengan hukum, yang menentukan kapan, mengapa dan dimana masyarakat datang kepada hukum (aturan formal) dan pemerintah (aparatus penegak hukum) atau malah pergi menghindari dari keduanya (Lawrence M. Friedman, 1977:17).

Komponen kultural dari Friedman mengangkat nilai dan sikap para fungsionaris hukum (petugas penjara) saat melakukan tugas sehari-hari. Petugas penjara dipengaruhi tujuan organisasi, seorang petugas berada dalam ikatan administratif teratur dan rutin sehingga kesalahan bertindak adalah hampir tidak mungkin. Seorang petugas menyesuaikan sikapnya dengan apa yang disenangi atasan. Petugas umumnya mengidentifikasikan dirinya sebagai kelas menengah (*middle class*) membawahi kelompok kelas bawah atau narapidana (Lawrence M. Friedman, 1977: 17). Budaya hukum timbul sebagai bagian kekuatan-kekuatan sosial, ide-ide, sikap-sikap, kepercayaan, harapan dan pandangan, yang memberi masukan, menjadi penggerak dan memberi *output* kepada sistim hukum (penjara). Kekuatan sosial ini secara eksternal terus menerus mempengaruhi sistim penjara, kadang-kadang merusak, memperbaharui, memperkuat atau memilih menampilkan segi-segi tertentu. Budaya hukum di masyarakat memberi pengaruh terhadap bekerjanya aturan-aturan dalam lembaga hukum yang telah dirumuskan dan disepakati bersama itu (Sulistiyowati Irianto, 2005: 43).

Secara lebih khusus Michel Foucault (1977) dalam *Discipline & Punish: The Birth of The Prison* mengurai tentang sejarah penjara, tapi tidak secara langsung membahas budaya penjara. Uraian buku Foucault mempunyai arti penting melihat perkembangan kehidupan sosial penjara. Penjara bagi Foucault merupakan institusi yang mentransformasi individu, dimana karakter dasar penghukuman penjara mereduplikasi terapi-terapi klinis yang terbungkus dalam bentuk disiplin (Foucault: 1977: 141-149). Penjara bagaikan bangunan panoptikon sebagaimana disampaikan Jeremy Bentham dalam rangka menggantikan hukuman tradisonal atau hukuman arak-arakan.¹ Bagi Foucault, panoptikon mampu

¹ Panoptikon merupakan bangunan besar, melingkar dengan banyak kamar, ditengah-tengahnya terdapat menara pengawas, model ini menggunakan teknik pencahayaan dan menempatkan individu pada posisi yang dapat dilihat setiap waktu dari menara pengawas. Para penghuni sel dipantau tanpa pernah mengetahui siapa yang memantau. Foucault menguraikan efek utama sistim panoptikon adalah kuasa berfungsi secara otomatis. Mekanisme panoptikon menampilkan ketidaksimetrisan kuasa tanpa memerlukan upacara-upacara yang menunjukkan kuasa yang berlebihan seperti pada jaman raja-raja. Panoptikon menjadi mesin mengotomatiskan dan mengindividualisasi kuasa hukum bukan melalui pribadi yang berkuasa (raja) tapi melalui penyebaran individu, cahaya, pemantauan dan pengaturan, yang menghasilkan relasi kuasa yang menguasai individu. Panoptikon merupakan penaklukan nonkorporal yang tidak memerlukan pemaksaan fisik, tapi melahirkan subyek yang sebenarnya, menginternalisasi kuasa penaklukan ke dalam dirinya sendiri dan menjadi subyek penaklukan dirinya sendiri (Hardiyanto, 1997).

mengintervensi semua individu setiap saat tanpa merasa diintervensi hanya melalui pengaturan cahaya dan tata geometri. Panoptikon menjawab bagaimana kuasa diperkuat tanpa harus memberati berbagai peraturan dan hukuman (Foucault, 1977: 195-208). Selanjutnya dikemukakan Foucault, penjara bukan sekedar perangkat perampas kebebasan tapi merupakan perangkat penghukuman yang memiliki fungsi korektif. Penjara memperbaiki individu tanpa mempertontonkannya di depan khalayak ramai, menggunakan waktu sebagai ukuran penghukuman. Pelaksanaan hukuman diarahkan pada kesadaran, hasrat dan kehendak individu dimana ide atau gagasan untuk berbuat jahat dikalahkan pikiran mengenai beratnya hukuman. Menghukum dilaksanakan untuk menimbulkan kesadaran pada diri individu, bukan lagi tubuh fisik yang disentuh, melainkan pikiran, kesadaran dan kehendak individu (Foucault, 1997: 110).

Foucault lebih jauh membahas kegagalan penjara dalam tugas korektif. Penjara dianggap tidak berhasil mendidik para terdakwa malahan menghasilkan penjahat-penjahat potensial, tapi meskipun penjara dikritik karena kegagalannya, bentuk penjara tetap dipertahankan sampai sekarang. Fungsi penjara bukanlah untuk menghapus kejahatan, Foucault mengatakan penjara telah membantu pemisahan pelaku kejahatan dari kelas sosialnya, menciptakan para pelanggar (*delinquent*) terpisah satu dari lain, terkontrol, dan dijadikan berguna (Foucault, 1997: 291-292)². Foucault mengemukakan dalam masyarakat *carceral*, peran penjara cenderung digantikan oleh lembaga medis, pendidikan dan pelatihan sebagai lembaga pendisiplinan. Tidak ada lagi pusat kekuasaan yang mengatur segala-galanya, melainkan hanya terdapat jaringan berbagai elemen yang tersebar diantara tembok, ruang, lembaga, aturan dan tuturan. Pelaksana kuasa bukan lagi penguasa pusat tapi dijalankan serangkaian jaringan *carceral* dalam melakukan normalisasi. Model penghukuman digantikan model pendisiplinan. Jaringan kuasa menggantikan peran hukuman publik yang keji, melaksanakan pemantauan, penaklukan, pendisiplinan, perawatan atas individu-individu. Melalui jaringan ini kuasa semakin mampu menyentuh sasaran dan mencapai targetnya secara efektif. (Foucault, 1977: 293-308, Hardiyanto, 1997: 154-162).

Catatan menarik uraian Foucault ini berbeda dibanding penjelasan sebelumnya membahas kehidupan penjara. Foucault menekankan kehidupan penjara melalui hadirnya

² Penjara tidak untuk menghapus kejahatan melainkan memilih, menyebarkan dan menggunakannya, bukan kodrat penjahat menentukan mereka itu penjahat atau bukan, melainkan peran atau kekuatan-kekuatan atau kuasa yang dimiliki individu sesuai dengan kelas. Kuasa itu menentukan mereka menduduki posisi kuat sebagai hakim atau sebagai penjahat yang harus masuk penjara (Hardiyanto, 1997:146-148).

power yang menentukan seseorang menjadi penjahat atau tidak. Kuasa tersebut menyebar melalui jaringan *carceral* dalam melaksanakan normalisasi. Tidak seperti penjelasan-penjelasan sebelumnya, disini Foucault tidak spesifik membahas budaya petugas atau narapidana secara internal atau eksternal, tapi menekankan *power* yang secara eksternal dan internal mempengaruhi keberadaan penjara, Foucault melihat penjara bukan lagi sebagai sistim yang tertutup dalam melaksanakan penghukuman. Uraian Foucault memberikan cara pandang lain melihat kehidupan penjara, dan memberi landasan bagi telaah budaya penjara berbeda. Dalam hal ini penulis tidak menjadikan pemikiran Foucault sebagai kerangka utama dalam bahasan penelitian, tapi sebagai landasan dan dasar utama pemahaman adanya pemikiran budaya penjara secara berbeda.

Penulis lebih lanjut merujuk deskripsi kehidupan sosial penjara yang disampaikan praktisi penjara Kiran Bedi (2003) dalam buku *It's Always Possible*. Kiran Bedi menguraikan konsep budaya (subbudaya) penjara mencakup upaya pelanggaran berbagai kesepakatan informal yang berlangsung dalam penjara. Dalam bukunya Bedi secara gamblang menjelaskan konsepsi budaya penjara terkait dengan pelanggaran perilaku dimana semua orang terlibat, tidak ada orang yang dibenci, dan tidak ada pula yang dihormati, baik itu petugas maupun narapidana keduanya merupakan korban dari sistim penjara. Kiran Bedi mengambil contoh penjara di Tihar India, lebih jauh Bedi mengatakan uang, ancaman, kekuasaan, kerjasama, dan fasilitas berjalan sendiri-sendiri menyelesaikan dan membereskan persoalan kehidupan penjara, sambil diwarnai ketegangan, kesengitan dan kengerian. Menjelaskan budaya penjara, Kiran Bedi (2003) mengutarakan ada relasi sosial penjara yang berlangsung diantara petugas dan penghuni. Sebagaimana budaya penjara di penjara Tihar, sangat cocok disejajarkan dengan keadaan penjara di negara-negara Asia, meskipun tidak semuanya cocok tapi sangat relevan. Gambaran tumbuhnya perilaku dan pola korupsi yang direkayasa, tarikan uang (pemerasan) secara rutin, merupakan daya tarik penting bagi petugas dalam menjalankan tugas. Begitu juga dengan penentuan ruang, barak atau sel adalah hak istimewa sipir dan asisten pribadinya (*munshi*). Narapidana yang tak mempunyai apa-apa baik uang, beking politik atau kriminal, akan ditempatkan dan dipindahkan ke sebuah asrama barak yang penuh orang, bercampur latar belakang pribadi. Narapidana miskin dipilah-pilah bagai surat-surat di kantor pos, dan ikut pemindahan ke penjara lain, berbeda dengan "*kaum punya*" yang masuk kategori "*kelas berkuasa*". Pemindahan merupakan salah satu hal ditakuti narapidana karena itu berarti hilangnya teman-teman yang sering berhubungan akrab,

meskipun dalam beberapa kasus lain, pemindahan berarti keuntungan bagi narapidana yang kerap melakukan pelanggaran dalam penjara. Menurut Kiran Bedi (2003) relasi hubungan sosial di penjara adalah unik, tidak begitu saja terbentuk oleh narapidana, tapi ada persyaratan lain yang harus dipenuhi. Tak aneh jika kelompok narapidana beresiko tinggi (gerombolan) berkembang dalam penjara karena punya jaringan informasi dan personal yang efisien dan efektif, semakin tinggi posisi hirarki kejahatan maka makin besar pula bagian yang diterimanya (Kiran Bedi, 2003:53-57).

Terkait studi antropologi, bahasan kehidupan sosial penjara pernah dikemukakan Lorne A. Rhodes (2001) dalam sebuah jurnal berjudul *Toward an Anthropology of Prisons*, menguraikan masih sedikitnya studi penjara dalam antropologi. Menurut Rhodes, penjara merupakan tempat melaksanakan keajaiban politik, sosial, ekonomi melalui *disappearing* (penghilangan) sejumlah besar kaum miskin, minoritas dan memproduksi rasisme. Penjara mengerahkan ketakutan dengan berbagai fasilitas pengamanan supermaksimum. Lorne A Rhodes (2001) menekankan studi penjara telah banyak dilakukan, tetapi belum mengeksplor penjara sebagai tempat sentral *the exercise of disciplinary power*, literatur penjara umumnya lebih membahas *prison industrial complex* (Lorne A Rhodes, 2001 : Vol. 20). Dalam tulisannya, Rhodes mengangkat persoalan penjara berfokus pada perhatian politik dimana hampir setengah isi penjara di Amerika Serikat adalah kulit berwarna, penjara adalah tempat hasil represi pelanggar ketertiban dan perang terhadap obat terlarang. Kajian Rhodes memperlihatkan keberadaan penjara memberi fungsi ganda yakni sebagai tempat mengamankan masyarakat umum di luar penjara sebaik mereka yang ada di dalam penjara (*to keep non-prisoners out as well as them in*). Lebih spesifik Rhodes mengangkat isu resistensi arus-bawah dalam konteks penjara, tapi tidak secara dalam menguraikan realitas itu dalam penjara. Rhodes mengakui kesulitan-kesulitan saat meneliti kedalam penjara dan mengusulkan perlunya *quasy-ethnography* meneliti penjara. Rhodes memberi gambaran bagaimana sulitnya penelitian antropologi atau etnografi dilakukan dalam penjara karena keterbatasan secara teknis maupun kedalaman substansi yang harus digali seorang etnografer.

Pustaka lain membahas kehidupan sosial dalam penjara dikemukakan Kip Coggins (1996) dalam penelitian disertasinya berjudul "*Life in A Southwest Prison: A Study of The Culture of The Penitentiary of New Mexico*", mengemukakan bahwa dalam penjara terjadi proses akulturasi atau asimilasi dimana sekurang-kurangnya terdakwa dan petugas *familiar* dengan budaya penjara. Budaya penjara mencakup pengetahuan tentang tingkah laku yang

diharapkan dalam institusi penjara, membentuk internalisasi nilai-nilai, beliefs, dan sikap masyarakat selama tinggal dalam penjara. Uraian Kip Coggins (1996) menegaskan masyarakat di balik tembok penjara mempunyai budaya nyata (*true culture*), sebagaimana diingatkan antropolog Eric Wolf bahwa masyarakat dengan budaya masing-masing saling melakukan kontak, memperoleh dan mempengaruhi satu sama lain sejak jaman dahulu, sehingga tak beda dengan di penjara, mempunyai budaya atau subbudaya sendiri, lebih dari uraian yang pernah disampaikan Erving Goffman sebelumnya (Kip Coggins, 1996:2).

Kip Coggins (1996) sendiri meneliti kekuatan-kekuatan yang membentuk budaya penjara (*prison culture*) dengan menelusuri respon para terdakwa atas keterbatasan serta ketidaknyamanan lingkungan penjara dimana mereka ditempatkan. Coggins (1996) mengemukakan adanya lima landasan spesifik memahami kehidupan masyarakat di balik tembok penjara, yang berbeda dengan masyarakat di luar penjara yaitu: Pertama, masyarakat di balik tembok penjara adalah masyarakat yang dibentuk, bukan terbentuk secara alami. Kedua, masyarakat penjara merupakan masyarakat *non-voluntary* dimana sebagian besar narapidana memilih tidak tinggal di penjara jika memungkinkan, begitu pula petugas akan bekerja di tempat lain jika ada kesempatan lebih baik. Ketiga, semua yang masuk institusi penjara harus berakulturasi dalam arti mereka harus *familiar* dengan tingkah laku, norma-norma dan aturan masyarakat penjara itu sendiri. Keempat, tak ada orang yang lahir dalam masyarakat penjara maupun tinggal begitu lama dalam masyarakat penjara, semua partisipan dalam penjara adalah pendatang baru (*newcomers*) yang memasuki setting baru dengan membawa elemen-elemen budaya didalam masyarakat mereka sendiri. Kelima, inti utama masyarakat penjara adalah para terdakwa (*inmates*). Kelima landasan inilah yang menunjukkan bahwa keberadaan budaya penjara memang berbeda dengan keberadaan budaya masyarakat secara umum (Coggins, 1996: 3).

Bahasan budaya penjara secara lebih kritis dikemukakan Geoffrey Hunt dan kawan-kawan (1993) dalam jurnal sosial yang berjudul *Changes in Prison Culture: Prison Gangs and The Case of The "Pepsi Generation"*. Intinya membahas perlunya perubahan dalam menelaah budaya penjara (*prison culture*). George Hunt dan kawan-kawan memulai penjelasan dengan menguraikan perdebatan menarik melihat *inmate culture* (budaya narapidana). Mulai pertanyaan apakah budaya penjara merupakan produk dari lingkungan penjara, ataukah perluasan dari subbudaya eksternal. Dalam tulisan Geoffrey Hunt dan kawan-kawan menjelaskan bahwa beberapa pengamat penjara seperti Sykes & Messinger

(1977), Cloward (1977), Goffmann (1961) berargumentasi sistem sosial narapidana (*inmate social system*) dibentuk sebagai suatu reaksi kepada berbagai penyakit dalam penjara (*pains of imprisonment*), dan berbagai kehilangan (*deprivation*) serta bentuk-bentuk derita selama dikurung (*captivity*). Para pengamat ini melihat penjara sebagai institusi total (*total institution*) dimana individu melalui serangkaian “*status degradation ceremonies*” berangsur melebur dalam kehidupan penjara. Berbeda dengan pengamat sebelumnya, Irwin dan Cressey (1977) tak setuju pandangan ini karena mengabaikan pentingnya budaya melekat pada terdakwa semenjak sebelum masuk penjara. Irwin dan Cressey (1977) mengidentifikasi dua bentuk subbudaya dominan dalam penjara yaitu subbudaya pencuri (*thief subculture*) dan subbudaya narapidana (*convict subculture*). Terhadap perdebatan ini, Geoffrey Hunt dan kawan-kawan tidak meneruskan atau menolak berbagai pandangan ini, tapi menjelaskan keberadaan dinamika lain dari kehidupan sosial penjara, sebagai kunci memahami pengalaman-pengalaman narapidana. Dinamika ini kompleks, karena beberapa narapidana membentuk *gang* unik terkait perubahan penjara, baik dari segi populasi (overkapasitas) maupun kebijakan (resmi) penjara yang diambil untuk memanfaatkan narapidana. Sampai disini, secara tegas George Hunt dan kawan-kawan mengatakan kecenderungan pendekatan teoritis mendikotomikan sumber-sumber perubahan (internal atau eksternal) telah gagal mengungkap kompleksitas dan keterbatasan situasi yang berlaku di penjara, karena itu perlu re-asses terhadap pemahaman budaya penjara (*inmate culture*) (Geoffrey Hunt, Stephanie Riegel, Tomas Morales, Dan Waldorf, 1993:398–409). Geoffrey Hunt dan kawan-kawan lalu menyampaikan perlunya kaji ulang terhadap budaya penjara karena penjara saat ini berada dalam ketidakpastian. Persoalan menyangkut penjara bertambah seiring meningkatnya fragmentasi narapidana, ketidakteraturan, bahkan mereka yang berulang kali masuk penjara berhadapan dengan budaya penjara yang berubah (*arbitrary*) dan peristiwa-peristiwa sementara (*ad hoc events*). Pengambilan-pengambilan keputusan ini tidak diambil semata-mata dari perilaku kelompok narapidana, tapi berangkat dari keputusan resmi dan tak-resmi para petugas. Bila sebelumnya penjara terbagi atas bagian-bagian terdikotomi seperti narapidana versus petugas, atau narapidana black versus white, saat ini telah tersebar dalam bentuk pecahan-pecahan (perpaduan-perpaduan) dan kesetiaan baru. Hubungan erat antara aktivitas di luar penjara dan aktivitas dalam penjara merupakan faktor yang berguna dan akurat melihat budaya dan pengaturan kehidupan dalam penjara (Geoffrey Hunt, Stephanie Riegel, Tomas Morales, Dan Waldorf, 1993:407).

Telaah substansi budaya penjara ini mengilhami dan memberi keleluasaan bagi penulis menelusuri bagaimana budaya penjara berlangsung dalam Lapas Bogor. Untuk menguraikan budaya penjara di Lapas Bogor, penulis tidak secara sempit masuk dalam perdebatan definisi-definisi budaya penjara atau terikat pada dikotomi sumber-sumber perubahan budaya penjara, tapi menjadikan perbedaan-perbedaan ini sebagai landasan dan kerangka dalam suatu rangkaian berpikir sewaktu menelusuri dan menelaah secara langsung kehidupan sosial di Lapas Bogor. Kesepakatan-kesepakatan informal berlangsung, dan berbagai upaya mempertahankannya menjadi gambaran dasar budaya penjara yang dipergunakan penulis melakukan penelitian lapangan.

2.2. Beberapa Sudut Pandang Lapas

Berdasar kepustakaan yang ditelaah penulis, kajian tentang Lapas dapat dipahami dan dilihat dari banyak sisi dan sudut pandang, mulai dari sudut pandang petugas (praktisi), sudut pandang narapidana, sudut pandang peneliti (akademisi), sudut pandang lembaga kemasyarakatan, maupun sudut pandang formal (perundangan). Semuanya ini mewarnai dan memunculkan sejumlah kenyataan dan persoalan tentang keberadaan Lapas. Berikut ini adalah beberapa sisi dari sudut pandang tersebut.

Pertama, sudut pandang petugas tentang Lapas, dapat diperhatikan mulai dari tulisan Suyatno (2003), Harsono (1995), Sudirman (2007) dan Bambang Purnomo (2008). Sudut pandang ini menggambarkan kehidupan Lapas penuh pengaturan dan aturan formal yang harus diikuti penghuninya. Kapasitas Lapas dipengaruhi kualitas dan kuantitas bentuk kejahatan yang berlangsung di masyarakat, serta banyaknya putusan hukuman penjara dihasilkan peradilan pidana. Peningkatan angka kejahatan di masyarakat mendongkrak tingginya jumlah perkara masuk dalam peradilan. Tulisan keempat orang ini, meskipun dapat dikategorikan satu sudut pandang tapi mengkaji topik berbeda-beda, sebagai berikut: Suyatno (2003) misalnya, menelaah sistim penghukuman yang berlaku di Indonesia dan mengatakan bukan lagi dinamakan sistim kepenjaraan tapi sistim pemasyarakatan, walau hanya bisa mengurai sisa sistim penjara lama yang masih tampak pada bangunan, sarana dan prasarana serta sikap perilaku petugas Lapas, berdampak pada menurunnya disiplin narapidana, sehingga narapidana kurang hormat atau menghargai petugas, disamping petugas sendiri terlalu hati-hati menindak narapidana yang melakukan pelanggaran. Harsono (1995), menelaah Lapas dengan fokus pada perlakuan narapidana dimana ia menekankan pembinaan

narapidana tidak harus dilakukan secara *top-down* tapi secara *bottom-up*. Narapidana jangan hanya dipandang sebagai obyek program-program yang telah ditetapkan, diperlakukan terbatas dengan alasan keterbatasan sarana dan keamanan semata. Dalam praktek, pembinaan narapidana masih jauh dari yang diharapkan. Berikutnya Sudirman (2007), menelaah Lapas berfokus pada berbagai penyimpangan perilaku yang timbul dalam kehidupan keseharian Lapas, mencakup perilaku penyimpangan seksual, *kapal selam*, *simpan vonis*, penyelundupan barang, pembuatan senjata tajam, pelarian, dan pemberontakan. Sudirman (2007) menegaskan berbagai penyimpangan ini merupakan konsekuensi dari struktur Lapas yang kaku dan terbatas. Kemudian Bambang Purnomo (2008), menelaah Lapas dengan fokus pada dampak pemenjaraan yang bisa membawa akibat destruktif bagi penghuni berupa prisonisasi, stigmatisasi dan residivisme, karena terpengaruh kekuatan-kekuatan hubungan antara sesama narapidana maupun petugas. Kekuatan-kekuatan ini menjadi bagian dari proses akomodasi antara sistem nilai petugas dan narapidana, disatu sisi narapidana sebagai penghuni menginginkan kebutuhan-kebutuhan dasarnya terpenuhi secara maksimal, disisi lain petugas terutama bagian pengamanan atau penjagaan berkepentingan tugasnya selalu dalam keadaan aman. Untuk itu dalam rangka memuaskan kebutuhan-kebutuhan kedua belah pihak, maka mereka saling melakukan upaya tukar kepentingan. Bertemunya kedua kekuatan ini bertumpu pada titik pemenuhan kebutuhan, karena kebutuhan kedua belah pihak ini tidak dapat dipenuhi secara normal sesuai peraturan formal yang berlaku. Pemenuhan kebutuhan ini bersifat manusiawi, sehingga berlangsung secara laten (terselubung), terus menerus didesak untuk dipenuhi, akhirnya timbullah pemenuhan kebutuhan dengan cara-cara yang “tidak normal” (Sujatno, Adi & Didin Sudirman, 2008: 155). Keempat tulisan ini meskipun mempunyai fokus berbeda, tapi mempunyai satu dasar sama yaitu menelaah Lapas sebagai tempat pembinaan yang dipenuhi keterbatasan, pengaturan dan penyimpangan dari aturan formal yang berlaku.

Kedua, sudut pandang narapidana atau tahanan, dapat ditelaah mulai tulisan Sujinah (2000), Atmowiloto (1996) dan Ramelan (2008). Ketiga penulis ini mempunyai *interest* berbeda dalam mengkaji Lapas. Sujinah (2000) misalnya, mengurai kehidupan sosial di Lapas Wanita Jakarta dimana ia menjadi penghuni. Dalam tulisannya, ia banyak menguraikan sebab musabab masuk ke penjara dan lika-liku menjadi penyimpang dalam penjara, sampai bagaimana bisa membuat Lapas menjadi tempat kehidupan rutinnnya. Atmowiloto (1996), mantan narapidana dalam beberapa tulisannya menjelaskan kehidupan

sosial di Lapas mengandung dua sisi utama yaitu: Pertama, adanya *penyeragaman* saat masuk dan mendekam di lembaga. Kedua, adanya *keberagaman* kelompok atas dasar tempat kejadian perkara, etnis maupun kondisi situasional. Ia menyebutkan penghuni penjara atau narapidana di masa lalu sering disamakan dengan sampah masyarakat, penjahat besar, penyakit masyarakat dan rentan diperlakukan buruk, diinterogasi dengan kekerasan, disiksa, dihilangkan paksa, sampai tinggal dalam tempat tahanan tidak manusiawi. Atmowiloto menambahkan pandangan ini berkembang hampir semua masyarakat dunia bahwa tahanan atau narapidana adalah orang terbuang, direnggut kebebasan oleh negara atas dasar hukum. Saat ini pandangan seperti ini tidak lagi mempunyai dasar kokoh dalam penghukuman modern, seiring dengan bangkitnya hak asasi manusia (HAM). Atmowiloto membeberkan dalam Lapas terjadi krisis identitas, resistensi budaya, keanehan-keanehan dan keajaiban-keajaiban seperti perkelahian berdarah yang berlangsung tanpa rasa khawatir dan malah menjadi pemandangan biasa dalam Lapas (Arswendo Atmowiloto, 1996). Selanjutnya Rahardi Ramelan (2008), mengurai kondisi Lapas (Cipinang) sebagai desa tertinggal, karena didalamnya mencakup pengaturan ruang, penduduk, penguasa formal, informal, yang serba terbatas dan dibatasi lingkungan sempit. Ramelan (2008) mendeskripsikan secara rinci bagaimana kehidupan sosial berlangsung di Lapas melalui kesepakatan-kesepakatan dan kerjasama diantara petugas dan narapidana dalam mengatur kehidupan sosial masing-masing. Dari keempat tulisan ini dapat ditarik satu kesamaan yaitu para penulisnya mengangkat fokus persoalan Lapas pada ketidakpastian tentang kehidupan sosial yang berlangsung didalamnya, dan kebiasaan penghuni atau narapidana yang dibatasi, tidak nyaman dalam ruang fisik dan sosial yang serba terbatas.

Ketiga, sudut pandang lembaga/organisasi masyarakat, dapat dilihat dari berbagai keterlibatan organisasi masyarakat dalam ikut membantu menangani berbagai persoalan kronis penjara. Terbatasnya publikasi keterlibatan lembaga masyarakat dalam Lapas membuat penulis mengambil contoh di negara lain. Seperti diuraikan oleh Jurgens (2000) dan Jacobs (1983), mereka mengangkat bahasan tentang hak-hak terpidana, hubungan ras dan subbudaya penjara, politik penjara serta *institution building* penjara. Jurgens (2000) menyimpulkan salah satu persoalan pelik yang dihadapi penjara adalah menyimpan tingkah laku dan pelaku beresiko, khususnya penggunaan injeksi narkoba yang menghasilkan transmisi HIV. Jurgens mengatakan perang terhadap narkoba selama ini sebagai *counterproductive* dan *harmful*, hanya membebani penjara di banyak negara. Sudut pandang ini menekankan

pentingnya program-program relevan bagi perbaikan penjara, melibatkan keikutsertaan “orang luar” (organisasi/lembaga) dalam rangka memperbaiki kondisi penjara. Penjara tidak hanya diamati dari apa yang terjadi didalam bangunan fisiknya, tapi harus mengelaborasi “kekuatan-kekuatan” kelembagaan internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi perbaikan kehidupan dalam penjara.

Keempat, sudut pandang akademisi (peneliti). Sudut pandang ini telah diuraikan sebagaimana pendapat pengamat penjara sebelumnya, tetapi akan diulas kembali. Secara umum masih sedikit akademisi yang menulis dan mempublikasi tulisan tentang Lapas, sehingga penulis perlu merujuk para akademisi yang telah dikenal dalam literatur penjara sebelumnya, dimulai dari Goffman (1962), Leinwald (1972), Houston (1999) maupun Arros (2004). Goffman (1962) menguraikan karakteristik lingkungan penjara tradisional sama dengan rumah sakit jiwa dan organisasi militer sebagai satu instusi total (*total institution*). Dikatakan demikian karena lingkungan tersebut menampung dan mengatur hidup orang banyak secara seragam. Struktur lingkungan totaliter ini berisi peraturan-peraturan detil, pengawasan ketat, jurang lebar antara yang berkuasa dan dikuasai, konsentrasi kekuasaan ada di tangan sekelompok yang berkuasa (*rulling few*). Goffman mendefinisikan institusi total sebagai tempat tinggal dan kerja sejumlah besar individu untuk waktu cukup lama, terlepas dari masyarakat luas, terlibat bersama-sama, dan berperan dalam kehidupan sosial yang diatur secara formal. Goffman memberi gambaran penjara sebagai sesuatu yang konvensional, klasik, tertutup, terkurung, dikekang peraturan ketat, diawasi secara ketat dan terasing dari kehidupan masyarakat. Segala sesuatu dilakukan dengan orang yang sama dibawah jadwal ketat dan kekuasaan baku (Poloma: 241). Para pengamat masa lalu memandang penjara sebagai tempat terpidana yang mendapat hukuman badan (*corporal punishment*) sadis berupa penyiksaan, mutilasi, eksekusi gantung atau dibakar. Sekarang penjara telah berubah menjadi model penghukuman yang secara antusias diperkenalkan sebagai pengganti hukuman fisik yang brutal (Gerald Leinwald, 1972). Penjara pada awalnya digunakan menunjukkan tempat seorang menebus dosa-dosanya terhadap masyarakat, tempat penahanan yang bisa dikatakan tak membedakan perlakuan terhadap pelaku kejahatan berdasar usia, tua-muda, jenis kelamin, laki-laki-perempuan, sakit atau sehat, status tahanan atau terpidana, semuanya dikumpulkan dalam satu tempat yang sama (Gerald Leinwald, 1972). Begitu pula konstruksi penjara, berangkat dari sejarah, sebagian besar berbentuk sangkar dan tembok batu, dimana pada abad pertengahan dikenal dengan benteng atau *castle*

yang berubah fungsi menjadi tempat tinggal para tahanan politik dari tempat kediaman bangsawan. Ciri fisik penjara sampai saat ini tak banyak berubah, menjadi alat ampuh menghukum mereka yang diputuskan sebagai pelaku kriminal oleh pihak pengadilan (Allen, Harry A. & Clifford E Simonsen, 1989). Selanjutnya bagi Houston (1999), organisasi penjara adalah unik, budaya (*culture*) yang eksis di penjara dapat dimengerti jika melihat secara efektif *the care, custody & control* terhadap narapidana. Ia menegaskan teori manajemen menjadi penting mengarahkan suatu organisasi seperti penjara, layaknya seorang manajer harus mengetahui *areas of policy, budget preparation, organizational development, motivations of individuals, use of group, leadership, planning & decision making* (Houston, 1999). Disini Houston mementingkan aspek manajemen administratif dalam memahami penjara, sedangkan tulisan Arros (2004) menawarkan pendekatan psikodinamik untuk memperbaiki penjara-penjara di Amerika dengan menambah dan memelihara kekuatan ego bagi staf profesional maupun para profesional penjara.

Kelima, sudut pandang formal, dikemukakan Undang-Undang no. 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Undang-undang ini menjelaskan Lapas adalah tempat melaksanakan pembinaan narapidana. Narapidana (napi) adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Dalam sejarah Indonesia, Lapas mulanya merupakan institusi rumah penjara yang berdasar pada sistem kepenjaraan, lalu berubah menjadi sistem pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah kegiatan melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan, sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana (UU no. 12 tahun 1995). Perlakuan terhadap narapidana pada sistem kepenjaraan menekankan unsur balas dendam dan pengentarjeraan, maka sistem pemasyarakatan menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahan dan kembali menjadi warga masyarakat yang baik dan tidak mengulangi perbuatan salahnya. Konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial ditujukan bagi penyadaran narapidana terhadap kesalahan-kesalahannya, agar tidak lagi berkehendak berbuat tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, masyarakat, keluarga dan lingkungan (*Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemasyarakatan Buku 1, 2000*). Keberadaan lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia telah berlangsung hampir empat dekade, menjadi saksi pasang surutnya kehidupan di negeri ini, yang dahulu dikenal dengan sebutan penjara. Lapas (penjara) dalam sejarah politik Indonesia merupakan cerminan kebijakan

politik pemerintah pada tiap masa, di masa pemerintahan kolonial misalnya, penjara dijejali pejuang Indonesia yang dianggap musuh, hampir semua pemimpin perjuangan pernah merasakan menjadi tahanan penjara termasuk Proklamator Soekarno-Hatta (Menteri Hukum dan HAM, 2007).

Berbagai sudut pandang ini merangkul bermacam pemahaman, telaah dan kajian terhadap keberadaan Lapas. Lukisan luas ini memberi masukan penting bagi penulis akan penting dan perlunya penekanan utama, perhatian atau fokus pada kehidupan sosial Lapas sebagai kajian utama dibandingkan perhatian pada bangunan fisik, tembok tinggi, pagar kokoh atau aturan formal Lapas. Hukuman penjara dilaksanakan dalam tembok tinggi, pengamanan berlapis maupun bangunan seram, tidak banyak mempengaruhi kehidupan sosial didalamnya, karena prakteknya lebih ditentukan interaksi hubungan antara narapidana dan petugas yang berlangsung didalamnya.

Bentuk interaksi, ragam tingkah laku narapidana maupun kebutuhan dan kepentingan, berperan membentuk kehidupan sosial Lapas. Di dalam Lapas, petugas penjara harus menghadapi bermacam jenis dan perilaku narapidana, mulai dari perilaku biasa (normal), sakit jiwa, sakit fisik, narapidana berduit, penghuni miskin, sampai berbagai latar belakang seperti berbeda etnis, agama maupun kebiasaan berbeda. Masuknya penghuni dengan beragam tindak kejahatan memberi bentuk relasi baru hubungan diantara petugas dan narapidana. Kedekatan hubungan ini membuat interaksi petugas dan narapidana tidak lagi saling meniadakan tapi saling membutuhkan. Relasi-relasi ini mendasari strategi pemenuhan kebutuhan timbal-balik bagi petugas sebagai pengelola dan narapidana sebagai penghuni Lapas.

2.3. Lapas: SASF & Relasi Jaringan

Berangkat dari uraian budaya penjara dan kajian kehidupan sosial Lapas diatas, penulis kemudian menekankan relasi sosial dalam Lapas sebagai inti utama memahami budaya penjara. Relasi-relasi sosial ini tergambar dalam kesepakatan-kesepakatan informal yang berlangsung dalam keseharian kehidupan di Lapas. Kesepakatan-kesepakatan informal menjadi acuan berperilaku melebihi berbagai ketentuan formal. Dalam kehidupan sosial di Lapas, berlangsung saling mempengaruhi antara aturan formal dan kesepakatan informal dalam praktek sehari-hari. Pelaksanaan secara terpadu dan kompetitif antara prosedur formal dan informal berjalan pada satu lingkungan Lapas tanpa saling meniadakan, meskipun secara

substantif terdapat perbedaan mendasar diantara keduanya. Bentuk mekanisme informal berperan sebagai aturan lokal (*self-regulation*) yang berfungsi menjaga keteraturan sosial disamping keteraturan formal. Koneksi antara aturan formal (*law*) dan perubahan mekanisme sosial (*social change*) timbul hanya jika aturan formal (*law*) dilaksanakan dalam konteks kehidupan sosial sehari-hari (*ordinary social life*), melibatkan perilaku saling mempengaruhi (*inducement*), memaksa (*coercion*) dan kerjasama (*collaboration*). Mekanisme informal berperan sebagai regulator tindakan yang efektif dan *bargaining positions* individu dalam berhadapan satu sama lain (Moore, 1973:722, Moore, 1983: 57) diantara ruang-ruang dalam bangunan fisik Lapas. Situasi ini menunjukkan berlakunya keadaan sosial semi otonom (*semi autonomous sosial field/SASF*) sebagaimana dijelaskan Sally F Moore, dalam rangka menjaga keutuhan, kontinuitas kehidupan sosial secara utuh dan saling menguntungkan.

Dilanjutkan oleh Moore (1983), bidang sosial semi otonom batas-batasnya bukan ditentukan oleh organisasi tetapi oleh suatu ciri prososial yang terjadi secara berangsur, menimbulkan aturan-aturan serta memaksa ketaatan pada aturan tersebut. Ciri prososial ini menjadikan manusia sebagai pusat analisis dan pada posisi ini, struktur, pranata atau bahkan kebudayaan merupakan hasil konstruksi terus menerus manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup (Moore: 1983: 57).

Bidang sosial semi otonom (SASF) mempunyai kapasitas menciptakan aturan dan menerapkan sanksi sendiri-sendiri. Ruang-ruang fisik dalam Lapas merupakan SASF karena mempunyai aturan-aturan sendiri terkait pengaturan rutin dan tetap, seperti hubungan antar sesama narapidana, petugas ataupun dengan pihak keluarga. SASF di Lapas secara spesifik mencakup ruang-ruang kamar narapidana, blok-blok maupun ruang perkantoran (administrasi), yang membentuk ruang-ruang sosial berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak yang saling berinteraksi. Ruang ruang atau bidang sosial ini menerapkan sanksi bagi mereka yang tidak mengikuti aturan main yang disepakati, baik secara legal, non-legal maupun illegal, berupa sanksi sosial seperti kehilangan sumber ekonomi, reputasi, kemauan-baik, sumber pendapatan (uang) maupun memperoleh kekerasan fisik. Aturan-aturan SASF dalam kehidupan Lapas sangat rentan terhadap aturan formal atau perundangan (UU) Lapas, serta mudah dipengaruhi atau dimasuki aturan SASF lain.

Beroperasinya bermacam aturan SASF dapat dilihat dari bagaimana aturan-aturan tersebut mempengaruhi perilaku petugas dan narapidana terkait dengan tingkah laku dan tindakan apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Banyak aturan yang

dapat mempengaruhi perilaku aktor dalam beberapa SASF sekaligus. Tumpang tindih antar aturan SASF mempengaruhi satu sama lain. Perilaku-perilaku individu dalam SASF ikut menentukan perkembangan kelompok dan masyarakat Lapas. Dengan demikian terjadi hubungan dua arah antara individu dan kebudayaan. Hal ini sesuai pergeseran wacana kebudayaan sebagai sistem yang membentuk kelakuan dan pikiran manusia, menjadi kebudayaan sebagai sistem yang turut dibentuk oleh kelakuan dan pikiran manusia (Wacana Antropologi 1998: 13) (Sulistiyowati Irianto, 2005: 68-69).

Aturan SASF memberi cara yang tajam dalam menggambarkan setting sosial suatu penelitian dimana didalam arena-arena tersebut sekelompok orang saling berinteraksi, dan interaksi tersebut memunculkan aturan-aturan yang mereka ciptakan dan pertahankan sendiri, lalu dimodifikasi, diubah atau ditinggalkan sesuai tuntutan kepentingan termasuk bagaimana aturan-aturan di SASF masuk dan memberi pengaruh terhadap interaksi mereka (Sulistiyowati Irianto, 2005: 70).

Akses yang terbatas dan dibatasi di Lapas mengurangi cara pemenuhan kebutuhan penghuni sebagaimana di luar Lapas. Narapidana diharuskan mengikuti aturan formal dan kebiasaan Lapas, mulai dari proses masuk, penempatan, bergaul dan mengikuti kegiatan yang disediakan Lapas. Kehidupan sosial di Lapas tak lepas dari keterbatasan-keterbatasan (*pains of imprisonment*) yang memaksa tahanan mengadakan penyesuaian-penyesuaian (*adjustment*) selama masa penahanan, maupun narapidana melakukan adaptasi (*adaptation*) semasa menjalani hukuman penjara. Tapi keterbatasan-keterbatasan ini tidak serta merta menjadi sumber perubahan kehidupan sosial di Lapas jika hanya dijalankan sepihak. Interaksi sosial kedua belah pihak antara petugas dan narapidana yang telah berlangsung sebelum terhukum berada dalam Lapas, ikut menciptakan kesepakatan-kesepakatan informal dalam bertingkah laku. Kesepakatan-kesepakatan informal menjadi pedoman berperilaku yang operasional bagi narapidana maupun petugas dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan sesuai konteks tertentu. Pedoman atau panduan berperilaku ini diketahui petugas dan narapidana tapi tertutup bagi orang lain (*orang luar*). Kesepakatan-kesepakatan informal dipelihara dan dipertahankan melalui mekanisme relasi-relasi sosial dalam ruang-ruang tertentu (SASF), diciptakan dan dijalankan sejumlah aktor narapidana dan petugas yang mempunyai kewenangan tertentu seperti di kamar, blok atau ruang perkantoran. Salah satu mekanisme penting yang melandasi kehidupan sosial penjara adalah terbentuknya jaringan dalam ruang-ruang Lapas. Petugas atau narapidana menjadi anggota jaringan yang belum tentu menyadari

keanggotaannya dalam suatu jaringan. Suatu kenyataan narapidana dan petugas saling peduli untuk berhubungan demi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masing-masing tanpa lebih jauh mempersoalkan latar belakang identitas individu secara rinci dan bertele-tele. Relasi jaringan di Lapas berbeda dengan kelompok yang mempunyai dasar identitas tertentu, relasi sosial disini lebih lentur dan cair saat dipergunakan dibanding kelompok. Relasi jaringan terbentuk dalam rangka *survive* dalam Lapas. Relasi ini bisa sangat lekat atau sangat cair, mudah bertahan atau mudah berubah, tergantung ikatan yang terbentuk dalam pemenuhan kebutuhan dan ditentukan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seseorang individu yang memiliki mobilitas mengadakan relasi-relasi sosial dalam ruang-ruang dalam Lapas, mempunyai sejumlah jaringan sesuai waktu, ruang, situasi, kebutuhan serta tujuan yang akan dicapai. Keanggotaan seseorang individu dalam jaringan bersifat kompleks, fleksibel dan dinamis. Seseorang memasuki jaringan berbeda-beda sesuai fungsinya. Hal ini berarti individu tersebut memasuki struktur sosial yang berbeda-beda pula. Relasi sosial dalam jaringan tidak menekankan semata-mata pada atribut pelaku, tetapi pada karakteristik dan pola-pola hubungan di dalam jaringan untuk memahami dasar atau latar belakang perilaku mereka (Mitchell Clyde: 1969).

Relasi jaringan terbentuk diantara aktor narapidana dan petugas, berlangsung demi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan kedua belah pihak. Uraian tentang jaringan berpusat pada relasi (*relation-centered approach*). Menurut Mitchell (1969: 1-2) jaringan adalah seperangkat hubungan khusus atau spesifik yang terbentuk diantara sekelompok orang dimana karakteristik hubungan-hubungan tersebut dipergunakan menginterpretasi motif-motif perilaku sosial dari orang-orang yang terlibat termasuk dimensi-dimensi terselubung (*hidden dimensions*) didalamnya. Relasi jaringan merupakan pengelompokan yang terdiri dari sejumlah orang, sedikitnya tiga orang, masing-masing mempunyai identitas dan dihubungkan satu dengan lain melalui hubungan-hubungan sosial, sehingga hubungan-hubungan sosial itu dapat dikelompokkan sebagai kesatuan sosial. Relasi-relasi sosial dalam jaringan tidak terjadi secara acak tapi menunjukkan suatu keteraturan yang jelas.

Barry Wellman menguraikan (1983: 155-157) jaringan merupakan suatu kajian luas, bukan sekedar kumpulan metode sempit, uraian jaringan mendalami bagaimana properti-properti struktural mempengaruhi tingkah laku melebihi pengaruh preskripsi-preskripsi normatif, atribut-atribut personal dan hubungan diadik. Didalam relasi jaringan dipelajari bagaimana pola-pola ikatan menyediakan kesempatan-kesempatan dan batasan-batasan

signifikan; mempengaruhi akses orang-orang dan institusi-institusi terhadap sumber daya informasi (*information*), kekayaan (*wealth*) maupun kekuasaan (*power*). Pemahaman jaringan menjauhkan diri dari studi kelompok dan kategori sosial, mempelajari ikatan aktor yang tak terikat kuat dan tak sepenuhnya memenuhi persyaratan kelompok (Wellman, 1983: 169). Dalam meneliti relasi sosial petugas dan narapidana di Lapas Bogor, penulis tidak mempergunakan pendekatan jaringan sebagai kerangka tapi hanya mau menunjukkan suatu kenyataan yang berlangsung dalam kehidupan di Lapas Bogor saja.

Lebih jauh penulis melihat kemiripan antara konsepsi SASF dan relasi jaringan, untuk itu penulis menggunakannya secara bersama dalam menelaah relasi-relasi sosial di Lapas. Kemiripan dan kesamaan kedua konsep ini adalah sama-sama menguraikan kepentingan-kepentingan dalam arena semi-otonom pada konteks-konteks sosial tertentu. Bila SASF menjelaskan aturan pengaturan lokal (*self-regulation*) dan ketaatan memaksa terhadap aturan tersebut, maka konsep jaringan merefleksikan kondisi struktur sosial sebagai rangkaian hubungan antara individu-individu tertentu yang secara nyata ada dan konkrit (Radcliffe Brown, 1980: 218-225), serta ditentukan konteks-konteks sosial dimana tindakan itu diwujudkan. Struktur-struktur sosial ini tidak berdiri sendiri tetapi bersumber dari kebudayaan yang menuntun anggota-anggotanya dalam berinteraksi dengan orang lain. Sebagai contoh beberapa studi-studi jaringan sosial dalam antropologi telah dilakukan Carol B Stack (1975)³, Kartini Syahrir (1995)⁴, Ahmad F. Saifuddin (1992)⁵. Intinya menunjukkan

³ Carol B Stack dalam *All Our Kin, Strategies for Survival in a Black Community* mempelajari kehidupan keluarga kulit hitam di pemukiman flat, ia menggambarkan pentingnya pemanfaatan jaringan sosial sebagai sarana adaptasi kolektif diantara anggota-anggota keluarga tersebut terhadap tekanan hidup di perkotaan. Terbentuknya jaringan sosial yang diikat oleh unsur kekerabatan tersebut adalah bentuk-bentuk yang relatif penting bagi keluarga-keluarga kulit hitam menghadapi tekanan sosial, kemiskinan, pengangguran serta keterbatasan akses sumber daya ekonomi langka. Keseluruhan keterbatasan ini mendorong mereka mengembangkan jaringan distribusi dalam pertukaran barang dan jasa melalui hubungan-hubungan yang kooperatif. Dengan cara demikian mereka mengembangkan pola-pola kehidupan bersama memelihara dan menguatkan secara intensif jaringan kekerabatan demi kelangsungan hidup mereka.

⁴ Kartini Syahrir dalam *Pasar Tenaga Kerja Indonesia, Kasus Sektor Konstruksi*, membahas aktivitas orang-orang Bejer sebagai pekerja konstruksi, dimana jaringan kerja dalam *bedeng* (barak) tidak saja merupakan upaya meningkatkan perbaikan hidup, tetapi sebagai tempat tinggal bersama, berbagi kepentingan serta menjadi tempat organisasi dan distribusi tenaga kerja. Kompleksitas, keragaman dan luasnya permasalahan hidup di kota Jakarta telah mendorong para pekerja konstruksi melakukan strategi bertahan secara sosial ekonomi berwujud jaringan kerja yang melampaui batas-batas geografis desa atau garis keturunan. Seorang individu dianggap keluarga karena kedekatan jarak geografis atau hubungan sosial yang dekat, sebaliknya seorang kerabat dekat bisa saja dianggap jauh karena terpisah secara sosial maupun geografis untuk jangka waktu yang lama atau karena adanya konflik atau sikap permusuhan diantara mereka.

⁵ Ahmad F Saifuddin dalam Disertasi yang berjudul *Stability & Change : A Study of The Social Network and Household Flexibility Among The poor of Jakarta Indonesia* mengidentifikasi hubungan-hubungan sosial kontinyu diantara anggota rumah tangga miskin, dan antara mereka dengan pihak lain yang memiliki status sosial ekonomi lebih tinggi baik berasal dari dalam maupun luar masyarakat bersangkutan. Kemampuan kaum

penggunaan dan pemanfaatan jaringan sosial dalam masyarakat tertentu, mempunyai ruang lingkup luas dalam mencapai tujuan tertentu. Relasi hubungan sosial yang terbentuk tidak semata-mata berupa hubungan antar individu, tapi melampaui batas-batas teritorial dan garis keturunan dalam rangka *survival* menghadapi sulitnya lingkungan atau kehidupan yang harus mereka lakukan.

Sama dengan kondisi masyarakat dalam Lapas, terdiri dari narapidana yang berada dalam ruang kekangan, berusaha agar dapat *survive* saat melaksanakan hukuman yang telah dijatuhkan palu hakim dalam persidangan. Tak ketinggalan pula para petugas yang berusaha agar dapat menjalankan tugas dengan optimal baik secara kelembagaan maupun pribadi. Bentuk relasi sosial antar petugas dan narapidana, antar narapidana, melampaui batas-batas teritorial fisik yang ditetapkan Lapas demi tercapainya kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Lapas sebagai organisasi formal, tersentralisasi & terstruktur, dalam praktek dan keseharian menjadi arena semi-otonom. Kehidupan sosial rutin telah mendorong dan melanggengkan keberadaan SASF beserta relasi jaringan dalam ruang-ruang didalamnya. SASF dan keberadaan relasi sosial terwujud dalam ruang-ruang fisik dalam Lapas, melandasi terciptanya kesepakatan-kesepakatan informal yang berlaku secara operasional, dipelihara dan dipertahankan atau dilanggengkan diantara para aktor narapidana dan petugas.

Secara keseluruhan uraian bab ini menelaah secara kepustakaan konsepsi dan pemahaman budaya penjara secara umum dan secara khusus dalam Lapas. Ketiga bagian dalam uraian bab ini menekankan pentingnya menelusuri kehidupan sosial dalam Lapas, mendalami Lapas sebagai *semi autonomous social fields* (SASF), mendasari strategi pemenuhan kebutuhan timbal-balik petugas dan narapidana.

miskin melakukan seleksi atas potensi sosial budaya dalam hidup di perkotaan menjadikan mereka menciptakan dan memelihara penggunaan jaringan sosial, baik dengan mereka yang memiliki status sosial ekonomi sama maupun berbeda. Sarana yang terpenting untuk mencapai hal tersebut adalah melalui adanya jaringan kekerabatan, ketetanggaan, pertemanan atau kesamaan tempat asal usul di Jawa.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian penelitian etnografi di Lapas Paledang Bogor mendeskripsikan budaya penjara senyatanya melalui telusuran lapangan yang dilakukan penulis dalam menembus ruang fisik dan sosial di Lapas. Penulis menjadikan etnografi sebagai metode penelitian utama mengangkat realitas kehidupan sosial di Lapas.

3.1. Telusuran Lapangan: Menembus Ruang Fisik di Lapas

Telaah pustaka budaya penjara dalam bab sebelumnya telah mendorong penulis memahami budaya penjara sebagaimana dikemukakan Kip Coggins (1996) bahwa budaya penjara menjadi acuan berperilaku dalam Lapas meliputi pengetahuan tentang tingkah laku yang diharapkan dalam institusi penjara, membentuk internalisasi nilai-nilai, beliefs dan sikap masyarakat selama tinggal dalam penjara. Uraian Kip Coggins (1996) menegaskan keberadaan masyarakat di balik tembok penjara mempunyai budaya yang nyata (*true culture*), berangkat dari kehidupan sosial yang terwujud dalam ruang-ruang fisik Lapas baik di kamar, blok maupun ruang perkantoran. Untuk menggambarkan budaya penjara secara nyata, penulis melakukan telusuran lapangan dengan melaksanakan penelitian secara langsung ke lokasi Lapas Bogor.

Penulis menyadari meneliti Lapas tidak mudah seperti melakukan penelitian pada lokasi umum, keramaian atau area publik lain. Lapas terlindungi tembok tinggi yang mengelilingi seluruh area dimana pada setiap sudut tembok berdiri pos jaga dan diisi petugas berseragam. Melalui tahapan cukup panjang akhirnya penulis bisa meneliti ke dalam bangunan Lapas. Sebagai suatu proses, akhirnya penelitian di Lapas Bogor ini dapat penulis laksanakan mulai dari tahapan pertama di ruang besukan, berlangsung selama September 2007 sampai Juli 2008 (9 bulan), tahapan kedua di pos jaga blok, berlangsung selama Juli 2008 sampai Februari 2009 (6 bulan), dan tahapan ketiga, berperan sebagai petugas jaga Lapas, berlangsung selama Mei 2009 sampai Juli 2010 (12 bulan).

Meneliti budaya penjara sebagai realita yang nyata (Kip Coggin, 1996) mendorong penulis untuk fokus dan melakukan pendekatan pada petugas dan narapidana, meyakinkan mereka bahwa peneliti adalah peneliti bukan orang luar. Berbagai pendekatan telah dilakukan mulai dari saat berinteraksi, berbicara dan berhadapan langsung, sehingga timbul rasa saling

percaya diantara penulis, narapidana dan petugas. Jumlah narapidana dan petugas yang menjadi informan kunci penulis diuraikan sebagai berikut: **Ali, Ati dan Bai** sebagai pemuka (3), **Pni, Zbi, Hi, Asi, Bci** sebagai tamping (5), **Azi, Bri, Rdi, Cpi, Rzi Lbi** sebagai narapidana biasa (6), **Wai, Nui, Adi, Sui, Dfi, Xi, Ini, Asi, Dni, Mdi, Bni, Gni** sebagai petugas pemasyarakatan (12).

Di lapangan, informan **Bri** dan **Asi** mempunyai keahlian menggambar dan melukis, sehingga dipergunakan penulis membantu membeberkan secara langsung keadaan Lapas dalam bentuk gambar-gambar agar suasana kehidupan sehari-hari tampak lebih nyata. Selain itu, penulis mengikutsertakan beberapa narapidana lain yang bersedia membantu menceritakan dan menuliskan kejadian yang dialami mereka dalam buku catatan yang disediakan penulis. Untuk lebih merasakan realita dan aktivitas dalam Lapas, penulis bergaul bersama narapidana dalam kamar dan ikut bermalam bersama dalam kamar tersebut. Selain itu, ikut dalam kegiatan pemindahan narapidana dari Lapas Bogor ke Lapas kuningan dimana kegiatan ini sengaja dirahasiakan agar tidak terjadi hal tak terduga saat pemindahan berlangsung. Penulis juga ikut terlibat dalam sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) untuk menentukan apakah seorang narapidana bisa atau tidak mendapat program bebas seperti pembebasan bersyarat (PB), cuti bersyarat (CB), remisi ataupun pemindahan ke Lapas lain.

Dalam penelitian ini penulis menjadikan etnografi sebagai landasan utama mengangkat realitas budaya penjara di Lapas. Penulis mengutip Spradley (1979) yang menguraikan etnografi adalah cara mendeskripsikan suatu kebudayaan untuk mengerti *way of life* dari sisi *the native point of view*. Penelitian etnografi *concern* pada makna suatu tindakan, peristiwa dari orang-orang tertentu dimana beberapa makna diekspresikan dalam bahasa, *taken for granted*, dikomunikasikan secara tidak langsung melalui kata dan tindakan. Masyarakat secara berkala menggunakan sistem makna ini untuk mengatur tingkah laku, mengerti keberadaan mereka dan orang lain serta mengenal dunia tempat mereka tinggal. Sistem makna ini menyatakan kebudayaan mereka. Etnografi mengimplikasikan teori kebudayaan, seorang etnografer tidak sekedar mengamati perilaku tapi menyelidiki makna perilaku tersebut sehingga tidak sekedar melihat benda atau obyek alam, tapi menemukan makna yang diberikan orang terhadap obyek tersebut, tidak sekedar mencatat kondisi emosional tapi mencari pengertian dari rasa takut, cemas, marah dan rasa lain (James P. Spradley, 1979:1-7).

Uraian Spradley ini menginspirasi penulis mengekspresikan bagaimana realitas kehidupan sosial di Lapas melalui berbagai langkah dan tahapan dalam rangka menembus ruang fisik dan menemukan ruang sosial di Lapas Bogor. Realitas kehidupan yang dialami dan dirasakan penulis bersama informan narapidana dan petugas merupakan gambaran nyata realitas budaya dalam Lapas Bogor.

Menemukan budaya penjara dalam Lapas Bogor berarti penulis harus terlebih dahulu menelusuri ruang-ruang fisik dalam Lapas Bogor. Untuk bisa masuk ke dalam Lapas, hanya ada satu cara yaitu melalui pintu portir yang dijaga oleh dua orang penjaga berseragam lengkap. Memasuki Lapas harus mengikuti prosedur baku dimana pengunjung lapor pada petugas portir, diberikan kartu identitas tamu, setelah itu meminta izin untuk masuk ke dalam, lalu anggota regu jaga akan mengantar ke tempat yang dituju. Pengunjung yang masuk ke dalam ruang besuk akan berinteraksi dengan narapidana/tahanan yang dibesuk, dibatasi waktu, tempat dan terbatas pada area tertentu saja. Prosedur ketat dalam Lapas berlaku mulai saat masuk, bertemu, berbicara dengan narapidana, sampai keluar kembali dari Lapas. Memang tidak mudah menembus ruang-ruang fisik dan prosedur baku Lapas, tapi melalui informan kunci **Cpi**, **Rzi** dan **Lbi** dan informan lain, penulis *step by step* dapat masuk dan memahami apa yang terjadi dan berlaku dalam Lapas Bogor.

September 2007 adalah awal memasuki Lapas dimana penulis diajak seorang pejabat di Departemen Hukum & HAM mengunjungi Lapas Bogor. Saat kunjungan, penulis berkeliling di lingkungan Lapas mulai dari blok A sampai blok D. Sewaktu melewati kamar 4A, seorang narapidana dari jendela kamar menegur penulis, ternyata napi yang menegur, sebut saja **Cpi**, adalah seorang yang telah penulis kenal sebelumnya. Setelah berbincang sekilas dari balik jendela kamar **Cpi** memberikan nomor kontak agar bisa berhubungan dengan penulis. Kejadian tak disengaja ini menjadi awal penulis mempertimbangkan penelitian di Lapas Bogor. Tadinya penulis ragu untuk meneliti Lapas kalau hanya memperoleh informan-informan dari kalangan petugas saja, penulis yakin sekurang-kurangnya harus ada narapidana yang jadi informan penelitian agar mendapat gambaran utuh tentang kehidupan, kondisi dan situasi dalam Lapas. Pertemuan dengan **Cpi** di luar dugaan menjadi penting untuk memastikan seperti apa kondisi Lapas yang sebenarnya. Saat kunjungan bersama pejabat Departemen Hukum & HAM ini, suasana "*rekayasa*" tampak menonjol, semua kamar terkunci rapi, narapidana teratur dalam kamar, mengucapkan selamat siang saat rombongan melewati kamar. Petugas pengiring pun terlihat ramah dan akrab,

narapidana pembantu mengawal sambil memberi penjelasan kepada rombongan bahwa keadaan Lapas aman, tertib dan lancar. Suasana rekayasa ini bukan hal aneh lagi, karena sebelumnya penulis membaca tulisan persoalan etnografis penelitian penjara yang ditulis Carol Martin (2000), *Doing Research in a Prison Setting*, dimana sebagian besar persoalan penelitian penjara melibatkan keberuntungan dan keteguhan hati.

Menembus ruang fisik Lapas Bogor dilakukan penulis melalui beberapa langkah yaitu pertama, mengamati kehidupan sosial Lapas melalui ruang besukan, kedua, mengamati suasana Lapas dan berinteraksi secara langsung dari blok dan kamar narapidana dan ketiga, berpartisipasi langsung sebagai petugas pemasyarakatan.

3.2. Proses Pengumpulan Data Lapangan

Pengumpulan data lapangan di Lapas Paledang Bogor tidak dilakukan secara spontan dan cepat, tapi berkala melewati langkah demi langkah atau merupakan suatu proses, agar dapat melukiskan secara nyata kehidupan riil yang berlangsung dalam Lapas. Budaya penjara dalam Lapas Paledang Bogor secara sekilas tampak tertutupi tembok tinggi dan dipenuhi aturan formal. Untuk memastikan keadaan ini, berbagai upaya dan langkah diupayakan penulis menembus tembok Lapas dan ruang fisik yang dipenuhi jeruji besi, untuk menemukan berbagai kesepakatan informal sebagai standar norma atau pedoman (budaya) yang berlaku bagi petugas maupun narapidana dalam Lapas. Berikut adalah berbagai langkah dan pendekatan dilakukan dan dialami penulis sesuai praktek keseharian di Lapas bersama para narapidana dan petugas.

3.2.1. Mengamati dan Berinteraksi dalam Ruang Besukan

Untuk langkah pertama, penulis bersikap seperti pengunjung pada umumnya yang menjenguk keluarga atau kerabat yang mendekam di Lapas. Penulis cukup beruntung sudah ada informan narapidana **Cpi** yang penulis kenal, sehingga bisa membantu menggali informasi kehidupan sosial walau hanya melalui wawancara di ruang besukan. Informasi yang diperoleh selama wawancara di ruang besukan sangat terbatas, karena dibatasi aturan ketat waktu kunjungan hanya tiga puluh menit per sekali kunjungan. Disini sebagai peneliti belajar bagaimana berhadapan dengan petugas yang terkesan *jaga wibawa*, berpegang teguh pada prosedur tetap (protap) secara kaku.

Ruang besukan adalah salah satu ruang fisik di Lapas Bogor yang paling mudah diamati oleh *orang luar*. Ruang besukan sering disebut '*kerangkeng*', merupakan tempat

bertemu narapidana/tahanan dengan keluarga. Ruang besukan terbagi dua area utama yaitu area untuk pengunjung dan area narapidana/tahanan. Kedua area ini dibatasi jeruji besi dan dilengkapi beberapa tempat duduk panjang. Jam besukan dimulai jam 08.00–11.00 pagi dan jam 13.00–16.00 siang. Sebelum melakukan besukan, pengunjung harus melakukan administrasi besukan, dengan mencatatkan nama, alamat, jumlah pengunjung dan menunjukkan KTP, serta menitipkan handphone (HP). Setelah itu ditanya mau bertemu siapa, statusnya apa, tahanan atau narapidana, dan kamarnya nomor berapa. Sesudah pencatatan selesai, HP dititipkan dan diberi nomor titipan. Petugas melalui pengeras suara lalu memanggil nama narapidana/tahanan yang akan dikunjungi, dan meminta si pengunjung masuk ke dalam area tempat bertemu. Di dalam ruang ini terpampang aturan tertulis larangan memakai HP, kamera, merokok, membawa barang terlarang dan memberi uang. Dalam ruangan juga tampak beberapa petugas begitu ketat mengawasi para pengunjung saat berinteraksi dengan narapidana. Setelah narapidana yang dikunjungi datang, maka pengunjung dapat langsung berbicara, ngobrol, bertatap muka, dan bersalaman tangan dengan orang yang dikunjungi.

Cpi, **Rzi** dan **Lbi** adalah informan utama penulis saat melakukan wawancara di ruang besukan. Awal menelusuri tempat besukan mulai pertengahan bulan September 2007, penulis bertemu narapidana kasus narkoba vonis 1,5 tahun penjara, sebut saja **Cpi**. Pada hari yang disepakati, kami bertemu di tempat besukan Lapas Paedang Bogor. Penulis diberitahu waktu besukan hanya dua puluh menit. Setelah menunggu lima menit di ruang tunggu besukan, **Cpi** muncul ke ruang besukan, **Cpi** kelihatan seperti baru bangun memakai baju biru dan rompi oranye. Kami bersalaman, duduk, ngobrol, sambil diawasi dua petugas, satu petugas laki-laki dan satu petugas perempuan, siang itu penulis ditemani lima pembesuk lain.

Dua puluh menit mengobrol terasa cepat, tak terasa waktu habis, seorang tamping datang memberitahu waktu habis dan kami diminta untuk bersiap-siap menyudahi pertemuan. Sebelum meninggalkan tempat besukan, **Cpi** meminta-tolong kepada penulis memberikan *voucher* HP senilai Rp. 100 ribu, ditambah meminta uang kas Rp. 250.000 dengan alasan untuk keperluan di dalam Lapas. Cukup kaget juga penulis dimintai uang sebanyak itu, pertanyaan timbul dalam hati, "*Koq bisa sebanyak itu jumlah pengeluaran yang harus disiapkan untuk membesuk Cpi*". Sambil memelas **Cpi** mengatakan uang itu untuk membayar berbagai "*administrasi besukan dalam*" yang harus dijalani seorang napi yang dibesuk. Tanpa banyak bertanya dan karena waktu sempit, penulis menyerahkan sejumlah uang yang diminta,

ditambah *voucer* HP dan tak lupa menitipkan selebar kertas berisi pertanyaan penelitian untuk dijawab tertulis oleh **Cpi**. Inti pertanyaan adalah aktivitas keseharian, keadaan fisik bangunan dan lingkungan sosial Lapas.

Awalnya penulis agak canggung saat mau menyerahkan uang Rp. 250.000 karena terpampang tulisan "*Dilarang memberikan uang kepada napi*" tapi **Cpi** mengajarkan agar uangnya dilipat saja dan dimasukkan dalam sebungkus rokok yang isinya sebagian telah dikosongkan agar tak menarik perhatian petugas. Tindakan **Cpi** ini cukup beresiko bagi penulis karena disamping kiri meja petugas tertera aturan "*Bebas peredaran uang (BPU)*" dan tertulis "*Uang yang diterima harus disetorkan ke buku tabungan warga binaan*", artinya, semua uang harus diserahkan pada petugas perempuan yang berjaga disitu. Hal ini membuat penulis heran dan kikuk karena diperhatikan gerak-gerik oleh petugas terutama saat mau memberikan uang dalam bungkus rokok. Tapi setelah diajarkan caranya, dan dipastikan **Cpi** keadaannya aman, akhirnya bungkus rokok berisi uang dapat diterima dan dibawa **Cpi** ke dalam kamar. Meski **Cpi** sempat digeledah baju dan celananya, bungkus rokok dibuka, tapi tak ketahuan ada uang didalamnya. Penulis melihat hal ini terjadi juga pada semua narapidana lain yang juga dibesuk, penulis melihat perlaku "*kucing-kucingan*", ada napi yang lolos tapi ada juga yang tertangkap saat membawa uang ke dalam Lapas.

Lebih jauh penulis melihat perilaku **Cpi** selesai dibesuk, ia membagi-bagikan uang & barang yang diterima kepada tamping besukan dan petugas, berupa sebungkus rokok, makanan kecil ataupun barang seperti permen, minuman kaleng, yang diperoleh dan dibeli di kantin sebelah tempat besukan. Kejadian ini mengilhami penulis melihat tempat besukan sebagai ruang dilaksanakannya kesepakatan informal, karena begitu kasat-mata bagi orang luar. Kesepakatan informal dilakukan tidak saja oleh pengunjung tapi juga antar sesama narapidana dan petugas. Kesepakatan-kesepakatan ini dilaksanakan dengan memanfaatkan ruang besukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kebebasan mereka. Berbagai pengaturan informal ini sering tak sesuai dan melanggar aturan normatif (formal) yang berlaku, tapi kesepakatan informal dalam ruang besukan berlangsung, dipelihara dan ditaati mereka yang berkepentingan.

Dalam pertemuan di tempat besukan **Cpi** menjelaskan kegiatan sehari-hari di kamar yaitu jam 07.00 pagi keluar kamar, jam 12.00 siang masuk kamar untuk pemeriksaan (*apel*), jam 13.00 siang keluar kamar, jam 17.00 sore masuk kamar, dan seterusnya sampai besok hari. *Apel* adalah pemeriksaan petugas pengamanan terhadap kondisi kamar dan jumlah

penghuninya. Pukul 07.00 pagi sampai 12.00 siang, dan jam 13.00 siang–17.00 sore adalah waktu berinteraksi, berolah-raga, bercanda, ngobrol, bermain atau sekedar tidur-tiduran. Sore harinya semua narapidana sudah berada dalam kamar masing-masing. Pukul 07.00 malam peralatan tidur disiapkan, dan jam 21.00 banyak yang telah tertidur secara bersamaan. Informasi ini sangat penting bagi penulis selain mengetahui kegiatan keseharian Lapas, sekaligus menentukan kapan saat yang tepat menjenguk **Cpi** dalam ruang besukan.

Dari wawancara di ruang besukan, penulis bisa mengetahui kamar hunian narapidana yang sempit dan padat. Keadaan ini mendorong kebutuhan hidup di Lapas untuk dipenuhi, dan berjalan baik asal bisa mendekati tamping maupun petugas. Banyak informasi-informasi yang diberikan **Cpi** dari ruang besukan membingungkan, karena penulis tak melihat dan merasakannya secara langsung. Keterbatasan berhubungan lewat tempat besukan maupun melalui *handphone* menghalangi penulis bertanya lebih banyak kepada **Cpi**. Untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut penulis berusaha bertemu langsung **Cpi** di tempat *besukan bagian dalam*, dan **Cpi** menyarankan kalau bertemu di tempat besukan lebih baik diatas jam satu, setelah pergantian regu jaga biar tidak terganggu waktu pemeriksaan (apel). Jadi pada waktu-waktu inilah penulis membesuk **Cpi**.

Tiga minggu kemudian, penulis kembali bertemu di tempat besukan yang sama. Rasa canggung penulis mulai berkurang pada pertemuan kali ini. Sejumlah pengeluaran sudah harus disiapkan penulis saat menjenguk **Cpi**. Terkait dengan sejumlah uang yang diminta, **Cpi** menjelaskan : *"...Di Lapas harus pegang uang kalau mau enak dan bisa bergerak. Kalau vocer belum dibeli gak usah aja, mending kasih duitnya aja. Uang Rp 250.000 tiap kali besuk itu untuk bayar rompi oranye yang dipakai Rp. 50.000, bayar ke petugas Rp. 50.000, lalu setoran ke kepala kamar antara Rp.50.000–Rp. 100.000, dan sisanya untuk keperluan pribadi..."* (Wawancara **Cpi**, tanggal 30 Mei 2007). Penjelasan **Cpi** ini menjadi alasan penulis untuk tetap berhubungan melalui ruang besukan, agar bisa tetap mewawancarai **Cpi** dan mendapat data penelitian.

Setelah 7 kali bertemu **Cpi** lewat besukan, cukup banyak informasi lisan maupun tertulis dikumpulkan. Pada pertemuan ke 8, **Cpi** mengatakan dia akan segera bebas satu bulan lagi karena masa waktu pidananya habis. Berkaitan dengan keadaan ini, maka penulis meminta **Cpi** mengenalkan napi lain yang bisa dijadikan informan berikut. **Cpi** lalu mengenalkan penulis dengan napi lain **Rzi** yang bisa membantu penulis menjelaskan kondisi dalam Lapas.

Dalam pertemuan berikut **Cpi** mengenalkan penulis pada **Rzi**, penghuni blok C, yang sama-sama terkena kasus narkoba, dan mempunyai tempat kejadian perkara (TKP) sama. **Cpi**

menjelaskan **Rzi** adalah teman seperkara (SPK) saat di lokasi kejadian penangkapan (TKP). **Rzi** adalah terhukum penjara 2,6 tahun. Tidak begitu sulit bagi penulis menjalin hubungan baik dan kepercayaan dengan **Rzi** karena selain dikenalkan **Cpi**, ternyata **Rzi** pernah menjadi mahasiswa di tempat penulis bekerja. Hampir sama dengan cara sebelumnya, penulis menemui **Rzi** di ruang besukan siang hari (**Foto 3.1**). **Rzi** seringkali menawari penulis untuk bertemu di ruang belakang besukan yaitu di ruang staf petugas. **Rzi** berkomentar, “... Kalau ketemu di ruang staf Lapas nggak perlu ngemel, jadi bawa 50 ribu aja per orang buat nanti bayar ke kamar dan beli rokok...” (Wawancara **Rzi**, tanggal 3 Maret 2007).

Pada kenyataannya apa yang dikatakan **Rzi** tidak selalu sesuai, karena setelah bertemu di *ruang besukan-dalam* tetap saja jumlah uang harus disediakan terhadap **Rzi** cukup besar, meskipun memang lebih sedikit berkurang daripada lewat besukan-depan. Melalui **Rzi** ini penulis bisa mengetahui cara menjenguk napi di dalam pintu portir Lapas sekaligus melihat suasana lingkungan Lapas secara secara lebih dekat.

Foto 3.1
Ruang Besukan Narapidana



Sumber : Data Peneliti

Pada saat bertemu **Rzi** secara intensif, **Cpi** telah bebas dari Lapas. **Rzi** sendiri masih akan menjalani sisa hukuman enam bulan lagi. Dalam waktu pendek ini, penulis sempat empat kali bertemu **Rzi**, dua kali di *ruang besukan-luar* dan dua kali di belakang *ruang besukan dalam* Lapas.

Penulis sempat sekali bertemu bersama dengan **Cpi** dan **Rzi** di *ruang besukan-dalam*. Antara **Cpi** dan **Rzi** masing-masing bisa memahami dan membagi tugas dalam membantu penelitian penulis, tugas mana yang sudah dikerjakan, dan mana yang belum pernah diminta

penulis. Kepercayaan antara penulis, **Cpi** dan **Rzi** tetap terjalin dan terjaga. **Cpi** banyak memberi informasi tentang kehidupan Lapas, sedang **Rzi** lebih banyak membahas sisi lain yang belum terungkap, seperti pemakaian *handphone* (HP) yang dilarang tapi tetap dipakai, pemakaian HP yang marak dipergunakan narapidana berkomunikasi dengan keluarga. Tak jarang HP yang telah ketahuan, diambil dan diamankan petugas pengamanan, tapi bisa diambil kembali jika ada uang jaminan. **Rzi** dalam salah satu pertemuan menjelaskan ia pernah ada masalah terkait HP saat ketahuan oleh petugas, sehingga ia perlu menebus ("86") dengan membayar uang jaminan agar bisa berhubungan kembali dengan penulis. Akhirnya penulis membantu **Rzi** menyelesaikan persoalannya dengan menyerahkan sejumlah uang untuk bisa menebus HP yang diambil petugas. Tak hanya itu seringkali **Rzi** meminta dibelikan *voucher* telepon agar tetap bisa kontak dengan penulis. Lagi-lagi keheranan penulis timbul, begitu besar biaya hidup dalam Lapas. Menanggapi hal ini, **Rzi** menguraikan sebagai berikut: *"...Bisa minta tolong beli voucher dong, terserah berapa aja, yang penting nomor voucher dan nominalnya, karena bukan buat diisi tapi buat dijual, supaya gua nggak diterbangin (dipindahkan) dan dimasukin ke sel tikus (sel pengasingan). Kalo bisa jangan beli yang 100 ribu sekaligus, beli aja yang 25 ribuan 4 buah, soalnya yang 100 dijual murah..."* (Wawancara **Rzi**, tanggal 5 Juni 2008). Penjelasan ini menambah keyakinan penulis bahwa kebutuhan hidup di dalam Lapas memang tidak sedikit, terutama saat dijenguk keluarga atau teman kerja. Selain itu ada relasi jaringan yang kuat antara petugas, tamping, dan narapidana dalam membiasakan "*setoran*" saat pertemuan antara napi dengan keluarga, secara tidak secara langsung, dan tidak menggunakan kekerasan (**Foto 3.2**).

Penulis penasaran bagaimana HP bisa mudah dipergunakan dan disimpan dalam Lapas padahal aturan formal tidak memperbolehkan HP, pertanyaan ini dijawab **Rzi**: *"...Ada beberapa tempat rahasia dalam lapas, bisa diatas loteng, bisa dibawah tanah, pokoknya banyak tempat deh, dan setiap kamar beda-beda tempatnya, namanya juga penjahat banyak akal nya. Lagian kalo ketahuan kan bisa ditebus lagi, disini apa sih yang nggak bisa, formalitas doang, biasanya kalo ada razia HP dan barang lain udah bocor duluan..."* (Wawancara **Rzi**, tanggal 5 April 2007). Uraian **Rz** jelas menunjukkan keberlakuan kesepakatan informal begitu dominan menjadi aturan yang berlaku nyata dalam Lapas.

Setiap wawancara dengan **Rzi** di tempat besukan, penulis selalu memberikan pertanyaan untuk dijawab secara tertulis dan diambil saat berkunjung kembali. Meneliti melalui besukan mengeluarkan dana cukup besar. Setiap kali kunjungan penulis harus mengeluarkan biaya minimal 300.000, keadaan ini diterangkan **Rzi** sebagai berikut: *"...Dari*

300 ribu, 200 ribu untuk kamar dan uang rokok petugas, trus napi jaga (tamping) 100 ribu...” (Wawancara **Rzi**, tanggal 5 April 2007).

Foto 3.2
Suasana Ruang Besukan-Luar



Sumber : Data Peneliti

Penulis sendiri tetap menjaga hubungan baik dengan terhadap informan karena sulit mendapatkan informan lain. Keadaan ini menjadi dilema bagi penulis karena setiap dikasih uang maka pada kunjungan berikutnya akan terus naik nilai uangnya, sebaliknya jika tidak diberi mereka tidak mau lagi bertemu di tempat besukan. Situasi ini bisa diterima penulis setelah **Rzi** mengatakan, "...Tempat besukan adalah tempat mendapatkan pemasukan untuk diberikan pada petugas, tamping, kepala kamar maupun untuk bergaul antar sesama narapidana maupun kebutuhan pribadi lainnya..." (Wawancara **Rzi**, tanggal 5 April 2007). Tempat besukan menjadi akses dan titik masuk bagi penulis. Begitu juga bagi napi, tamping, dan petugas bisa menjadi sumber pemasukan. Tak ada pilihan lain bagi penulis saat itu untuk tetap wawancara dari tempat besukan.

Satu hal menarik yang penulis peroleh bahwa mewawancarai narapidana di dalam Lapas khususnya di kamar narapidana hasilnya lebih baik dibandingkan wawancara dilakukan di luar Lapas. Pengalaman penulis yaitu pada saat wawancara dengan **Cpi** bulan Mei 2008, saat itu **Cpi** telah bebas dari Lapas, tiga hari setelah bebas kami bertemu dan melakukan wawancara, **Cpi** tampak banyak bergerak, tidak bisa diam dan tidak betah saat mengobrol, duduknya pindah-pindah, jawabannya tidak fokus. Penulis melihat **Cpi** mengekspresikan kebebasan bergerak yang berbeda dibanding saat di dalam Lapas, bagaimana keterbatasan dan ketertekanan sewaktu di Lapas memaksa **Cpi** menahan dan memendam untuk bisa mengekspresikan keadaan sebaliknya yang dialami. Wawancara dan

ngobrol dengan **Cpi** lalu dilakukan di luar Lapas, tapi ternyata **Cpi** tak bisa fokus, perhatiannya berubah-ubah dan tak menjawab pertanyaan. Penulis berusaha memahami keadaan ini karena mungkin baru bebas dari Lapas, tapi satu minggu kemudian, kami janji ketemu dan wawancara, saat ditanya, **Cpi** malah mengatakan sudah banyak lupa tentang apa yang dialami di Lapas. Tampak ada kecenderungan **Cpi** untuk melupakan apa yang dialami dalam Lapas karena selain "mimpi buruk" juga memberi kesan negatif di mata masyarakat umum. Penulis mengingat dan membandingkan saat wawancara di tempat besukan Lapas, **Cpi** begitu fokus dan terarah menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis, padahal suasananya terbatas dan dikelilingi jeruji besi, berbeda setelah bebas dari Lapas.

Selama bulan April, Mei, Juni, Juli 2008 penulis intensif bertemu **Rzi** melalui ruang besukan, banyak informasi terkumpul dari sudut pandang narapidana. **Rzi** menambahkan: "...Biasa orang bui kebanyakan bilang iya-iya aja pas ditanya, tapi giliran mau di wawancara pada takut masuk koran. tapi diklik dikit lagi juga pada nyanyi koq. Gua incer korve, tukang sampah, dan tukang laundry..." (Wawancara **Rzi**, tanggal 30 Mei 2007). Uraian **Rzi** ini menjelaskan bahwa mewawancarai narapidana atau petugas di dalam Lapas tidak mudah apalagi dilakukan oleh orang luar.

Untuk lebih menangkap hubungan sosial yang terjadi dalam Lapas, penulis memberi alat rekaman pada **Rzi** untuk merekam pembicaraan di dalam Lapas, tapi setelah dicoba banyak data yang tak terdeskripsi dengan baik, tak jelas siapa orangnya, seperti apa suasana wawancara, berubah-ubah topik yang dibicarakan. Alat rekaman ini penulis sampaikan pada **Rzi** saat bertemu di ruang besukan, tentu dengan memberi tahu dan mendapat izin dari petugas jaga saat itu. Ketika penulis hendak mengambil kembali rekaman tersebut di ruang besukan, **Rzi** memberikan secara diam-diam. Penulis sadar akan hal ini karena di area ruang besukan tertulis tanda dilarang membawa alat elektronik. Alat rekaman rentan disita petugas kalau ketahuan dipergunakan secara kasat mata. Saat mengembalikan alat rekaman, **Rzi** mengatakan, "...Yang penting barang (rekaman) dikeluarin dulu soalnya kalo udah ketahuan petugas akan dipantau terus..." (Wawancara **Rzi**, tanggal 5 April 2007). **Rzi** menjelaskan penggunaan alat rekaman harus dilakukan diam-diam dan tidak terlihat oleh petugas.

Saat wawancara di ruang *besukan-dalam* (**Foto 3.3**), penulis melihat langsung interaksi *intens* narapidana dan keluarga, petugas & narapidana, dan antar sesama narapidana. Para tamping membantu memasuk-keluarkan barang titipan keluarga dari ruang besukan ke dalam blok. Prosedur ketat Lapas yang penulis rasakan sebagai hambatan, makin-lama makin

terasa longgar karena berbagai jalur akses masuk tak resmi telah diberitahukan **Cpi** dan **Rzi** kepada penulis.

Foto 3.3
Suasana Ruang Besukan-Dalam



Sumber : Data Peneliti

Tak terasa pertemuan dengan **Rzi** sudah mendekati 6 bulan, **Rzi** hampir menjelang bebas, maka untuk tetap mendapat informasi tentang Lapas melalui besukan, penulis meminta **Rzi** mengenalkan narapidana lain yang mempunyai karakteristik sama dengan **Rzi** dan **Cpi**. Akhir bulan Mei 2008 di ruang *besukan-dalam*, **Rzi** mengenalkan **Lbi** pada penulis, **Lbi** juga adalah narapidana kasus narkoba, dengan lokasi kejadian (TKP) di Depok, teman seperkara (SPK) **Rzi** dengan hukuman pidana penjara 4 tahun.

Rekomendasi **Rzi** menjadi penting, karena bisa menghindari kecurigaan narapidana atau petugas terhadap penulis sebagai orang luar. Kecurigaan petugas dan sesama narapidana (tamping) dimungkinkan karena penulis sering meminta informasi tentang kehidupan Lapas dan disampaikan saat besukan.

Tanggal 5 Juni 2008 penulis bertemu **Rzi** di depan Lapas, saat itu hari pertama **Rzi** bebas dari Lapas, **Rzi** mendapat pembebasan bersyarat (PB), menjalani hukuman sisa di luar Lapas tapi tetap harus melapor tiap bulan sampai awal tahun 2009 ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bogor, bila melanggar maka PB nya bisa dibatalkan. Penulis saat itu mengucapkan selamat atas kebebasan **Rzi**. **Rzi** mengajak penulis mengobrol di ruang toko penjualan "Elpale" yaitu tempat penjualan produk warga binaan pemasyarakatan (WBP) seperti tas, ikat pinggang, dompet dan asesoris lain. Tampak sekali si **Rzi** agak kaku melihat dunia bebas, **Rzi** mengatakan, "Wah, banyak mobil, banyak orang di jalan, banyak cewe cantik." Saat mengobrol di toko,

Universitas Indonesia

penulis dikenalkan dengan **Thi**, tamping luar yang menjaga toko elpale, awalnya **Thi** masih ragu bercerita pada penulis, tapi lama-lama menjadi biasa. Dari panggilan “*Pak*” menjadi “*Lu-gue*” saja, tidak mudah bagi peneliti sebagai *orang luar* mendekati narapidana tanpa ada referensi dari sesama teman narapidana lain.

Meski dua informan utama penulis yaitu **Cpi** dan **Rzi** telah bebas, meneliti lewat besukan masih dilakukan penulis melalui informan **Lbi**, napi narkoba yang dihukum 4 tahun dan baru menjalani 1 tahun. Wawancara lewat ruang besukan ini tidak dilakukan secara spontan tapi *snowball* karena tidak mudah mendapatkan kepercayaan dari narapidana apalagi penulis sebagai *outsider*. Penulis mengamati rekomendasi sesama napi menjadi penting untuk menjalin dan menciptakan hubungan dengan informan agar saling percaya dan dapat menjaga rahasia mempertahankan keberlakuan aturan dan kesepakatan informal dalam Lapas.

Mewawancarai **Cpi**, **Rzi** dan **Lbi** melalui tempat besukan merupakan suatu proses karena narapidana tidak tinggal tetap dalam Lapas, selalu berganti (habis masa pidana). Dibanding petugas yang relatif menetap karena tugas utamanya di Lapas. Mewawancarai petugas lebih informatif meskipun seringkali timbul penolakan, sehingga penulis selalu memverifikasi kembali informasi yang diberikan baik oleh narapidana maupun petugas. Tidak berarti tempat besukan menjadi arena penelitian menyenangkan karena selama meneliti, penulis hanya menunggu dan terpaksa mengandalkan informasi yang disampaikan informan saja, tanpa bisa melihat langsung kondisi sebenarnya. Keterbatasan ini membuat penulis mencoba mendapatkan ijin resmi secara tertulis ke Dirjen Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM agar bisa masuk dan mendapat akses lebih luas ke dalam Lapas.

Sambil menunggu turunnya surat ijin, penulis tetap melakukan kontak dengan **Lbi** melalui tempat besukan. Awal Juli 2008 surat ijin penelitian turun, tanggal 10 Juli 2008 tepatnya, dengan berpakaian rapih, penulis membawa surat ijin dan melapor ke Lapas. Sampai di pintu portir ternyata banyak orang yang mau masuk ke Lapas, mereka berkumpul di depan pintu portir, kebanyakan keluarga narapidana mau besuk ke dalam Lapas. Pintu portir terdiri dari dua pintu besar, ditengahnya terlihat sepotong besi yang harus diketok sebagai tanda mau masuk. Pintu utama ini merupakan jalan keluar-masuk utama narapidana/tahanan serta *kiriman* dari kepolisian, kejaksaan atau pengadilan. Banyaknya arus keluar-masuk orang dan barang melalui pintu portir membuat penulis disuruh mengantri satu per satu. Setelah 15 menit, penulis diperbolehkan masuk ke dalam Lapas. Di pintu portir,

penulis menyerahkan kartu tanda mahasiswa (KTM) dan diberi kartu identitas tamu. Setelah menyelesaikan administrasi surat-surat, penulis diantar ke Ruang Kepala Seksi Pembinaan yang bernama **Adi**. Penulis mengemukakan keinginan mengadakan penelitian di dalam Lapas, penulis menanyakan bagaimana caranya agar tak mengganggu kegiatan Lapas, Kasi Pembinaan menjawab: “...Kalo soal area Lapas harus ditanyakan kepada Kepala KPLP yang lebih tahu soal lapangan, seperti kalo ada yang ribut atau berantem, KPLP sudah biasa menanganinya, kita tenang saja jangan panik petugas kita udah biasa menangani seperti itu dan cepat penanganannya kok...” (Wawancara **Kasi Pembinaan**, tanggal 1 Agustus 2008). Penjelasan Kasi Pembinaan cukup menenangkan penulis yang begitu kaget melihat para napi tampak bergerombol di depan ruang Kasi Pembinaan dan blok narapidana. Para narapidana ini tampak menyeramkan karena bertato dan melotot ke arah penulis. Sambil diselingi rasa takut, penulis melewati kumpulan napi/tahanan ini dari ruang Kasi Pembinaan menuju ke ruang Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP) yang letaknya di dalam blok narapidana. Setelah mendapat izin dari Kepala KPLP, penulis mulai penelitian dengan mengamati dan berinteraksi di blok, mulai blok A sampai ke blok D. Kepala KPLP mengatakan: “...Oya kalo gitu nanti besok, saya kondisikan kepada petugas blok” Penulis menanggapi dan mengatakan, “Nggak usah pak saya harap pengamatan dan penelitian bisa berjalan dalam kondisi sebagaimana biasanya saja, tak usah dikondisikan...” (Wawancara **Kepala KPLP**, tanggal 1 Agustus 2008). Penulis menolak saran Kepala KPLP untuk mengkondisikan para napi dan petugas, penulis mengatakan pada Kepala KPLP untuk membiarkan saja penelitian berlangsung dalam kondisi sebagaimana biasanya.

3.2.2. Berhadapan Langsung di Area Blok Narapidana

Langkah kedua ini dilakukan setelah mendapat izin meneliti dalam Lapas. Penulis bisa melihat secara langsung ruangan blok dan kamar narapidana dengan menggunakan identitas tamu dan pakaian bebas. Sangat berbeda dengan apa yang dirasakan saat wawancara di ruang kunjungan. Di ruangan blok dan kamar narapidana, penulis merasa menjadi tontonan banyak mata narapidana dan petugas, mereka bertanya-tanya tentang penulis. Hal ini terjadi karena dalam blok dan kamar ini tak ada orang lain selain narapidana dan petugas. Keadaan ini cukup merepotkan penulis yang harus berkali-kali dan berulang-ulang menjelaskan identitas penulis sebagai seorang peneliti. Setiap berjalan beberapa langkah dalam blok/kamar, ada saja narapidana dan petugas yang mendekat, dan menanyakan siapa penulis. Situasi ini tak bisa dihindari karena jalanan dan koridor dalam ruangan blok dijadikan tempat duduk-duduk dan bercengkrama para narapidana. Saat penulis bertanya balik tentang identitas para

narapidana tersebut, semuanya diam dan malah pergi menjauh. Tak jarang penulis harus meminta bantuan petugas untuk mencarikan napi yang bisa diajak ngobrol dan dapat dipercaya. Sulit sekali menemukan langsung narapidana yang bisa menjadi informan, padahal begitu banyak napi yang sedang nongkrong dan ngobrol di koridor blok maupun dalam kamar. Secara perlahan akhirnya penulis mengerti bagaimana harus bersikap menghadapi narapidana maupun petugas, meskipun mereka belum berani terus terang mengutarakan keadaan sebenarnya dalam Lapas.

Blok narapidana terletak di tengah bangunan Lapas Bogor. Area blok ini dikelilingi tembok tinggi kurang lebih tiga meter dan hanya mempunyai satu pintu masuk dan keluar. Selasa 29 Juli 2008 adalah hari pertama penulis mengamati melalui pos blok yang dimulai dari blok A. Blok A adalah blok tempat menampung para tahanan. Meskipun belum menjadi narapidana, lokasi blok A berada di dalam Lapas Bogor sehingga terkadang susah membedakan mana narapidana dan tahanan secara sekilas. Petugas yang bertanggungjawab di blok A disebut pembina blok A yang bertugas mengatur, menjaga, memantau, dan menyelesaikan persoalan-persoalan dalam blok. Nama lain pembina blok dikenal dengan istilah penjaga atau wali blok. Pembina blok A sebut saja **Ini**, menjelaskan di blok A ada empat orang pembina, tiap petugas blok wajib mengenakan baju dinas harian lengkap saat bertugas. Tugas pembina dibagi tiga shift, pertama jam 07.00 – 13.00, kedua, jam 13.00 – 19.00, dan ketiga, jam 19.00 – 07.00 pagi. Dari pos blok A (**Foto 3.4**) penulis bisa melihat bagian terdalam Lapas yaitu kamar narapidana (tahanan) dan ruang berkumpul narapidana dalam blok.

Foto 3.4
Pelataran Pos Blok



Sumber : Data Peneliti

Dmi, pembina blok D, menjelaskan blok A diperuntukan bagi tahanan baru masuk dan diberlakukan *maximum security*, sedangkan di blok B diperuntukan penghuni atau napi yang sudah putus vonisnya dan berlaku *medium security*, kemudian di blok C dan blok D untuk napi yang telah putus vonisnya dan berlaku *minimum security*. Di blok D selain berisi kamar-kamar narapidana, ada tempat binatu (pengeringan), cuci dan tempat menjahit. Keadaan napi di blok, menurut pembina blok C, sebut saja **Sui**, sebagai berikut: “...Biasanya napi duduk-duduk dan kumpul-kumpul berdasar beberapa alasan seperti teman sekamar, se-polresta, se-polres, se-polsek, se kampung atau se-spK (teman seperkara)...” (Wawancara **Sui**, tanggal 7 Agustus 2008). Beda dengan di blok A dimana para tahanan belum saling kenal, di blok C umumnya sudah saling kenal. **Sui** sebagai pembina blok C mengatakan ia sendiri tak kenal semua penghuni yang ada dalam blok C, oleh karena itu ia mengandalkan bantuan *korve* atau tamping untuk mengawasi jumlah dan aktivitas penghuni.

Penulis mengamati suasana pagi hari di blok, sekitar jam 08.00 pagi makanan diambil *korve* ke dapur melewati area perkantoran dan ruang KPLP. Ruang KPLP sering disebut *area steril*, tidak boleh ada narapidana/tahanan bolak-balik di area steril kecuali petugas dengan baju dinas lengkap atau tamping. Tampak sekali perbedaan saat penulis dalam blok narapidana, memakai baju bebas tapi bisa bebas berkeliaran, sesuatu yang tidak biasa bagi narapidana dan petugas dalam blok. Penulis tampak seperti menjadi *orang lain*, tapi atas dukungan dan penjelasan petugas blok, penulis menjadi tenang dan biasa saja. Mengatasi rasa

canggung ini, penulis mendekati narapidana pembantu atau pemuka yang dekat dengan petugas, penulis menyampaikan bahwa penulis bukanlah wartawan yang harus ditakuti tapi sedang mencari bahan penelitian untuk studi. Penulis menyebut beberapa referensi nama seperti **Cpi** dan **Rzi** yang pernah mendekam adalah teman penulis. Mendengar hal ini, pemuka **Rdi** dan **Ati** mulai bisa menerima penulis. Tidak sembarang orang bisa saling percaya dan keluar masuk blok yang dijaga ketat seorang *korve*, tapi ditemani pemuka blok **Rdi** dan **Ati**, penulis bisa keluar-masuk dengan meminta permisi terlebih dahulu. Hampir enam bulan lebih, penulis mengamati dan berinteraksi dari blok narapidana. Dari semua blok yang ada, yang sedikit berbeda adalah blok A karena merupakan blok tahanan dengan kondisi *maximum security*.

Pengamatan di blok narapidana, penulis lakukan mengikuti waktu aktivitas blok mulai jam 06.30 pagi sampai jam 17.00. Penulis mengamati pada jam 07.00 pagi, pintu kamar blok dibuka, lalu makan pagi jam 07.15 pagi. Jam 07.15 – 12.30 adalah jam bebas, beragam kegiatan blok dilakukan mulai dari pengajian, ibadah, duduk-duduk, diam, tidur di kamar sampai aktivitas bersiap sidang di pengadilan negeri (PN) Bogor, Cibinong dan Depok. Waktu keluar kamar dikenal dengan *waktu bebas* atau *waktu gaul*. Waktu ini hanya berlangsung sampai jam 12.00 siang, Pada pukul 12.30 masuk kamar lagi, pukul 13.00 siang dilakukan pemeriksaan di blok narapidana (apel) sekaligus pergantian regu jaga. Pukul 14.00 siang kamar dibuka lagi dan *waktu bebas/gaul* dimulai, pukul 15.00 makan sore dan sekalian sholat jamaah, pukul 16.30 masuk kamar kembali untuk melakukan kegiatan di kamar sampai pagi hari. Kegiatan di kamar jam 18.00 dan 19.00 adalah melakukan sholat dan pengajian di kamar masing-masing, sesudah itu dilanjutkan dengan membicarakan persoalan-persoalan dalam kamar seperti uang kamar dan pengeluaran kamar yang dipimpin langsung *kepala kamar (KM)*. Sekitar pukul 10.00 malam para penghuni kamar tampak tertidur di tempat masing-masing, ada yang tidur jongkok, tidur di bawah lantai, tidur di tengah (kolong) dan tidur di loteng. Pengaturan tidur ini menunjukkan strata atau status narapidana dalam kamar sekaligus menampilkan fasilitas dan kelonggaran yang diperolehnya, tidak sama perlakuan antara napi satu dengan lain di blok dan kamar.

Saat melakukan pengamatan sore hari, tampak narapidana sebagian besar melakukan aktivitas duduk-duduk di lapangan, ada yang berolah raga, sebagian lain dalam kamar, ada juga yang nongkrong di depan kamar, kamar mandi dan tempat jemuran. Selama pengamatan dari blok narapidana, penulis tak menemukan narapidana yang memakai *handphone*, berbeda

sekali pada saat penulis mulai berinteraksi memasuki kamar narapidana, disudut-sudut kamar, ada saja napi yang sedang menelepon sambil tidur-tiduran. Suatu kali penulis mengikuti seorang petugas blok, sebut saja **Dfi** ke kamar, **Dfi** memberi penjelasan isi aturan formal bahwa di kamar *handphone* (HP) tak boleh dipergunakan, kalau ketahuan akan dihancurkan, kalau mau telepon sudah ada wartel, Saat itu penulis melihat narapidana duduk tenang mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan **Dfi**. Selesai memberikan pengarahan di kamar, **Dfi** mengatakan kepada penulis, “*Kalau wartel sepi jadi patokan HP menjamur sehingga perlu ada razia*”. Setelah **Dfi** pergi penulis kembali ke kamar dan menemukan beberapa narapidana tetap menggunakan *handphone* secara sembunyi-sembunyi. Hasil pengamatan penulis menunjukkan ternyata petugas **Dfi** mau menunjukkan pada penulis bahwa aturan formal berjalan dengan baik dalam Lapas. Akhirnya penulis mengerti bagaimana bersikap dan selalu melakukan cek silang dalam Lapas, sebagai contoh narapidana memakai HP di kamar secara sembunyi-sembunyi, kalau ketahuan akan disita dan dihukum, selama tidak ketahuan akan berjalan terus, artinya kesepakatan informal lebih menjadi acuan berperilaku dibanding aturan formal.

Pengamatan dan interaksi dari blok narapidana (**Foto 3.5**) memberi banyak masukan penting terutama untuk mengetahui kondisi masyarakat penjara yang mempunyai ciri berbeda dengan masyarakat secara umum, mereka tidak mudah memberi informasi apa adanya. Pengalaman proses verbal peradilan (penjatuhan hukuman) yang telah dilalui narapidana dari tahap kepolisian, kejaksaan dan kehakiman memberi kemahiran tersendiri bagi narapidana menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti, terutama memastikan apakah peneliti betul-betul meneliti atau sekedar mencari mau tahu saja atau mau mengorek keterangan lainnya. Kecurigaan narapidana terhadap penulis beralasan karena pengalaman yang telah mereka alami selama diinterogasi dan diperiksa aparat penegak hukum selama proses peradilan begitu melekat. Begitu pula saat berinteraksi dalam Lapas, sulit menjalin hubungan dengan napi yang dijuluki *napi tak jelas* karena mereka seringkali menghindar, takut terhadap penulis yang disangka wartawan atau orang luar, meskipun diluar dugaan beberapa napi tersebut menegur penulis, mengungkapkan perasaan senang karena bisa ada orang luar (wartawan) masuk ke Lapas dan mengangkat masalah-masalah kejelekan dalam Lapas. Sewaktu penulis tanyakan lebih dalam dan serius hal-hal negatif apa saja yang terjadi dalam Lapas, beberapa narapidana tersebut malah takut, tidak berani berterus terang, mereka mengatakan, “*Nanti saja saya jelaskan kalau saya sudah bebas.*” Agak berbeda dengan *tamping*,

kepala kamar, pengurus kamar atau pemuka lebih terbuka dalam memberi informasi meski tidak seluruhnya transparan.

Foto 3.5
Interaksi Di Kamar Napi



Sumber : Data Peneliti

Saat berinteraksi dengan petugas jaga maupun napi, penulis melihat tanggapan dan jawaban berbeda-beda diberikan terhadap penulis. Ada yang menutup-nutupi keadaan sebenarnya, ada yang setengah-setengah menjelaskan, tapi ada juga yang berkata apa adanya. Tak semua realitas kehidupan Lapas mau diungkap secara transparan, sebagian realitas ditutupi, terbatas untuk konsumsi penghuni Lapas saja. Pengamatan penulis dengan mata kepala sendiri terkait hal-hal negatif di Lapas saja seringkali dibantah petugas maupun tamping melalui jawaban berbelit-belit atau normatif. Hal ini disebabkan, sekali lagi, karena penulis dianggap orang luar yang dianggap tak perlu tahu apa yang terjadi di dalam Lapas. Untunglah tidak semua petugas terlihat kaku, petugas **Adi** dari blok B mencairkan keadaan ini dengan menceritakan salah satu kesepakatan informal yang berlaku yakni soal uang beredar secara lebih terbuka, sebagai berikut:

"...Sekarang harusnya uang gak boleh masuk kedalam, kalo dibesuk ada tabungan, gak pake uang, kalo ada masuk ke buku tabungan (butap), tapi kenyataannya masih ada yang bandel apalagi sekarang sudah overkapasitas gak ada yang kepegang, pagi ini ada 1600 an penghuni, terlalu padat, sehingga pengawasan menjadi sulit, mau lewat aja susah, kadang-kadang gak tutup mata berbagai hal bisa terjadi..."
(Wawancara **Adi**, tanggal 30 Juni 2008)

Pengamatan dan interaksi di blok narapidana membuat penulis bisa melihat dan menentukan tipe petugas maupun narapidana seperti apa yang bisa dijadikan informan dan dipercaya. Setelah mengamati sekian lama dari blok narapidana, kira-kira enam bulan lebih, beberapa petugas masih ragu terhadap keberadaan penulis, mereka menyembunyikan hal-hal yang dianggap kurang baik dalam Lapas. Penulis menduga mereka berusaha melindungi aturan dan kesepakatan informal agar tidak diketahui orang luar, disini penulis harus pintar-pintar mencari keterangan dan memilih informan. Di Lapas ada istilah *tembok bisa bicara*, artinya masing-masing narapidana mempunyai *pegangan* petugas, mereka selalu memberi laporan pada *pegangannya* kalo ada sesuatu yang baru dan berbeda. Beberapa napi melaporkan pada petugas terkait keberadaan penulis di dalam Lapas, tapi penulis tetap ramah terhadap mereka dan menganggap sebagai teman saja. Inilah pentingnya melapor pada Kalapas atau Kepala KPLP maupun petugas yang berwenang, agar bila ada masalah dapat cepat diketahui dan diselesaikan. Contohnya saat penulis mengambil foto-foto memakai kamera handphone, beberapa napi tampak terganggu dan melapor pada petugas, sehingga dengan rasa tidak enak penulis berusaha menjelaskan kepada mereka apa maksud pengambilan foto ini.

Mengamati dan berinteraksi dari blok narapidana membuat penulis selalu berkomunikasi dan mendekati petugas lapangan bila telah selesai berbicara dan berinteraksi dengan narapidana. Hal ini untuk menunjukkan apa yang diperbuat penulis memang diketahui petugas, sehingga tak perlu lagi ada narapidana yang memberi laporan kepada petugas. Di lapangan memang beberapa narapidana menanyakan siapa penulis, seperti napi **Zzi** mengatakan, “*Kok bisa masuk secara bebas ke dalam blok ya karena sebelumnya tak boleh ada orang bebas yang berkeliaran di dalam blok tanpa ijin petugas*”. Terhadap napi **Zzi** ini, penulis jelaskan maksud penelitian, meskipun tak semudah itu Zz mempercayai penulis, tapi napi **Zzi** lebih kooperatif dibanding dari narapidana lain yang kebanyakan hanya basa-basi saja.

Saat mengamati dari blok narapidana, penulis ikut mengobrol dan tidur bersama napi di salah satu kamar di blok D saat malam hari (**Foto 3.6**). Hal ini dilakukan setelah selesai wawancara dan untuk melihat lebih dekat suasana dalam kamar. Ternyata kegiatan dalam kamar tak berbeda dengan kegiatan sehari-hari masyarakat di luar penjara, bedanya hanya tempat tidurnya sempit, tidak bebas dan saling berhimpitan waktu tidur.

Foto 3.6
Tidur Di Kamar Blok D



Sumber : Data Peneliti

Pengamatan dan interaksi langsung dari blok narapidana membuka cakrawala penulis mengenai seluk beluk berinteraksi dengan sesama narapidana dan petugas, sebagai norma tersendiri atau nilai khas yang menonjol dalam kehidupan Lapas. Meskipun penulis telah berusaha mendekati narapidana ke kamar, tapi tetap saja penulis dianggap orang luar yang tak perlu tahu aturan dan kesepakatan informal di Lapas. Dari pengamatan penulis banyak bentuk relasi hubungan tersembunyi dan tertutup tidak terungkap. Penulis lalu berdiskusi dengan Kepala Lapas tentang kesulitan-kesulitan ini, dan Kepala Lapas menyarankan untuk menggunakan seragam petugas pemasyarakatan saja agar bisa mengungkap hubungan-hubungan sosial yang lebih tersembunyi dan tertutup dalam Lapas.

3.4.3. Berpartisipasi sebagai Petugas Pemasyarakatan

Langkah ketiga ini, dilakukan penulis mengikuti ketentuan formal Lapas agar tidak menimbulkan pertanyaan dan ketidakpastian di blok dan kamar narapidana, semata-mata karena dugaan penulis adalah *orang luar*. Dugaan *orang luar* ini cepat sekali teridentifikasi, menjadi perbincangan, bahkan penulis dianggap mengawasi gerak-gerik petugas maupun narapidana dalam rutinitas keseharian di Lapas. Tapi dengan kehadiran penulis berpakaian seragam, mendapat tanggapan positif dari beberapa petugas dan narapidana yang selama ini akrab dengan penulis. Dengan berpakaian seragam, penulis tidak lagi disangka anggota keluarga narapidana, wartawan, dan menimbulkan kecemburuan diantara sesama napi. Menjadi petugas dianggap menjadi orang yang tahu semua yang terjadi dalam Lapas

Universitas Indonesia

meskipun juga menimbulkan rasa was-was bagi narapidana yang sering melakukan pelanggaran aturan main.

Pada 8 Mei 2009 penulis diizinkan menggunakan seragam petugas Lapas untuk meneliti secara lebih intensif dalam Lapas. Melalui persetujuan Kepala Lapas penulis diberi pangkat pegawai menengah agar mudah berinteraksi dengan napi maupun sesama petugas, tentu saja izin ini diperoleh setelah dibicarakan dengan Kepala Lapas, dan melalui lobi-lobi dengan beberapa pimpinan Dirjenpas Departemen Hukum & HAM.

Meneliti Lapas dengan menjadi petugas Lapas sangat berbeda dibanding meneliti di ruang besukan dan pos blok. Bagi penulis, sewaktu mula-mula meneliti di ruang besukan merupakan kesempatan mencari dan menemukan informan narapidana, sedang meneliti di blok narapidana merupakan kesempatan mendekati jajaran petugas, mendapatkan informan dari pihak petugas. Berperan sebagai petugas membuat penulis bisa mendekati keduanya yaitu narapidana dan petugas secara langsung, bersamaan dan interaktif. Masing-masing cara meneliti ini mempunyai kelebihan dan kelemahan, meneliti dengan menjadi petugas Lapas membuat penulis terasa dekat dengan kedua belah pihak.

Menggunakan ketiga cara meneliti ini membuat penulis bisa memahami budaya penjara di Lapas Bogor yang berisi interaksi petugas dan narapidana maupun antar sesama narapidana. Interaksi ini menimbulkan aturan dan kesepakatan informal diantara kedua belah pihak. Seorang narapidana/tahanan yang masuk Lapas terlebih dahulu dibiasakan dengan norma dan nilai informal baik oleh napi maupun petugas, disamping nilai dan norma formal yang hanya untuk diketahui bukan untuk dilaksanakan. Dengan memakai baju seragam maka penulis bisa meneliti secara lebih dekat hubungan-hubungan yang melandasi interaksi narapidana dan petugas.

Awal memakai baju seragam, beberapa tamping dan pegawai Lapas kaget sewaktu pertama kali penulis memasuki blok dan kamar narapidana. Beberapa pegawai ada yang bertanya, "...Bapak, pegawai baru?" "Bapak pindahan dari mana?...". Dengan memakai baju seragam menunjukkan perubahan saat berinteraksi dengan narapidana dan petugas unit kerja tertentu, tiap bertemu dengan petugas atau narapidana didahului dengan bersalaman atau cium tangan saat bertemu narapidana. Memakai baju seragam membuat akses masuk penulis menjadi lebih luas. Penulis bisa melangkah dan berpindah langsung dengan segera dari area blok satu ke blok lain, dari area blok napi ke area perkantoran dan sebaliknya atau dari ruang kepegawaian ke luar Lapas seperti ke bengkel kerja, kebun dan seterusnya.

Beberapa tamping yang telah penulis kenal sebelumnya terkejut melihat penulis memakai seragam. Mereka mengatakan, "...*Ternyata Bapak petugas ya...*". Menanggapi pertanyaan ini, penulis menjawab balik, "...*saya peneliti, memakai baju seragam ini agar tidak melanggar prosedur tetap yang ada dalam Lapas, sehingga bisa meneliti tanpa melanggar aturan dan tidak dicurigai sebagai orang luar yang punya kepentingan lain...*". Akhirnya posisi peneliti ini bisa dimengerti beberapa tamping dan narapidana yang menjadi informan kunci penulis. Tiap kali bertemu napi di blok dan kamar, ada yang menyalami, mencium tangan, menghormat, menyapa selamat pagi, tersenyum, dan seterusnya, keadaan ini berkebalikan dengan saat penulis memakai baju biasa dan identitas kartu tamu sewaktu melakukan wawancara di ruang besukan dan blok narapidana, waktu itu sulit sekali rasanya mendekati petugas dan narapidana.

Berpakaian seragam membuat prosedur ketat dan formal yang berlaku ketat dalam Lapas dapat dilalui penulis tanpa merasa takut melanggar, bahkan seringkali malah dilindungi oleh aturan formal seperti mengambil foto atau mencari bahan-bahan dan data-data lain yang diperlukan. Dengan berpakaian seragam, penulis semakin yakin dan percaya bahwa peran tamping/pemuka sangat besar dalam membantu menggerakkan aktivitas Lapas, mulai dari ruang kantor lantai satu, lantai dua, area blok A - D, area luar Lapas seperti kebun, kolam ikan, tempat parkir dan halaman depan. Memakai seragam membuat penulis bisa mengungkap relasi-relasi sosial petugas dan napi secara lebih leluasa, mendekati napi dan petugas dilakukan kapan pun saat jam kerja, sesuai jam kerja, maupun di luar jam kerja.

Dengan berpakaian seragam, penulis ditempatkan pada regu pengamanan (rupam) agar bisa mengakses seluruh ruangan yang ada dalam Lapas. Penulis diberi jadwal masuk persis sama dengan jadwal kerja regu pengamanan (**Tabel 3.1**). Regu pengamanan ini berada dibawah tanggung jawab Kepala KPLP, terdiri dari empat regu pengamanan (rupam) yaitu regu satu, regu dua, regu tiga dan regu empat. Penulis ditempatkan pada regu pengamanan dua. Dalam praktek berlaku tiga *shift* pengamanan tiap hari (**Tabel 3.1**) yaitu dinas pagi mulai dari pukul 07.00 – 13.00 (P), dinas siang mulai pukul 13.00 – 19.00 (S) dan dinas malam mulai pukul 19.00 – 07.00 (M). Sebagai contoh pada tabel tertera tanggal satu dan kode P artinya waktu masuk pagi (P) bagi regu satu, sedangkan rupam dua diberi kode M artinya masuk malam, rupam tiga diberi kode L artinya libur, dan rupam empat diberi kode S artinya masuk siang, begitu seterusnya. Dengan jadwal ini penulis secara lebih bebas masuk Lapas mengikuti jadwal rupam dua. Menjadi petugas pengamanan membuat penulis

merasakan bagaimana suka dan duka bertugas mulai dari menjaga pintu portir, pos jaga bawah, pos jaga atas, jaga malam, pengawalan napi sakit, sampai pemindahan napi ke Lapas lain.

Tabel 3.1
Jadwal Kerja Regu Pengamanan

| NO | NAMA | TANGGAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|---------|-------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | REGU PENGAMANAN I | P | M | L | S | P | M | L | S | P | M | L | S | P | M | L | S | P | M | L | S | P | M | L | S | P | M | L | S | P | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | REGU PENGAMANAN II | M | L | S | P | M | L | S | P | M | L | S | P | M | L | S | P | M | L | S | P | M | L | S | P | M | L | S | P | M | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | REGU PENGAMANAN III | L | S | P | M | L | S | P | M | L | S | P | M | L | S | P | M | L | S | P | M | L | S | P | M | L | S | P | M | L | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | REGU PENGAMANAN IV | S | P | M | L | S | P | M | L | S | P | M | L | S | P | M | L | S | P | M | L | S | P | M | L | S | P | M | L | S | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

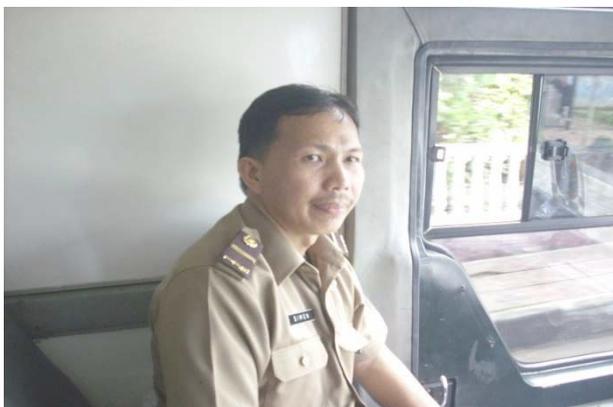
Sumber : Data LP Paledang 2009

KETERANGAN

- P : DINAS PAGI DARI PUKUL 07.00 S/D 13.00 WIB
 S : DINAS SIANG DARI PUKUL 13.00 s/d 19.00 WIB
 M : DINAS MALAM DARI PUKUL 19.00 S/D 07.00 WIB
 L : LIBUR

Masuk ke Lapas dengan memakai baju seragam (**Foto 3.7**) memberikan kemudahan penulis mengakses hubungan-hubungan sosial yang berlangsung secara kasat mata antara petugas dan narapidana maupun sesama narapidana.

Foto 3.7
Memakai Seragam



Sumber : Data Peneliti

Universitas Indonesia

Salah seorang petugas **Gni** yang menjadi informan kunci penulis mengatakan di Lapas ini petugas masih dihargai dibanding Lapas lain, narapidana disini banyak yang suka dan mendekati ke petugas. Lebih jelas diuraikan **Gni**, *"...Di Paledang sini petugas masih dainggap ama napi, beda ama Lapas lain, saya tahu karena udah 28 tahun jadi petugas, pake baju petugas bisa dapat kepercayaan dan kepastian..."* (Wawancara **Gni**, tanggal 8 mei 2009). Uraian **Gni** menegaskan petugas di Lapas Bogor lebih dekat dengan narapidana bukan sebaliknya sebagaimana terjadi di Lapas lain. Penulis percaya pada **Gni** karena informan ini dianggap "tokoh yang dipercaya" di kalangan petugas maupun narapidana. Senada dengan **Gni**, petugas jaga **Bui**, juga mengakui narapidana di Lapas Bogor sangat suka mengobrol dengan petugas, karena itu petugas menjadi segan dan menghormati napi-napi tersebut. Komentar **Bui**, katanya, *"...Mendingan pake baju dinas, banyak yang segan, tapi kalo didekati banyak yang suka, sambil cari kerjaan mereka senang diajak ngobrol. Pake baju dinas kita dianggap sudah tahu semua keadaan didalam, kalo kita dibohongi ya kita bisa cek ke napi lain..."* (Wawancara **Bui**, tanggal 8 mei 2009).

Petugas dan narapidana yang baru penulis kenal pun tampak keheranan melihat penulis berpakaian seragam, karena menurut mereka penelitian seperti ini belum pernah ada yang melakukan, karena itu dikhawatirkan menimbulkan persoalan dari sisi narapidana maupun petugas yang tidak tahu dan tidak mengerti keberadaan penulis sebagai peneliti. Menggunakan baju seragam menjadi tiket untuk bisa keluar masuk Lapas secara lebih leluasa, bahkan beberapa petugas mengingatkan dan mulai menanamkan nilai pada penulis, seperti dikatakan **Gni**, seorang petugas senior sebagai berikut, *"Jika berhadapan dengan napi agar tidak melanggar aturan yang ada, kalau terpaksa menginjak atau memaksa jangan sampai mereka menjerit."*

Beberapa narapidana yang sebelumnya sudah kenal penulis, tak begitu kaget dengan pakaian seragam yang dikenakan penulis, karena penulis telah memberitahu mereka sebelumnya, bahwa memakai baju dinas lebih aman dan leluasa dibanding baju biasa (preman) yang dapat menimbulkan tafsiran lain. Beberapa tamping dan pemuka juga telah tahu karena diberitahu atau diinformasikan beberapa petugas yang menjadi pegangannya. Dengan berpakaian seragam, malah beberapa napi berusaha lebih dekat dan mengobrol lebih bebas dengan penulis, berbeda dengan dahulu, kala penulis memakai baju bebas, penulis harus selalu berinisiatif mendekati dan menyediakan imbalan ("86"). Tapi sekarang tidak, mungkin karena rasa segan dan percaya narapidana terhadap seragam yang dikenakan penulis, meskipun begitu penulis tetap mengambil inisiatif untuk menawarkan rokok atau permen demi menjalin kedekatan baik antar sesama napi maupun dengan petugas.

Seorang tamping yang menjadi informan kunci **Ati**, ikut mengomentari penulis yang memakai memakai seragam, kata **Ati**: “...*Pake seragam lebih biasa daripada pake baju preman dikira buser polisi, jadi posisi kita pada bergeser (menjauh) itu karena insting sebagai penjahat saja...*” (Wawancara **Ati**, tanggal 10 Mei 2009). Penulis menyadari betul konsekuensi yang disampaikan **Ati**, karena itu bersama **Ati**, penulis diperkenalkan dengan berbagai kegiatan narapidana dalam kamar maupun blok, kegiatan mengisi waktu luang, mulai dari bikin cincin, gelang, kalung, sampai membuat kerajinan motor dari kertas, bikin tas, dan seterusnya. Penulis menjadikan **Ati** dan **Rdi** sebagai penghubung utama mendekati napi-napi lain terutama dari *kelas tak jelas*. Sedangkan untuk narapidana *mampu* dan *jelas* mudah ditemui dan langsung akrab. Penulis juga membangun pertemanan dengan *korve*, *buser*, *tamping* dan *pemuka lain*. Terutama melalui **Ati** dibantu **Rdi** inilah, penulis secara cepat bisa mendekati narapidana, berinteraksi dalam kamar, depan kamar, dan di lapangan blok secara transparan (Foto 3.8).

Foto 3.8
Berinteraksi Di Kamar Saat Apel



Sumber : Data Peneliti

Setelah akrab dengan tamping **Ati** dan **Rdi**, mereka menceritakan terus terang bahwa sebenarnya sewaktu awal penulis meneliti ke Lapas Bogor, mereka diberi tugas untuk memonitor penulis dan memberitahu semua narapidana agar tidak membocorkan apa yang berlangsung di Lapas. Berikut uraian **Ati**:

“...*Waktu Bapak datang pertama kali dipenjara ini pake baju bebas, diblok A saya ama Rdi berinisiatif nge GM (ngegambar) dulu, mengawasi Bapak dan memberi perintah tidak tertulis /warning pada semua KM untuk diam kalo Bapak datang, jangan ada macam-macam, jangan ada kekerasan, kalo gak mereka yang jadi susah, seperti dulu ada kasus jadinya besukan yang dulu di aula jadi pindah ke depan...*” (Wawancara **Ati**, tanggal 10 Mei 2009)

Pengakuan **Ati** dan **Rdi** menjadi dasar bagi penulis melukiskan bagaimana kedekatan penulis dan para informan kunci, membangun dan menimbulkan rasa saling percaya dan saling membagi. Rasa saling percaya ini membuat penulis bisa mengungkapkan dan mendeskripsikan berbagai aturan dan kesepakatan informal yang berlangsung dalam Lapas, siapa saja yang terlibat dan ikut serta menjalankan, serta relasi-relasi yang melanggengkan keadaan ini.

Dalam kesempatan lain, rasa saling percaya dimanfaatkan mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi dalam kamar narapidana, sebagai contoh, dalam salah satu kesempatan wawancara di kamar 2B, penulis melihat ada seorang narapidana memakai telepon (HP) di loteng atas kamar. Herannya si narapidana tersebut melihat penulis memakai seragam tapi ia tampak tenang saja dan terus menelepon, keadaan ini bertolak belakang sewaktu penulis memakai pakaian bebas (preman). Saat itu penulis terus memperhatikan si narapidana yang menelepon tersebut, ia tampak malu dan pura-pura menyembunyikan HP nya. Tapi sewaktu penulis katakan, “*Lanjut*”, dia bilang, “*Makasih pak.*”, dan dia terus menelepon anggota keluarganya. Peristiwa ini menunjukkan interaksi dengan memakai seragam di kamar memang cukup terbuka dan menyenangkan. Pada kesempatan lain, penulis diberi minuman teh panas manis yang dituang dari termos dan sachet teh dari *box* kamar, penulis juga ditawarkan kue-kue kecil dan buah. Setelah selesai ngobrol-ngobrol dan menikmati makanan kecil, penulis buang air kecil di kamar mandi dalam kamar tersebut, yang ternyata lebih bagus daripada toilet umum. Apa yang dilakukan penulis ternyata sudah biasa dilakukan petugas lain, bahkan beberapa petugas lebih suka mampir ke kamar mandi di kamar narapidana daripada mampir di kamar mandi yang tersedia di areal blok narapidana.

Kedekatan hubungan penulis dan tamping serta petugas membuat mereka tak ragu lagi memberi masukan atau saran kepada penulis atas apa yang terjadi di Lapas. Pada satu kesempatan, pemuka **Rdi** memperhatikan cara penulis bertanya pada napi, **Rdi** mengajarkan agar cara bertanya pada narapidana tak sama dengan bertanya pada orang pada umumnya. Berikut uraian **Rdi**, napi kriminal yang sudah menjalani hukuman enam tahun:

“...Disini kalo tanya napi sebaik mulai tanya udah berapa lama, dihukum berapa lama, jangan tanya kasusnya apa karena bisa bikin trauma pada WBP (napi), saya lebih suka sebut WBP daripada napi, apalagi kasus seks, rumah tangga, kebanyakan diam aja waktu ditanya kasus apa. Kalo udah gitu baru masuk ke kasusnya, jadi enak, beda ama kasus-kasus narkoba ama perampokan yang suka nonjolin/nunjukin...” (Wawancara **Rdi**, tanggal 16 Juni 2009).

Masukan **Rdi** terhadap penulis sungguh diluar dugaan, penulis menerima masukan **Rdi** dan mendiskusikannya lebih jauh bagaimana sebaiknya mendekati narapidana dan petugas. Setelah beberapa lama berinteraksi langsung dengan narapidana dan petugas, membuat penulis sering dijadikan tempat pengaduan, sebagai contoh seorang *buser* kamar 6D melaporkan pada penulis sebagai berikut: “...Pak, KM kamar di selti karena ada utang ama rentenir 700 ribu, dia minta di selti atas permintaan sendiri, untuk ngindarin utang, sebelumnya lapor ke Ka KPLP lalu dibuat aturannya dia melanggar jadi masuk selti...” Berita ini diberikan *buser* pada penulis sebagai bagian dari upaya mengadu agar persoalannya didengar dan bisa diselesaikan. Melihat penulis seringkali menjadi tempat pengaduan, informan **Lbi** mengingatkan penulis, kalau menjadi petugas harus banyak bergaul agar tidak membuat *kepala kamar* dan narapidana lain menjadi repot memikirkan *ngemel* saat petugas mengunjungi kamar atau blok tertentu. Berikut uraian **Lbi**:

“...Kalo pake seragam pada was-was, KM mikirin ngemel, anak-anak pada takut ketahuan botol, bungkam gak mau blak-blakan, tapi tau kalo petugas juga udah tau jadi ngomong apa adanya. Bagi napi “pemain” tinggal dalam tembok tinggi malah bagus mereka terlindungi dari sanksi sosial di masyarakat tak ketahuan perilaku kriminalnya...” (Wawancara **Lbi**, tanggal 11 Juni 2009)

Berbagai masukan dan kecurigaan sebagaimana uraian **Lbi**, penulis sikapi dengan berterus terang setiap bertemu narapidana di kamar, penulis sampaikan secara langsung bahwa penulis adalah peneliti bukan petugas meski berpakaian petugas. Telusuran lapangan ini membuat penulis mendapat kepercayaan dari sejumlah narapidana dan petugas di lapangan.

Keseluruhan uraian dalam bab ini menampilkan dan menyuguhkan bermacam situasi dan keadaan yang dialami dan dirasakan penulis selama meneliti sebagai bagian mendeskripsikan budaya penjara secara nyata dan berlangsung apa adanya di Lapas Bogor.

BAB 4

ATURAN FORMAL DAN PENGATURAN LAPAS

Dalam bab ini penulis menguraikan secara garis besar ketentuan formal dan pengertian umum Lapas, tugas pembinaan dan prosedur tetap (protap) yang berlaku serta mendeskripsikan lingkungan fisik di Lapas Bogor meliputi lokasi, ruang-ruang, struktur-organisasi, profil petugas dan profil narapidana. Uraian ini mendeskripsikan Lapas sebagai organisasi yang diatur ketentuan formal dan untuk bisa sampai dan menembus lokasi Lapas harus melewati berbagai prosedur formal yang berlaku.

4.1. Gambaran Umum Lapas

Lapas berada dibawah naungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjenpas) Departemen Hukum dan HAM. Departemen ini bertugas mengayomi masyarakat dalam bidang hukum dan hak asasi manusia. Kewenangan Departemen ini berada ditangan Pemerintah Pusat, tidak diserahkan menjadi kewenangan daerah otonomi (Dirjenpas Departemen Kehakiman & HAM, 2003: 12). Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) adalah salah satu Direktorat yang berada dibawah struktur Departemen Hukum dan HAM bersama tujuh badan lain yaitu Ditjen Peraturan Perundang-undangan (PP), Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Ditjen Imigrasi, Ditjen Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Badan Penelitian & Pengembangan Hak Asasi Manusia (Balitbang HAM). Seorang Menteri Hukum dan HAM membawahi Kantor Wilayah (Kanwil) yang ada di daerah-daerah di seluruh Indonesia dan Kepala kantor Wilayah (Kakanwil) membawahi Lapas yang ada di daerah-daerah masing-masing.

Secara normatif Ditjenpas mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pemasyarakatan. Ditjenpas melakukan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan departemen di bidang pemasyarakatan, perawatan tahanan dan pengelolaan benda sitaan negara, b. Pelaksanaan di bidang pemasyarakatan, perawatan tahanan dan pengelolaan benda sitaan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, c. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pemasyarakatan, perawatan tahanan dan pengelolaan benda sitaan negara, d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi, e. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Direktorat Jendral, f. Pemberian perijinan dan penyiapan standar teknis di bidang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan,

g. Pengamanan teknis dan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, perawatan tahanan dan pengelolaan benda sitaan negara. Selanjutnya menurut pasal 3 Undang-Undang no. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Ditjenpas berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan (WBP) agar dapat terintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI no: M.01-PR.07.03 tahun 1985 menyebutkan lembaga pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. UPT ini mempunyai fungsi:

- a. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik,
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja,
- c. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik,
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas,
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Menteri Hukum dan HAM RI No. M.09-PR.07.10 tahun 2007. Ada enam direktorat teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi pemasyarakatan yaitu:

1. Direktorat Registrasi dan Statistik
2. Direktorat Perawatan
3. Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan
4. Direktorat Latihan Kerja dan Produksi
5. Direktorat Keamanan dan Ketertiban
6. Direktorat Bina Khusus Narkotika.

Ditjen Pemasyarakatan memiliki unit pelaksana teknis (UPT) hampir di seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia, berbentuk Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan (Rutan), Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Keseluruhan lembaga pemasyarakatan di Indonesia berjumlah 209 UPT dengan perincian: Lapas Klas I = 13, Lapas Klas IIA = 90 dan Klas IIB = 106. Lapas Klas 1 berarti UPT itu berada ditingkat propinsi, klas 2 berarti UPT itu berada di tingkat kabupaten atau kota.

Untuk rumah tahanan negara (Rutan) berjumlah 193 buah di seluruh Indonesia dengan rincian Rutan Klas I = 10 UPT, Rutan Klas IIA = 10 dan Rutan Klas IIB = 115. Sedangkan cabang rutan (Cabrutan) sebanyak 58 buah. Untuk balai pemasyarakatan (Bapas) Klas I = 16, Bapas Klas II = 52. Jadi total keseluruhan unit pelaksana teknis (UPT) dibawah Ditjen Pemasyarakatan berjumlah 531 buah di seluruh Indonesia.

Klasifikasi Lapas atau pembagian Lapas dibuat berdasarkan daya muat, beban kerja dan lokasi. Lapas klas 1 di tingkat propinsi dan klas II di tingkat kabupaten/kota.

Sedangkan *spesifikasi Lapas* mencakup pembagian Lapas dengan memperhatikan kekhususan kepentingan pembinaan atau keamanan seperti Lapas Narkoba, Lapas Anak dan Lapas Wanita.

Persyaratan Lapas secara normatif paling kurang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Terletak diluar atau di pinggir kota tetapi mudah terjangkau dengan transportasi, telekomunikasi, fasilitas penerangan dan air bersih; b. Luas tanah Lapas klas I, IIA, IIB masing-masing minimal 60.000, 40.000 dan 30.000 meter persegi; c. Luas Lapas Kelas I, IIA, IIB masing-masing 19.000, 14.000, 7000 meter persegi dan terletak dibagian tengah lahan; d. Bebas atau jauh dari kemungkinan tertimpa bencana alam seperti gempa, banjir, longsor dan pembuangan limbah tidak mengotori (merusak) lingkungan; e. Sesuai tata kota dan keserasian lingkungan hidup; f. Sedapat-dapatnya dekat dengan markas kepolisian, kejaksaan dan pengadilan (Dirjenpas Departemen Kehakiman & HAM, 2003: 103-104).

4.2 Tugas Pemasarakatan & Prosedur Tetap

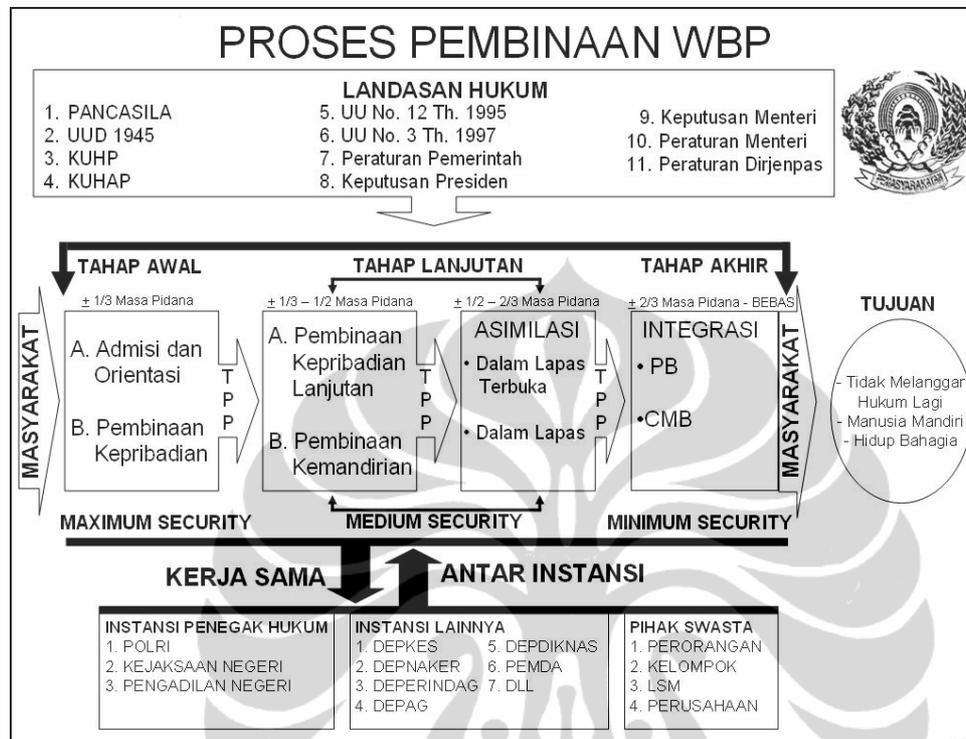
Tugas utama pemsarakatan adalah melakukan pembinaan narapidana atau warga binaan pemsarakatan (Peraturan Pemerintah RI no. 31 tahun 1999) yaitu melalui beberapa tahap yaitu tahapan awal, lanjutan dan akhir (**Diagram 4.1**).

Tahap pertama adalah tahap awal, dimulai sejak seseorang mulai berstatus narapidana sampai menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) masa pidana, meliputi masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan (mapenaling) paling lama 1 bulan. Tahap kedua adalah tahap lanjutan, terdiri dua tahap yaitu tahap lanjutan-pertama sejak berakhirnya tahap awal sampai $\frac{1}{2}$ (setengah) masa pidana, dan tahap lanjutan-kedua sejak berakhirnya tahap lanjutan-pertama sampai $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana. Tahap ketiga adalah tahap akhir, dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai berakhirnya masa pidana narapidana bersangkutan, meliputi perencanaan dan pelaksanaan program integrasi seperti PB, CMB dan Asimilasi¹ dan pengakhiran pelaksanaan pembinaan

¹ Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Asimilasi merupakan salah satu bentuk pembinaan untuk memulihkan hubungan narapidana dan anak didik pemsarakatan dengan masyarakat (integrasi), tentu selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat. Tujuannya membangkitkan motivasi atau dorongan narapidana (anak didik pemsarakatan), mempersiapkan hidup mandiri ditengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana, mendorong masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan pemsarakatan. Dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI no. M.01.PK.04-10 tahun 1999, disebutkan *PB* adalah proses pembinaan narapidana di luar Lapas yang dilaksanakan berdasarkan pasal 15 dan 16 KUHP serta pasal 14, 22 dan 19 UU no 12/1995 tentang Pemsarakatan. *CMB* adalah proses pembinaan di luar Lapas bagi narapidana yang menjalani masa pidana atau sisa masa pidana yang pendek. *Asimilasi* adalah proses pembinaan narapidana (anak didik pemsarakatan) yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana (anak didik pemsarakatan) didalam kehidupan bermasyarakat.

tahap akhir. Untuk pembinaan tahap awal dan lanjutan dilaksanakan di Lapas sedangkan pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar Lapas oleh Bapas.

Diagram 4.1 Tugas Pemasarakatan



Sumber: Arsip lapas Bogor 2009

Tugas pemsarakatan dilaksanakan petugas pemsarakatan meliputi tugas *pembina* pemsarakatan, *pembimbing* pemsarakatan dan *pengaman* pemsarakatan. Pertama, pembina pemsarakatan adalah petugas yang melakukan pembinaan secara langsung terhadap narapidana dan anak pidana (*intramural treatment*) baik dilakukan secara perorangan, kelompok atau organisasi. Kedua, pembimbing pemsarakatan adalah petugas balai pemsarakatan (Bapas) yang membimbing klien pemsarakatan di luar tembok (*ekstramural treatment*). Ketiga, pengaman pemsarakatan adalah petugas yang melaksanakan pengamanan dalam kegiatan pembinaan (Menteri Kehakiman RI, 1990: 55).

Secara khusus tugas pembinaan Lapas² meliputi dua bidang utama: Bidang pertama, *pembinaan kepribadian* mencakup pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa & bernegara, pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) dan pembinaan kesadaran hukum. Bidang kedua, *pembinaan kemandirian* mencakup

² Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemsarakatan 6 Bidang Pembinaan, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jendral Pemsarakatan, Jakarta, 2000, hal. 67- 69.

pemberian program-program seperti ketrampilan mendukung usaha-usaha mandiri (kerajinan, industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika), ketrampilan mendukung usaha-usaha industri kecil (membuat perabot rumah tangga, pengelolaan makanan ringan, pembuatan batu-bata), ketrampilan sesuai bakat masing-masing (seni, olah raga), ketrampilan mendukung industri atau pertanian dengan teknologi madya/tinggi (kulit, sepatu, tekstil). Pembinaan narapidana ini disesuaikan *Standar Minimum Rules (SMR)*³ yang tercermin dalam sepuluh prinsip pemasyarakatan.⁴

Peraturan ketat dan kaku merupakan mekanisme dan tatacara yang diterapkan dalam Lapas. Peraturan ketat dan kaku ini disebut prosedur tetap (protap) ditetapkan oleh Dirjenpas Departemen Hukum & HAM, dan diberlakukan dalam semua Lapas di Indonesia. Prosedur tetap merupakan bagian tak terpisahkan dari tugas pemasyarakatan (Departemen Hukum & HAM, 2003: 1-117). Setiap bagian/seksi kerja dalam Lapas mempunyai protap kerja masing-masing. Salah satunya prosedur tentang tidak sembarang orang bisa keluar-masuk bangunan Lapas dengan bebas, harus mengikuti protap yang tersedia baik bagi petugas atau sipir, narapidana, pengunjung serta keluarga narapidana. Berlaku juga beberapa prosedur tetap (protap) yang dipergunakan dan dipakai terkait dengan tugas pemasyarakatan mencakup antara lain protap kunjungan narapidana; protap penerimaan, pendaftaran & penempatan napi/andika; protap penyimpanan & penggunaan uang napi/andika; protap pelaksanaan mapenaling; protap

³ Peraturan-peraturan standar bagi perlakuan terhadap narapidana (*standar minimum rules for the treatment of prisoners*) disepakati Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa pertama mengenai pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap para Pelanggar. Diselenggarakan di Jenewa pada tahun 1955, dan disetujui Dewan Ekonomi dan Sosial dengan Resolusi 663 C (XXIV) 31 Juli 1957 dan Resolusi 2067 (LXII) 13 Mei 1977. SMR berisi peraturan-peraturan umum seperti akomodasi, kebersihan pribadi, pakaian dan tempat tidur, makanan, latihan olah raga, pelayanan kesehatan, disiplin dan hukuman, serta peraturan-peraturan khusus seperti perlakuan, hak-hak istimewa, pekerjaan, dan seterusnya.

⁴ 10 Prinsip Pemasyarakatan yaitu 1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna, 2. Penjatuh pidana tidak lagi didasarkan oleh latar belakang pembalasan. Maksudnya tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik, baik berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan maupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas. 3. Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) supaya mereka bertobat. 4. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Maksudnya agar tidak mencampur-baurkan narapidana dengan anak didik yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan. 5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan hiburan ke Lapas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya. 6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu. 7. Pembinaan dan pembimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila. 8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya, kemudian dibina/dibimbing ke jalan yang benar. 9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu. 10. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik maka disediakan sarana yang diperlukan.

pembukaan dan penutupan kamar napi/andika; protap tindakan disiplin; protap hukuman disiplin; dan protap penanggulangan gangguan kamtib.

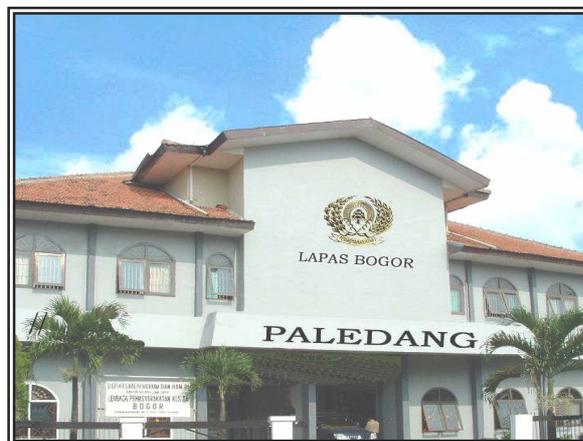
4.3. Pengaturan Lapas Bogor

Lapas Bogor termasuk unit pelaksana teknis (UPT) klas IIA yang terletak di kota Bogor, secara formal berada dibawah naungan Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Barat, didirikan tahun 1906. Semula bernama Rumah Penjara. Pada tahun 1964 dengan diberlakukan sistim pemasyarakatan dipelopori Dr Saharjo, Menteri Kehakiman waktu itu, maka Rumah Penjara Bogor berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Bogor, dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01.-PR.07.03 tahun 1985 tentang organisasi dan tata kerja Lapas, berubah nomenklatur menjadi Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bogor.

4.3.1. Ruang-Ruang Lapas

Kondisi bangunan Lapas kelas IIA Bogor telah beberapa kali mengalami rehabilitasi (perbaikan) namun masih diwarnai tata ruangan rumah penjara yang menitikberatkan pada masalah keamanan dan penjeraan terpidana. Renovasi lanjut bangunan Lembaga Pemasyarakatan Bogor berikut disesuaikan dengan SK Menteri Kehakiman RI No. M.01.PL.01.01 tanggal 11 april 1985 tentang pola bangunan Lapas yang berorientasi pada keamanan dan pembinaan narapidana. Terkait hal ini bangunan Lapas Bogor mengalami beberapa kali perbaikan lanjutan, antara lain tahun 1973 berupa rehabilitasi lantai, plesteran dinding kamar-kamar tahanan blok A, B, C, D & lantai ruang kantor (**Foto 4.1**).

Foto 4.1
Lapas Paledang Bogor



Sumber: Arsip lapas Bogor 2009

Pada tahun 1980 dibangun beberapa gedung atau sarana tambahan seperti gedung aula, ruang serba-guna, sarana olah raga, kesenian, ruang pertemuan dan sarana peribadatan. Tahun 1981 renovasi terus berlangsung, ruang kantor dibuat bernuansa bangunan biasa agar tidak menggambarkan rumah penjara. Tahun 1994 dilakukan lagi rehabilitasi bangunan kantor dan perluasan lantai dua, atap dan bangunan blok A, B, C, D.

Secara keseluruhan bangunan fisik Lapas Bogor terdiri dari: Pertama, bangunan kantor pada lantai bawah dan atas yaitu ruang untuk kegiatan administrasi perkantoran mencakup tiga puluh dua ruangan. Kedua, bangunan blok A, B, C, D untuk kamar tidur tahanan dan narapidana berkapasitas hunian sebanyak 500 orang, mencakup blok A = 18 kamar, blok B = 6 kamar, blok C = 6 kamar dan blok D = 9 kamar (**Foto 4.2**). Ketiga, bangunan kegiatan kerja & pembinaan narapidana bidang ketrampilan, meliputi 3 ruang aktivitas dan 1 dapur. Keempat, bangunan aula/ruang serbaguna untuk kegiatan olah raga, kesenian, pertemuan, peribadatan dan lain-lain.

Foto 4.2
Batas Blok & Kantor



Sumber: Data Penulis

4.3.2. Lokasi & Struktur Organisasi

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bogor terletak di tengah-tengah Kota Bogor yaitu persisnya di Jalan Paledang No.2 Bogor (**Foto 4.3**). Sebelah utara menghadap Jalan Kapten Muslihat, sebelah timur menghadap Jalan Paledang, sebelah barat menghadap sungai dan sebelah timur menghadap pemukiman. Lapas Bogor lebih dikenal dengan sebutan Lapas Paledang, dibangun pada masa pemerintahan Belanda tahun 1806 dengan areal tanah yang relatif sempit yaitu 8.185 M². Luas bangunan

seluruhnya 2629,556 M². Luas kamar narapidana/tahanan dalam blok A, B, C, D sebesar 975,631 M² dengan rincian luas bangunan blok A = 257,175 M², blok B = 296,80 M², blok C = 157,256 M² dan blok D = 264,60 M². Lapas Bogor saat ini berfungsi selain sebagai tempat pembinaan narapidana juga sebagai tempat penitipan tahanan (rumah tahanan) dari beberapa wilayah hukum Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Kota Depok.

Foto 4.3.
LP Paledang Di Kota Bogor

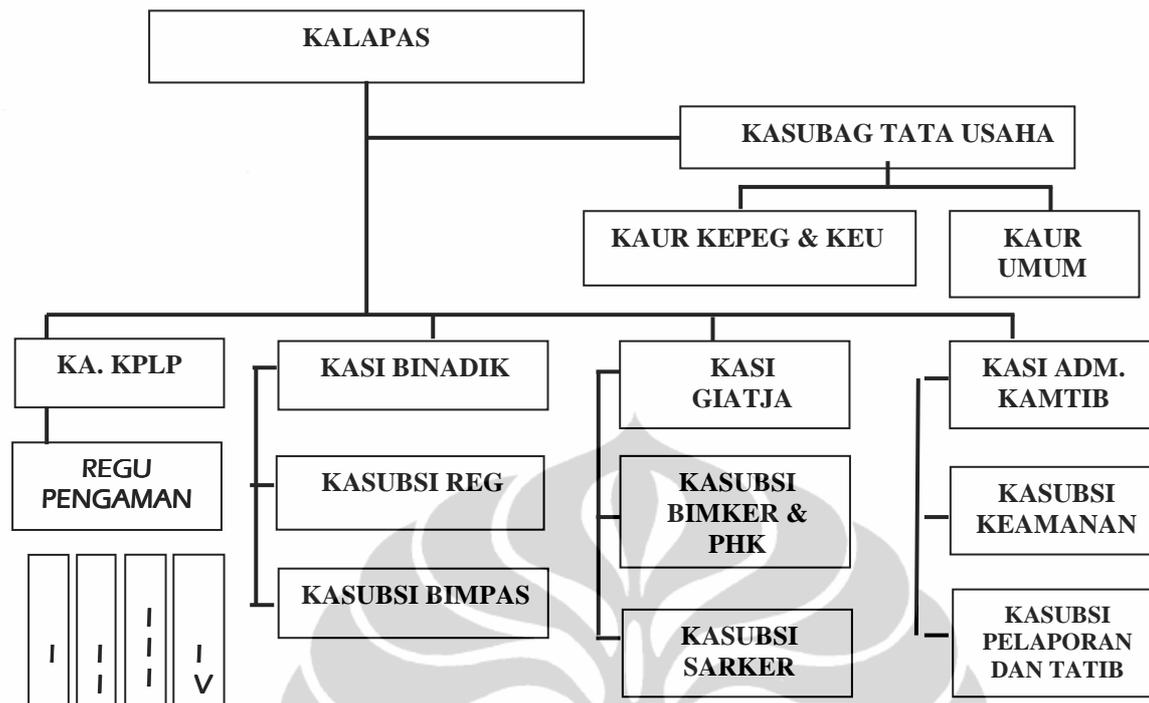


Sumber: Data Penulis

Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bogor (**Diagram 4.2**) dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga, dan dibantu lima orang Kepala Seksi yaitu 1. Kepala sub bagian tata usaha (TU). 2. Kepala seksi bimbingan narapidana/anak didik (Binadik). 3. Kepala seksi kegiatan kerja (Giatja). 4. Kepala seksi administrasi keamanan & tata tertib (Kamtib). 5. Kepala kesatuan pengamanan lembaga pemasyarakatan (KPLP).

Adapun visi Lapas Bogor yaitu memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan & penghidupan warga binaan pemasyarakatan (WBP) sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat & makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Misi Lapas Bogor melaksanakan pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP) dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Sedangkan motto Lapas Bogor adalah *Cermat–Tertib–Tanpa Keluhan* (Laporan Tahunan Lapas Bogor, 2009).

Diagram 4.2. Struktur Organisasi Lapas



Sumber: Arsip lapas Bogor 2009

Secara normatif tugas utama Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor (Kalapas) yaitu mengkoordinasikan pembinaan kegiatan kerja, administrasi keamanan & tata tertib, pengelolaan tata usaha (kepegawaian, keuangan, rumah tangga), melakukan pembinaan dan pengamanan Lapas serta mengkoordinasikan tugas lain yang diberikan oleh Kakanwil. Kalapas membawahi kepala-kepala seksi yaitu Binadik, Giatja dan Administrasi-Kamtib dan KPLP. Adapun Seksi Binadik, Giatja dan Administrasi-Kamtib menempati ruangan di ruang perkantoran Lapas, dibatasi pagar kawat dengan area blok narapidana (**Foto 4.2**). Sedangkan ruang KPLP berada dalam area blok A, B, C, D dan tepat disamping ruang kamar-kamar narapidana. Ruang KPLP ini diposisikan mengawasi dan memonitor semua kegiatan narapidana yang ada di blok dan kamar. Tugas Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) adalah mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penjagaan sesuai jadwal jaga, mengawasi pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawasan terhadap narapidana/anak didik, lalu mengawasi penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana, serta melakukan pemeriksaan pelanggaran keamanan dan ketertiban.

Setiap kegiatan dalam Lapas termasuk aktivitas apapun yang memasuki area blok dan kamar narapidana harus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kalapas serta Kepala KPLP karena tugas mereka mengatur masuk-keluar orang atau pergerakan

narapidana dalam Lapas. Setiap ruang dalam Lapas terdapat aturan normatif, sebagai contoh di ruang kunjungan tidak boleh membawa *handphone*, memberikan uang kepada petugas, memotret, membawa barang terlarang dan dilarang, berkunjung sesuai waktu yang ditentukan. Meskipun pelaksanaannya seringkali berbeda, penulis melihat aturan normatif hanya menjadi "*hiasan*" atau berlaku untuk "*orang baru*" saja. Bagi "*orang lama*" tidak berlaku. Kesepakatan-kesepakatan informal lebih mendominasi aktivitas yang berlangsung diantara narapidana dan petugas saat menggunakan ruang-ruang dalam Lapas.

Selama penelitian di lapangan, penulis secara spesifik menelusuri beberapa ruang yang menjadi arena kesepakatan informal diantara sesama narapidana maupun petugas. Kesepakatan informal ini mencakup tempat kunjungan serta area blok dan kamar narapidana. Pada kesempatan ini penulis terlebih dahulu menguraikan profil petugas dan narapidana di Lapas Bogor meliputi identitas, jenis kejahatan, asal wilayah hukum maupun jumlah penghuni blok dan kamar. Sedang deskripsi lebih jauh tentang kesepakatan informal diuraikan dalam bab berikut.

4.3.3. Profil Petugas & Narapidana

Berdasarkan Laporan Kepegawaian (tahun 2009), selama tahun 2008 jumlah pegawai Lapas Bogor berjumlah 137 orang, dengan rincian pegawai laki-laki 104 orang dan pegawai perempuan 33 orang. Rata-rata pegawai hampir 50% berpangkat penata muda (IIIA) dan penata muda tingkat I (IIIB). Usia pegawai berada antara 40-50 tahun (**Tabel 4.1**).

Tabel 4.1 Jumlah Pegawai & Kepangkatan

| NO. | PANGKAT/GOL.RUANG | JENIS KELAMIN | | TOTAL |
|-----|------------------------------|---------------|--------|-------|
| | | PRIA | WANITA | |
| 1. | JURU MUDA (I/a) | - | - | - |
| 2. | JURU MUDA Tk.I (I/b) | - | - | - |
| 3. | JURU (I/c) | - | - | - |
| 4. | JURU Tk.I (I/d) | - | - | - |
| 5. | PENGATUR MUDA (II/a) | 10 | - | 10 |
| 6. | PENGATUR MUDA Tk.I (II/b) | 2 | 1 | 3 |
| 7. | PENGATUR (II/c) | 8 | 3 | 11 |
| 8. | PENGATUR Tk.I (II/d) | 11 | 3 | 14 |
| 9. | PENATA MUDA (III/a) | 14 | 9 | 23 |
| 10. | PENATA MUDA Tk.I (III/b) | 44 | 10 | 54 |
| 11. | PENATA (III/c) | 11 | 4 | 15 |
| 12. | PENATA Tk.I (III/d) | 3 | 3 | 6 |
| 13. | PEMBINA (IV/a) | - | - | - |
| 14. | PEMBINA Tk.I (IV/b) | 1 | - | 1 |
| 15. | PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c) | - | - | - |
| 16. | PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d) | - | - | - |
| 17. | PEMBINA UTAMA (IV/e) | - | - | - |
| | JUMLAH | 104 | 33 | 137 |

Sumber : Arsip Lapas Bogor 2009

Tingkat pendidikan sebagian besar pegawai Lapas Bogor berpendidikan SLTA/SMK, hanya sebagian berpendidikan strata satu (S1) = 15 orang dan sebagian kecil strata dua (S2) = 6 orang, sebagaimana dirunjukkan dalam tabel dibawah ini (Tabel 4.2.).

Tabel 4.2. Tingkat Pendidikan

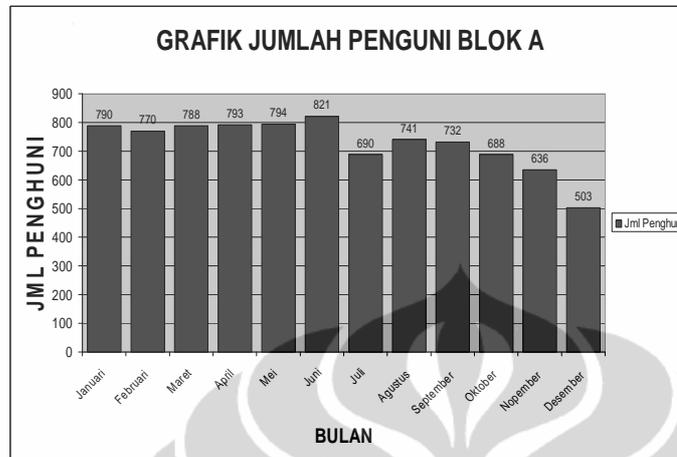
| NO. | PENDIDIKAN | JENIS KELAMIN | | TOTAL |
|-----|----------------------|---------------|--------|-------|
| | | PRIA | WANITA | |
| 1. | SD | 6 | - | 6 |
| 2. | SMP/SLTP | 6 | - | 6 |
| 3. | SLTA/SMK | 70 | 19 | 89 |
| 4. | D-III/AKADEMI | 9 | 6 | 15 |
| 5. | STRATA SATU (S1) | 9 | 6 | 15 |
| 6. | PASCA SARJANA (S2) | 4 | 2 | 6 |
| 7. | PASCA SARJANA (S3) | - | - | - |
| | JUMLAH | 104 | 33 | 137 |

Sumber: Arsip Lapas Bogor 2009

Adapun jumlah blok dalam Lapas Bogor adalah sebanyak lima blok, mencakup blok A, B, C, D dan blok wanita (BW). Di blok A (tahun 2008) dihuni oleh mereka

yang berstatus tahanan. Jumlah tahanan rata-rata per bulan sebesar 729 tahanan per tahun (**Tabel 4.3**).⁵

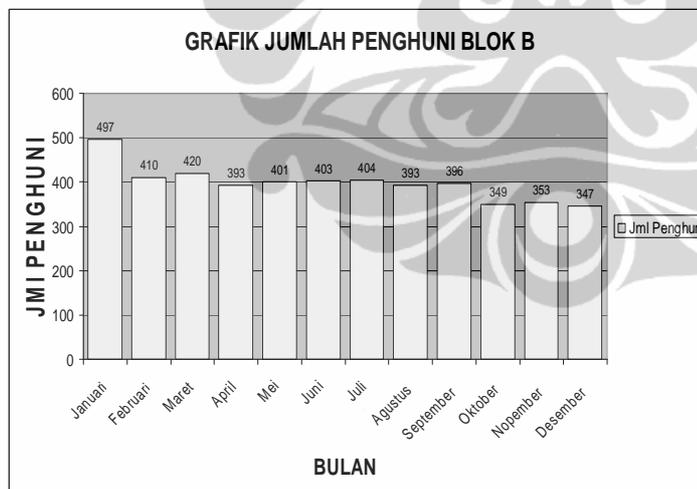
Tabel 4.3. Tahanan Blok A



Sumber: Arsip Lapas Bogor 2009

Berikutnya di blok B berisi hunian narapidana, dengan jumlah rata-rata narapidana per bulan selama 2008 adalah 398 narapidana (**Tabel 4.4**).⁶

Tabel 4.4. Jumlah Penghuni Blok B



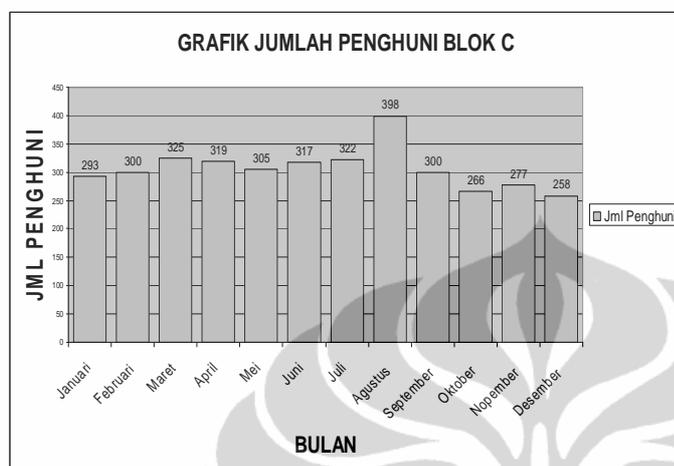
Sumber: Arsip Lapas Bogor 2009

⁵ Bulan januari berjumlah 790 penghuni, pebruari = 770 penghuni, maret = 788 penghuni, april = 793 penghuni, mei = 794 penghuni, juni = 821 penghuni, juli = 690 penghuni, agustus = 741 penghuni, september = 732 penghuni, oktober = 688 penghuni, november = 636 penghuni dan desember = 503 penghuni

⁶ Bulan januari berjumlah 497 penghuni, pebruari = 410 penghuni, maret = 420 penghuni, april = 393 penghuni, mei = 401 penghuni, juni = 403 penghuni, juli = 404 penghuni, agustus = 393 penghuni, september = 396 penghuni, oktober = 349 penghuni, november = 353 dan desember = 347 penghuni.

Selanjutnya Blok C dikenal dengan blok narapidana. Jumlah rata-rata narapidana per bulan selama 2008 adalah 307 narapidana (Tabel 4.5)⁷.

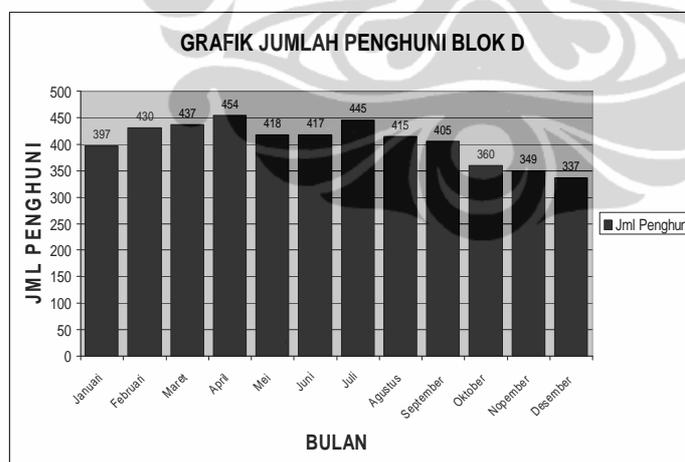
Tabel 4.5. Jumlah Penghuni Blok C



Sumber: Arsip Lapas Bogor 2009

Adapun Blok D, jumlah rata-rata narapidana per bulan selama 2008 adalah 405 narapidana (Tabel 4.6).⁸

Tabel 4.6. Jumlah Penghuni Blok D



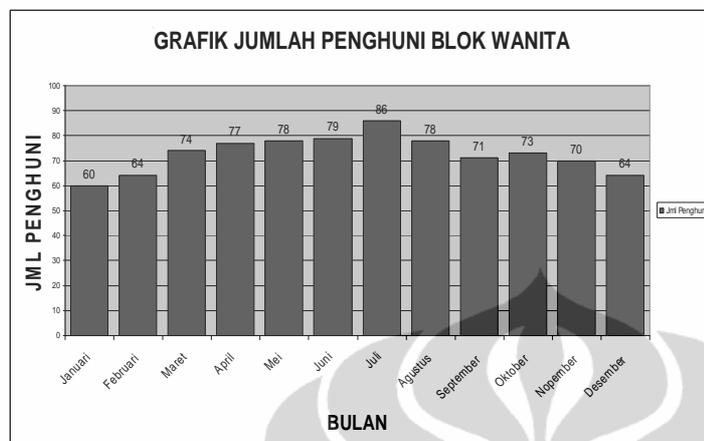
Sumber: Arsip Lapas Bogor 2009

⁷ Bulan januari berjumlah 293 penghuni, pebruari = 300 penghuni, maret = 325 penghuni, april = 319 penghuni, mei = 305 penghuni, juni = 317 penghuni, juli = 322 penghuni, agustus = 398 penghuni, september = 300 penghuni, oktober = 266 penghuni, november = 277 dan desember = 258 penghuni.

⁸ Dengan perincian bulan januari berjumlah 397 penghuni, pebruari = 430 penghuni, maret = 437 penghuni, april = 454 penghuni, mei = 418 penghuni, juni = 417 penghuni, juli = 445 penghuni, agustus = 415 penghuni, september = 405 penghuni, oktober = 360 penghuni, november = 349 dan desember = 337 penghuni.

Berikutnya blok Wanita dikenal dengan blok BW. Jumlah rata-rata penghuni per bulan (narapidana/tahanan) adalah 73 penghuni (**Tabel 4.7**)⁹.

Tabel 4.7. Jumlah Penghuni Blok Wanita



Sumber: Arsip Lapas Bogor 2009

Secara sederhana tabel-tabel ini memberi gambaran keadaan narapidana dan tahanan Lapas Bogor berdasarkan jumlah blok dalam Lapas. Perbandingan jumlah petugas dan napi/tahanan dalam Lapas Bogor (tahun 2008) dapat diuraikan sebagai berikut: jumlah petugas secara keseluruhan 137 orang, umumnya berpendidikan SMA. Mereka harus mengelola dan mengurus 1912 tahanan/narapidana yang berasal dari wilayah hukum Bogor, Cibinong dan Depok. Perbandingan petugas dan napi adalah 1: 14 (satu banding empat belas).

Tapi saat pengamatan di lapangan, petugas yang ada dalam blok hanya bidang keamanan (KPLP) saja dengan jumlah personil sekitar lima puluh orang terbagi atas empat regu pengamanan, sehingga perbandingan petugas dan napi menjadi 1:38 (satu banding tiga puluh delapan). Bila diteliti lagi per blok, maka blok A yang berpenghuni 729 tahanan hanya dijaga oleh seorang petugas (wali blok A), blok B berpenghuni 398 narapidana hanya dijaga seorang petugas (wali blok B), blok C berpenghuni 307 hanya diawasi satu petugas (wali blok C), blok D berpenghuni 405 narapidana hanya diawasi satu petugas (wali blok D) dan blok BW berpenghuni 73 narapidana hanya dijaga satu petugas (wali blok BW). Para wali blok menjaga bergantian sepanjang hari. Wali blok dibantu sepuluh orang regu pengamanan berpatroli yang mengelilingi Lapas setiap hari, terbagi atas tiga shift waktu. Secara praktis dalam keseharian mulai dari pagi, siang dan

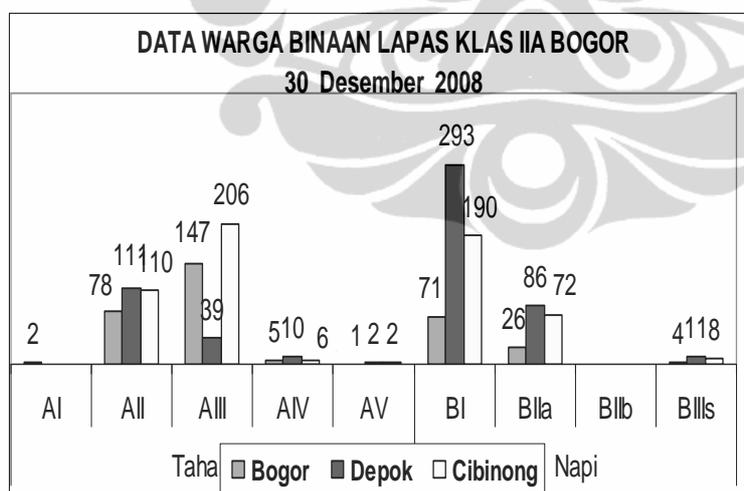
⁹ Bulan januari berjumlah 60 penghuni, pebruari = 64 penghuni, maret = 74 penghuni, april = 77 penghuni, mei = 78 penghuni, juni = 79 penghuni, juli = 86 penghuni, agustus = 78 penghuni, september = 71 penghuni, oktober = 73 penghuni, november = 70 penghuni dan desember = 64 penghuni.

malam, tiap blok hanya dijaga satu petugas dibantu sepuluh orang regu pengamanan yang berada di pos jaga bukan di blok narapidana. Keadaan ini menggambarkan bagaimana minimnya petugas yang berjaga dan mengawasi dalam blok, sehingga memungkinkan peranan napi untuk diikutsertakan membantu petugas.

Selanjutnya telaah kategori narapidana/tahanan dapat ditelusuri berdasarkan wilayah hukum dan status, jenis kejahatan, napi meninggal, dan kategori narapidana bebas, sebagai berikut:

Jumlah tahanan Lapas Bogor berdasarkan wilayah hukum (per 30 desember 2008). Berjumlah 1480 penghuni (**Tabel 4.8**), dengan perincian status sebagai berikut: tahanan kepolisian (A1) = 2 orang¹⁰; status tahanan kejaksaan (A2) = 299 orang¹¹, status tahanan pengadilan (A3) = 392 orang¹², status tahanan pengadilan tinggi (AIV) = 21 orang¹³, status tahanan mahkamah agung (AV) = 5 orang¹⁴. Sedang rincian status narapidana (**Tabel 4.8**) sebagai berikut: status narapidana masa pidana diatas satu tahun (B1) = 559 orang¹⁵, status narapidana masa pidana dibawah satu tahun, antara tiga bulan sampai satu tahun (BIIa) = 184 orang¹⁶, status narapidana masa pidana dibawah satu tahun, antara nol sampai tiga bulan (BIIb) = 0 orang; status narapidana masa pidana kurungan & membayar denda (BIII) = 23 orang¹⁷

Tabel 4.8.
Jumlah Penghuni Berdasar Wilayah Hukum



Sumber: Arsip Lapas Bogor 2009

¹⁰ Semua dari wilayah Bogor

¹¹ 78 dari wilayah Bogor, 111 dari wilayah Depok, 110 dari wilayah Cibinong

¹² 147 dari wilayah Bogor, 39 dari wilayah Depok dan 206 dari wilayah Cibinong

¹³ 5 dari wilayah Bogor, 10 dari wilayah Depok, 6 dari wilayah Cibinong

¹⁴ 1 dari wilayah Bogor, 2 dari wilayah Depok, 2 dari wilayah Cibinong

¹⁵ 71 dari wilayah Bogor, 293 dari wilayah Depok, 190 dari wilayah Cibinong

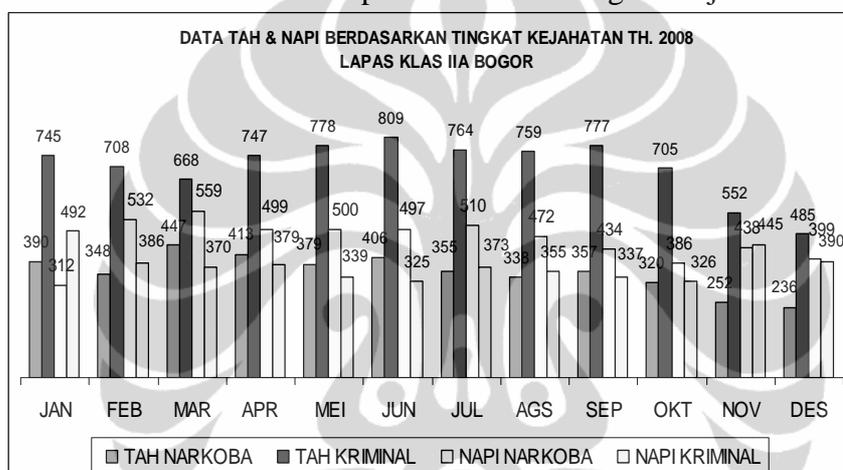
¹⁶ 26 dari wilayah Bogor, 86 dari wilayah Depok, 72 dari wilayah Cibinong

¹⁷ 4 dari wilayah Bogor, 11 dari wilayah Depok dan 8 dari wilayah Cibinong

Tabel 4.8 memperlihatkan jumlah tahanan dan narapidana dalam Lapas Bogor hampir berimbang, jumlah tahanan = 719 orang sedangkan narapidana = 766 orang, dengan prosentase terbesar kiriman dari wilayah Depok.

Selanjutnya kategori jumlah penghuni berdasarkan tingkat kejahatan (**Tabel 4.9**). Rata-rata jumlah tahanan narkoba = 348 orang per bulan¹⁸, begitu pula narapidana narkoba rata-rata = 373 orang per bulan¹⁹. Sedang untuk rata-rata jumlah tahanan jenis kriminal = 708 orang per bulan,²⁰ begitu pula jumlah rata-rata narapidana jenis kriminal = 339 orang per bulan²¹.

Tabel 4.9. Tahanan & Napi Berdasarkan Tingkat Kejahatan



Sumber: Arsip Lapas Bogor 2009

Tabel 4.9 memperlihatkan napi Lapas Bogor hampir 65 % adalah tahanan/napi narkoba, sedangkan sisanya adalah tahanan/napi kriminal lain. Tingginya jumlah penghuni narkoba mempengaruhi keadaan blok dalam Lapas secara keseluruhan.

Berikut adalah jumlah narapidana yang meninggal di Lapas selama tahun 2008. Berjumlah 13 orang dan jumlah tahanan yang meninggal = 8 orang. Secara keseluruhan ada 21 warga Binaan Lapas Klas IIA Bogor yang meninggal dunia (**Tabel 4.10**).

¹⁸ Bulan januari berjumlah 391 orang, februari =348 orang, maret=386 orang, april=413 orang, mei=375 orang, juni=406 orang, juli=355 orang, agustus=336 orang, september=355 orang, oktober=321 orang, november=252 orang dan desember=236 orang.

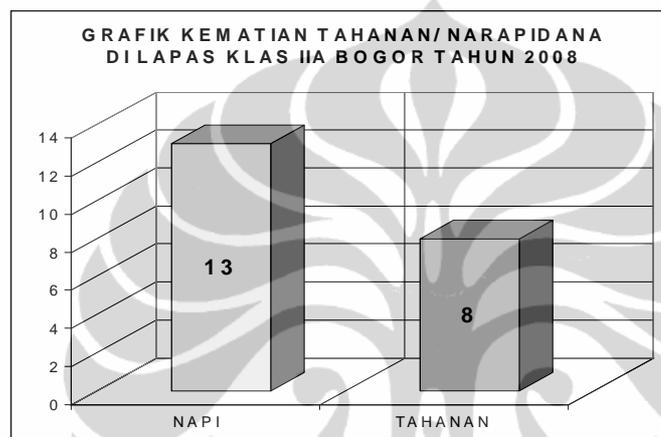
¹⁹Bulan januari berjumlah 312 orang, februari=532 orang, maret=559 orang, april=499 orang, mei=500 orang, juni=497 orang, juli=510 orang, agustus=472 orang, september=434 orang, oktober=386 orang, november=438 orang dan desember=399 orang.

²⁰ Selama bulan Januari berjumlah 745 orang, Februari=708 orang, Maret=668 orang, April=747 orang, Mei=778 orang, Juni=809 orang, Juli=764 orang, Agustus=759 orang, September=777 orang, Oktober=705 orang, November=552 orang dan Desember=485 orang.

²¹ Selama bulan januari berjumlah 492 orang, Februari=386 orang, Maret=370 orang, April=379 orang, Mei=339 orang, Juni=325 orang, Juli=373 orang, Agustus=355 orang, September=337 orang, Oktober=326 orang, November=445 orang dan Desember=390 orang.

Adapun penyebab kematian tersebut adalah akibat penyakit ODHA (HIV/AIDS)= 7 orang (33,5 %), penyakit tuberkulosis (TBC) = 4 orang (19 %), jantung = 2 orang (9,5 %), dan lain-lain = 8 orang (38 %). Berdasarkan data ini, napi yang meninggal di Lapas umumnya dikarenakan sakit. Kasus terbanyak akibat penyakit kekebalan tubuh, paru-paru dan jantung. Penyakit-penyakit ini memperlihatkan kondisi kesehatan Lapas yang memprihatinkan, penuh sesak, kurang ventilasi, lembab sehingga mudah terjadi penularan penyakit.

Tabel 4.10 Kematian Tahanan/Narapidana



Sumber: Arsip Lapas Bogor 2009

Tabel 4.10 menunjukkan persoalan kesehatan masih menjadi kendala dalam pengelolaan Lapas. Selanjutnya kategori napi berdasarkan jumlah yang bebas. Dapat diuraikan sebagai berikut: Penghuni yang bebas di Lapas Bogor (**Tabel 4.11**), umumnya ditempuh dengan cara bebas murni (BM), pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB),²² cuti bersyarat (CB) dan bebas demi hukum (BDH). Rata-rata narapidana yang bebas dengan cara BM = 121 orang per bulan (tahun 2008).²³ Rata-rata yang bebas dengan cara PB = 38 orang per bulan²⁴. Rata-rata yang bebas dengan cara CMB = 1 orang per bulan²⁵. Rata-rata yang bebas dengan cara CB = 29 orang per

²² Cuti yang diberikan setelah narapidana menjalani lebih dari 2/3 masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 bulan (pasal 14 UU no. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

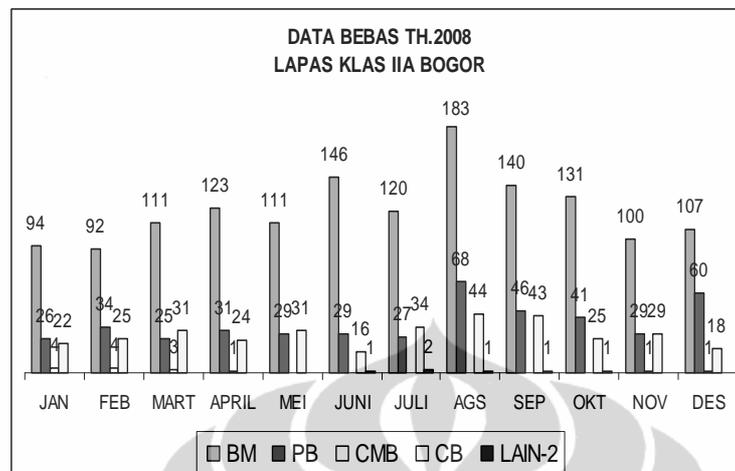
²³ Bulan Januari berjumlah 94 orang, februari = 92 orang, maret = 111 orang, april = 123 orang, mei = 111 orang, juni = 146 orang, juli = 120 orang, agustus = 183 orang, september = 140 orang, oktober = 131 orang, November = 100 orang dan Desember = 107 orang.

²⁴ Bulan Januari = 26 orang, februari = 34 orang, maret = 25 orang, april = 31 orang, mei = 29 orang, juni = 29 orang, juli = 27 orang, agustus = 68 orang, september = 46 orang, oktober = 41 orang, november = 29 orang dan desember = 60 orang.

²⁵ Bulan Januari berjumlah 4 orang, Februari=4 orang, Maret=3 orang dan April=1 orang.

bulan.²⁶ Rata-rata yang bebas dengan cara lain-lain atau bebas demi hukum (BDH) = 0,6 orang per bulan.²⁷

Tabel 4.11. Jumlah Penghuni Bebas



Sumber: Arsip Lapas Bogor 2009

Tabel 4.11 memperlihatkan jumlah penghuni yang bebas (tahun 2008), ada 189 narapidana yang bebas melalui berbagai program (BM, PB, CMB, CB). Artinya dibanding tahanan/napi yang masuk pada tahun itu juga, diperoleh bandingan 1: 10 (satu banding sepuluh) antara napi yang bebas dan yang masuk. Keadaan ini turut menyumbang kondisi overkapasitas dalam Lapas Bogor.

4.3.4. Struktur Bangunan Lapas

Lapas Bogor terdiri dari struktur bangunan luar dan dalam. Struktur luar Lapas di sebelah timur terdiri dari lahan parkir, pintu portir, kantin, pendaftaran besukan dan ruang kunjungan. Sebelah utara terdiri dari area steam mobil/motor, kantor kegiatan kerja dan bengkel kerja. Sebelah barat terdiri dari kolam ikan, kebun dan saung kebun. Sebelah selatan terdiri dari pemukiman dan perumahan pegawai Lapas.

Adapun struktur dalam Lapas (**Gambar 4.1**) terdiri dari ruang perkantoran lantai bawah dan atas, klinik, laboratorium (klinik), dapur, kamar narapidana, blok B, blok C, blok D, kamar tahanan blok A, kamar blok wanita, aula, lapangan olahraga blok A, lapangan olahraga blok B, ruang KPLP, pos wali blok A, pos wali B, pos wali C, pos

²⁶ Bulan Januari=22 orang, Februari=25 orang, Maret=31 orang, April=24 orang, Mei=31, Juni=16 orang, Juli=34 orang, Agustus=44 orang, September=43 orang, Oktober=25 orang, November=29 orang, Desember=18 orang..

²⁷ Bulan Juni berjumlah 1 orang, Juli=2 orang, Agustus=1 orang, September=1 orang, Oktober=1 orang, November=1 orang dan Desember=1 orang.

wali D, pos jaga satu, pos jaga dua, pos jaga tiga, pos jaga empat, kantin Elpale, kamar mandi umum blok A, kamar mandi umum blok B/C dan kamar mandi umum Blok D, perpustakaan serta bengkel elektronik. Struktur dalam Lapas Bogor dikelilingi tembok tinggi \pm tiga meter (*berwarna merah*) dan mempunyai satu pintu masuk (pintu portir). Setelah melewati pintu portir ada ruang regu pengamanan (rupam) yang bertugas mengawasi keluar masuk narapidana/tahanan.

Sedangkan bangunan depan Lapas adalah Ruang perkantoran, terbagi dua lantai yaitu lantai satu (*garis merah muda*) terdiri dari ruang kerja bagian registrasi, ruang perawatan/poliklinik, ruang dokter, ruang kalapas, ruang karupam, ruang kasi binadik, ruang bagian bimbingan & perawatan masyarakat (bimpas) serta dapur.

Lantai dua (*garis warna kuning*) terdiri dari ruang kebaktian (aula atas), ruang kasubsidi sarana kerja dan bimbingan kerja, ruang staf subsidi keamanan & tatib, ruang kasi administratif kamtib, ruang bengkel kerja tas, ruang kasi giatja, ruang kasubbag tata usaha, ruang kepala urusan kepegawaian & keuangan serta ruang kepala urusan umum.

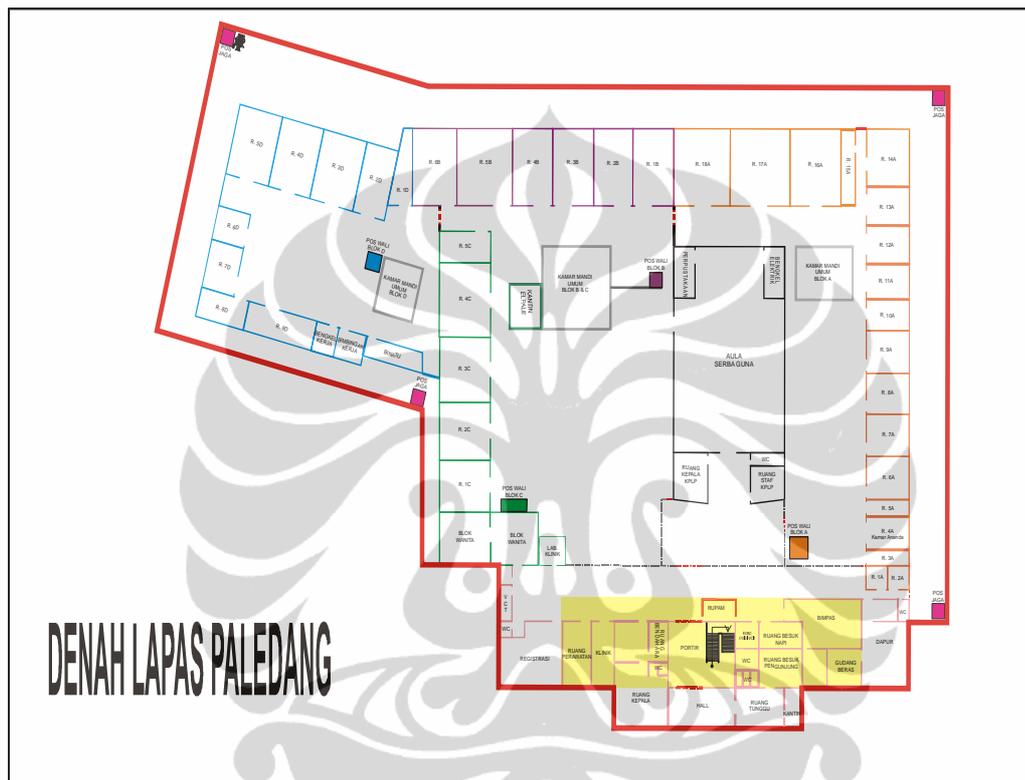
Ruang perkantoran dan blok tempat narapidana/tahanan dibatasi pagar kawat setinggi \pm tiga meter (*garis putus hitam*), ditengahnya ada pintu masuk (*garis merah putus*) berukuran lebar satu setengah meter & tinggi tiga meter. Setelah melewati pintu masuk ini, ada ruang Kepala KPLP & staf, didepannya taman dan tempat duduk untuk mengawasi narapidana/ tahanan. Dari area ini, ada dua pintu masuk (*garis merah putus*) selebar satu setengah meter & tinggi dua meter serta pagar kawat setinggi tiga meter membatasi ruang blok dengan ruang perkantoran. Pintu masuk pertama untuk ke blok A (*garis merah tipis*), mengarah ke tempat kamar tahanan, dan pintu masuk kedua ke ke blok B/C, selanjutnya ke tempat kamar narapidana.

Disamping itu, ada pintu lain (*garis hitam*) yang dipergunakan untuk memasuki aula/ruang serba guna yang dapat tembus ke area blok B dan C. Bila memasuki blok A, akan melewati pos wali (*kotak jingga*), lapangan olahraga, ke arah kamar-kamar tahanan (*garis panjang merah*). Bila memasuki blok B (*garis ungu*) akan melewati lapangan olahraga, pos wali blok B (*kotak ungu*), ke arah kamar-kamar narapidana (*garis panjang ungu*).

Bila hendak memasuki blok C (*hijau*) akan melewati lapangan olahraga, pos wali blok C (*garis kotak hijau*), lalu mengarah ke kamar-kamar narapidana (*garis panjang hijau*). Sedang untuk memasuki blok D (*garis biru*) harus melewati jalur blok B atau C dahulu, setelah itu ada pintu masuk (*garis merah pendek*) melewati pos wali D (kotak biru) ke arah kamar-kamar narapidana (*garis biru panjang*).

Antara blok A (tahanan) dan blok B (narapidana) dibatasi pintu selebar satu setengah meter, tinggi dua meter (*garis merah putus*). Untuk Blok wanita (*garis hijau*) meskipun terletak di area blok C, tapi pintu masuk dekat dengan ruang perkantoran, agar tidak bercampur dengan penghuni laki-laki di blok A, B, C, D. Pada tiap sudut blok diawasi oleh empat pos jaga berbentuk bangunan yang terletak di atas (*kotak pink*).

Gambar 4.1. Denah Lapis Bogor



Sumber: Arsip Lapis Bogor 2009

Gambar 4.1 memperlihatkan Blok A terdiri dari delapan belas kamar, (*garis merah tipis*) yang diberi kode kamar 1A – 18 A, dengan peruntukan kamar 1A – 2A adalah tempat sel pengasingan, kamar 3A untuk korve (tamping), kamar 4A untuk anak didik pemsyarakatan (anak pidana), kamar 5A – 14A untuk tahanan, kamar 15A untuk tahanan sakit, kamar 16A – 18A untuk tahanan baru (mapenaling).

Blok B (*garis ungu*) terdiri dari enam kamar yang diberi kode 1B – 6B, dengan peruntukan semua kamar untuk narapidana narkoba dan kriminal. Blok C terdiri dari lima kamar yang diberi kode 1C – 5C, dengan peruntukan kamar 1C – 4C untuk narapidana kriminal dan narkoba, kamar 5C untuk narapidana sakit.

Blok D (*garis biru*) terdiri dari sembilan kamar yang diberi kode 1D – 9D, dengan peruntukan kamar 1D – 5D untuk narapidana narkoba dan kriminal, kamar 6D - 7D – 9D untuk tamping umum dan kamar 8D untuk tamping dapur.

Untuk blok wanita (BW) hanya terdiri dari satu ruangan yang terdiri dari satu kamar, dilengkapi ruang masak, cuci dan kamar mandi. Masing-masing kamar di semua blok dilengkapi ruang kamar mandi sendiri terutama untuk kamar besar, sedang di kamar kecil juga telah dilengkapi ruang bak mandi dan kloset kecil.

Isi blok A terdiri dari tempat masak air, sel pengasingan (*sel tikus*), kamar-kamar blok. Di belakang blok ada tempat jemuran pakaian, tempat mandi dan cuci baju tahanan/narapidana. Di tengah blok ada lapangan bulutangkis dan TV 24 inch. Di setiap kamar tampak TV 14 inch. Depan pintu kamar terpasang daftar isi penghuni kamar, yang berisi nama-nama penghuni kamar. Berwarna putih berarti tahanan polisi (A1), warna kuning tahanan jaksa (A2), warna merah tahanan pengadilan (A3), warna hijau napi masa hukuman satu tahun ke bawah (B2A) dan warna biru napi masa hukuman diatas satu tahun (B1)

Di setiap kamar terpasang jendela teralis, dan tergantung dua buah wadah plastik, satu untuk buang ludah & dahak, satu lagi untuk buang abu rokok. Tiap kamar dihubungkan dengan koridor yang selalu harus bersih. Tak ada puntung rokok maupun benda kotor lain yang jatuh di lantai. Keadaan sama berlaku juga di setiap kamar di blok B, C dan D. Penjaga blok adalah petugas yang berhadapan langsung dengan napi/tahanan, tugasnya mengetahui lebih dahulu jika ada persoalan diantara sesama napi/tahanan dan bisa langsung menyelesaikan. Jika persoalan tak selesai maka di lanjutkan ke ruang KPLP atau dibantu regu pengamanan yang berjaga saat itu.

Secara umum para pembina blok bertugas menjelaskan kegiatan di blok. Aktivitas di blok semua sudah diatur, kegiatan keluar-masuk narapidana diatur, ada aturan jam masuk kamar, aturan jam nonton TV, aturan saat keluar kamar, pengaturan air umum, pemakaian kamar mandi umum, aturan mandi dua kali sehari, aturan penggunaan air dan kloset di kamar. Aktivitas teratur lain di blok yaitu pemakaian air di kamar mandi dihidupkan jam 10,00-12,00 siang, air minum dimasak empat kali, dibagikan tiap jam 07.00 pagi, jam 10.00 siang, jam 15.00 sore dan jam 21.00 malam. Air minum dibagi ke tiap kamar melalui dirigen. Untuk kamar kecil dibagi masing-masing dua dirigen dan kamar besar dibagi empat dirigen.

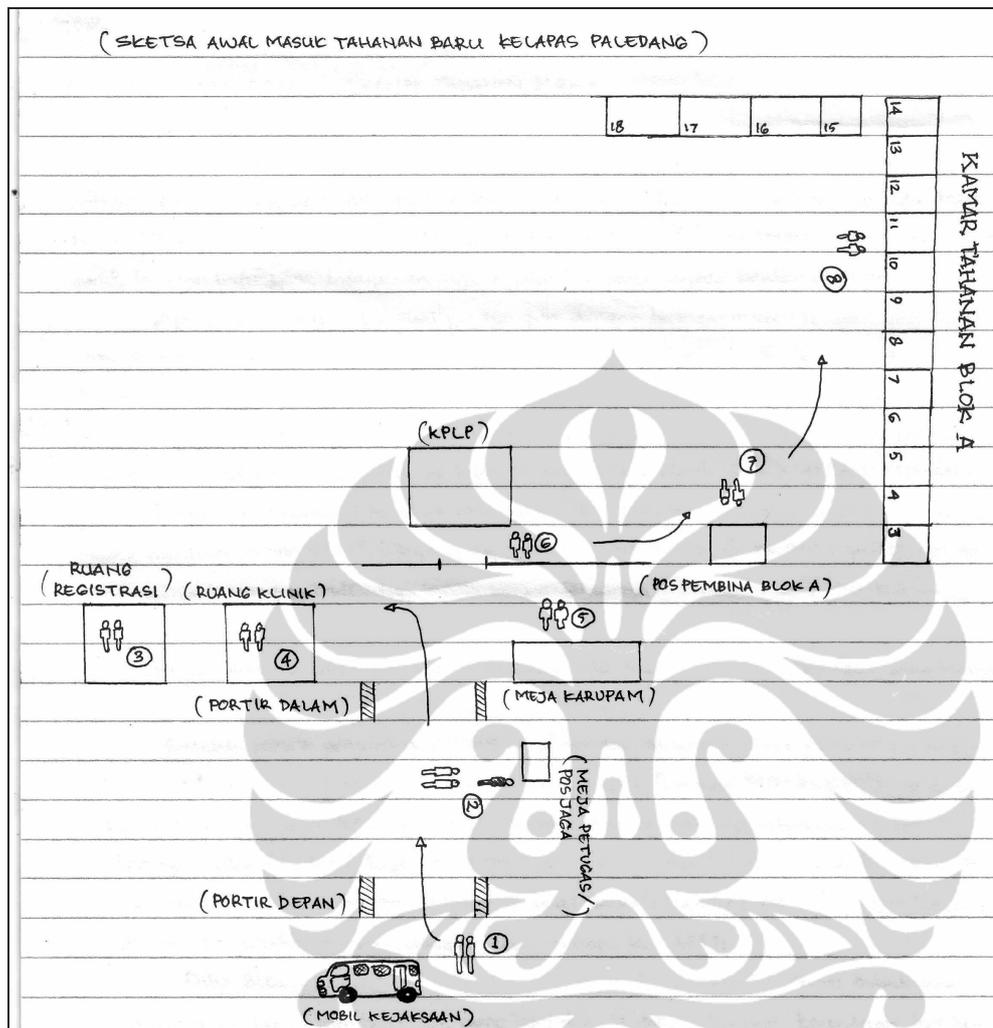
Semua dibuat teratur dalam Lapas, termasuk waktu penggunaan televisi, pagi mulai jam 09.00-12.00, siang jam 14.00-15.00, sore 16.00-18.00 dan malam 20.00-01.00

pagi. Olah raga pagi juga diatur, bergantian kamar besar dulu, besoknya baru penghuni kamar kecil. Penjadwalan olahraga dilakukan karena lapangan olah raga yang sempit, tidak muat kalau semua narapidana ikut serta berolahraga bersamaan.

Di pos blok, berisi sebuah kursi (plastik), meja panjang, kursi panjang, satu pintu dan meja beton yang dikelilingi kaca gelap. Ada lima buku yang tersimpan dalam pos blok yaitu *buku laporan harian Pembina Blok*, *buku apel blok*, *buku harian catatan napi bebas*, *buku catatan sidang (Bogor, Cibinong, Depok)*, *buku tahanan baru (Kejari Bogor, Kejari Cibinong, Kejari Depok)*. Buku satu merupakan catatan petugas blok yang harus diisi bila ada kejadian-kejadian seperti tahanan baru masuk, berapa yang keluar sidang/bebas, keluhan atau gesekan antar tahanan, sedangkan empat buku berikut merupakan buku catatan keadaan blok, yang pengisiannya dibantu oleh tamping atau *korve*.

Pelaksanaan Hukuman di Lapas mulai dirasakan narapidana/tahanan saat ditempatkan dalam kamar. Tiap narapidana mempunyai cara menyesuaikan diri dan beradaptasi terhadap lingkungannya. Lingkungan kamar yang sempit, membuat aktivitas di kamar menjadi terbatas. Arena berkumpul, bercengkerama, tidur, berpakaian, makan, tidur, semua berada dalam satu ruangan yang luasnya tergantung fisik bangunan. Satu kamar yang berkapasitas sepuluh orang bisa dihuni 20-25 orang. Ruangan yang berkapasitas empat puluh orang bisa dihuni seratus penghuni. Keadaan ini disebabkan jumlah penghuni yang overkapasitas. Sebelum menempati kamar, ada proses penerimaan napi dari pihak kejaksaan/kepolisian kepada petugas Lapas, proses awal penerimaan napi/tahanan baru ini dapat digambarkan sebagai berikut (**Gambar 4.2**):

Gambar 4.2
Tahanan Baru Masuk Ke Lapas



Sumber : Informan Lbi

Keterangan:

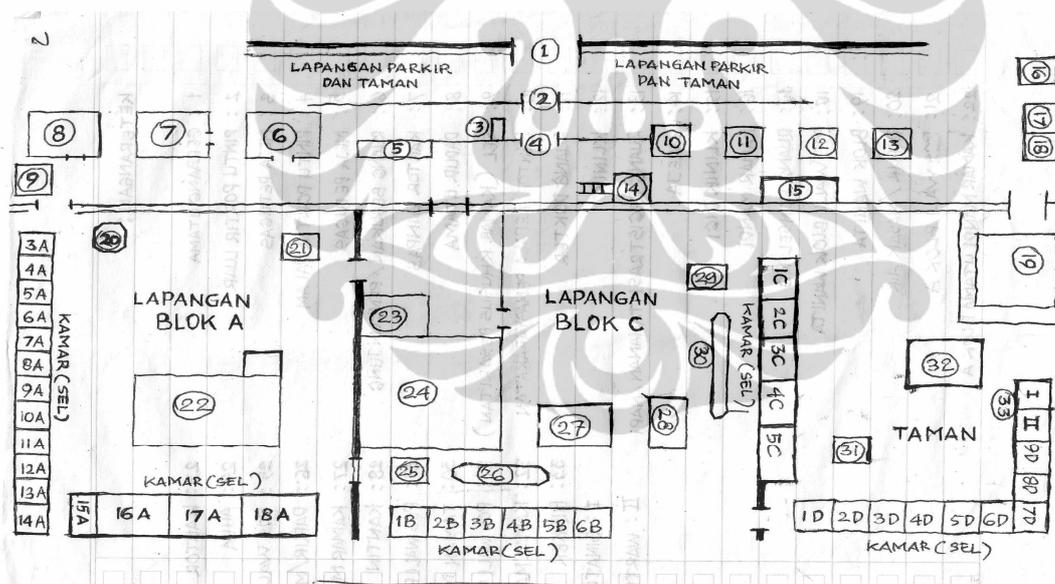
1. Tahanan baru tiba di depan Lapas
2. Pemeriksaan oleh petugas porter
3. Tahanan melengkapi registrasi
4. Pemeriksaan/cek kesehatan tahanan
5. Pengarahan petugas Karupam
6. Pengarahan petugas KPLP
7. Pengarahan petugas & Pembina Blok
8. Tahanan baru menempati kamar sesuai ketentuan Petugas/Pembina blok

Gambar 4.2 merupakan deskripsi yang diberikan informan **Lbi**, tentang proses penerimaan narapidana (tahanan) yang dialaminya. Langkah pertama, tahanan tiba di depan pintu Lapas Bogor. Kedua, pemeriksaan dilakukan oleh petugas portir di pintu gerbang utama. Ketiga, tahanan melengkapi registrasi surat-surat administrasi pengantar dari polres maupun kejaksaan. Keempat, tahanan diperiksa kesehatan, bila malam hari diperiksa keesokan hari. Kelima, pengarahan oleh kepala regu pengamanan sekaligus pemeriksaan serta penggeledahan barang dan badan secara menyeluruh. Keenam,

pengarahan oleh petugas KPLP setelah masuk ke dalam areal blok. Ketujuh, pengarahan oleh petugas dan pembina blok saat dibawa dari ruang KPLP memasuki areal blok. Kedelapan, tahanan diberikan kamar oleh petugas blok dan menempati kamar sesuai dengan ketentuan petugas blok yang bertugas saat itu. Proses penerimaan ini secara umum mengikuti protap yang diatur dalam himpunan peraturan perundangan Lapas yang berlaku.

Bagi beberapa narapidana, proses pengenalan suasana Lapas telah dimulai di luar Lapas khususnya selama di polres dan kejaksaan, sehingga sampai di Lapas mereka tinggal menyesuaikan situasi yang ada dan mendekati orang berpengaruh di Lapas, agar proses penerimaan nantinya bisa berlangsung lancar. Ruang Lapas yang terbatas membuat jangkauan bergerak napi pun menjadi terbatas, hanya dalam kamar, blok atau area kantor saja. Berikut ini gambaran ruang dan areal Lapas yang bisa dijangkau dan diakses narapidana selama menjalani masa penghukuman (**Gambar 4.3**).

Gambar 4.3
Batas Jangkauan Bergerak Narapidana



Sumber : Gambar dibuat Lbi

Keterangan:

- | | | |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Gerbang Utama | 13. Ruang Registrasi | 25. Pos Wali Blok B |
| 2. Pintu Portir | 14. Gereja | 26. Dapur Blok B |
| 3. Meja Petugas | 15. Klinik Gigi | 27. Kamar Mandi Umum Blok B/C |
| 4. Pintu Portir Dalam | 16. Kamar Mandi | 28. Kantin |
| 5. Meja petugas | 17. Ruang Konseling | 29. Pos Wali Blok C |
| 6. Kantor Besukan | 18. Pos Wali Blok Wanita | 30. Taman Mini |
| 7. Kantor Bimpas | 19. Blok Wanita | 31. Pos Wali Blok D |
| 8. Dapur Utama | 20. Dapur/Masak Air | 32. Kamar Mandi Umum Blok D |
| 9. Sel (pengasingan) | 21. Pos Wali Blok A | 33. Bimker (I – Binatu, II – Wartel) |
| 10. Kantor Kalapas | 22. Kamar Mandi Utama Blok A | |
| 11. Ruang Dokter | 23. Kantor KPLP | |
| 12. Klinik | 24. Aula | |

Gambar 4.3 dibuat **Lbi**, untuk memperlihatkan bagaimana terbatas ruang gerak napi, gambar ini merupakan deskripsi tentang keadaan di blok Lapas, narapidana hanya bisa bergerak antar kamar, antar blok, tidak bisa bebas bergerak bolak-balik ke ruang kantor maupun ruang kunjungan. Bila tidak sedang dalam kamar, umumnya narapidana berkumpul di taman, koridor, dan lapangan blok.

Jadwal kegiatan narapidana berbeda-beda di blok dan kamar, tapi secara garis besar mengikuti jadwal rutin yang dikeluarkan pihak Lapas. Berikut ini jadwal rutin kegiatan dikeluarkan pihak Lapas (**Tabel 4.12**).

Tabel 4.12
Jadwal Rutin Aktivitas Lapas²⁸

| J A M | KEGIATAN | TEMPAT |
|-------------------|----------------------------|---------------------------|
| 04.30 – 05.00 WIB | Shalat Subuh Berjama'ah | Kamar |
| 06.30 – 07.00 WIB | Apel Pagi | Kamar dan Blok Hunian |
| 07.00 – 07.30 WIB | Buka kamar dan MCK | Kamar dan Blok Hunian |
| 07.30 – 08.00 WIB | Senam Pagi | Lapangan Olahraga |
| 08.00 – 09.00 WIB | Makan Pagi | Kamar dan Blok Hunian |
| 09.00 – 11.30 WIB | Pesantren Al – Hidayah | Graha Sahardjo |
| 09.00 – 11.30 WIB | YAKITA / kebaktian Nasrani | Aula Atas |
| 10.00 – 11.00 WIB | Pembagian Makan Siang | Kamar dan Blok Hunian |
| 12.00 – 12.30 WIB | Shalat Dzuhur Berjamah | Graha Sahardjo / Kamar |
| 12.30 – 13.00 WIB | Apel Siang | Kamar dan Blok Hunian |
| 13.00 – 15.00 WIB | Kreatifitas | Aula Atas |
| 13.00 – 15.00 WIB | Keaksaraan Fungsional | Graha Sahardjo |
| 15.30 – 16.00 WIB | Pembagian Makan Malam | |
| 15.00 – 16.30 WIB | Marawis | Graha Sahardjo |
| 13.30 – 16.30 WIB | Badminton/Tenis Meja/Band | Graha Sahardjo |
| 13.30 – 16.30 WIB | Volly | Lapangan Olahraga |
| 15.00 – 15.15 WIB | Shalat Ashar | Graha Sahardjo |
| 17.00 – 18.00 WIB | Kunci Blok dan Apel Sore | Kamar dan Blok Hunian |
| 17.45 – 18.15 WIB | Shalat Maghrib Berjama'ah | Kamar |
| 18.15 – 19.00 WIB | Tausiah | Graha Sahardjo (terbatas) |
| 19.00 – 19.15 WIB | Shalat Isya Berjama'ah | Kamar |
| 19.15 – 03.00 WIB | ISTIRAHAT | Kamar Dan Blok Hunian |

Sumber: Arsip Lapas Bogor

Keterangan: Jadwal pemakaian televisi pagi : 08.00 WIB s/d 12.00WIB, Siang: 14.00 WIB s/d 15.00 WIB, Sore: 15.30 s/d 18.00 WIB, Malam: 20.00 WIB s/d 24.00 WIB, Televisi dimatikan dan dihidupkan menggunakan remote. Jadwal Kegiatan sewaktu – waktu dapat berubah

Jadwal ini merupakan kegiatan rutin penghuni yang ditetapkan secara resmi oleh pihak Lapas. Seringkali pada kenyataannya, narapidana memilih kegiatan sendiri berbeda dari jadwal yang telah ditentukan Lapas. Hanya pada saat apel dan malam hari saja napi harus kembali ke kamar untuk dihitung kembali jumlahnya, biasanya pintu

²⁸ Jadwal ini tidak sama mulai dari senin sampai sabtu, berubah pada jam-jam tertentu disesuaikan dengan pembinaan yang akan dilakukan. Jadwal resmi ini prakteknya mengikuti keadaan lapangan, blok, kamar dan individu.

kamar dibuka pagi hari sesudah pemeriksaan petugas pukul 07.00 pagi, sesudah itu dikenal waktu “*gaul*” dan makan pagi. Jam 10.00 berlangsung makan siang, lalu sholat dzuhur dilanjutkan apel siang pukul 13.00 siang. Pada saat pemeriksaan ini semua napi masuk ke kamar masing-masing. Pada pukul 14.00 siang, pintu kamar dibuka kembali dan aktivitas napi dilakukan bermacam-macam. Pukul 15.00 waktu makan sore dan waktu *gaul* sampai 16.30 sore. Pada jam 17.00 semua napi sudah masuk kembali ke kamar dan pintu kamar ditutup kembali.

Adapun makanan jatah yang diberikan pihak Lapas pada semua narapidana Lapas sesuai menu telah ditetapkan (**Tabel 4.13**). Makan nasi cadong merupakan kesepakatan formal yang dibuat dalam kehidupan sosial Lapas. Tidak semua narapidana mengambil jatah nasi cadong ini. Makanan cadong ditaruh dalam rantang ompreng yang berwarna merah dan penutup putih, dibawa dengan gerobak tiga kali sehari ke kamar-kamar di blok masing-masing.

Tabel 4.13
Daftar Menu Makanan

| HARI/TANGGAL | HARI KE - 1 | HARI KE - 2 | HARI KE - 3 | HARI KE - 4 | HARI KE - 5 | HARI KE - 6 | HARI KE - 7 |
|----------------------------|--|--|--|--|---|--|--|
| PAGI JAM 07.00 - 08.00 | 1. Nasi Putih 2. Tempe Goreng 3. Oseng ² Buncis 4. Air Putih | 1. Nasi Putih 2. Ubi Rebus 3. Ikan Asin Goreng 4. Tumis Kangkung 5. Air Putih | 1. Nasi Putih 2. Tempe Bacem 3. Oseng ² Kc.Pig 4. Air Putih | 1. Nasi Uduk 2. Ikan Asin Goreng 3. Urap Sayuran 4. Ubi Rebus 5. Air Putih | 1. Nasi Putih 2. Oseng ² Sayuran 3. Bubur Kacang Hijau 4. Air Putih | 1. Nasi Putih 2. Ubi Rebus 3. Tempe Goreng 4. Pecel 5. Air Putih | 1. Nasi Goreng 2. Tempe Goreng 3. Tumis Sawi 4. Kolak Ubi 5. Air putih |
| SIANG JAM 11.00 - 12.00 | 1. Nasi Putih 2. Semur Daging 3. Sayur Sop 4. Air Putih | 1. Nasi Putih 2. Perkedel Kentang 3. Ikan Asin Goreng 4. Sayur Lodeh 5. Pisang Ambon 6. Air Putih | 1. Nasi Putih 2. Telur Balado 3. Sayur Kare 4. Air Putih | 1. Nasi Putih 2. Daging Goreng 3. Sayur Asem 4. Pisang Ambon 5. Air Putih | 1. Nasi Putih 2. Telur Gulai 3. Sayur Lodeh 4. Air Putih | 1. Nasi Putih 2. Kering Tempe 3. Sayur Sop 4. Perkedel Kentang 5. Pisang Ambon 6. Air Putih | 1. Nasi Putih 2. Tempe Gr.Tepung 3. Sayur Kare 4. Air putih |
| SORE JAM 16.00 - 17.00 | 1. Nasi Putih 2. Tempe Bacem 3. Sayur Asem 4. Kolak Ubi 5. Air Putih | 1. Nasi Putih 2. Tempe Orek 3. Pecel 4. Air Putih | 1. Nasi Putih 2. Tempe Goreng 3. Sayur Sop 4. Bubur Kcg.Hijau 5. Air Putih | 1. Nasi Putih 2. Tempe Bacem 3. Sayur Nangka + Kcg. Panjang 4. Air Putih | 1. Nasi Putih 2. Tempe Goreng 3. Sayur Kare 4. Air Putih | 1. Nasi Putih 2. Ikan Asin Goreng 3. Urap Sayuran 4. Air Putih | 1. Nasi Putih 2. Ikan Asin Goreng 3. Sayur Asem 4. Air Putih |

Sumber : Arsip Lapas Bogor

Keterangan: Daftar Menu Makanan berlaku selama 1 minggu

Tabel 4.13 adalah daftar menu makanan narapidana yang dikenal dengan nasi cadong. Daftar menu ini dibuat untuk jatah makan satu minggu dan berubah untuk minggu berikut disesuaikan dengan keadaan. Secara umum aktivitas narapidana di

Lapas diatur oleh berbagai ketentuan formal dimana Lapas merupakan tempat penghukuman dan pembinaan.

Uraian bab ini secara garis besar menggambarkan secara spesifik berbagai aturan formal yang berlaku dalam Lapas serta pengaturan lingkungan di Lapas Bogor mencakup berbagai ruang fisik baik di areal perkantoran maupun blok narapidana.



BAB 5

KESEPAKATAN-KESEPAKATAN INFORMAL: KERJASAMA & PEMENUHAN KEBUTUHAN

Bab ini mendeskripsikan gambaran kesepakatan kesepakatan informal terdiri dari tiga bagian: Pertama, deskripsi tentang kesepakatan informal dalam rangka adaptasi mencakup kesepakatan mulai masuk kamar, aturan kamar, jenis kebutuhan, dan cara pemenuhan kebutuhan. Kedua, deskripsi tentang kesepakatan informal dalam rangka resistensi mencakup kepemilikan barang-barang berbahaya dan pelanggaran prosedur rutin & tetap. Ketiga, deskripsi tentang sanksi lokal (informal) meliputi perilaku *modus* dan kekerasan.

Relasi-relasi sosial dalam Lapas merupakan inti budaya penjara. Relasi-relasi ini berlangsung dalam lingkungan Lapas yang berlaku aturan formal dan kesepakatan informal. Ada saling mempengaruhi antara aturan formal Lapas (normatif) dan kesepakatan informal (aturan lokal) dalam praktek sehari-hari. Kedua aturan ini berjalan bersama dan bahkan berkompetisi dalam satu lingkungan sosial penjara, dimana pada satu kasus saling mendukung tapi dalam kasus lain bisa saling meniadakan. Kedua aturan ini secara substantif terdapat perbedaan mendasar diantara keduanya, kesepakatan informal (kebiasaan sehari-hari) berperan sebagai aturan lokal (*self-regulation*) yang berfungsi menjaga keteraturan sosial dalam pengaturan ruang-ruang fisik Lapas yang sempit dan terbatas, disamping keberlakuan mekanisme formal yang menaungi kelembagaan secara normatif. Situasi ini menunjukkan berlakunya bidang sosial semi otonom (*semi autonomous sosial field/SASF*) dalam Lapas sebagaimana dijelaskan Sally F Moore. (Moore: 1983: 57).

Lapangan semi otonom (*Semi-Autonomous Social Field*) dalam Lapas ditandai ciri: Pertama, adanya kapasitas menciptakan aturan sendiri-sendiri, terkandung dalam ruang-ruang fisik Lapas yang sarat hubungan-hubungan sosial antar sesama narapidana maupun dengan petugas. Ruang-ruang Lapas menciptakan kesepakatan-kesepakatan informal melalui aturan-aturan tersendiri (lokal). Pengaturan-pengaturan rutin berlangsung diantara sesama narapidana, petugas maupun pihak luar seperti keluarga narapidana & pengunjung. Kedua, masing-masing ruang fisik tersebut menerapkan sanksi bila ada pihak yang tidak mengikuti aturan main yang diatur dan disepakati, berupa sanksi sosial seperti kehilangan sumber ekonomi, reputasi, kemauan-baik, sumber pendapatan (uang) maupun kekerasan.

Secara spesifik kesepakatan informal (lokal) menjadi pedoman yang berlaku di Lapas dalam pemenuhan kebutuhan, menghadapi ketatnya aturan formal. Kesepakatan informal mengatur kelonggaran atau pengurangan keterbatasan-keterbatasan antara lain kebebasan bergerak, rasa aman, kebutuhan standar maupun fasilitas serta kenyamanan tertentu sebagaimana diperoleh saat di luar Lapas. Kesepakatan informal ini rentan terhadap aturan formal negara (UU & protap Lapas) atau dengan kata lain, saling mempengaruhi dan mengintervensi antara aturan formal (aturan negara) dan kesepakatan informal. Berikut ini penulis mendeskripsikan kesepakatan-kesepakatan informal dalam rutinitas kehidupan sosial yang ditemukan dan diperoleh penulis dari penelitian lapangan di Lapas.

5.1. Kesepakatan Informal Dalam Rangka Adaptasi

Lapas merupakan tempat melaksanakan hukuman penjara yang telah diputuskan hakim dalam sidang pengadilan. Berdasarkan asal-usulnya kata penjara berasal dari *penjoro* {bahasa jawa} yang berarti *tobat* atau *jera*. Dipenjara berarti dibuat tobat atau dibuat jera (Suyatno, 2003: 11-12). Seseorang pelaku kejahatan yang mendapat hukuman penjara dimasukkan ke Lapas untuk melaksanakan hukuman penjara yang diterimanya. Seseorang memasuki Lapas akan mengalami proses berbeda secara sosial dan kejiwaan. Mereka mengalami konflik, ketegangan dan ketakutan terkait lingkungan baru dimana mereka ditempatkan. Secara bertahap mereka belajar menyesuaikan diri, melakukan akomodasi sehingga ketakutan dan ketegangan menjadi berkurang.

Aturan normatif masuk Lapas memberlakukan narapidana ditempatkan bersama dengan narapidana lain yang belum saling kenal dan diharuskan tinggal bersama dalam kurun waktu tertentu. Penyesuaian diri dalam Lapas selama menjalani masa hukuman berlangsung konstan dan ajeg, mewarnai kehidupan sosial di lingkungan Lapas. Penyesuaian (*ajustment*) dan adaptasi (*adaptation*) seringkali diselingi perlawanan terhadap kekangan yang membatasi kebutuhan dan kebebasan para terdakwa. Penyesuaian tahanan atau adaptasi narapidana berlangsung tiap hari dalam rutinitas Lapas. Narapidana berhadapan langsung dengan petugas yang melaksanakan hukuman penjara berdasar aturan formal di unit kerja masing-masing.

Adaptasi dapat diartikan sebagai proses yang menghubungkan sistem budaya dengan lingkungannya, membuahkan dampak berbeda-beda pada taraf perkembangan sosiokultural dan sosioekonomi. Manusia sebagai spesies mahluk hidup menghadapi

keharusan untuk beradaptasi terhadap lingkungan, cara-cara digunakan masyarakat menghadapi keharusan itu, pada tempat dan waktu berlainan, setidaknya memberi sebagian jawaban tentang cara masyarakat mengorganisasikan kehidupan ekonomi dan sosial, menciptakan ritual keagamaan dan mengembangkan pandangan serta keyakinan artistik disamping mengembangkan falsafahnya (Kaplan, David & Albert A. Manners, 1999: 112-116). Ruang-ruang dalam Lapas membuat narapidana melakukan adaptasi sesuai aturan formal dan informal yang berlaku dalam Lapas. Sebagai seorang manusia, narapidana beradaptasi dalam kamar dan blok, antar sesama mereka dan dengan petugas di lingkungan Lapas. Mereka mengorganisasikan kehidupan sosial-ekonomi, mengikuti kesepakatan-kesepakatan informal yang telah berlangsung sebelumnya.

Adaptasi di penjara menurut Dhami, Ayton & Loewenstein (2007) merupakan fungsi penggunaan waktu di penjara dan kualitas hidup sebelum di penjara, dipengaruhi dua hal: pertama, penggunaan waktu di penjara terkait lamanya penghukuman dan tingkat keamanan penjara (*indigenous approach*) dan kedua, adaptasi sebagian besar dibawa, dan merefleksikan gaya hidup serta karakteristik narapidana sebelum di penjara (*importation approach*) (K Dhami, Peter Ayton & Loewenstein, 2007: Vol. 34 No.8). Adaptasi secara kasat mata berlangsung di lingkungan Lapas, tampak mulai saat bergaul, berinteraksi maupun pemenuhan kebutuhan di Lapas. Kesepakatan-kesepakatan informal dalam Lapas sekian lama telah berjalan mencakup cara-cara yang digunakan narapidana bekerjasama dengan petugas mengakses berbagai sumber daya yang terbatas di lingkungan Lapas.

5.1.1. Kesepakatan Masuk Lapas & Aturan Kamar

Proses penerimaan narapidana (tahanan) secara formal diatur dalam protap Lapas (**Bab 4**), tetapi prakteknya kesepakatan-kesepakatan informal lebih "bermain", mulai dari tahap sebelum masuk Lapas sampai penempatan dalam kamar. Kesepakatan informal memainkan peranan penting mempersiapkan narapidana (tahanan) memasuki Lapas. Kesepakatan diam-diam dilakukan mulai di luar Lapas oleh pihak keluarga, penegak hukum (polisi atau jaksa) atau pihak lain, dengan cara menghubungi pihak Lapas untuk mempersiapkan kedatangan terdakwa yang dimaksud. Menempatkan atau menitipkan terdakwa dalam Lapas seharusnya menjadi tugas jaksa / polisi / pengadilan secara administratif, tetapi agar terdakwa mendapat perlakuan baik maka dikenal mekanisme "titipan" sebagai kesepakatan informal

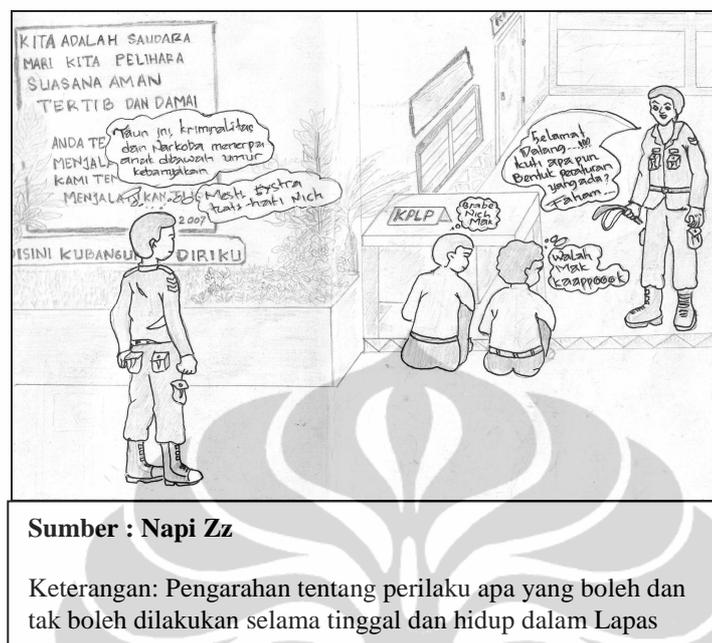
dalam penerimaan tahanan atau narapidana baru. Cara lain bisa dilakukan oleh terdakwa itu sendiri, dengan mendekati aktor narapidana dan petugas yang berwenang.

Untuk narapidana (tahanan) berstatus "titipan" dapat dengan mudah melewati berbagai prosedur penerimaan, dan langsung ditempatkan di kamar tanpa melewati berbagai ritual penerimaan penghuni baru, yang biasanya dilakukan petugas pengamanan dan tamping. Keadaan ini tak terlepas dari kerjasama aktor petugas, tamping dan kepala kamar dalam menjalankan kesepakatan-kesepakatan informal tersebut. Sampai di kamar, narapidana (tahanan) yang berstatus *titipan*, harus beradaptasi dengan sesama narapidana lain dikelilingi ruangan sempit, berdesakan, penggab, serta diawasi terus menerus oleh petugas pengamanan.

Setiap penghuni baru diharuskan memakai baju biru kemeja maupun kaos saat berada di kamar maupun blok sesuai aturan berlaku, tapi dalam praktek sering tidak berjalan, para narapidana bisa berpakaian bebas atau seadanya. Kesepakatan informal dengan kepala kamar memberi keleluasaan pada narapidana untuk berpakaian bebas. Kesepakatan informal tak berlaku jika narapidana/tahanan keluar dari Lapas untuk mengikuti sidang atau ke ruangan kunjungan. Saat persidangan di luar Lapas, aturan formal secara ketat diberlakukan, narapidana diharuskan memakai baju koko tak boleh hanya memakai kaos dalam, jika ada yang memakai kaos maka harus dibuka dan diganti. Baju koko dipakai untuk membedakan terdakwa dengan pengunjung lain di ruang sidang agar tidak ada yang menyamar dan tertukar dengan pengunjung sidang.

Pengenalan narapidana (tahanan) dengan petugas secara fisik dimulai saat pengarahan masuk Lapas, baik dilakukan petugas pengamanan, anggota regu jaga atau staf KPLP. Dalam proses penerimaan ini dibuat kesepakatan formal dan informal melalui arahan-arahan dan petunjuk-petunjuk bagaimana seharusnya berperilaku selama berada di Lapas. Salah satu poin yang ditanamkan pada penghuni baru yaitu agar tingkah lakunya kooperatif, dan bila itu terjadi maka petugas akan memperlakukan orang tersebut dengan santun, menanyakan identitas dan kehadirannya secara baik. Sebaliknya, bila tidak maka tak urung petugas memberi pelajaran pada narapidana (tahanan) tersebut agar taat dan tunduk pada protap yang ditetapkan dalam Lapas (**Gambar 5.1**).

Gambar 5.1
Pengarahan Oleh Petugas Pengamanan



Gambar 5.1 merupakan deskripsi yang dibuat narapidana **Zzi**, melukiskan bagaimana keadaan narapidana (tahanan) baru saat diberi pengarahan oleh petugas keamanan (KPLP) dan regu pengamanan (rupam) yang sedang bertugas. Dalam gambar terlihat percakapan antara petugas dan tahanan baru, seorang petugas KPLP mengatakan, "Selamat datang, ikuti apapun peraturan yang ada disini, paham?", tahanan baru berkomentar dalam hatinya, "Berabe nih", sedang tahanan baru lain mengatakan, "Waduh mak kapok". Perbedaan komentar ini merupakan tanggapan beragam atas arahan yang diberikan petugas Lapas. Sesudah itu narapidana (tahanan) dibawa ke blok dan ditempatkan di kamar masing-masing. Tak jarang narapidana baru tidak mengerti arahan petugas lalu diganjar hukuman fisik agar tidak menyepelkan petunjuk dan arahan petugas. Prosedur tetap (protap) bisa ditegakkan secara formal dan informal tergantung situasi di lapangan. Penegakan aturan formal yang ketat menimbulkan kesepakatan-kesepakatan informal yang lebih mudah diikuti atau diterapkan bahkan menjadi pedoman berperilaku para penghuni dalam Lapas.

Seorang narapidana narkoba **Zzi**, yang mendapat hukuman dua tahun pidana penjara, menceritakan proses persiapan masuk Lapas dan kesepakatan-kesepakatan informal dilakukan sebagai berikut:

*“...Saya pertama kali sampai di Lapas Paledang, saya dan umumnya napi lain sudah mempunyai teman bekas satu polres atau polsek sebelum dikirim kesini. Dari sana mereka mencoba meraba, saling tanya dan saling memberikan saran dan nasehat tentang apa saja yang ada di Lapas. Biasanya tahanan-tahanan pada umumnya saling membicarakan tentang “sidang” karena pada umumnya mereka belum putus sidang dan masih sering bertanya-tanya tentang mekanisme persidangan. Kebetulan waktu pertama kali saya sampai ke Lapas Peledang, Saya masuk ke kamar yang mayoritas adalah para tahanan kriminan dari Polres yang sama dengan Saya, jadi Saya lebih gampang beradaptasi karena memang sebelumnya sudah saling mengenal di Polres. Menurut Saya orang-orang yang berpengaruh dan harus didekati pada saat masa adaptasi adalah informan blok, kepala kamar, wali blok, karena ketiga orang itu yang meng-handle semua permasalahan tahanan di blok penampungan. Ketiga orang itu “pusat kekuasaan” di penampungan, mereka bisa memperbesar masalah kecil, merekayasa masalah hingga menghilangkan suatu masalah besar. Kekuasaan mereka sangat besar hingga meliputi masalah “jual-beli kepala tahanan” sehingga jika ingin aman dan bebas melakukan apapun dalam penampungan maka harus dekat dengan ketiga orang itu...” (Wawancara **Zzi**, tanggal 30 Juni 2009)*

Berdasarkan uraian **Zzi**, kesepakatan informal telah terjadi sebelum seseorang menjadi narapidana, tersangka telah bertemu di tahanan polres, saling mengenal dan biasanya saling memberi informasi dan saran tentang apa yang terjadi dan diperlukan untuk masuk ke dalam Lapas. Tak semua tahanan dipindahkan ke Lapas tanpa bekal memadai, umumnya mereka sudah mendapat informasi dari narapidana (tahanan) sebelumnya, yang sudah tinggal terlebih dahulu di Lapas. Hal ini dijelaskan **Rzi** sebagai berikut: *“...Tempat tahanan Polres “D” menjadi sarana mengetahui dan mengenal satu sama lain, waktu disana, saya beruntung karena telah ada **Cpi** yang waktu itu jadi kepala kamar di Polres “D” sehingga bisa tanya-tanya dan cari cara untuk mengetahui seluk beluk tahanan polres sampai ke Lapas Paledang...” (Wawancara **Rzi**, tanggal 5 April 2007).*

Kesepakatan informal tidak saja menjadi acuan tapi diperlukan selama menjalani hukuman di Lapas, secanggih apapun teknologi yang dimiliki dan setinggi apapun ilmu (supernatural) yang dikuasai, seorang kriminal tetap *tak-berarti* dalam Lapas. Hal ini disampaikan **Rzi**, bahwa banyak penjahat mempunyai kemampuan tambahan (supernatural) dan peralatan teknologi canggih, melakukan aksi kriminal dengan berani tanpa rasa takut di masyarakat, tapi kalo sudah tertangkap dan masuk Lapas, sama saja dengan yang lain. Uraian **Rzi** sebagai berikut: *“...Kalo udah dalam Lapas yang namanya penjahat meskipun kesaktian dan mistik-mistiknya tinggi, peralatan teknologicanggih tak ada apa-apanya tetap aja disuruh nyuci ya nyuci juga...” (Wawancara **Rzi**, tanggal 5 April 2007).*

Kesepakatan informal petugas dan narapidana tidak dilakukan sembarangan. **Thi**, narapidana narkoba, menguraikan kesepakatan formal saat berhubungan dengan petugas harus fleksibel, ia mengatakan: *“...Sebaiknya jangan terlalu dekat dengan petugas*

karena semakin banyak kenal maka makin banyak kita dimintain (setor) jadinya ya secukupnya aja, tetap perlu, agar dapat bisa lebih bebas, karena kebebasan, fasilitas dan privasi sangat mahal...” (Wawancara **Thi**, 5 Juni 2008). **Thi** mengatakan agar tidak terlalu dekat berinteraksi dengan petugas, tapi tetap harus mengadakan pendekatan kepada petugas agar mendapatkan kebebasan, fasilitas dan privasi yang menjadi *barang mahal* dalam Lapas.

Kesepakatan informal juga dilakukan saat mencari dan mendekati orang-orang yang dianggap berpengaruh dalam kamar dan blok, seperti *informan blok*, *kepala kamar (KM)* dan *wali blok*. Ketiga orang ini disebut mempunyai “*kekuasaan*” dan *kewenangan* mengatur kamar dan blok yang berada dibawah pengawasannya. Ketiga orang ini dapat merekayasa suatu kasus maupun meniadakan suatu kasus, kasus kecil dapat menjadi besar dan sebaliknya. Bagi **Zzi**, merangkul ketiga orang ini membuat kehidupan dalam Lapas menjadi aman dan tenang saat melakukan kegiatan apapun.

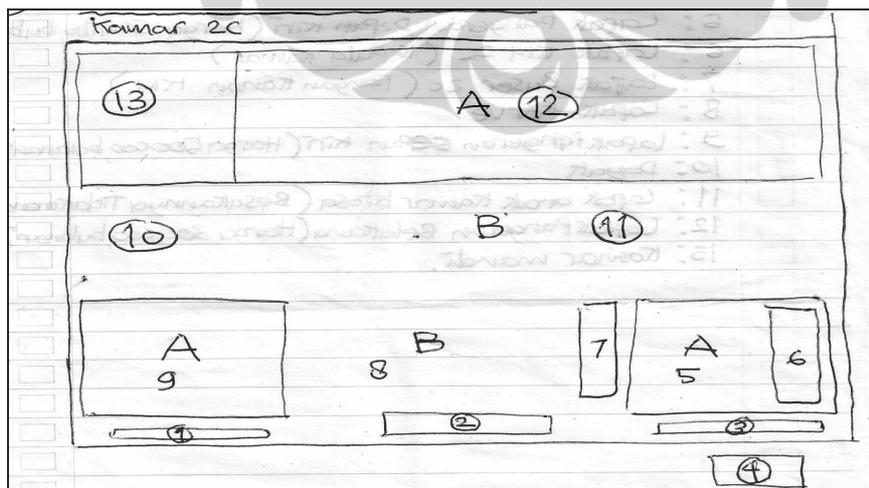
Sepintas, ruang fisik blok dan kamar-kamar narapidana (tahanan) tampak teratur, pengelolaan kebersihan dan ketertiban blok dan kamar menjadi tanggung-jawab petugas setempat. Tapi kenyataan, pengaturan ketertiban dan pengelolaan *pernak-pernik* di kamar diserahkan sepenuhnya pada penghuni kamar masing-masing. Petugas blok malah tak tahu persis isi kamar, pengaturan ruangan kamar, isinya diserahkan dan dikelola para narapidana yang disebut pengurus kamar, terdiri dari pengurus utama yaitu *kepala kamar (KM= ka-em)*, *wakil kepala kamar (buser)*, *imam sholat kamar* dan beberapa *pembantu kepala kamar (korve)*. Isi keseluruhan kamar dihuni oleh *anak-anak kamar*, dimana pengaturan tugas dan keteraturan dalam kamar menjadi porsi terbesar kesepakatan informal diantara sesama penghuni kamar dan petugas. Urusan kamar ditangani dan dilakukan pimpinan informal *kepala kamar (KM)*, *buser*, *korve* dan *imam kamar*.

Pengaturannya berlangsung sebagai berikut: Pertama, *kepala kamar (KM)* bertugas membuat kamar tetap terkondisi agar rasa aman dan nyaman bagi semua penghuni dan aktivitas didalamnya. Kedua, *wakil kepala kamar (buser)* bertugas sebagai kaki-tangan *KM*, mengurus bidang keamanan kamar, memberi rasa aman pada penghuni kamar, bertindak sebagai pendata nama-nama napi baru dan menyelesaikan perselisihan dalam kamar. Ketiga, *imam sholat kamar* bertugas sebagai pemimpin kerohanian saat sholat maupun ibadah sholat magrib, pengajian Al-Quran, sholat Isya sore hari, pukul 16.30 wib sampai malam hari, saat penghuni tidak lagi diperbolehkan di luar kamar. Keempat, *korve* bertugas mengurus kebersihan dan

kenyamanan di dalam kamar hunian, membantu tugas *KM*, *buser* dan *penghuni kamar*. Kelima, *anak kamar* yaitu semua penghuni kamar yang diharapkan bisa menciptakan rasa aman dan nyaman di dalam maupun di luar kamar hunian.

Kesepakatan informal dalam kamar melandasi dan menciptakan struktur sosial tersendiri dalam kamar dan blok. Kehidupan sosial kamar dan blok ter-refleksikan dari status yang dimiliki para narapidana. Ada dua status utama di kamar yaitu pertama, narapidana yang *jelas dan mampu* dari sisi ekonomi yang sering disebut *pangeran*, dan kedua, narapidana *kurang mampu, hilang, atau tak jelas* disebut *dayak*. *Pangeran* merupakan istilah bagi anak kamar yang mampu membayar iuran kamar per bulan maupun tagihan kamar lain secara tepat waktu, sehingga mendapat fasilitas dan kenyamanan. Sedangkan *dayak* adalah istilah bagi anak kamar yang *tidak mampu* membayar iuran kamar, sehingga tak mendapat fasilitas apapun, mereka mendapat posisi tidur duduk atau jongkok bahkan berdiri kalau jumlah pasokan narapidana dalam kamar terus bertambah dan berlebihan. Perbedaan status *pangeran* dan *dayak* tampak dari sikap, fasilitas dan pemenuhan kebutuhan yang diperoleh, *pangeran* mendapat fasilitas kamar seperti tempat tidur *lapak belakang (kolong)* atau *lapak atas (depan)*, sedangkan *dayak* atau sering disebut *anak bawah*, tidak memiliki lapak baik *lapak belakang (kolong)* maupun *di depan (atas)* (**Gambar 5.2**).

Gambar 5.2
Pengaturan Isi Ruang Kamar



Sumber : Napi Lbi

Keterangan:

A = Bagian Atas

B = Bagian Bawah

1 = Jendela Kanan

2 = Pintu

3 = Jendela Kiri

4 = Televisi

5 = Lapak Pangeran Depan Kiri

13 = Kamar Mandi

6.= Lapak KM

7 = Lapak Buser

8 = Lapak Korve

9 = Lapak Pangeran Depan Kiri

10 = Dayak

11 = Lapak Anak Kamar Biasa

12 = Lapak Pangeran Belakang

Gambar 5.2 merupakan oretan **Lbi**, tentang keadaan kamar hasil kesepakatan bersama para penghuni kamar yang ada di blok C. Pemanfaatan ruang dalam kamar ini terdiri dari bagian atas (A), bagian bawah (B), jendela kamar (1), pintu (2), jendela kiri (3), televisi (4), lapak pangeran depan kiri (5), lapak KM (6), lapak busur (7), lapak korve (8), lapak pangeran (9), tempat dayak (10), lapak anak kamar biasa (11) dan lapak pangeran belakang (12). Gambar ini mencerminkan struktur sosial yang terbentuk dalam kamar narapidana. Struktur kamar ini hampir sama dengan kamar narapidana lain, hanya berbeda luas atau sempit saja.

Pengaturan isi ruang kamar narapidana seperti ditunjukkan dalam gambar 5.2. disatu sisi menampilkan kepadatan dan kesesakan, disisi lain melandasi interaksi intens sesama narapidana. Kedekatan hubungan mudah dilakukan di area kamar karena ruang kamar membentuk rasa senasib sesama narapidana, menciptakan *teman se-lapak, teman se-makan, se-tidur, se-ngobrol, dan se-teman bermain*. Berinteraksi antar *teman-teman* ini biasanya terjadi diantara orang-orang yang mudah diajak bicara dan tidak banyak macam-macam, paling dekat adalah *teman satu lapak tidur*. Keakraban pertemanan diutamakan untuk menjaga rasa saling percaya, saling hormat antar sesama napi dalam kamar.

Penyesuaian kehidupan di kamar dialami dan dirasakan narapidana baru yang ditempatkan dalam Lapas, sebagian besar dari mereka masih diliputi rasa takut, rasa bersalah atau rasa tidak aman. Narapidana baru selalu berusaha mencari orang yang bisa melindungi dan menjaga keamanannya, oleh karena itu teman tidur atau se-kamar menjadi referensi permulaan dalam penyesuaian kamar kecuali bagi narapidana residivis atau titipan yang sebelumnya telah mempunyai jalinan relasi dengan narapidana atau petugas sebelumnya.

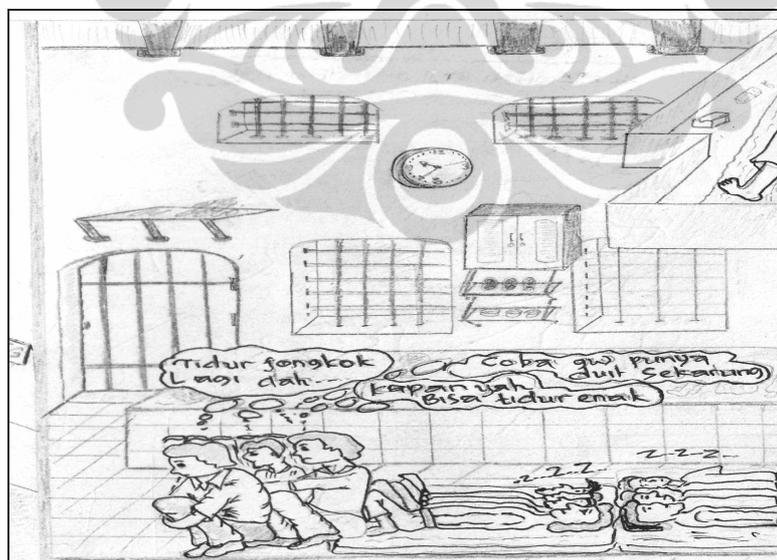
Di ruang-ruang kamar, para narapidana menunjukkan "*rasa se-kelompok*", saling tenggang rasa dan rasa senasib, tercipta rasa toleransi, keamanan dan ketertiban, tidak mementingkan kemauan dan ego individu. Perasaan ini penting dan perlu agar timbul kondisi kondusif bagi keamanan dan ketertiban di kamar, Tidak saja dalam kamar tapi juga di blok maupun keseluruhan area Lapas. Di blok dan area Lapas, keamanan dan ketertiban selain menjadi tugas petugas keamanan, juga dibantu para *pemuka, tamping* dan *korve*.

Upaya menjaga ketertiban dan keamanan di Lapas tidak hanya dioptimalkan dengan memanfaatkan aktor narapidana, tapi ditunjang dengan himbauan-himbauan

persuasif tertuang dalam spanduk-spanduk dan mural (tulisan dinding) di tembok Lapas. Kekurangan jumlah dan peran petugas ditutupi para aktor narapidana demi menjaga suasana kondusif dalam Lapas. Salah satu isi mural di dinding Lapas tertulis: “*Kita adalah Saudara, mari pelihara suasana aman, tertib dan damai, Disini kubangun diriku*”. Pada bagian lain tertulis motto Lapas yaitu “*Cermat, Tertib, Tanpa Keluhan*”.

Struktur ruangan kamar narapidana mempengaruhi interaksi sesama penghuni. Tiap-tiap kamar mempunyai cara dan ketentuan tak resmi (informal) soal aturan kamarnya. Tidak ada aturan baku soal pengaturan isi kamar ini. Secara kasat mata, kegiatan sehari-hari narapidana *berstatus jelas (pangeran)* maupun *tidak jelas (dayak)* berlaku sama dan rutin, hanya berbeda di malam hari saja saat di kamar, dimana *pangeran* bisa agak longgar bergerak dibanding *dayak* yang duduk saja sudah bersenpitan. Kalau siang hari banyak *napi dayak* tidur-tiduran di lapangan, koridor maupun taman karena malam harinya kasur atau matras hanya disediakan bagi napi yang memiliki *lapak tidur* digelar mulai jam sembilan malam. Narapidana *tidak jelas* dan tak memiliki lapak tetap harus tidur jongkok (**Gambar 5.3**).

Gambar 5.3
Tidur Jongkok



Sumber : Napi Zzi

Keterangan: Posisi tidur narapidana yang mencerminkan struktur sosial dalam kamar Lapas.

Gambar 5.3 dibuat **Zzi**, mendeskripsikan keadaan kamar dan suasana tidur di malam hari. Tampak dalam gambar *napi jelas* tidur terlentang sambil mendengkur, sedangkan *napi golongan tak jelas* atau *dayak* tidur jongkok sampai pagi sambil mengomel. Posisi tidur menggambarkan status seorang napi dalam kamar. Gambar 4.3 menunjukkan bagaimana struktur sosial narapidana dalam kamar, dimana struktur atas diwakili narapidana mampu yang tidur diatas ubin tinggi. Lapis struktur sosial kedua, ditempati para napi yang *tidur ditengah (kolong)* dan lapis struktur sosial rendah, diwakili mereka yang tak mampu dan harus tidur jongkok.

5.1.2. Bahasa Pergaulan & Aktor

Kesepakatan informal berlangsung dalam bergaul dan berinteraksi di dalam maupun luar kamar narapidana. Sarana atau media yang dipergunakan adalah bahasa pergaulan yang mengandung istilah-istilah yang hanya dapat dimengerti oleh narapidana dan petugas saja. Di dalam kamar, interaksi ditentukan posisi dan status si narapidana (tahanan), seorang *pangeran* akan mendapat keleluasaan berbicara di kamar dibanding dengan *dayak*. Berikut ini gambaran interaksi dalam kamar seperti aktivitas membaca, membereskan perlengkapan pribadi, menikmati secangkir teh, menonton televisi, membereskan loker yang dilakukan *pangeran* (**Gambar 5.4**). Adapun narapidana *tak mampu* hanya bergerombol di sudut ruangan, ada yang bengong, merenung maupun membantu membersihkan ruang dan areal sekitar kamar.

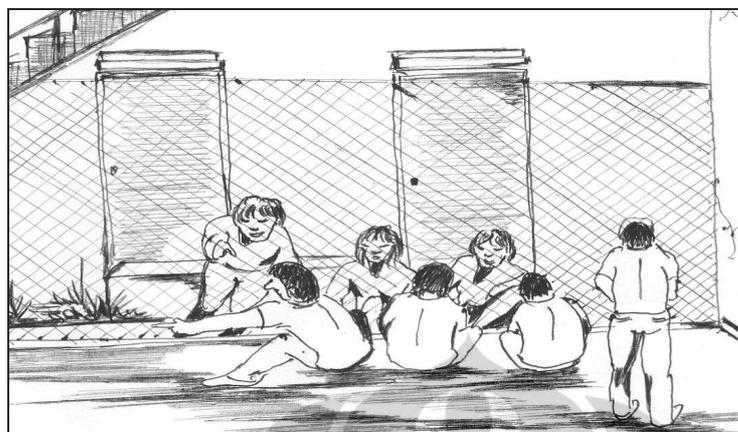
Gambar 5.4
Interaksi di Kamar



Gambar 5.4 dibuat oleh **Rzi**, mendeskripsikan keadaan kehidupan kamar dimana narapidana melakukan berbagai kegiatan secara bersama dalam ruangan kamar yang terbatas dan sirkulasi udara kurang. Ada yang membaca, nonton televisi (TV), membersihkan kamar maupun membuat kerajinan (cincin, gelang).

Selain di dalam kamar, interaksi dan “*gaul*” dilakukan di luar kamar dengan teman-teman berbeda kamar, blok, maupun petugas dan pengunjung (**Gambar 5.5**). Kata *dulur*, yang artinya saudara, sering dipergunakan dalam pergaulan agar terlihat lebih akrab dan mudah dikenali. Para penghuni melakukan kegiatan kesehariannya tidak sendiri-sendiri tapi dilakukan bersama.

Gambar 5.5
Interaksi Di luar Kamar



Sumber : Napi **Zzi**

Keterangan: Suasana bergaul dan berinteraksi antar napi antar blok yang dibatasi pagar kawat.

Gambar 5.5 dibuat **Zzi**, memperlihatkan bagaimana interaksi dan komunikasi berlangsung diantara para narapidana yang berbeda blok dan dibatasi pagar tinggi. Saat *gaul* biasanya narapidana mengobrol di tepi pagar dengan teman atau kenalan dari blok atau kamar berbeda. Dalam interaksi ini terjadi kesepakatan-kesepakatan sosial (informal) mulai sekedar menyampaikan salam pada seseorang di blok lain, menitipkan makanan pada seseorang tertentu, memberi pesan, mencurahkan isi hati, sampai menyampaikan barang barang kebutuhan ataupun benda-benda terlarang sesuai pesanan narapidana di kamar atau blok lain. Interaksi antar blok seperti dalam gambar 5.5. dilakukan karena sulitnya narapidana masuk dari blok satu ke blok lain. Kesepakatan-kesepakatan informal dilakukan dan dibuat untuk memenuhi kebutuhan, mendapatkan keleluasaan dan kebebasan karena dibatasi aturan formal. Kesepakatan informal ini dapat berupa sekedar tindakan atau perilaku taat aturan sampai tindakan yang melanggar aturan.

Kesepakatan informal diciptakan dan dilakukan terutama oleh *aktor-aktor* dari kalangan narapidana maupun petugas dalam satu lingkungan tertentu. **Zzi**, seorang narapidana berstatus *pangeran*, menguraikan berbagai tingkatan aktor narapidana dan petugas melekat dengan fasilitas dan kewenangan yang dimiliki, sebagai berikut:

“...Untuk tingkatan napi dimulai dari informan Lapas (pemuka); informan blok (formen); pemuka kebersihan, keamanan, ketertiban, olahraga, dapur; kepala kamar; pengeran, tamping blok, buser, korve dan dayak. Sedangkan tingkatan petugas dimulai dari Kalapas, Wakalapas, petugas staf administrasi (lantai 2), KPLP, wali blok, komandan regu pos jaga (porter), regu pos jaga, petugas kamtib, petugas biasa (kroco)...” (Wawancara **Zzi**, tanggal 16 Juli 2009)

Narapidana **Zzi** menggambarkan para aktor dan tingkatan statusnya, berpengaruh dalam melaksanakan kesepakatan informal. Aktor-aktor bisa berada pada jenjang tingkatan narapidana maupun petugas, jenjang aktor petugas dikenal hirarkis, mulai dari kalapas, petugas administrasi, KPLP, *wali blok*, komandan regu, *portir* dan seterusnya, sedangkan jenjang kalangan narapidana dikenal mulai dari pemuka, informan blok (formen), pemuka/tamping kebersihan, pemuka/tamping keamanan, pemuka/tamping ketertiban, pemuka/tamping olahraga, sampai tamping dapur, *kepala kamar*, *pengeran*, *tamping blok*, *buser* dan *korve*.

Pengakuan **Zzi** ini ditimpali petugas **Asi** yang mengatakan tidak semua petugas sepakat dengan kesepakatan informal yang dibuat di lapangan. **Asi** menjelaskan, “...Di kamar gak boleh juga terlalu enak nanti gak ada kapoknya, sekarang sudah overkapasitas membuat tersiksa jadi gak perlu lagi kekerasan oleh petugas, terus tidur nggak nyaman, gak bisa selonjor, nunggu nasi cadong tiga kali sehari...” (Wawancara **Asi**, tanggal 15 April 2009). Disini **Asi** sebagai petugas pengamanan tampak bersikap mendua, di satu sisi memegang kesepakatan formal, agar dalam kamar berlaku penghukuman, di sisi lain menyadari sulitnya mengatur kamar secara langsung. Menurut petugas **Asi** tak menutup kemungkinan bermunculan kesepakatan-kesepakatan informal dimana petugas seringkali memanfaatkan keadaan ini dengan menjadi perantara (*broker*). **Asi** yang sudah bertugas 15 tahun menceritakan pengalaman sebagai berikut:

“...Petugas gak nekan, tapi ada juga oknum pegawai seperti kapal selam atau broker. Seperti lapak harusnya gak ada, karena tahanan baru harusnya duduk dulu dibawah, 1 bulan kemudian baru diatas, digilir, nanti putus baru ke blok, nah yang dibawah baru ke atas. Ini semua tugas ka kamar, tapi kepala kamar (KM) bisa main, karena itu harus dipilih pembina blok, tapi pembina juga bisa main...” (Wawancara **Asi**, tanggal 15 April 2009).

Uraian **Asi** menunjukkan kesepakatan-kesepakatan informal dibiarkan saja berlangsung di lapangan karena ketidakmampuan organisasi Lapas secara sistemik. Keterbatasan petugas, membuat mau tak mau melibatkan narapidana menjaga kamar masing-masing dan ketertiban blok. Hasil kesepakatan bersama aktor napi dan petugas terjadi memanfaatkan kelemahan atau kekurangan aturan formal yang tidak

didukung sarana, prasana dan sumber daya manusia (SDM) memadai. Persetujuan bersama kedua belah pihak menjadi kesepakatan informal yang berlaku nyata di lapangan. Seorang narapidana lebih mendengarkan apa yang dikatakan petugas blok daripada mengikuti aturan formal yang berlaku. Kesepakatan informal petugas dan napi telah menjadi *aturan lokal* yang berlaku operasional dalam Lapas. Para aktor narapidana maupun petugas saling memberitahu dan mensosialisasikan *ketentuan bersama* ini pada sesama petugas maupun narapidana lain.

Berlakunya kesepakatan informal membuat narapidana menjalankan kesetiaan untuk mendapatkan kepercayaan, perlindungan dan terpenuhinya kebutuhan tertentu. Sebagai contoh, ada larangan menggunakan *handphone*, prakteknya narapidana diam-diam menggunakan *handphone*, untuk itu mereka setia memberikan uang perlindungan kepada petugas tertentu demi kebebasan menelepon (*handphone*). Contoh, narapidana *pembantu* seharusnya membantu petugas mengawasi narapidana lain tapi secara terselubung *narapidana pembantu* malah lebih setia kepada sesama narapidana dibanding petugas, mereka membiarkan saja perilaku melanggar yang dilakukan narapidana lain karena solidaritas bergaul sesama napi. Kesepakatan informal marak menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar seperti memakai *handphone* untuk berinteraksi dengan pihak keluarga, kebutuhan perut seperti membeli atau menjual rokok, roti serta pemenuhan kebutuhan sekunder lainnya.

Kesepakatan informal mempergunakan bahasa tersendiri (lokal) hanya dapat dimengerti penghuni di balik tembok Lapas. Bahasa pergaulan ini harus dipelajari narapidana (baru) untuk berinteraksi selanjutnya dalam kamar maupun blok, selain untuk mempererat hubungan dengan petugas dan tamping. Bahasa spesifik ini menjaga kerahasiaan aktivitas yang berlangsung dalam Lapas dari amatan orang luar. Berikut ini beberapa istilah yang dipergunakan dalam berinteraksi di kamar dan blok sebagaimana penulis ikuti di lapangan (**Tabel 5.1.**)

Tabel 5.1
Bahasa Istilah Dalam Lapas

| No | Bahasa/Istilah/Kode | Arti/Maksud |
|----|---------------------|--|
| 1 | Cadong | Makanan pokok dan seadanya yang diberikan pihak LP |
| 2 | Disk | Segala macam bentuk pemberian dari LP yang dapat dipakai secara umum yang tidak dapat dibawa keluar dan menjadi ciri khas LP, misal baju disk, celana disk, nasi disk, dll |
| 3 | Preman (reman) | Kebalikan dari disk. Segala macam pemberian dari dunia luar yang bukan untuk umum dan menjadi ciri khas dunia luar, misal nasi reman cewe reman |
| 4 | Nyokai (nyanyi) | Segala macam bentuk pengaduan atau komentar kepada pihak berwenang dan yang terkait dalam LP misal ngadu ada HP |
| 5 | Modus | Segala macam bentuk kebohongan, berbohong melakukan trik bohong atau omong kosong |
| 6 | GM (ngegambar) | Segala macam bentuk pengintaian atau pengamatan terhadap sesuatu |
| 7 | “R” (residivis) | Sebutan atau panggilan bagi napi yang sudah lebih dari satu kali masuk penjara |
| 8 | Kijang Baru | Sebutan atau panggilan bagi napi/tahanan yang baru pertama kali masuk penjara |
| 9 | Tembus | Segala sesuatu berita yang sudah diketahui sebelumnya |
| 10 | KM (kepala kamar) | Jabatan tertinggi di dalam kamar atau yang bertanggung-jawab didalam kamar |
| 11 | Buser | Tangan kanan KM |
| 12 | Sekolah | Segala macam bentuk pemerasan termasuk menggunakan kekerasan |
| 13 | Brengos | Tangan kanan Buser yang bertugas menjadi algojo (tukang pukul) |
| 14 | Otak Kotor | Segala macam bentuk kecurangan dalam memanipulasi uang pribadi didalam kamar, misal saat dibesuk bawa uang, di kamar bilang tak ada tak setor sama KM |
| 15 | Otak-otakin | Segala macam bentuk pendoktrinan, penghasutan dan pembesaran masalah |
| 16 | Tembakan | Alat memasak air memakai tenaga listrik (seperti hitter) |
| 17 | Botol | <i>Handphone</i> |
| 18 | Asbak | Penadah barang-barang hasil curian (480) |
| 19 | Ngembet | Mengadukan orang lain selain kita sendiri agar terlibat dalam satu kasus bersama |
| 20 | Bangkong | Tas |
| 21 | Pemetik | Pencuri |
| 22 | Cepu | Mata-mata suruhan petugas yang digunakan sebagai alat pemancing pada kasus-kasus tertentu (terutama narkoba) |
| 23 | BW (blok Wanita) | Blok khusus wanita |
| 24 | Bokap | Petugas Laki-laki |
| 25 | Nyokap | Petugas perempuan |
| 26 | Dayak | Napi/tahanan yang tidak pernah dibesuk, hidup susah di Lapas, disebut orang miskin |

| | | |
|----|-----------------------------|--|
| 27 | Pengeran | Kebalikan dari dayak, orang yang sering dibesul (orang kaya) |
| 28 | Korve | Napi yang bertugas menjaga kebersihan (pesuruh) |
| 29 | Tamping | Napi yang dipekerjakan (pendamping atau perpanjangan tangan petugas) |
| 30 | Peleg (p-leg/velg) | Polos, miskin, tanpa apapun missal makar cadong velg artinya tanpa apapun |
| 31 | Lacak | Segala macam bentuk pencarian terhadap sesuatu barang atau benda baik hidup maupun mati |
| 32 | Nyiram | Segala bentuk penyuaipan terhadap aparat kejaksaan dan hakim dalam persidangan |
| 33 | Mail (mel) | Segala macam bentuk pungutan yang dilakukan petugas dalam LP |
| 34 | Lapak | Tempat untuk tidur yang dibeli dalam kamar melalui KM |
| 35 | Apel | Momen penghitungan jumlah napi/tahanan dalam kamar oleh petugas |
| 36 | Stut | Sebutan untuk napi kasus-kasus pencabulan dan perkosaan |
| 36 | P-lor (pelor) | Uang yang digulung & dibungkus plastik hingga kecil menyerupai kapsul |
| 37 | Ompreng | Rantang nasi catering yang disediakan LP dibagikan untuk semua napi & tahanan dengan menu seadanya |
| 38 | “86” (uang damai) | Suatu imbalan untuk pekerjaan atau imbalan agar yang ingin dilakukan dapat terlaksana |
| 39 | Gaul | Sesuatu barang yang diberikan atau dibagikan pada sesama napi agar dapat berteman |
| 40 | Ngeressing | Mencari nafkah atau meminta untuk bekal makan, rokok atau ngopi |
| 41 | Nyebrang | Bergaul atau main dari blok napi ke blok tahanan |
| 42 | SBP (<i>sex by phone</i>) | Dilakukan sebagian napi yang menyalurkan hasrat seksual dengan menelepon istrinya pasangannya. |
| 43 | Sikim | Alat yang terbuat dari gagang sikat gigi yang diasah hingga tajam dan menyerupai pisau. |
| 44 | Dulur | Saudara |
| 45 | Kegep | Ketangkap petugas |
| 46 | Diroll | Didata |
| 47 | Sangkutan | Utang-piutang |
| 48 | Ngeloco | Masturbasi |
| 49 | Ubas | Narkotika dan obat-obatan |
| 50 | 86 | Uang damai |
| 51 | Rentenir | Peminjam uang |
| 52 | Bon | Hutang (pinjam) |
| 53 | Sel Tikus | Sel pengasingan |
| 54 | Bocor | Ketahuan |
| 55 | Nyolong | Mencuri |
| 56 | Pindah Kamar | Sanksi bagi pelanggar aturan kamar |
| 57 | Pajak | Setoran (gaulan) |
| 58 | Kapal Selam | Broker (perantara) |
| 59 | Jatah | Pembagian |
| 60 | Lapak Atas | Tempat tidur diatas |
| 61 | Lapak Kolong | Tempat tidur ditengah |
| 62 | Lapak Bawah | Tempat tidur di lantai (ubin) |
| 63 | Napi jelas | Napi mampu dalam hal keuangan |
| 64 | Napi Tak Jelas | Napi tak mampu dalam hal keuangan |

| | | |
|----|----------|--|
| 65 | Donatur | Para napi mampu yang mengumbang dana dalam berbagai kegiatan |
| 66 | Ngebata | Memukul pihak lawan yang berselisih |
| 67 | Gulungan | Pemukulan |

Sumber : Data Peneliti

Beragam istilah bahasa *gaul* ini dipakai untuk berkomunikasi dan berteman di kamar maupun blok. Melalui penguasaan bahasa ini, kesepakatan-kesepakatan informal dimengerti dan dilakukan kedua belah pihak demi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan bersama.

5.2. Kebutuhan dan Pemenuhan Kebutuhan

Menurut pengamatan penulis kebutuhan narapidana di Lapas secara umum dapat dibagi menjadi dua kebutuhan utama yaitu kebutuhan pribadi dan kebutuhan kamar. Kebutuhan pribadi berbeda-beda tergantung status, strata sosial, selera makan dan kenyamanan tidur, sedangkan kebutuhan kamar hampir sama pada semua kamar narapidana. Seorang narapidana **Bri** mengatakan kebutuhan pribadi dan kebutuhan kamar di Lapas sebagai berikut:

“...Kalau kebutuhan pangeran depan adalah Rp. 200.000 per bulan untuk kamar, dengan biaya tarif Rp. 150.000 per besukan dan mingguan sebesar Rp. 2000 yang dipungut tiap hari sabtu, lalu membayar korve bersih-bersih kamar dan korve pribadi untuk cuci pakaian dan piring Rp. 20.000 per besukan. Beda lagi dengan pangeran belakang yaitu Rp. 70.000 per bulan dengan biaya tariff Rp. 50.000 per besukan dan mingguan Rp. 2000, lalu korve pribadi dan korve kamar Rp. 20.000 per besukan. Beda lagi dengan dayak, mereka tidak dikenakan uang bulanan tapi hanya biaya tarif besukan sebesar Rp. 50.000 per besukan dan uang mingguan Rp.2000 dan korve kamar Rp10.000. Mereka tidak dikenakan korve pribadi karena umumnya dayak tersebut tidak mau memakai dan melakukan segalanya sendiri dari cuci baju dan piring. Kalau untuk biaya makan umumnya berbeda-beda tergantung kemampuan masing-masing karena pada dasarnya sudah ada makanan “cadong”. Sedangkan kebutuhan kamar per hari sebagai berikut: biaya pembayaran mel petugas Rp. 3000 X 15 orang (3 regu), mel komandan regu jaga Rp. 10.000 x 4 orang, mel wali blok Rp.20.000 x 2 orang, mel petugas KPLP Rp.20.000 x 3 orang. Belum lagi kebutuhan bayar listrik Rp.5000/bulan, dapur Rp.500.000/bulan (untuk tamping dapur), kebersihan Rp.20.000/bulan (untuk karbol, sapu, pel), Jadi menurut hitungan saya dalam satu bulan untuk kebutuhan kamar saya sekitar Rp. Rp.5.670.000, per bulan...” (Wawancara **Bri**, tanggal 18 Agustus 2009)

Dari uraian **Bri**, diperoleh gambaran biaya cukup besar diperlukan untuk mengelola satu kamar, mencakup *mel* petugas, kebutuhan membayar listrik, dapur, kebersihan, keindahan, perlengkapan kamar, dan menjaga keamanan kamar. Pemenuhan kebutuhan ini merupakan kesepakatan informal diantara kepala kamar

(KM) dan anak kamar. Dengan biaya kebutuhan kamar yang begitu besar, tak ada pilihan lain bagi kepala kamar meminta narapidana (*anak kamar*) memenuhi kebutuhan tersebut. Keadaan ini menciptakan kesepakatan informal tentang cara memenuhi atas berbagai biaya dalam pengelolaan kamar ini.

Untuk kebutuhan pribadi narapidana umumnya mencakup *kebutuhan primer* seperti makan, tidur, cuci baju, cuci piring dan *kebutuhan sekunder* seperti berkomunikasi dengan keluarga dan kebutuhan alat-alat mandi. Secara normatif pemenuhan kebutuhan dasar primer telah disediakan pihak Lapas terutama kebutuhan dasar seperti makan, minum, ditambah fasilitas televisi, kantin, aula, air cuci, listrik, wartel, perlengkapan handuk, sabun, sikat-gigi, odol dan sandal. Tapi pelaksanaannya sangat variatif, ketidakmampuan Lapas memenuhinya secara maksimal membuat pemenuhan ini diserahkan pada masing-masing narapidana, terutama pemenuhan kebutuhan *sekunder* dan *tertier* yang tak bisa diatur secara ketat dalam Lapas. Tiap narapidana mempunyai kebutuhan *sekunder* dan *tertier* berbeda, sehingga pemenuhan kebutuhan ini beragam seperti mengisi waktu luang, membuat kerajinan tangan, ikut pesantren, masuk anggota band, memakai *handphone*, memegang uang, mencari uang pemasukan, memenuhi kebutuhan seksual, memasukkan barang terlarang dan seterusnya. Dalam konteks pemenuhan ini, aktor petugas dan narapidana menjalankan kesepakatan informal dengan memanfaatkan celah aturan formal yang ada.

Kesepakatan informal ini dapat dikategorikan sebagai suatu fungsi penggunaan waktu di Lapas, berhubungan erat dengan kualitas hidup sebelum di Lapas. Penggunaan waktu di penjara dihubungkan lamanya penghukuman & tingkat keamanan penjara. Penyesuaian perilaku di penjara sebagian besar dibawa dari luar penjara, merefleksikan gaya hidup dan karakteristik narapidana sebelum di penjara. (Mandeep K. Dhami, Peter Ayton & George Loewenstein, 2007 : Vol. 34 No.8, p. 1085). Berbagai penyesuaian ini tampak dalam pemenuhan kebutuhan primer maupun *sekunder (tertier)*. Penyesuaian (adaptasi) bagi *pangeran* dan *dayak* dilakukan secara berbeda. Lama hukuman membuat *narapidana pangeran* atau *dayak* tak begitu memikirkan bagaimana kondisi kehidupan di Lapas tapi menjalani saja sampai masa hukuman selesai. Hal ini berbeda dengan tahanan yang masih stres, bingung dan khawatir tentang hukuman apa yang akan diterima.

Pengamanan Lapas bagi tahanan dan narapidana berbeda. Untuk status tahanan diberlakukan *maximum security* karena masa ketidakpastian yang dialami, sedangkan narapidana telah jelas putusan pidananya, berlaku *medium security*, lebih

longgar dibanding blok tahanan. Selanjutnya narapidana yang telah menjalani 2/3 masa hukuman, pengamanan terhadap mereka menurun, diberlakukan *minimum security*. Semakin longgar pengamanan membuat napi lebih leluasa melakukan aktivitas, menjalankan berbagai kegiatan sebagaimana dilakukan masyarakat di luar Lapas.

Kebutuhan narapidana menjadi *concern* dalam telusuran penelitian lapangan ini mencakup kebutuhan makan, komunikasi, berdagang & hutang, kebutuhan seksual dan kebutuhan hiburan. Pemenuhan berbagai kebutuhan ini merupakan kenyataan yang mendasari berlangsungnya kesepakatan informal dalam Lapas. Berbagai kesepakatan informal menampilkan budaya penjara yang nyata, memainkan peranan penting dalam kehidupan sosial Lapas. Keadaan ini menjadi *concern* penulis karena kesepakatan informal begitu menonjol dalam kehidupan keseharian Lapas sebagaimana pengamatan penulis di lapangan.

5.2.1. Kebutuhan Makan

Pemenuhan kebutuhan makanan sangat bervariasi dan banyak pilihan. Sesuai aturan berlaku, pemenuhan makanan dimulai dari *nasi cadong*, makanan kantin sampai pesanan melalui rumah makan di luar Lapas. Kesepakatan informal dilakukan untuk memenuhi kebutuhan makan, dengan cara di beli dari luar Lapas oleh *tamping luar* atau dibeli petugas, memesan catering dibuat keluarga penghuni, yang penting asal mampu membeli dan membayar.

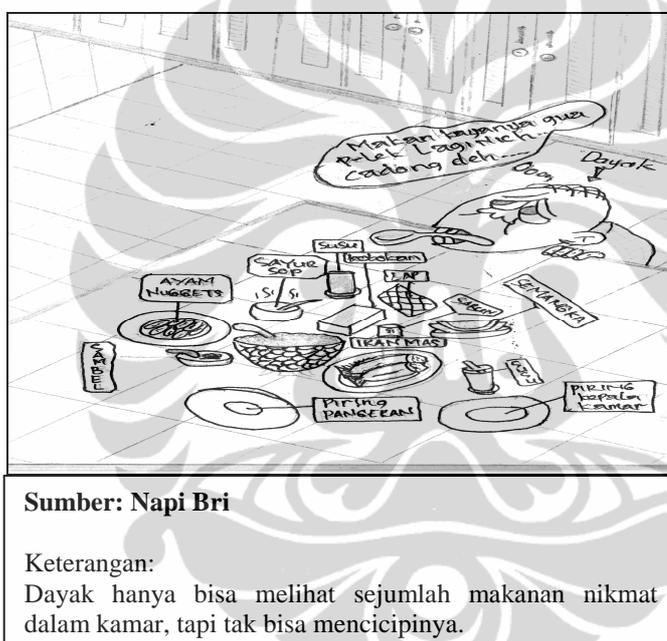
Untuk memperoleh masakan dari dapur, kesepakatan informal dibuat dengan *tamping dapur*, dimana makanan bisa didapat dan dipesan dari dapur berupa lauk pauk dan sayuran yang diolah "*tamping*" dapur (selain *cadong*). Pesanan ini diperjual-belikan tanpa ketahuan petugas atau petugas pura-pura tidak tahu karena terkait dengan kebutuhan perut narapidana. Makanan olahan dapur bisa berupa sayur bening, tempe orek, tempe goreng, semur daging, oseng daging, nasi uduk atau nasi goreng. Makanan ini tentu lebih menggugah selera dibanding makan nasi cadong.

Untuk narapidana *strata kurang mampu* seringkali mensiasati makanan cadong dengan jenis makanan lain. Makanan cadong dicampur dengan lauk mie rebus atau goreng, campuran lauk ini menjadi makanan lumayan nikmat bagi mereka, meski terkadang harus berebut mendapatkan "*tembakan*" (tempat memasak air) sebagai satu-satunya alat memasak mie dan air dalam kamar. Mereka memasak mie dalam kamar karena ada colokan listrik di masing-masing kamar. Antrian dalam memakai

alat memasak listrik, membuat mie yang disiapkan hanya bisa sekali saja diseduh air panas karena narapidana lain sudah menunggu giliran memasak. Selain *makanan cadong*, ada *air cadong* yaitu air panas dimasak dalam panci besar, dibagikan menggunakan jerigen ke kamar-kamar selama empat kali dalam satu hari.

Berbeda dengan *pangeran*, narapidana *tak mampu (dayak)* hanya bisa melihat sejumlah makanan nikmat yang tersedia di ruang kamar para *pangeran*, mereka tak boleh mencicipi makanan tersebut kecuali menunggu belas kasihan para *pangeran* untuk berbagi dengan mereka (Gambar 5.6).

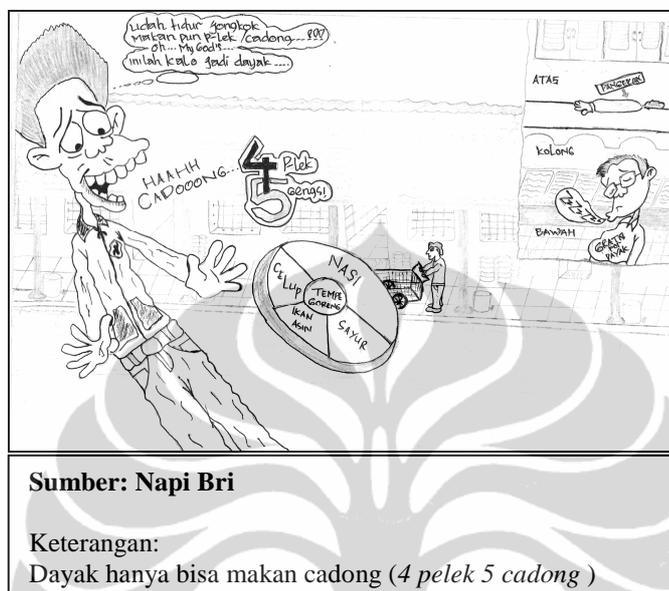
Gambar 5.6
Menunggu Belas Kasihan



Gambar 5.6 dibuat **Bri**, seorang narapidana *dayak*, untuk memperlihatkan keadaan di kamar dimana narapidana *dayak* biasanya menunggu para *pangeran* selesai menikmati makanan yang dibeli dari luar Lapas, dan berharap mendapat sisa bagian dari makanan *reman* tersebut. Dalam gambar terlihat seorang narapidana mengomel, "Makan bagian cadong lagi deh", padahal dihadapannya tersedia menu *pangeran* seperti sayur sop, ayam nuget, susu, semangka, ikan mas, dan kelengkapan makan *pangeran* lainnya. Jenis makanan dari luar sangat beragam, melalui petugas atau tamping, para *pangeran* bisa memesan makanan apa saja sesuai keinginan dan kemampuan sebagaimana makanan dinikmati masyarakat umum di luar penjara.

Berbeda dengan *dayak*, tidak bisa memilih makanan yang diinginkan, hanya bisa menikmati makanan *cadong* yang disediakan pihak Lapas (**Gambar 5.7**).

Gambar 5.7
Dayak: 4 Sehat & 5 P-lek



Gambar 5.7 dibuat **Bri**, seorang narapidana *dayak*, mendeskripsikan ekspresi kebosanan *napi dayak* memakan secara rutin *nasi cadong* yang disediakan pihak Lapas. Dalam gambar terlihat menu makan *dayak* terdiri dari nasi, tempe, sayur dan ikan asin, yang disebut *4 pelek dan 5 cadong*, sebagai suatu sinisme ketidakmampuan dan keprihatinan para *dayak*. Dalam gambar 5.7 tampak seorang narapidana mengomel, "Udah tidur jongkok, makan cadong...oh my god, inilah kalo jadi dayak", sementara disebelah kanan atas gambar narapidana *pangeran* selesai makan, kenyang, perut buncit, sedang tidur nyenyak dan berselimut.

Sebagian besar narapidana seringkali makan bersama *teman seperkara (SPK)* atau teman relasinya. Sesama *pangeran* makan dengan *pangeran*, sesama *dayak* makan dengan *dayak*. Para *pangeran* umumnya tak mengambil makanan *cadong* tapi membeli makanan dari luar, dan membayar bergantian atau patungan diantara mereka. Contohnya, satu kelompok *SPK* makan *pangeran* ada lima orang, maka dalam tiga puluh hari sebulan, tiap enam hari satu orang menanggung makan lima orang dengan menu beragam, yang disebut *nasi reman* yaitu nasi yang dibeli khusus bukan nasi jatah. Enam hari berikut ditanggung anggota *SPK* lain, begitu seterusnya, bergantian sampai giliran anggota *SPK* yang kelima. Kesepakatan informal diantara sesama

narapidana ini didukung petugas dalam rangka saling menanggung dan berbagi rasa sewaktu memenuhi kebutuhan makan.

5.2.2. Kebutuhan Komunikasi

Kebutuhan sekunder yang cukup krusial adalah berkomunikasi dengan pihak keluarga. Berkomunikasi ini dimungkinkan karena tersedianya alat-alat komunikasi seperti warung telekomunikasi (*wartel*) dan *handphone* (*HP*). Narapidana blok C, **Lbi** menceritakan pihak Lapas menerapkan secara tegas larangan penggunaan sarana komunikasi telepon selular/*handphone*, apalagi saat ada program-program khusus seperti program wajib *Bulan Tertib Lapas* (*Buterpas*) Departemen Hukum & HAM. Petugas **Gni** secara tegas mengatakan maraknya peredaran narkoba dari dalam Lapas merupakan salah satu acuan bagi petugas untuk menertibkan telepon selular dari dalam Lapas. Sanksi yang diberikan bagi narapidana yang diketahui memiliki/menggunakan *HP* cukup berat, yaitu antara lain *HP* dihancurkan oleh petugas, tidak bisa mengikuti program PB, CB, CMB atau asimilasi, di mutasi ke lapas daerah seperti Cirebon dan Bandung. Tapi ketegasan ini tidak berlaku sepanjang waktu, kesepakatan informal dalam praktek membuat sanksi formal bisa dinegosiasikan sesuai kesepakatan yang diinginkan bersama. Seorang napi narkoba **Lbi** menuturkan:

*“...Didalam Lapas ada petugas yang mengizinkan bahkan melindungi pemilik dan pengguna HP tapi itupun dikenakan biaya (86). “86” adalah suatu imbalan untuk pekerjaan atau suatu imbalan agar semua yang dilakukan atau diinginkan dapat terlaksana. Di dalam kamar saya, bisa ada napi sekitar 20 orang yang memiliki HP. “86” yang diberikan pada awalnya Rp. 10.000 per kepala yang memiliki HP, dibayarkan ke petugas/pembina blok. Rp 10.000 tersebut disetorkan/dibayarkan wakil kepala kamar sesuai dengan instuksi kepala kamar, yang dikoordinir seminggu sekali”. Bagi anak bawah, penggunaannya sembunyi-sembunyi, handphone sangat vital karena anak bawah yang rata-rata jarang dibesuk/dikunjungi sering memanfaatkan HP untuk “melacak” atau meminta sejumlah voucher untuk dijual kepada napi/tahanan lain. Harga jual voucher di dalam lapas, untuk voucher 25 ribu dijual @ Rp. 18.000-20.000, voucher 50 ribu dijual @ Rp. 35.000, voucher 100 ribu dijual @ Rp.70.000-75.000...” (Wawancara **Lbi**, tanggal 30 September 2009).*

Uraian **Lbi** ini menunjukkan protap larangan *handphone* (*HP*) diberlakukan tegas oleh pihak Lapas, tapi tidak oleh beberapa petugas lain. Mereka melaksanakan protap sekaligus menjadi pelindung dan pengaman *handphone* yang beredar di blok narapidana. Hal ini terjadi karena ada kesepakatan-kesepakatan informal berupa imbalan atas penyimpanan *HP* tersebut, selain itu petugas yang melindungi biasanya mendorong penggunaan *HP* untuk keperluan kamar (KM) seperti menelepon anggota

keluarga penghuni agar membayar setoran-setoran kamar yang belum dibayar atau belum lunas. Kesepakatan kesepakatan informal secara umum ditandainya dengan gerakan-gerakan isyarat, bahasa, ucapan yang dikenal dengan sebutan “86”, “cincai”, “beres”, “lancar”, “aman”, “siap”, “gaulan”, dan “setoran”.

Penggunaan *handphone* sebagai kebutuhan sekunder menimbulkan persoalan pelik dalam Lapas. Berkomunikasi dengan keluarga menjadi alasan utama narapidana memenuhi kebutuhan sekunder ini, tapi ada pula narapidana yang memanfaatkan untuk kebutuhan pribadi lain. Salah satu bentuknya adalah *rental handphone* (HP). Bagi narapidana yang *merental HP* sangatlah menguntungkan karena selain dapat berbisnis *sewa HP* satu malam Rp 25.000, *rental HP* dijadikan pemasukan untuk dapat bertahan di Lapas. Namun tak jarang kerugian dialami para perental tersebut saat *HP* tersebut *kegep* atau ketangkap petugas atau rusak.

Secara umum penggunaan *HP* mulai marak jika malam tiba (**Gambar 5.8**), pemakai *HP* umumnya *napi jelas* atau *pangeran*, mereka bisa berlama-lama memakai *HP*, berbeda dengan narapidana biasa yang dibatasi waktu meneleponnya. **Lbi** menguraikan bagaimana situasi saat *HP* ramai dipergunakan di kamar: “...*Komunikasi lewat HP begitu mesra terdengar, bahasa rayu, sendu, mesra, bahkan menggairahkan terdengar, curahan hati tertuang, entah benar atau tidak yang penting asik. Tiada malam tanpa bercumbu walau cuma lewat udara...*” (Wawancara **Lbi**, tanggal 30 September 2009). Uraian **Lbi** memperlihatkan penggunaan dan perbincangan *HP* malam hari di dalam kamar bisa didengar semua *anak kamar*, bahkan sesama *anak kamar* bisa ikutan menelepon atau *sms* ke sesama teman kamar lain, antar blok maupun ke rumah. Berikut ini adalah gambaran bagaimana suasana saling telepon dalam kamar satu ke kamar lain (**Gambar 5.8**).

Gambar 5.8
Menggunakan HP Di Kamar

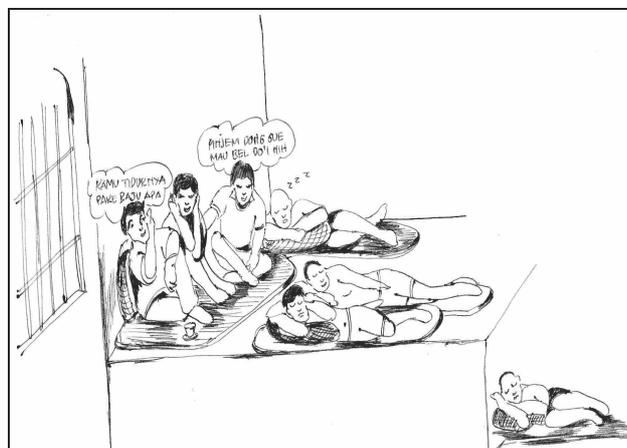


Sumber: Napi Lbi

Keterangan: Berkomunikasi lewat *HP* malam hari di sudut kamar.

Gambar 5.8 dibuat **Lbi**, menggambarkan suasana saling ngobrol dan sambil menelepon narapidana satu dengan lain. Dalam gambar, salah satu narapidana berkata sambil telepon, "Aku belum tidur, gak ngantuk?", yang lain menimpali, "Ngebel siapa tuh?". Suasana menelepon sambil tiduran dan *selonjor* ini hanya dapat dinikmati para *pangeran*, sedang *dayak* tak bisa berlama-lama menelepon seperti ini. Perbedaan ini ditunjukkan dalam gambar berikut, dimana *pangeran* menelepon sambil menikmati pembicaraan sedangkan *dayak* hanya bisa mendengarkan dan diam saja (**Gambar 5.9**).

Gambar 5.9
Komunikasi Sambil Tiduran



Sumber: Napi Lbi

Keterangan: Menelepon sambil tiduran, ngobrol, berbaring dalam kamar

Universitas Indonesia

Gambar 5.9 dibuat **Lbi**, memperlihatkan bagaimana *penghuni kamar* saling menelepon atau *sms* satu sama lain, sambil tiduran, ngobrol, berbaring atau jongkok di *lapak* tempat tidur masing-masing. Dalam gambar 5.9 berlangsung percakapan, "Kamu tidurnya pake baju apa?", "Pinjam dong, gua mau ngebel *doi* nih!". Menelepon dilakukan narapidana di bagian-bagian tersembunyi dalam kamar sebagai bagian kesepakatan informal dalam kamar agar tidak ketahuan dan tertangkap petugas yang melakukan patroli malam.

5.2.3 Berdagang & Hutang

Dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dalam Lapas, narapidana yang memiliki modal, ikut berjualan kopi, rokok atau mie. Para penjual ini disebut *penjual asongan*, mereka selalu dikenakan "86" oleh para *korve* blok sebagai bagian kesepakatan informal yang berlaku dalam kamar dan blok. Setiap pedagang dikenakan "gaulan" pagi hari Rp. 2000. dan sore hari Rp. 2000, belum lagi kalau jualan *nyebrang* blok harus membayar uang kunci Rp. 1000. Jadi kira-kira harus ada uang *gaulan* Rp.5000 untuk bisa berjualan dalam blok selama satu hari. Namun menurut seorang penjaga blok Wa, "86" itu tak masalah karena pendapatannya Rp.35.000 bersih per hari, bisa kembali untuk modal berjualan lagi". Bisnis dagangan tak hanya berasal dari modal beberapa napi, ada pula milik petugas yang dijaga napi yang tentu saja tidak dikenakan uang *korve*.

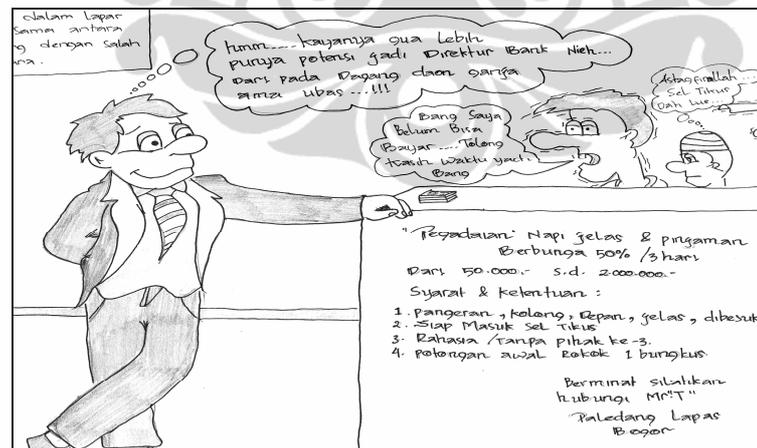
Meskipun di Lapas sudah ada kantin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penghuni tapi tetap saja "*penjual asongan*" marak dan laku jualannya. Para penjual ini bisa ditemukan sepanjang kamar, koridor blok, pos jaga maupun tempat jemuran. Barang dagangan yang dijual mulai dari rokok, roti, kripik, gorengan sampai permen dan kue-kue. Modal berdagang selain dari kocek sendiri juga dari meminjam dan berhutang.

Kesepakatan informal yang melandasi timbulnya penjual dan barang dagangan menyebabkan masalah lain yaitu banyaknya *kasus bon atau hutang* dalam Lapas. Ini menjadi fakta luar biasa mewabah dalam Lapas. Sebagai contoh, setiap kali makan atau merokok dapat *di bon atau hutang* dulu, tetapi tidak semua narapidana diperbolehkan *ngebon* oleh si penjual. Khusus untuk kepala kamar, pangeran atau napi *sering dibesuk* saja yang boleh mengutang. Caranya, dengan menuliskan nama pada buku catatan hutang yang tersedia, pengecualian bagi *narapidana biasa* boleh

hutang untuk satu hari saja misalnya ngambil pagi atau siang maka sorenya sudah harus dibayar.

Hutang menjadi bagian kesepakatan informal yang melekat pada kehidupan sosial Lapas. Mulai dari pengutang dan pemberi hutang melakukan kesepakatan didasari kepercayaan semata tanpa ada kesepakatan tertulis. *Hutang* dalam Lapas menciptakan sosok *aktor atau figur tempat peminjaman uang*, seperti *tamping* ataupun narapidana yang mempunyai jaringan luas di Lapas. Tempat peminjaman uang melekat pada sosok narapidana yang memang masa hukumannya cukup lama, sering disebut *napi elit* di blok dan punya dukungan perlindungan petugas. Tak tanggung-tanggung kesepakatan informal dalam peminjaman harus melalui beberapa syarat: Pertama, hanya berlaku bagi *status pangeran, kolong, depan, jelas* dan *dibesuk*. Kedua, siap masuk *sel tikus* bila mangkir. Ketiga, menjaga rahasia dan tanpa melalui pihak lain. Keempat, potongan awal rokok satu bungkus. Peminjaman ini berbunga 50% per tiga hari, peminjaman mulai dari Rp 50.000 sampai Rp 2.000.000. Bisa dibayangkan keuntungan yang diperoleh bila si peminjam jika telat satu hari saja. Contoh meminjam satu juta, baru bisa membayar pada hari keempat, maka jumlah pinjaman dan bunga sudah menjadi Rp 1.500.000 (**Gambar 5.10**).

Gambar 5.10
Sosok Rentenir Peminjam Uang



Sumber: Napi Zzi

Keterangan: Ini hanya analogi napi yang menjadi tempat peminjaman uang dengan bunga yang sangat tinggi, mirip direktur sebuah bank

Gambar 5.10 dibuat **Zzi**, mendeskripsikan keberadaan *rentenir napi* di Lapas yang bertugas meminjamkan uang kepada napi lain dengan bunga sangat tinggi. Fenomena *rentenir* bisa terlaksana dan subur di Lapas karena didukung aktor petugas yang mengeksekusi para pengemplang hutang tersebut. Dalam gambar dilukiskan bagaimana *rentenir napi narkoba* sedang berpikir, "Hmmm kayaknya gua lebih punya potensi sebagai direktur bank neh daripada dagang daun ganja ama ubas (narkoba)", sedang disebelahnya adalah napi korban *rentenir* yang memohon, "Bang saya belum bisa bayar....kasih waktu yah", ditimpali temannya, "Astagfirullah, sel tikus dah loe".

Sel tikus adalah sanksi bagi mereka yang melanggar kesepakatan informal, mengemplang utang, dimana pelaksanaannya diatur aktor petugas tertentu. *Sel tikus* merupakan tempat hukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran berat (*daftar F*) malah dipergunakan sebagai tempat pelaksanaan sanksi informal bagi para pegemplang hutang.

5.2.4. Kebutuhan Seksual

Beragam upaya dimungkinkan dalam pemenuhan kebutuhan di Lapas termasuk kebutuhan seksual. Dhami, Ayton & Loewenstein (2007) mengatakan sebagian besar perilaku adaptasi dibawa dari luar penjara, merefleksikan gaya hidup dan karakteristik narapidana sebelum di penjara. Salah satunya adalah kebutuhan seksual. Kebiasaan memenuhi kebutuhan seksual sebelum masuk Lapas menjadi persoalan pelik karena sulit terpenuhi dalam Lapas. Oleh karena itu celah aturan formal sering dimanfaatkan sebagai bagian kesepakatan informal untuk melakukan *SBP (sex by phone)* yaitu bercinta lewat *telephone* (**Gambar 5.11**), dimana penelepon dan yang ditelepon saling berimajinasi seolah-olah sedang melakukan hubungan intim dengan ucapan mendesah atau berkata-kata merayu sampai kedua imajinasi keduanya bertemu. *SBP* umumnya dilakukan dengan orang yang telah dikenal, pasangan, atau terkadang lewat jasa pelayanan telepon *sex*.

Selain *SBP*, pemenuhan kebutuhan seksual narapidana laki-laki biasanya dilakukan dengan masturbasi di kamar mandi. Kebetulan hampir semua kamar narapidana telah dilengkapi kamar mandi sendiri, biasanya dilakukan malam hari saat tidur, terbatas hanya *napi yang jelas* saja. Masturbasi atau lebih dikenal dengan "ngeloco" terkadang dilakukan memakai gambar-gambar wanita seksi yang dijual di kamar sebagai bahan masturbasi. Narapidana **Zzi**, menceritakan masih ada satu-dua

narapidana yang memanfaatkan anak-pidana yang ketakutan untuk menyalurkan hasrat seksual, tapi makin berkurang karena anak-pidana akan melapor kejadian tersebut pada petugas keamanan. Ada pula narapidana lain yang mempergunakan *waria* untuk menyalurkan kebutuhan seksual baik disengaja dibawa masuk ke Lapas atau *waria* yang berstatus narapidana (tahanan). *Waria* sering dipergunakan beberapa narapidana untuk memenuhi penyaluran kebutuhan biologisnya (Gambar 5.11). Upaya-upaya pemenuhan kebutuhan biologis ini merupakan kesepakatan informal antar sesama napi maupun petugas, karena saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

Gambar 5.11
Seks Lewat Telefon & Gambar Foto



Gambar 5.11 dibuat napi **Zzi**, mendeskripsikan bagaimana kesepakatan informal berlangsung dalam penyaluran kebutuhan seksual di lingkungan Lapas yang dipenuhi protap dan pagar penghalang tinggi. Gambar paling kiri adalah lukisan SBP dan *desahan seksual* yang sering dilakukan kebanyakan napi yang telah berkeluarga. Gambar tengah adalah perilaku seksual melihat *blue-film* atau gambar porno saat *bermasturbasi* di kamar mandi atau lapak tidur sambil ditutupi sarung. Gambar paling kanan perilaku seksual memakai *jasa waria*, dalam gambar terlihat percakapan dimana sang waria mengatakan, "Ayo dong bang cepetan", sang napi malah berkata, "ssst,,,ssst", karena malu ketahuan orang banyak.

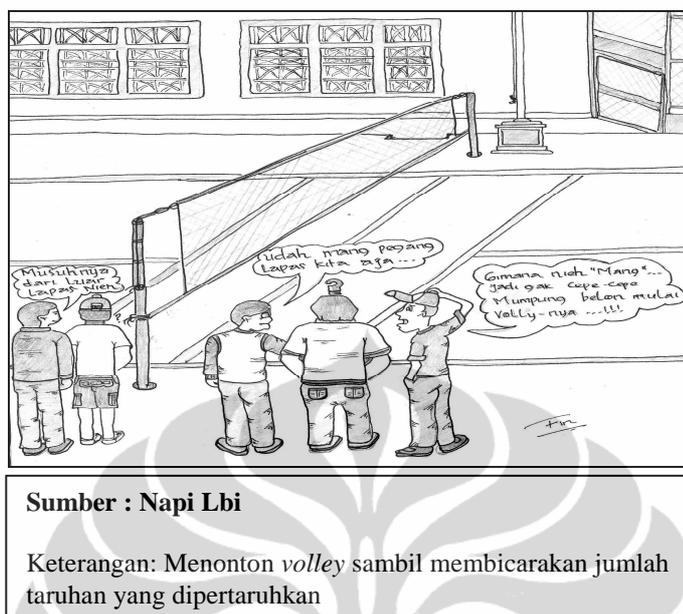
5.2.5. Kebutuhan Hiburan

Selain kebutuhan seksual, pemenuhan kebutuhan sekunder berikut adalah kebutuhan hiburan. Salah satu hiburan di Lapas yaitu olah raga *volley* atau futsal (**Gambar 5.12**). Tak jarang arena hiburan menjadi ajang taruhan atau judi sebagai bagian kesepakatan informal. Hiburan olahraga dimanfaatkan narapidana yang hobi berjudi, selain untuk hiburan sekaligus mencari uang tambahan kebutuhan kamar Taruhannya bervariasi antara Rp 50.000 sampai Rp 1 juta, pesertanya dari kalangan *napi jelas dan elit*. Seorang narapidana pengikut judi **Zzi**, mengatakan:

“...Biasanya saya taruhan bermain futsal antar teman pada siang hari, kalo saya bisa mulai dari 10 ribu sampai 100 ribu per sekali pertandingan. Ini yang membingungkan saya, banyak orang bilang di penjara itu susah tapi buat taruhan judi banyak sekali peminatnya, tidak hanya pertandingan di lapangan saja tapi juga di televisi. Masih banyak napi kaya dalam Lapas. Kasarnya, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Kesenjangan terlihat sekali dalam Lapas...” (Wawancara **Zzi**, tanggal 18 Agustus 2009)

Uraian **Zzi** menarik, ia sendiri tak menyangka Lapas yang digambarkan sebagai tempat suram dan seram malah bisa menjadi tempat hiburan dan mengadu untung. Hiburan olahraga bisa menjadi sarana mencari untung atau pemasukan sekaligus penyaluran hobi. Hiburan olahraga terlaksana sebagai wujud kesepakatan informal antara sesama napi dan petugas. **Zz** mengatakan, *”Kebutuhan hiburan tidak sekedar mencari hiburan tapi untuk pemenuhan kebutuhan mencari uang.”* Hiburan ini untuk semua kalangan, tak heran jika mereka yang mengaku *dayak* (tak punya uang) bisa ikut judi ini secara bersamaan dengan para *pangeran* di lapangan olah raga. Rupanya arena pertandingan menjadi arena mencari peruntungan bagi para *dayak*, *pangeran* maupun *buser kamar demi* memenuhi kebutuhan masing-masing.

Gambar 5.12
Nonton Volley Sambil Taruhan



Gambar 5.12 dibuat **Lbi**, memperlihatkan persiapan-persiapan pertandingan *volley* akan dimulai termasuk mempersiapkan jumlah taruhan yang diperebutkan sebelum pertandingan *volley* dimulai. Dalam gambar tampak percakapan, seseorang napi mengatakan, "*Musuhnya dari luar Lapas nih?*", ada yang nyeletuk, "*Udah mang pegang Lapas kita aja?*", ditimpali yang lain, "*Gimana neh mang jadi gak cepe-cepe mumpung bolleynya belum dimulai?*".

5.3. Kesepakatan Informal dalam Rangka Resistensi

Berbagai kesepakatan informal dibuat dan dijalankan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama. Ada beberapa kesepakatan sejalan dengan aturan formal, ada pula melanggar aturan formal. Dalam keseharian, kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan ikut mendorong timbulnya kesepakatan informal dalam rangka perlawanan, secara halus sampai kasar terhadap berbagai protap baku dan ketat dalam Lapas.

Upaya perlawanan diam-diam, halus atau resistensi ini dapat dilihat sebagai pelanggaran atau penyimpangan aturan formal dalam rangka *survive* di Lapas. Secara harafiah, resistensi dapat diartikan sebagai perlawanan terhadap sesuatu, ditujukan terhadap ketidaksetaraan struktur (*inequality*) atau penindasan yang didasarkan pada perbedaan kelas, jenis kelamin, etnisitas atau hubungan-hubungan ekonomi. Konsep

resistensi ini merujuk pada bagaimana sumber-sumber budaya lokal diberdayakan masyarakat menghadapi ketidaksetaraan struktur tersebut. Resistensi seringkali ditemukan dalam bentuk yang samar dan sukar dipahami dalam wilayah-wilayah kehidupan yang tidak diharapkan (Alan Barnard & Jonathan Spencer (ed), Routledge, 1996 :488-489). J. C. Scott (1985) menjelaskan resistensi sebagai bagian bentuk perjuangan sehari-hari (rutin) bagi kelas-kelas ter subordinasi (*subordinate class*) dan mungkin merupakan satu-satunya pilihan yang tersedia (J.C. Scott, 1985 : 33). Resistensi bagi Scott merupakan perjuangan yang prosaik dan konstan sifatnya, tidak membuat manifesto, demonstrasi maupun pertempuran-pertempuran teratur, yang biasanya menuntut perhatian tambahan, tetapi lebih sebagai ungkapan ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada dalam struktur tidak menguntungkan dan merupakan bentuk- represi sehari-hari yang dikenal dengan bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari (J.C. Scott, 1985 : 29).¹ Senjata-senjata yang biasanya (*ordinary weapons*) dimiliki kelompok-kelompok relatif “*tak berdaya*” (*powerless group*) berbentuk seperti berpura-pura taat, mengelabui, mencuri kecil-kecilan, pura-pura bodoh, aksi diam, merusak, sabotase, dan sebagainya, guna menghindari konfrontasi langsung dengan otoritas resmi. Kebanyakan bentuk-bentuk resistensi ini menghentikan aksinya jauh sebelum tuntutan terpenuhi, bahkan terkadang lebih merupakan upaya menolong diri sendiri (*self-help*) tetapi bukan berarti tak dapat menjadi perlawanan yang aktif dan keras (J.C. Scott, 1985 : 29).

Kehidupan Lapas yang serba terbatas dan dibatasi, memungkinkan terjadinya perlawanan sebagaimana dikemukakan Scott. Resistensi sebagai bagian bentuk perjuangan sehari-hari (rutin) bagi narapidana bisa berlangsung seperti berpura-pura taat, mengelabui (*modus*), mencuri kecil-kecilan, pura-pura bodoh, sampai membuat keributan, menyelundupkan barang terlarang, melarikan diri bahkan melawan petugas. Hal ini terjadi sebagai ungkapan ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada dalam struktur yang tidak menguntungkan, terwujud dalam bentuk-bentuk represi sehari-hari atau dikenal dengan bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari. Resistensi narapidana juga timbul karena penderitaan–penderitaan yang dialaminya, Gresham M Sykes menguraikan penderitaan-penderitaan (*pains of imprisonment*) terdiri dari: 1. *broken Relationship with family and double lose of liberty* (hilangnya kebebasan dan

¹ Dalam kaitan ini Scott menjelaskan ada 2 model resistensi yang berlawanan, pertama, perlawanan sehari-hari, dan kedua, berbentuk konfrontasi yang lebih terbuka dan langsung. Tak heran bila kedua model ini yang lebih sering mendominasi studi-studi tentang resistensi.

retaknya hubungan dengan keluarga). 2. *lost control of these goods and service* (kehilangan kontrol atas barang-barang dan jasa). 3. *deprivation of heterosexual relationship* (kehilangan kebutuhan hubungan heteroseksual). 4. *their lose of autonomy* (kehilangan otonomi diri sendiri) 5. *deprivation of a sense of security* (hilangnya rasa aman) (Larry J. Siegel, 1983 : 542).

Resistensi secara umum menggambarkan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan di Lapas sebagai pengingkaran aturan-aturan formal. Resistensi menjadi kesepakatan informal yang dilakukan terus menerus, terpola, *kucing-kucingan*, diam-diam dan mengandalkan pendekatan persuasif ke petugas atau disebut *delapan enam* (86).

Pengamatan dan telusuran lapangan penulis terhadap keadaan atau suasana perlawanan narapidana merupakan bagian kesepakatan informal, dalam rangka menghadapi prosedur baku (protap), mencakup tiga bentuk utama yaitu pertama, memiliki barang-barang berbahaya yang dilarang secara formal dalam Lapas, kedua, pelanggaran terhadap prosedur tetap dan rutin, dan ketiga, sanksi atas perlawanan tersebut.

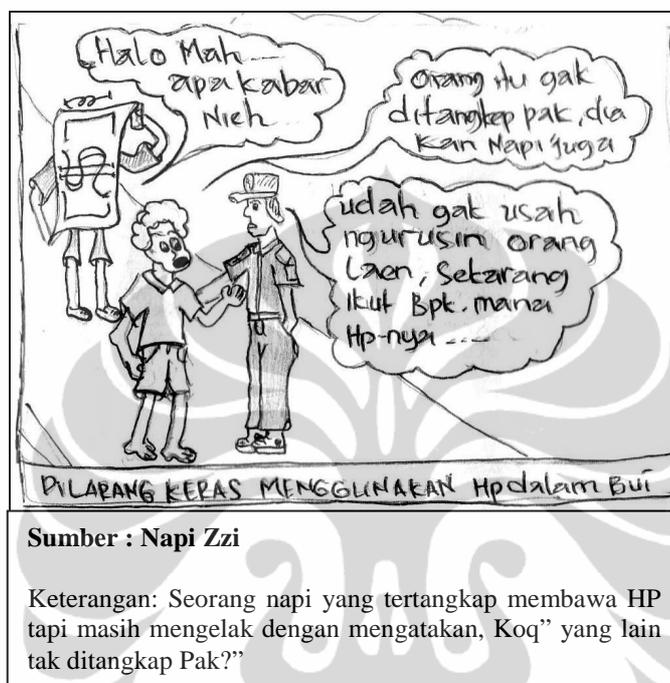
5.3.1. Kepemilikan Barang Terlarang

Barang-barang yang dilarang aturan formal di Lapas adalah membawa *HP*, pisau (*sikim*), gunting, paku, *MP3*, kamera, alat *tattoo*, narkoba maupun minuman keras. Dalam kenyataannya, secara kasat mata banyak narapidana yang malah menggunakan *HP* dalam kamar, padahal sudah ada protap larangan menggunakan *HP* dalam kamar. Tidak hanya itu, beredarnya barang-barang dilarang dalam kamar mencerminkan bagaimana resistensi berlangsung demi memenuhi kebutuhan, secara diam-diam dengan melanggar aturan formal yang berlaku.

Perlawanan ini disikapi petugas Lapas dengan melakukan razia atau *sweeping HP & barang-barang terlarang* lain. *Sweeping* adalah kegiatan para petugas keamanan (KPLP) untuk memastikan kamar dan blok aman dari barang-barang terlarang dalam Lapas (**Gambar 5.13**) tapi terkadang *sweeping* menjadi kurang maksimal karena bocornya kegiatan ini. Para narapidana terlebih dulu membereskan barang-barang berbahaya sebelum *sweeping* diadakan. Hal ini bisa terjadi karena berlangsungnya kesepakatan informal yang melandasi kepemilikan barang-barang ini, dimana *tamping* atau *pemuka* selalu memberikan informasi kepada narapidana lain untuk mengamankan barang-barang tersebut terlebih dahulu, tak jarang petugas diajak kerja-

sama untuk menyimpan barang-barang ini. Keadaan ini menegaskan adanya relasi-relasi antar aktor petugas dan narapidana dalam memainkan peranan penting menentukan keberlakuan aturan formal dan informal dalam area Lapas.

Gambar 5.13
Sweeping



Gambar 5.13 dibuat **Zzi**, mendeskripsikan kesepakatan informal secara nyata di lapangan, dalam gambar tampak seorang napi tertangkap melanggar aturan formal yakni memegang *HP*, dan melaporkan asal *HP* itu dari napi lain kepada petugas pengamanan, si pelapor malah diabaikan petugas karena dianggap mencampuri urusan orang lain. Petugas lalu menangkap basah narapidana yang dilaporkan tersebut dan langsung menindaknya. Dalam gambar 5.13. terlihat *orang berbentuk uang* sebagai simbol penyelesaian masalah, bila tertangkap membawa barang-barang yang dilarang di Lapas, dapat diselesaikan melalui kesepakatan informal ("86") dengan membayar sejumlah uang damai pada petugas yang menangkap. Seorang napi narkoba, **Bri** menceritakan: "...Selama dalam LP, barang-barang yang pernah saya miliki adalah HP dua buah, tinta tato, mesin tato, charger HP, baterai HP, fitting sambungan listik, sampai barang-barang terlarang seperti ganja, miras (berbagai macam merek)..." (Wawancara **Bri**, tanggal 8 September 2009). Kepemilikan barang-barang yang dilarang, menurut **Bri** sebenarnya merupakan upaya perlawanan terhadap ketatnya aturan pemenuhan kebutuhan di Lapas, bukan diperuntukkan melawan petugas yang sedang bertugas di Lapas. Resistensi ini

sebagaimana diungkap **Bri** berlangsung secara diam-diam, halus, terutama kepemilikan barang-barang seperti peralatan tato, miras dn narkoba (**Gambar 5.14**).

Gambar 5.14
Kepemilikan Barang Terlarang



Sumber : Napi Zzi

Keterangan: kepemilikan miras atau narkoba atau perlatan terlarang dilakukan secara diam-diam, tapi dibagi pada sesama napi yang bisa dipercaya agar tidak ketahuan

Gambar 5.14 dibuat **Zzi**, menunjukkan suasana tertutupan dalam kepemilikan barang barang yang dilarang dalam kamar. Salah satu kesepakatan informal yang berlaku di kamar yaitu bila diantara narapidana ada yang tahu barang terlarang (miras atau narkoba) dimiliki oleh narapidana lain, maka narapidana yang mengetahui akan diajak berdamai oleh narapidana yang memiliki barang terlarang tersebut, dengan membagi sebagian barang tersebut. Berbagai kesepakatan informal yang tercipta dan dijalankan menyulitkan mencari dan mengetahui keberadaan barang terlarang tersebut ada dan beredar di Lapas.

Kesepakatan informal sangat ampuh dipakai melanggengkan perlawanan halus terhadap aturan formal Lapas, perlawanan halus dilakukan dengan menyimpan barang-barang tersebut pada tempat-tempat yang aman bahkan mengikutsertakan aktor petugas untuk bekerja sama. Seorang napi narkoba **Rdi** mengatakan:

“...Saya pernah merasakan razia besar-besaran yang dilakukan petugas gabungan dari petugas Lapas, polisi dan BNN, pemeriksaan dilakukan sampai ke sudut tempat-tempat terpencil seperti WC, rak sepatu, sepatu, ventilasi udara, langit-langit, kasur, jemuran, tong sampah, tanah, taman, pot tanaman, dan seterusnya. Ada beberapa barang yang ketahuan tapi tidak semua ketahuan. Kepengurusan napi dipergunakan mengantisipasi razia. Tamping, korve luar, pemuka tertentu menjadi pengawas gerakan para petugas yang melakukan *sweeping* ini...” (Wawancara **Rdi**, tanggal 8 September 2009)

Berdasar pada kesepakatan informal yang ditetapkan, penyimpanan barang-barang yang dilarang harus dijaga rapat antar sesama napi maupun petugas yang terlibat. Tapi ternyata, tidak semua kesepakatan informal dapat berjalan lancar, ada beberapa napi seringkali dijadikan *cepu* yaitu mata-mata petugas melaporkan kegiatan-kegiatan yang dianggap melanggar aturan formal. *Cepu* sangat licik dan banyak akal, terkadang bisa membesar-besarkan masalah sekedar mencari muka di depan petugas, terkadang mengecil-ngecilkan masalah karena kedekatan sesama teman napi. *Cepu* mempunyai status tersendiri dan bersifat rahasia, sampai terkadang narapidana yang tertangkap tidak menyadari adanya *cepu* tersebut. Ditanggapi tidaknya hal yang dilaporkan oleh *cepu* ditentukan petugas pengamanan terkait. Disini *cepu* merupakan bagian kesepakatan informal yang berlangsung di Lapas.

Tidak semua resistensi bersifat disfungsional, ada juga yang bersifat fungsional seperti memiliki barang-barang: *sikim* untuk memotong, jarum untuk menjahit, gunting untuk keperluan gunting rambut, pisau untuk membuat kerajinan tangan cincin, kalung, cangklong, tasbeh dan seterusnya (**Gambar 5.15**). Barang-barang yang dilarang memang berbahaya tapi dalam praktek dibiarkan saja selama dipergunakan mengisi waktu luang atau sekedar untuk membuat kerajinan.

Gambar 5.15
Barang Berbahaya dan Dilarang



Sumber : Napi Zzi

Keterangan: Jenis-jenis barang yang dilarang tapi dipergunakan secara fungsional

Gambar 5.15 dibuat **Zzi**, mendeskripsikan jenis barang-barang yang berbahaya dan dilarang beredar masuk di Lapas. Meskipun secara diam-diam seringkali masuk ke dalam kamar, penggunaannya tergantung pada si individu narapidana bersangkutan. Bagi petugas, kepemilikan barang-barang tersebut selama fungsional dibiarkan saja, sebaliknya bila disfungsi, maka akan disita bahkan ditindak pemiliknya. Resistensi atau kepemilikan barang-barang yang dilarang sebagian besar mengikuti dan merupakan kebiasaan yang dibawa dari luar Lapas. Salah satu contoh resistensi yang disfungsi adalah kebiasaan memenuhi kebutuhan obat-obat terlarang. Kebutuhan narkoba menjadi pemicu dipergunakannya berbagai cara agar barang terlarang tersebut bisa masuk ke dalam Lapas untuk memenuhi pesanan *napi mampu dan jelas*. Seorang napi narkoba, **Rdi**, menguraikan sebagai berikut:

“...Maraknya peredaran narkoba dalam Lapas membuat Lapas menjadi rentan terhadap berbagai kegiatan melanggar hukum. Barang terlarang seperti ganja, miras dan sabu, obat-obatan bisa masuk dalam Lapas, lewat orang luar maupun orang dalam, biasanya 80% untuk dipakai sendiri dan hanya 20% dijual, konsumennya pun hampir sebagian besar pangeran dan napi jelas”. (Wawancara **Rdi**, tanggal 8 September 2009)

Uraian **Rdi** ini menjelaskan peredaran barang terlarang di Lapas sulit diberantas karena besarnya imbalan yang diterima dalam distribusi barang terlarang ini. Barang yang berhasil masuk ke dalam Lapas seperti narkoba misalnya, 80% untuk

dipakai sendiri dan 20% untuk dijual dan sisanya dibagi-bagi ke teman, sehingga sulit dilacak pemasok dan memberantas peredaran barang terlarang ini. Mekanisme kesepakatan informal aktor narapidana dan petugas dimanfaatkan untuk memuluskan beredarnya barang-barang berbahaya dan dilarang dalam Lapas.

5.3.2. Pelanggaran Prosedur Rutin

Perlawanan sehari-hari yang menonjol adalah pelanggaran protap bebas peredaran uang (BPU), dimana ketentuannya tak boleh memberi uang pada petugas, tapi protap ini mendapat perlawanan keras karena kesepakatan informal dalam Lapas atau "86" sudah berlangsung sedemikian rupa menyelesaikan masalah-masalah sehari-hari yang timbul dalam Lapas, melebihi aturan formal yang tertempel di dinding atau tertulis pada panduan Lapas. Peredaran uang mulai terlihat dari ruang besukan sampai ruang kamar narapidana. Beredarnya uang dalam jumlah besar berlangsung saat diadakan acara hiburan seperti judi dalam Lapas. Judi yang digemari adalah kartu gapple, monopoli, bola (siaran TV), adu ikan cupang dan jenis permainan lain. Alasan melakukan judi adalah untuk menghabiskan waktu yang berjalan terasa lambat, padahal hal ini melanggar aturan protap formal Lapas.

Perlawanan halus terhadap prosedur-tetap tampak juga dari keberadaan tempat jualan kaki lima dalam Lapas, padahal jelas terpampang aturan formal melarang berjualan dalam Lapas. Alasan narapidana berjualan adalah memenuhi kebutuhan dan jualannya bisa dihutang atau dibon sehingga menguntungkan narapidana, berbeda dengan kantin yang harus bayar langsung (kontan). Tidak hanya berjualan makanan, ada narapidana yang menjual barang atau pakaian, sekedar untuk membeli lauk-makan dan rokok, bahkan ada narapidana tak mampu yang harus *nyolong* atau mencuri terlebih dahulu di jemuran umum atau tempat lain untuk bisa mendapat uang dan makan. Tak heran bila dalam kamar narapidana, makanan yang ditaruh di lemari (loker) bisa hilang termasuk uang dan rokok yang disimpan. Narapidana **Zzi**, menceritakan pernah ada narapidana *tak mampu* tertangkap basah sedang mengambil uang dalam loker karena kelaparan, hanya diberi sanksi dipindahkan ke kamar lain. *Pindah kamar* adalah pelajaran dan sanksi informal bagi narapidana pelaku pencurian, agar tidak berbuat seperti itu lagi. Kesepakatan informal dalam bentuk perlawanan halus ini telah meresap dan melekat, membuat protap baku sulit diterapkan secara mutlak di lapangan (**Gambar 5.16**). Kondisi *overcapacity*

membuat aturan resmi semakin tak dapat menjangkau dan menyelesaikan semua persoalan yang muncul di lapangan.

Gambar 5.16
Pelanggaran Prosedur Rutin



Sumber : Napi Zzi

Keterangan: Perlawanan terhadap protap: memberi uang dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, melakukan perjudian dalam blok, berjualan dalam Lapas untuk memenuhi kebutuhan.

Gambar 5.16 dibuat narapidana **Zzi**, terdiri dari tiga gambar. Gambar paling kiri melukiskan seorang napi yang membayar petugas untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi, padahal melanggar protap formal bebas peredaran uang (BPU). Dalam gambar berlangsung pembicaraan kesepakatan informal dimana narapidana mengatakan, "Benar yach bisa diurus", dijawab petugas, "Itu soal kecil tapi ini no rekening aku pak". Gambar ini memperlihatkan bila ada masalah timbul dalam kamar, semua bisa diselesaikan melalui kesepakatan informal, dengan memberi uang atau bingkisan pada petugas. Gambar ditengah menggambarkan suasana perjudian (adu cupang) berlangsung dimana saat petugas datang, si petugas diberi uang kesepakatan ("86"), agar kegiatan hiburan tetap terus dapat dilaksanakan. Gambar paling kanan memperlihatkan pedagang asongan menjajakan barang dalam blok, dibiarkan saja oleh petugas, karena sudah ada kesepakatan informalnya ("86"), dalam gambar ditunjukkan omelan si penjual pada petugas, "Yah jadi sepi gini dagangan gua".

5.4. Sanksi Informal: *Modus & Kekerasan*

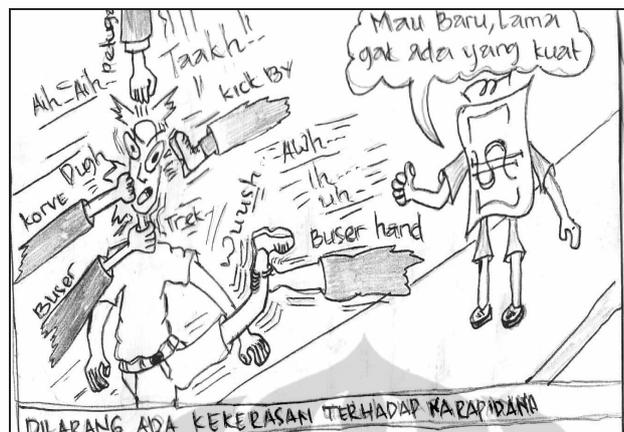
Dalam ketentuan formal disebutkan bila melanggar aturan maka akan mendapat sanksi formal. Begitu pula dengan kesepakatan informal, bila melanggar akan mendapatkan sanksi informal. Dalam Lapas, aturan dan sanksi formal sering

menjadi poster atau tulisan dinding saja yang menghiasi ruangan fisik bangunan Lapas. Kesepakatan informal lebih banyak berperan, dipakai para aktor narapidana dan petugas dalam melaksanakan tugas masing-masing. Sanksi informal sangat efektif karena dihubungkan dengan peran dan kemampuan aktor dalam pemenuhan kebutuhan. Bila aktor tak mampu atau tak taat lagi dalam memenuhi kebutuhan yang disepakati, maka ia akan dikeluarkan dan dicari aktor lain yang lebih mampu. Sanksi informal ini rentan terhadap sanksi formal atau dipengaruhi sanksi formal. Seringkali sanksi formal dan informal bertentangan tapi tak jarang bersamaan dilaksanakan dalam ruang-ruang fisik di Lapas. Sanksi formal tidak terlalu efektif dibanding sanksi informal sehingga gabungan sanksi formal dan informal seringkali dimanfaatkan secara bersamaan. Gabungan sanksi ini diterapkan dalam kamar, blok maupun perkantoran dalam menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang muncul.

Perselisihan merupakan peristiwa tak terhindarkan terjadi dalam kamar atau blok yang dihuni sekian banyak narapidana. Perselisihan bisa terjadi saat tidur, berdesak-desakan, menendang badan orang lain, menyikut lengan orang lain, merupakan salah satu rutinitas yang mewarnai kehidupan sosial narapidana (tahanan) baik di sengaja maupun tidak. Tak jarang perselisihan berlanjut menjadi pemukulan dan pengeroyokan bahkan sampai kerusuhan antar blok di Lapas. Perselisihan sesama napi timbul karena keadaan kamar dan blok begitu padat.

Sanksi formal sulit diterapkan dan dilakukan terhadap pihak yang berselisih karena masing-masing pihak bersengketa mempunyai alasan sendiri yang dibuat-buat atau dikenal *modus* (*berbohong atau bocor*) sebagai cara menghindar agar tidak diminta membayar hutang atau tidak diminta *setoran, pajak* dan seterusnya. *Modus* merupakan cara halus ketidaktaatan terhadap kesepakatan informal. Tak jarang, bila sudah keterlaluhan, sanksi informal berupa tindakan keras diberlakukan dimana pelaku *modus* ditampar, dipukul, ditendang oleh sesama narapidana agar mau mengaku terkait pencurian yang dilakukan, atau mengembalikan uang pinjaman atau hutangnya. Tidak saja bagi narapidana lama, hal ini berlaku bagi narapidana baru dimana mereka selalu diperiksa terkait ada atau tidaknya *pelor* (uang yang dilipat) dibawa masuk ke dalam kamar dari luar Lapas. Bila mereka melawan (tidak taat), atau berpura-pura tidak tahu, maka tak ayal lagi akan *dikerjai* dan diberikan ganjaran dalam kamar tanpa ada yang membantu (sanksi informal). Bentuk *modus* atau *pelor* biasanya diatasi dengan memberi sanksi informal mulai cara halus sampai tindakan kekerasan (**Gambar 5.17**).

Gambar 5.17
Modus & Kekerasan



Sumber : Napi Zzi

Keterangan: Pemukulan dilakukan terhadap napi yang modus dan tak mau bayar hutang.

Gambar 5.17 dibuat narapidana **Zzi**, mendeskripsikan sanksi informal berupa pemukulan yang dilakukan *buser* dan *korve* terhadap narapidana di kamar yang tidak memenuhi kesepakatan informal dengan berbohong (*modus*) atau tidak taat membayar hutang. Pemukulan biasa berlangsung dalam kamar atau ruangan tersembunyi, dilakukan atas perintah *kepala kamar (KM)* atau petugas tertentu. Dalam gambar tampak seorang narapidana berkomentar, "Mau lama, baru, gak ada yang kuat", maksudnya baik narapidana lama maupun baru, tak ada yang bisa menghindari sanksi informal bila melanggar.

Dalam kasus lain, sanksi informal bisa dilakukan secara brutal, dengan memukul salah satu pihak berselisih dengan *penutup got semen* dalam area Lapas. Peristiwa ini disebut *ngebata (Gambar 5.18)*, adalah pertengkaran diantara para narapidana karena satu hal yang telah atau sedang diperebutkan, menimbulkan emosi salah satu pihak, sehingga memukulkan *bata semen* yang ada di halaman kamar pada tubuh (kepala) narapidana lain yang dianggap musuh hingga bocor kepalanya. Hal-hal yang diperebutkan atau disengketakan biasanya mulai sekedar omongan (asal ngomong), berita miring (*modus*), sampai kepemilikan barang terlarang tertentu diluar kesepakatan informal yang telah disepakati.

Gambar 5.18 Ngebata



Sumber : Napi Lbi

Keterangan: pertengkaran yang diakhiri dengan memukul kepala dengan bata (semen) hingga bocor (berdarah)

Gambar 5.18 dibuat narapidana **Lbi**, mendeskripsikan sanksi informal *ngebata* yang dilakukan seorang narapidana kepada sesama narapidana lain secara diam-diam, direncanakan, dan dilakukan begitu cepat sehingga sulit diantisipasi petugas. Tampak dalam gambar penutup got menjadi satu alat ampuh untuk perilaku *ngebata*. Dalam gambar 5.18 juga ditunjukkan alasan pelaku *ngebata* melakukan aksinya, ia berkata, "Makanya jangan pernah mau berebut atau berdebat !! bye-bye !!".

Pada kasus lain, perpaduan sanksi formal dan informal diberikan petugas dan narapidana secara bersamaan pada mereka yang mencoba melarikan diri atau tidak taat dalam Lapas, apalagi bila pelarian dilakukan secara terang-terangan (**Gambar 5.19**). Pelarian biasanya dimulai dimana si pelaku melakukan pengamatan (*ngegambar*) situasi dan kondisi fisik Lapas, kemudian mencari-cari dan mengumpulkan informasi dari para narapidana yang telah lama tinggal dalam Lapas, dan menunggu saat yang tepat misalnya hari minggu atau libur, saat petugas sedikit, ada acara bersama, hujan keras atau keramaian tertentu atau ada pengalih perhatian lain. Bila saatnya dianggap tepat, maka pelaku pelarian mencari titik start dari tempat paling mudah dipanjat, naik ke atas atap, dan berlari menuju tembok sekeliling Lapas dan melompat keluar (**Gambar 5.19**).

Gambar 5.19
Percobaan Pelarian



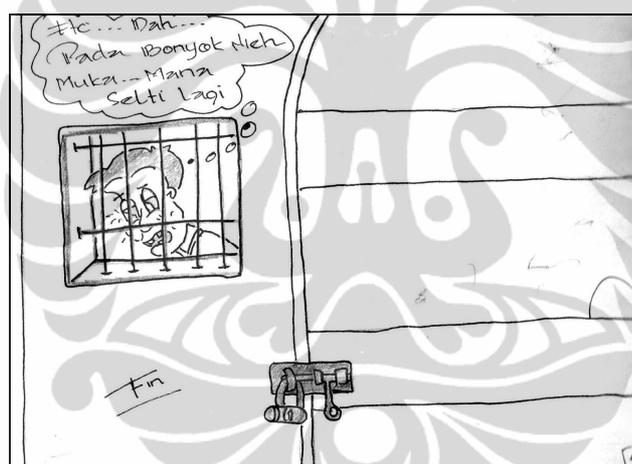
Sumber : Napi **Zzi**

Keterangan: Pelaku pelarian lewat atas genteng

Gambar 5.19 dibuat narapidana **Zzi**, deskripsi tentang pelarian melalui atas genteng Lapas oleh napi berinisial **Hri**. Dalam gambar pelaku berkomentar, "Gak ada yang liat nie..kabur ahh..". Tapi dalam waktu dua jam, **Hri** kembali tertangkap. Petugas **Gni** yang menangkap menjelaskan, narapidana yang tidak taat atau melarikan diri lewat atap hampir semua dapat ditangkap kembali kecuali beberapa napi yang lari saat waktu tertentu yang sulit diduga seperti hujan sangat keras, mati lampu atau ada keramaian dalam Lapas. Seringkali pelaku pelarian tertangkap karena dibantu warga sekitar yang mengepung narapidana yang lari tersebut. Menurut pengalaman **Gni**, bila pelarian sudah lebih dua jam bisa dipastikan pelaku lolos, karena itu sebelum dua jam sudah harus jelas ditemukan posisi napi yang lari. Saat pelaku tertangkap langsung diborgol, tak jarang bila ia melawan ditembak kakinya dan langsung dibawa kembali ke dalam Lapas untuk diperiksa di ruang keamanan (KPLP). Sanksi terhadap para pelaku pelarian dilakukan secara formal dan informal, dan secara bersama oleh petugas dan *tamping*. Penanganannya lebih kompleks, herannya menurut pengamatan penulis para pelaku pelarian yang tertangkap kebanyakan adalah pelaku kejahatan jalanan seperti pencuri kambing, pencuri krupuk, dari golongan *dayak* bukan *pangeran*. Pelarian narapidana kategori *dayak* ini merupakan ekspresi ketidaktaatan dan ketidakberdayaan mereka dalam Lapas, karena mereka harus tidur jongkok, tak bisa makan seperti pangeran, setoran sering hutang, sering digebuki dan dipukuli, selalu terlambat mengembalikan hutang.

Pelaku pelarian yang tertangkap biasanya langsung mendapat sanksi formal diisolasi dalam *sel pengasingan* atau *sel tikus* berukuran 1,5 m², tertutup, gelap, diberi ventilasi kecil berbentuk kotak kontrol kecil (**Gambar 5.20**). Sebelum di sel pelaku pelarian mendapat sanksi informal dipukuli, diejek, diasingkan, dimusuhi ramai-ramai para narapidana pembantu dalam Lapas terutama *tamping keamanan*. Mereka yang dihukum sel ini, semua aktivitasnya dilakukan dalam sel, mulai makan, mandi sampai buang air besar dan kecil. Pelaku pelarian yang telah menjalani *sel pengasingan* biasanya langsung dipindahkan ke Lapas lain. Kasus pelarian memperlihatkan bagaimana sanksi formal dan informal merupakan bagian kesepakatan formal dan informal antara aktor petugas dan narapidana untuk memberi efek jera terhadap pelakunya.

Gambar 5.20
Sel Pengasingan/Sel Tikus



Sumber : Napi Zzi

Keterangan: Sel pengasingan/sel tikus adalah tempat hukuman bagi napi/tahanan yang melakukan pelanggaran berat

Gambar 5.20 dibuat **Zzi**, mendeskripsikan bagaimana hukuman formal dan informal sebagai bagian kesepakatan dalam Lapas diberikan bersamaan pada narapidana yang tidak taat atau melarikan diri. Pelaku pelarian dihukum sel pengasingan yang sempit selama waktu tertentu dan diawasi secara ketat. Dalam menangani kasus pelarian, perilaku kekerasan merupakan sanksi informal lebih efektif dibanding sanksi formal mengatasi resistensi kasar dalam Lapas.

Berbagai uraian diatas memperlihatkan gambaran kesepakatan informal berlangsung dalam Lapas. Berbagai kesepakatan ini dilakukan, dipelihara dan dipertahankan dalam rangka memenuhi kebutuhan narapidana dan kepentingan petugas dalam ruang-ruang fisik Lapas yang sempit dan terbatas. Kesepakatan informal ini berlaku secara operasional dan menyeluruh meliputi seluruh aspek kehidupan sosial Lapas. Kesepakatan informal mengangkat konteks-konteks tertentu dalam memahami aktivitas keseharian Lapas. Konteks-konteks ini ditentukan secara bersama para aktor narapidana dan petugas, tidak lagi berjalan sendiri-sendiri sebagaimana diatur ketentuan formal. Konteks-konteks kehidupan sosial dalam Lapas secara garis besar dapat diidentifikasi mulai dari saat penerimaan napi baru, masuk kamar, mendapat fasilitas kamar, menyandang status sosial, memperluas kebebasan bergerak, penyelesaian kasus, sampai pemenuhan kebutuhan makan, berkomunikasi, berdagang, seksual, dan kebutuhan hiburan.

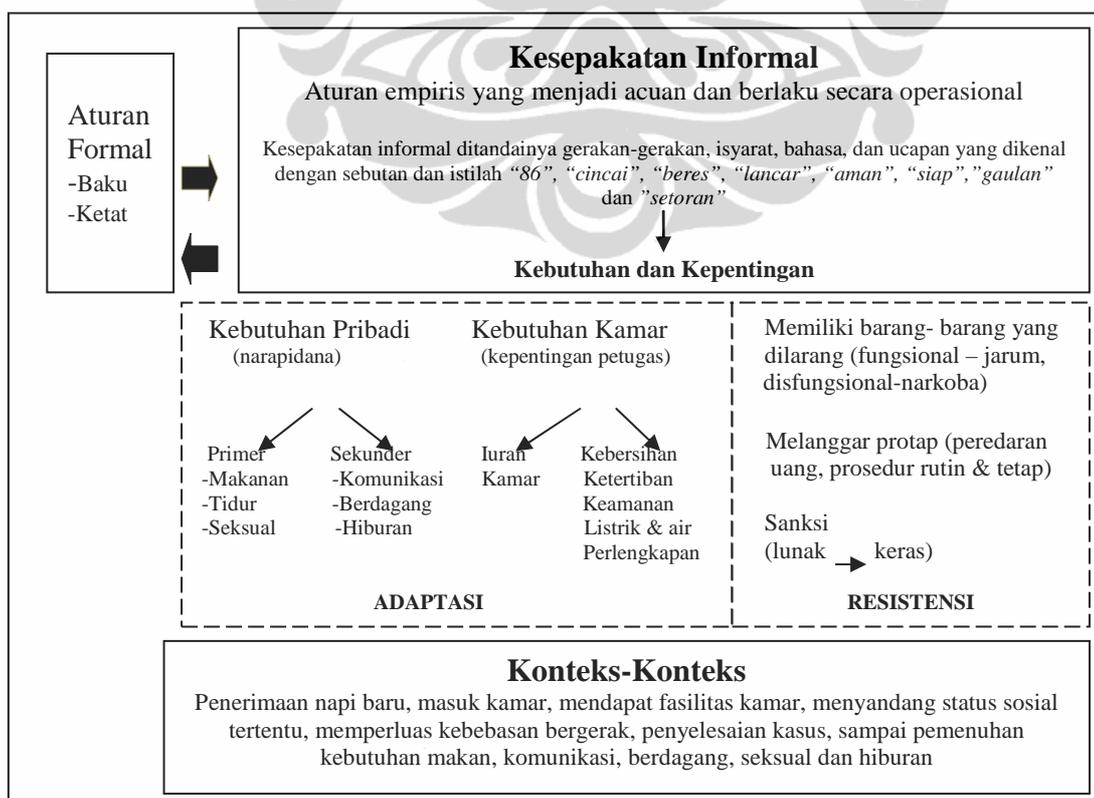
Konteks-konteks ini merupakan jabaran kesepakatan-kesepakatan informal yang ditandainya gerakan-gerakan, isyarat, bahasa, dan ucapan yang khas dan lokal. Kiran Bedi (2003) menambahkan bahwa persoalan kehidupan sosial penjara tak hanya bicara subkultur berlangsung dalam penjara, tapi bagaimana subkultur itu dilanggengkan dalam penjara. Bedi menguraikan pelanggaran subkultur penjara tampak dari berbagai tampilan tersembunyi di penjara yang hanya diketahui "*orang dalam*" seperti pemerasan, korupsi, jaringan penyaluran obat, pemukulan dan pembiaran-pembiaran. Ada saat-saat dimana petugas mempunyai kehidupan tak menentu, tak memiliki perlindungan dari "*gembong-gembong*" narapidana, sehingga beberapa petugas mencari jalan aman bekerja sama, memberi fasilitas pada gembong-gembong tersebut. Uang, ancaman, kekuasaan, kerja sama, fasilitas, berjalan sendiri-sendiri menyelesaikan dan membereskan persoalan mereka, diwarnai ketegangan, kesengitan dan kengerian. Keadaan ini merupakan pelanggaran "*sub-kultur*" penjara dimana semua terlibat didalamnya, tidak ada orang dibenci dan tidak ada pula yang dihormati (Kiran Bedi, 2003).

Uraian Kiran Bedi (2003) mempunyai kesamaan dengan keadaan yang terjadi di Lapas Bogor dimana kesepakatan kesepakatan informal tidak saja dipergunakan dalam rangka adaptasi maupun resistensi, tapi memenuhi kebutuhan secara terpadu dan timbal balik diantara para aktor. Pelanggaran ini berbicara sesuatu yang melanggar aturan formal dan seharusnya mendapat sanksi formal, tetapi sanksi formal dalam praktek tidak ditentukan aturan formal, tapi oleh kesepakatan diantara para

aktor. Bagi sebagian narapidana, sanksi informal lunak seperti dikucilkan, diejek dan diasingkan, sudah menjadi hal biasa, rutin, bukan lagi memalukan. Apalagi tidak ada yang peduli dengan perilaku mereka yang buruk dalam Lapas. Untuk itu kesepakatan informal dibutuhkan menghadapi kategori narapidana seperti ini yang melanggar kesepakatan yang disetujui bersama. Aktor petugas dan narapidana bertugas menentukan perilaku mana yang menjadi pedoman dan aturan mana yang operasional sesuai keadaan Lapas.

Aturan formal hanya menjadi aturan baku mengatur Lapas, berbeda dengan kesepakatan informal menjadi acuan empiris, ditetapkan dan dilaksanakan secara operasional (**Diagram 5.2**) dalam Lapas. Mengacu uraian Moore (1983) maka berbagai kesepakatan-kesepakatan informal ini dalam rangka adaptasi maupun resistensi memperlihatkan keadaan Lapas sebagai arena semi otonom, yang batas-batasnya bukan ditentukan aturan organisasi, tetapi oleh ciri prosesual (aktor dan konteks) yang menimbulkan aturan-aturan lokal serta ketaatan pada aturan tersebut. Dalam hal ini, kebutuhan dan kepentingan menjadi konteks-konteks mendasari timbulnya kesepakatan-kesepakatan informal sebagaimana proses, serta dinamika perubahan kehidupan sosial dalam Lapas (**Diagram 5.2**).

Diagram 5.2. Gambaran Kesepakatan Informal



Sumber: Hasil Temuan Penulis

Diagram 5.2 memperlihatkan kesepakatan informal menjadi acuan empiris karena adanya kebutuhan dan kepentingan berbagai pihak, dalam rangka adaptasi maupun resistensi meliputi kebutuhan pribadi, kebutuhan kamar, kepemilikan barang terlarang dan pelanggaran prosedur rutin. Pemenuhan berbagai kebutuhan dan kepentingan ini menjadi konteks-konteks dasar kehidupan sosial di Lapas.

Uraian dalam bab ini memperlihatkan berbagai kesepakatan informal dilakukan aktor, baik dalam konteks adaptasi maupun resistensi sebagai ekspresi nyata kehidupan sosial di Lapas. Kesepakatan-kesepakatan informal ini menjadi arena kerjasama dan pemenuhan kebutuhan masyarakat di balik tembok Lapas.



BAB 6

RELASI SOSIAL AKTOR: MEMPERTAHANKAN KESEPAKATAN INFORMAL

Bab ini menguraikan relasi-relasi sosial aktor yang terbentuk dalam rangka mempertahankan kesepakatan informal. Pada bagian pertama bab ini menjelaskan peran petugas dan tamping sebagai aktor. Bagian kedua, mendeskripsikan relasi-relasi sosial yang terbentuk dalam kamar dan blok narapidana diantara petugas, tamping, *pengurus kamar* dan *anak kamar*.

Kesepakatan-kesepakatan informal tidak diam tapi digerakkan dan dijalankan oleh aktor narapidana dan petugas, diperlihara, dijaga dan dipertahankan dalam rangka *survive* demi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan kedua belah pihak. Upaya menjaga dan mempertahankan kesepakatan informal dilakukan dengan membentuk relasi-relasi sosial diantara narapidana maupun petugas. Relasi-relasi sosial antar aktor memainkan peranan penting melandasi kehidupan rutinitas Lapas.

Telusuran lapangan penulis menunjukkan proses yang berlangsung dalam kehidupan Lapas memiliki keteraturan berulang dan berpola. Narapidana maupun petugas bekerja di Lapas, dihadapkan secara langsung dengan keadaan ini, sehingga ikut terlibat membentuk relasi-relasi bersama menjaga kesepakatan informal yang telah ada. Relasi-relasi sosial menjadi wadah menampung berbagai keluhan dan persoalan, karena hidup di Lapas tidak semata didasarkan ikatan-ikatan kategorial, tapi bagaimana *survive* pada kondisi terkurung dan terbatas, melalui pemenuhan kebutuhan secara terus menerus, terjaga keamanan, kenyamanan maupun adanya perlindungan di kamar, blok dan area Lapas.

Berperan sebagai petugas pemasyarakatan memungkinkan penulis menelusuri relasi-relasi sosial yang terbentuk diantara aktor sebagai ikatan yang bergerak di balik tembok tinggi dan kawat pagar dalam Lapas. Relasi sosial petugas dan narapidana merupakan gambaran budaya (subkultur) penjara sebagaimana dijelaskan Kiran Bedi (2003) bahwa kesepakatan informal berlangsung dalam relasi-relasi sosial terus menerus dan relatif tetap, merupakan pelanggaran budaya penjara. Uraian Kiran Bedi melandasi penulis tidak hanya mengungkap berbagai kesepakatan informal yang

terbentuk, tapi juga relasi-relasi sosial yang mempertahankan keberlakuannya dalam Lapas.

Melalui penelitian lapangan, kurang lebih tiga tahun di Lapas, penulis melihat perbedaan struktural tampak berlangsung di Lapas Bogor, tapi perbedaan ini semakin kabur dengan munculnya kesepakatan-kesepakatan informal antara petugas dan narapidana dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kepentingan bersama. Perbedaan jelas adalah baju seragam dan kelengkapan peralatan petugas sebagai ciri utama yang membedakan identitas petugas dan narapidana. Seragam dan perlengkapan ini dipakai membedakan mana petugas dan narapidana, tapi tidak dijadikan acuan sepenuhnya menjalankan kesepakatan informal secara bersama. Konteks-konteks pemenuhan kebutuhan dan kepentingan memunculkan keakraban dan kedekatan tersendiri bagi petugas dan narapidana. Aktor narapidana dan petugas saling menyesuaikan kewenangan dan kedekatan masing-masing. Tidak semua narapidana atau petugas dapat melakukan kebersamaan ini, hanya aktor-aktor tertentu saja yang menjalankan kesepakatan-kesepakatan informal ini, menjaga dan mempertahankannya melalui relasi-relasi sosial tertentu sebagai simbol kerjasama, keamanan dan perlindungan.

Berikut adalah telusuran penulis terhadap relasi-relasi sosial aktor yang terbentuk di dalam Lapas, dimana relasi-relasi ini berfungsi mempertahankan atau melanggengkan berbagai kesepakatan informal. Upaya pelanggengan kesepakatan-kesepakatan informal merupakan gambaran budaya penjara nyata di Lapas. Adapun relasi-relasi sosial aktor di Lapas dapat dikategorikan dua bentuk: Pertama, relasi-relasi aktor berdasarkan unit kerja, dan kedua, relasi-relasi aktor berdasarkan kebutuhan kamar & pribadi.

6.1. Petugas & Tamping Sebagai Aktor

Dalam menjalankan kegiatan keseharian dan tugas-tugas administratif-operasional Lapas, petugas dibantu narapidana yang dikenal dengan sebutan *narapidana pembantu*. Narapidana ini membantu operasional dan pergerakan di Lapas secara kasat mata. Hampir semua bagian atau seksi di Lapas didukung narapidana pembantu yang jumlahnya beragam. *Narapidana pembantu* menjadi bagian rutinitas Lapas, keberadaan mereka menutupi kekurangan jumlah petugas. Mereka mengupayakan kelancaran operasional dari keterbatasan sarana dan prasarana yang dihadapi Lapas. Secara fisik *narapidana pembantu* tak beda dengan narapidana lain,

mereka beraktivitas mengikuti jadwal rutin Lapas, masuk dan keluar kamar pada jam yang telah ditentukan. Bedanya *narapidana pembantu* bisa keluar kamar dan berinteraksi di unit kerja tertentu sesuai kebutuhan. Mereka bisa berada di ruang perkantoran atau unit-unit kerja tertentu seperti ruang registrasi, bimpas, KPLP, penjagaan blok dan seterusnya.

Narapidana pembantu selain bertugas membantu kegiatan administratif, juga dijadikan penghubung antara penghuni blok (kamar) dengan petugas. *Narapidana pembantu* menjadi andalan para penghuni blok (kamar) karena mereka bisa keluar-masuk blok, ruang perkantoran dan areal luar Lapas secara lebih bebas. Berbeda dengan sebagian besar narapidana yang hanya boleh beraktivitas dalam area blok atau kamar saja. Penulis memperhatikan hampir semua area atau unit-unit kerja dalam Lapas mempergunakan *napi pembantu* sebagai pendukung, baik itu di blok tahanan A, blok narapidana B, C dan D, sampai bagian luar Lapas, seperti tempat parkir, kebun, bengkel dan perumahan pegawai.

Narapidana pembantu berperan sebagai aktor utama membentuk relasi-relasi sosial dalam Lapas. Keberadaan *narapidana pembantu* dikenal dengan beberapa sebutan seperti *pemuka* atau *voorman*¹, *tamping*, *korve*, *KM (kepala kamar)* dan *buser*. Beberapa istilah ini telah diatur dalam ketentuan formal kelembagaan.

Istilah *pemuka* adalah istilah yang diberikan pada narapidana yang tugasnya membantu pegawai di bidang tertentu seperti tata tertib, tata usaha, pendidikan, rumah sakit dan seterusnya. Pengangkatan *pemuka* harus mendapat ijin dari kepala Lapas (Kalapas) dan kantor wilayah (Kakanwil) setempat, pemuka diberi surat keputusan pengangkatan sebagai pemuka serta mendapat keistimewaan, fasilitas dan remisi-remisi tertentu². Istilah lain *narapidana pembantu* adalah *tamping* yaitu mereka yang membantu pegawai (petugas) tetapi lebih ringan pertanggungjawabannya. *Tamping*

¹ Istilah ini dimuat dalam buku terjemahan dari *Reglement Penjara / Gestichten Reglemen* (Staatblad 1917 no. 108), Departemen Kehakiman dan HAM RI tahun 2004, menguraikan bahwa *voorman/pemuka* berasal dari beberapa orang yang terpenjara.

² Pasal 6 Keputusan Presiden no. 174/1999 menguraikan bahwa narapidana atau anak pidana yang telah membantu kegiatan pembinaan sebagai pemuka memperoleh $\frac{1}{3}$ dari remisi umum yang diperoleh pada tahun bersangkutan. Remisi adalah pengurangan masa pidana. Remisi umum berupa 1 bulan bagi narapidana yang telah menjalani pidana 6 – 12 bulan, dan 2 bulan bagi narapidana yang telah menjalanni 12 bulan atau lebih. Hal ini sesuai Surat Keputusan Direktorat Jendral Bina Tuna Warga, Departemen Kehakiman RI, No. J.H.1/2049 tertanggal 16 Desember 1964 tentang pengangkatan “pemuka” dan penunjukkan “tamping”.

secara formal memperoleh remisi yang sama dengan narapidana biasa, bedanya surat penunjukkan tamping secara administratif dibuat kepala Lapas (Kalapas) setempat.³

Menjadi pemuka atau tamping merupakan cara untuk mendapatkan kelonggaran dan kebebasan dari kekangan aturan formal ketat yang berlaku di Lapas. Tak jarang para narapidana saling berlomba berebut mendapat posisi ini sehingga dalam pelaksanaannya menjadi tidak mudah. Selain harus mengenal petugas yang memiliki kewenangan dan otoritas di bidang tertentu, calon pemuka/tamping harus mempunyai hubungan dekat dengan tamping sebelumnya, dan mempunyai pengalaman kerja di bidang tertentu. Kesepakatan informal mewarnai proses untuk menjadi pemuka/tamping, seorang calon harus memberi sejumlah materi atau imbalan sebagai jaminan untuk dapat diterima. Posisi pemuka atau tamping menjadi wadah dan *jalan masuk* berhubungan dengan dunia luar, serta bergerak lebih bebas diantara sesama narapidana dan petugas.

Kebutuhan dan formasi pemuka atau tamping disesuaikan kebutuhan atau keadaan Lapas setempat⁴. Kenyataannya jumlah dan peran tamping/pemuka menumpuk bahkan tumpang tindih, membuat interaksi kehidupan Lapas menjadi berubah, lebih ramai dan tidak kaku, bervariasi menurut tiap bagian/seksi dalam perkantoran Lapas.

Menjadi tamping (pemuka) tidak sekedar menjadi pembantu, tapi menjadi seorang yang dihargai dan disegani di kalangan narapidana dan petugas. Tamping (pemuka) mempunyai status tinggi dan peran besar sekaligus mempunyai tanggung jawab besar pula. Mereka selalu siap menjadi orang yang ditunjuk menyelesaikan berbagai masalah spesifik dan rutin dalam blok maupun ruangan kerja di Lapas. Seorang tamping, **Ati**, mengatakan syarat menjadi pemuka/tamping sebagai berikut:

³ Berdasar Keputusan Presiden No. 174 tahun 1999.

⁴ Pengertian kata kebutuhan dan formasi, saat ini telah bergeser sebagaimana dijelaskan Surat Keputusan Dirjen Bina Tuna Warga No. J.H.1/2049 16 Desember 1964, bahwa formasi pemuka/tamping terdiri dari *pemuka/tamping perusahaan* yaitu pemuka dibantu 3 tamping untuk pekerjaan berat, dan masing-masing tamping memimpin 8 narapidana anak buah. Sedang untuk pekerjaan biasa/tidak rumit, 1 pemuka membawakan 3 tamping dan masing-masing tamping memimpin 20 narapidana anak buah. Untuk formasi *pemuka /tamping tata tertib* terdiri atas: *pekerjaan dalam lembaga* mencakup 1 pemuka membawakan 3 tamping dan masing-masing tamping memimpin 20 anak buah; *pekerjaan diluar lembaga* mencakup 1 pemuka membawakan 3 tamping dan masing-masing memimpin 8 anak buah.

*"...Pemuka/tamping di lapangan adalah satuan petugas yang diambil dari warga binaan yang harus mempunyai persyaratan 1. Punya ijazah SLTA, 2. Berpotensi dibidang yang kan ditempatinya, 3. Berkelakuan baik, 4. Siap bekerja membantu petugas tanpa pamrih. Selama ini ada pemuka yang ada SK nya ada tapi tidak aktif lagi dibidang itu, trus ada juga dalam satu bidang, beberapa pemuka sekaligus. Kenapa tidak satu saja? Ini karena warga binaan banyak yang ingin jadi pemuka tapi sudah tak ada lagi tempatnya, paling bisa menjadi tamping. Keuntungan menjadi pemuka yaitu 1. potongan masa tahannan (remisi) yang lebih atau 2 kali lipat dibanding warga binaan lain, 2. Dapat leluasa bergerak dalam Lapas, 3. Lebih dekat dengan petugas. Biasanya para pemuka adalah mereka yang memiliki hukuman tinggi dan mampu membayar..." (Wawancara **Ati**, tanggal 30 September 2009)*

Uraian **Ati** menjelaskan keanggotaan tamping mempengaruhi relasi-relasi sosial dalam kehidupan Lapas, tidak sekedar anggota tapi mendapat keuntungan-keuntungan lain seperti perhatian, kerja sama petugas, mendapat remisi, leluasa bergerak, lebih dekat dan aman bersama petugas dan memperoleh tempat berlindung.

Posisi tamping dianggap sebagai kepanjangan tangan petugas. Posisi ini membuat sebagian besar narapidana di blok dan kamar taat dan patuh pada mereka. Tamping memainkan peran penting dalam pemenuhan kebutuhan di blok dan kamar, mereka dipercaya membuat persetujuan lokal dengan petugas, boleh tidaknya atau apa saja pemenuhan kebutuhan dapat dipenuhi. Kalaupun ada pemenuhan kebutuhan bertentangan dengan ketentuan formal, tamping bisa melakukan pembicaraan atau penawaran untuk memperoleh perijinan dan persetujuan petugas, termasuk menyelesaikan berbagai masalah atau persoalan pelik lain yang muncul. Aktor petugas dan narapidana berperan besar melanggengkan kesepakatan-kesepakatan informal. Melalui para aktor tamping ini terbentuk jalur-jalur informal distribusi barang, peralatan maupun informasi ke dalam blok dan kamar. Keadaan ini berlangsung mengikuti arus pesanan baik dari narapidana, petugas maupun kerja sama dengan pihak keluarga atau penegak hukum lain. Tamping menjadi aktor utama membentuk relasi-relasi sosial di unit kerja tertentu. Penulis sendiri lebih cocok memakai istilah tamping dibanding pemuka dalam menelusuri relasi-relasi sosial dalam Lapas, karena tamping memegang peran penting, jumlahnya banyak dan identik kepanjangan tangan petugas.

Tamping membangun jalinan hubungan dengan petugas dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kepentingan unit-unit kerja petugas. Tamping bertugas menyelesaikan pekerjaan dan kepentingan unit kerja dimana ia ditempatkan. Hubungan tamping dan petugas merupakan relasi kerjasama karena mulai perekrutan sampai

menjadi anggota tak berlangsung begitu saja, tapi melewati proses yang diatur syarat formal dan informalnya, melalui pewarisan dan rekomendasi tamping sebelumnya atau petugas tertentu.

Di kalangan narapidana, tamping/pemuka diartikan sebagaimana diungkap **Bai** sebagai berikut:

“...Tamping (pemuka) adalah napi yang dipercaya dapat membantu pekerjaan para petugas. Namun selain itu para pemuka dikenal sebagai napi berduit, buktinya setiap event yang diadakan di Lapas pasti donator awal pun dari para pemuka. Seperti momen untuk agustusan, lebaran dan natal, pemuka wajib memberi gaulan agar bisa dapat remisi...” (Wawancara **Bai**, tanggal 18 Agustus 2009)

Uraian **Bai** memperlihatkan status tamping bukan sekedar pembantu biasa, tapi dikenal sebagai donatur dan pengatur berbagai *event* penting dalam Lapas seperti acara agustusan, keagamaan maupun acara lain. Kemampuan finansial dan non-finansial tamping membuat mereka dipercaya petugas di unit kerja masing-masing.

Hubungan relasi-relasi sosial aktor di unit-kerja dikaitkan dengan peran mereka sebagai *narapidana yang dikenal, narapidana jelas dan berduit*. Sebagian lagi mengadakan hubungan sosial karena keahlian dan ketrampilan mereka dalam bidang tertentu, sebagian lain melakukannya dengan cara *modus* atau tindakan tipu-tipu agar diterima dalam relasi-relasi sosial pada unit-kerja tertentu.

Pengaruh dan dukungan tamping berlangsung pada hampir semua lini atau unit kerja perkantoran di Lapas. Relasi-relasi ini membentuk pola hubungan, perekrutan, kesepakatan informal yang diwariskan dari tamping lama kepada yang baru, dari petugas satu ke lainnya. Relasi-relasi sosial ini menjadi gambaran budaya penjara yang riil, kontinyu dan terpelihara dalam Lapas. Berikut diagram para aktor utama yang memainkan peranan penting membentuk relasi sosial dalam Lapas.

Diagram 6.1. Aktor Utama

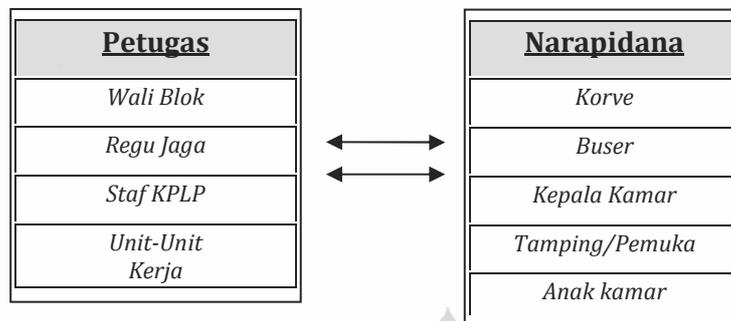


Diagram 6.1 memperlihatkan siapa dan posisi apa yang masuk dalam kategori aktor, meliputi aktor petugas melibatkan *wali blok*, *regu jaga*, *staf KPLP* dan *unit-unit kerja*, sedangkan aktor narapidana mengikutsertakan *korve*, *buser*, *kepala kamar*, *tamping (pemuka)* dan *anak kamar*.

Dari catatan resmi yang diperoleh, jumlah keseluruhan *narapidana pembantu* di Lapas Bogor diidentifikasi terdiri dari empat belas pemuka⁵, meskipun prakteknya sebagian besar aktivitas pemuka tidak berjalan karena mereka tidak diterima petugas di unit kerja yang melekat dengan peran mereka. Relasi-relasi sosial aktor terbentuk melibatkan narapidana dan petugas yang dapat bekerja sama dalam suatu unit kerja tertentu. Oleh karena itu banyak posisi tamping (pemuka) menjadi status diatas kertas saja, tidak berjalan di lapangan karena tak sesuai fungsi dan tidak aktif sebagaimana surat keputusan yang dibuat, malah semakin membingungkan karena ada beberapa narapidana ditetapkan menjabat satu pemuka dalam bidang yang sama.

Dari telusuran lapangan, jumlah tamping di Lapas Bogor terbagi atas dua bagian utama yaitu *tamping dalam* dan *tamping luar*. Jumlah tamping lebih banyak, dan mudah ditemui dibandingkan pemuka. Beberapa tamping tidak menjalankan tugas dengan baik karena tidak dapat bekerja sama dengan petugas di unit-kerja yang melekat dengan posisi mereka.

⁵ Terdiri dari *pemuka tata usaha kantor*, *pemuka kebersihan*, *pemuka kerja keamanan*, *pemuka kerja kerohanian Islam*, *pemuka kerja administrasi kantor*, *pemuka kerja kebersihan*, *pemuka olah raga tenis meja*, *pemuka olah raga bola volley*, *pemuka olah raga senam kesegaran jasmani*, *pemuka kesehatan*, *pemuka kebersihan ruang graha sahardjo*, *pemuka kesenian*, *pemuka kegiatan kerja* dan *pemuka kebersihan blok B* (Laporan Seksi Bimpas: 2009)

Secara formal jumlah tamping tersusun sebagai berikut: *tamping luar* terdiri dua puluh lima orang⁶, *tamping dalam* terdiri delapan puluh dua orang.⁷ Tidak semua tamping ini membentuk relasi-relasi sosial dengan petugas. Satu unit kerja tertentu bisa mempekerjakan sekian banyak tamping, tapi hanya ada satu atau dua orang menjadi motor utama kegiatan di unit kerja tersebut, mereka ini menjadi aktor yang melandasi terbentuknya relasi-relasi sosial dalam unit kerja tersebut.

Sulit sekali menemukan relasi-relasi sosial dalam suatu unit kerja, jika hanya melakukan penelitian singkat karena harus melakukan pendekatan pada dua belah pihak yakni pihak tamping dan petugas. Mengatasi persoalan ini, penulis mengatasinya membuat hubungan erat dengan aktor narapidana dan petugas melalui tahapan-tahapan penelitian yang cukup lama (**bab 3**).

Lebih jauh penulis melihat keikutsertaan tamping dalam pengelolaan operasional Lapas menampilkan fenomena masyarakat dalam Lapas (*prison society*) yang interaktif, tidak lagi seperti gambaran penjara lama dimana narapidana hanya terkurung dalam kamar dan menjadi tak berdaya. Meski harus diakui, saling keterhubungan narapidana dan petugas tidak sepenuhnya setingkat tapi keterkurungan ini membentuk hubungan kerja dan komunikasi kedua belah pihak menjadi akrab, sebagaimana disinyalir Ellis Finkelstein (1993). Hubungan akrab terjalin diantara para aktor tidak melibatkan narapidana dan petugas secara keseluruhan, hanya beberapa orang tertentu saja. Interaksi para aktor menjadi sentral meneropong keberadaan relasi-relasi sosial di Lapas. Relasi-relasi sosial ini menjembatani berlangsung dan tumbuhnya kesepakatan-kesepakatan informal diantara tamping dan petugas.

6.2. Relasi-Relasi Sosial Aktor

Berdasar hasil telusuran lapangan yang diperoleh penulis, teridentifikasi beberapa relasi-relasi sosial yang terbentuk diantara tamping dan petugas yakni:

⁶ Meliputi *tamping kegiatan kerja (giatja)* 22 orang dan *tamping besukan luar* 3 orang.

⁷ Meliputi *tamping ruang bimpas* 6 orang, *tamping binatu* 5 orang, *tamping dapur* 20 orang, *tamping ruang graha saharjo* 5 orang, *tamping ruang kesehatan* 3 orang, *tamping ruang KPLP* 6 orang, *tamping ruang registrasi* 3 orang, *tamping ruang kasubbag TU* 1 orang, *tamping masak air malam* 12 orang, *tamping ruang aula atas* 2 orang, *tamping kebersihan ruang besukan dalam* 1 orang, *tamping ruang sarana kerja* 2 orang, *tamping ruang umum dan kepegawaian* 2 orang, *tamping umum dalam lapas* 1 orang, *tamping tas* 10 orang, dan *tamping ruang administrasi kamtib* 3 orang (Laporan Seksi Giatja: 2009).

Pertama, relasi-relasi sosial yang terkait dengan kepentingan unit-unit kerja dan kedua, relasi-relasi sosial yang terkait dengan kebutuhan kamar atau pribadi.

Relasi sosial pertama, mencakup relasi tamping-dalam dan petugas, tampak dalam unit kerja senam, dapur, binatu, keamanan, besukan, kesehatan, kegiatan kerja (giatja) dan kesenian. Termasuk juga relasi tamping-luar dan petugas, terdiri dari unit kerja parkir, kebun, sampah maupun showroom. Relasi sosial kedua, mencakup relasi sosial berdasarkan kebutuhan kamar atau pribadi, meliputi jalinan hubungan antara petugas, *kepala kamar (KM)*, *buser* beserta *anak kamar* (Diagram 6.2).

Diagram 6.2. Relasi-Relasi Sosial Aktor

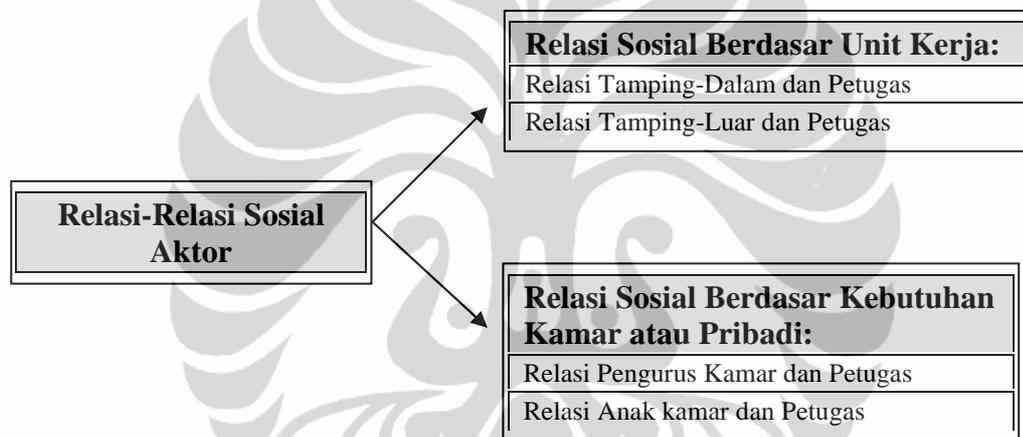


Diagram 6.2. memperlihatkan pembentukan relasi-relasi sosial aktor petugas dan narapidana mewarnai kehidupan sosial di Lapas. Berikut ini uraian keberadaan dan deskripsi masing masing relasi-relasi sosial tersebut.

6.2.1. Relasi Sosial Tamping-Dalam dan Petugas

Telusuran lapangan penulis menunjukkan relasi-relasi sosial tamping-dalam dan petugas terjalin dalam hubungan unit-unit kerja tertentu meliputi: pertama, unit kerja senam; kedua, unit kerja dapur; ketiga, unit kerja binatu; keempat, unit kerja keamanan; kelima, unit kerja besukan; keenam, unit kerja kesehatan; ketujuh, unit kegiatan kerja (giatja) dan kedelapan, unit kerja kesenian.

Pertama, relasi sosial dalam unit-kerja senam. Tamping senam bertugas memimpin senam pada pagi hari secara bergantian per blok sesuai jadwal yang telah ditetapkan petugas unit kerja Bimpas (**Foto 6.1**). Relasi sosial terjalin sesuai tugas

tamping untuk menjemput narapidana dari masing-masing kamar di blok, lalu dikumpulkan di lapangan untuk melakukan senam pagi secara bersama. Petugas Bimpas hanya mengawasi pelaksanaan senam pagi agar berjalan secara teratur, bila tidak, maka tampingnya dipanggil dan ditegur. Tamping harus bisa mengorganisir para narapidana untuk bangun dan mengikuti senam pagi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Foto 6.1
Senam Pagi



Sumber : Data Peneliti

Foto 6.1 menggambarkan senam pagi berlangsung dan terlaksana berkat jalinan relasi tamping senam dan petugas bimpas. Saat senam berlangsung sebagaimana dalam gambar, pemuka **Ati**, langsung memimpin olahraga dengan berdiri paling depan, sedang petugas hanya memonitor lancar tidaknya aktivitas senam pagi tersebut. Relasi ini menunjukkan kerja sama yang baik antara tamping dan petugas saat melaksanakan kegiatan rutin olahraga. Sulit sekali bagi petugas memanggil narapidana satu per satu dari kamar (blok) lalu mengumpulkan dan mengatur mereka di lapangan. Kerjasama ini memberikan nilai lebih bagi tamping **Ati**, melaksanakan tugas dengan baik. Bila hubungan ini terus berjalan lancar dan rutin, maka ia dianggap berkelakuan baik. Sebaliknya bagi petugas Bimpas, pelaksanaan tugasnya menjadi cepat dan lancar karena dibantu tamping senam. Relasi sosial timbal balik dalam aktivitas senam pagi meningkatkan kinerja unit kerja Bimpas sesuai kriteria ditetapkan organisasi. Tidak sembarang narapidana bisa menjadi tamping senam, ada seleksi dan penyaringan bagi mereka yang pantas menjadi tamping, kesepakatan informal berlaku bagi mereka yang

ingin menjadi tamping senam. Relasi-relasi sosial di unit kerja senam yang rutin mendasari kelancaran pelaksanaan tugas Bimpas.

Kedua, relasi sosial dalam unit kerja dapur. Secara formal pemuka dapur membawahi dua puluh satu tamping, tugasnya terdiri dari dua *shift*, satu shift regu masak, dan satu shift lagi mendistribusi makanan cadong. Tiap regu tiap minggu bergantian tugasnya. Menurut pemuka dapur, **Ali**, “...Ini baru pengaturan makanan saja 3 kali sehari, belum kalo air minum yang dibagi korve blok, masing-masing ambilnya di depan dapur sebelah pos wali blok A...” **Ali** menambahkan:

“...Tamping disini hanya jadi pembantu petugas, suasana Paledang ada suasana kebatinannya, karena residivis dari manapun kalo masuk sini pasti tunduk ama petugas baik R Cipinang, R NK (Nusakambangan), R Cirebon, ikut aturan petugas, makanya disini pas keluar kerangkeng petugas hilir mudik, beda ama di LP lain diserahkan ke tamping dan pemuka aja...”
(Wawancara **Ali**, tanggal 8 September 2009)

Ali menguraikan di Lapas, sebagian besar narapidana membantu petugas di lapangan dan sebaliknya, tak terkecuali mantan-mantan residivis pindahan Lapas lain. Hal ini berpengaruh pada relasi kerja-sama antara petugas dan tamping dapur. Bagi beberapa tamping dapur, relasi ini berlangsung tak sebanding karena narapidana hanya dianggap pembantu saja, meskipun begitu ada hal lain diperoleh yaitu kerjasama. Relasi sosial tamping dan petugas dapur dimulai setiap hari saat subuh (pagi hari) dimana tamping bertugas menyiapkan bumbu, bahan mentah makanan, memasak dan mengantar ke kamar, lalu membersihkan dapur kembali (**Foto 6.2**), sedangkan petugas mengawasi dan memonitor keseluruhan pelaksanaan tugas dapur pada hari tersebut. **Tsi** seorang petugas dapur mengatakan: “...Tiap UPT bisa beda-beda aturan main dan prosedur dapurnya, sesuai fisik bangunan dan tergantung pimpinan (kalapas), tapi kebiasaan/mekanisme didalam pengelolaan dapur sudah jalan terus dan lama, kebiasaan (budaya) disini sudah lancar, tetap jalan meskipun kalapas berganti-ganti...” (Wawancara **Tsi**, tanggal 2 Oktober 2009).

Menarik apa yang dikatakan petugas dapur **Tsi**, bahwa pengaturan dapur sudah berjalan lama dan menjadi kebiasaan, tak menjadi persoalan meskipun Kalapas dan Pimpinan (Kasi) berganti-ganti, urusan dapur tetap berjalan sebagaimana biasa. Apa yang dikatakan **Tsi**, menunjukkan relasi sosial yang terbentuk pada unit kerja dapur menjadi pendukung utama berjalannya pemenuhan kebutuhan di Lapas. Petugas dapur lain **Ini** menambahkan, orang dapur merupakan *urat nadi* kehidupan blok dan kamar narapidana, apalagi kondisi *over capacity* saat ini membuat kapasitas makanan

narapidana naik tiga kali lipat dari kapasitas seharusnya. Hal ini membuat petugas tidak bisa lagi memakai pendekatan kekuasaan tapi menggunakan pendekatan kejiwaan terhadap para tamping agar ikut membantu di dapur sepenuh hati. Petugas **Ini**, mengatakan, *"...99% pikiran napi/tahanan ada di luar Lapas, hanya 1% memikirkan tentang badannya, karena itu sekarang bukan jamannya lagi melakukan kekerasan, pemerasan dan pemukulan tahanan/napi, tapi harus melihat cara bicara dan gerak tubuh mereka untuk mengerti mereka..."* (Wawancara **Ini**, tanggal 7 Agustus 2008). **Ini** menegaskan, saat ini bukan lagi waktunya menggunakan pendekatan kekerasan terhadap tamping tapi persuasif mendekati mereka melalui pembentukan kesepakatan-kesepakatan informal agar kebutuhan masing-masing pihak dapat terpenuhi bersama. Kesepakatan-kesepakatan ini berlangsung dimana tamping bisa membuat masakan tambahan sebagai pesanan narapidana maupun petugas, lalu tamping tersebut memperoleh imbalan atas pesanan tersebut.

Foto 6.2
Kerjasama Petugas & Tamping Dapur



Sumber : Data Peneliti

Foto 6.2 menunjukkan bagaimana kerja sama dilakukan narapidana dan petugas saat mempersiapkan makanan dan minuman bagi narapidana/tahanan di Lapas, berjumlah seribuan orang setiap hari, mulai dari mengolah sampai mendistribusikan makanan ke blok dan kamar-kamar. Tamping dapur disatukan dalam kamar tersendiri oleh petugas dapur agar subuh (jam tiga pagi) sudah bangun dan siap memulai aktivitas memasak di dapur.

Ketiga, relasi sosial dalam unit kerja binatu. Relasi ini dijalin oleh lima orang tamping dan beberapa petugas Bimpas. Tamping binatu bertugas mencuci, menyetrিকা

baju dan celana narapidana/tahanan, sedangkan petugas mengawasi kamar binatu, untuk setiap baju/celana sekali cuci dikenakan Rp 1.000. Tugas tamping adalah mencatat merek, nomor kamar dan ciri lain yang melekat pada pakaian (ditandai) agar tak tertukar dengan pakaian orang lain, tanda-tanda ini harus diingat tamping binatu seperti garis, pola dan bentuk tiap pakaian. Menjadi tamping binatu tidak bisa dilakukan setiap orang atau diterima begitu saja, perlu kemampuan seperti mengenal jenis pakaian, perbedaan pola dan bentuk kain. Tamping binatu menampung cucian dan setrikaan *para pangeran* dari tiga puluh delapan kamar setiap harinya (**Foto 6.3**). Seratusan pakaian dikerjakan, dan selesai dua hari kemudian. Bagi *narapidana tak mampu* tidak memakai jasa binatu, mereka mencuci baju, menjemur pakaian, menyetrika pakaian sendirian dengan alas tempat tidur mereka. Tamping binatu hanya bertugas di blok narapidana pria saja, tidak di blok wanita (BW). Blok wanita tidak mempunyai binatu sendiri karena mereka mencuci pakaian secara bersama dan bergantian, narapidana perempuan menyeterika bergantian, sesuai piket yang telah ditetapkan.

Foto 6.3
Tamping Binatu



Sumber : Data Peneliti

Foto 6.3 menggambarkan aktivitas tamping binatu dimana mereka melakukan pencucian dan penyeterikaan pakaian berjumlah lebih dari seribuan, kiriman dari blok A, B, C, dan D. Setiap pagi, salah satu tamping mengambil pakaian kotor dari kamar ke kamar, sekaligus mengembalikan pakaian yang sudah disetrika dan berbau wangi. Relasi-relasi sosial petugas dan tamping binatu merupakan unit kerja yang berada

dibawah struktur Bimpas. Petugas binatu mengawasi dan mensuplai berbagai peralatan dan bahan yang diperlukan. Relasi-relasi sosial pada unit kerja ini berfungsi membantu menentramkan dan menyamankan para penghuni Lapas karena mereka dapat mempergunakan pakaian yang bersih, tidak berbau keringat dan apek.

Keempat, relasi sosial dalam unit kerja keamanan. Relasi sosial dalam unit-kerja ini mempunyai peran penting dalam Lapas karena jumlah petugas di bidang keamanan (KPLP) terbatas dan sedikit jumlahnya. Tamping keamanan membantu mulai dari mencatat tahanan baru, administrasi tahanan sidang, perubahan status dari tahanan ke narapidana, merekapitulasi jumlah narapidana, dan mengecek identitas narapidana dalam kamar (**Foto 6.4**). Seorang tamping KPLP **Pni**, menjelaskan:

“...Tugas kita bantu registrasi napi seperti penamaan di depan kamar, warna kuning untuk tahanan, warna hijau untuk sudah putus dibawah 1 tahun dan warna biru diatas 5 tahun. Kalau ada ditambah kode + artinya lebih lima tahun. Lalu kode D=dewasa, W=wanita, AA=anak-anak, P=pria. Tamping disini bekerja berdasar wilayah kerja kekuasaan dari petugas, tamping KPLP termasuk tamping dalam yang bisa masuk ke semua blok A-D sampai BW. Tapi hanya di dalam, kalo tamping luar bisa keluar, lebih bebas dan lebih susah memperolehnya seperti tamping giatja atau besukan. Tamping KPLP ada 5 orang dengan tugas berbeda-beda, tugasnya ditetapkan staf KPLP, mulai dari membersihkan ruang KPLP, mencatat, mengecek sampai memanggil orang yang akan diperiksa...”
(Wawancara **Pni**, tanggal 30 Juni 2009)

Uraian tamping **Pni**, menjelaskan tugas utama tamping keamanan adalah mencatat jumlah fisik tahanan/narapidana secara langsung, membandingkannya dengan data yang tersedia di unit kerja registrasi. Petugas dibantu tamping keamanan menghitung satu per satu narapidana secara fisik di kamar maupun blok. Tamping keamanan mempunyai wilayah kerja luas mencakup semua area-dalam Lapas, tapi tidak di luar areal Lapas. Tamping keamanan membantu petugas melakukan tugas administrasi keamanan dalam semua blok. Wilayah kerja tamping keamanan begitu besar mengikuti kewenangan yang melekat pada petugas keamanan (KPLP), hanya bedanya petugas mempunyai kewenangan mencakup eksekusi tindakan keamanan pada semua areal Lapas, sedangkan tamping hanya mengurus keamanan dalam blok dan kamar saja.

Foto 6.4
Tamping KPLP & Papan Identitas Kamar



Sumber : Data Peneliti

Foto 6.4 menunjukkan kegiatan pencatatan dilakukan tamping keamanan terkait identitas narapidana/tahanan secara keseluruhan. Mereka lalu menempelkan identitas tersebut di depan pintu kamar masing-masing narapidana/tahanan. Setelah selesai, semua kegiatan dilaporkan dan diberikan pada petugas untuk dicek kembali. Relasi kerja sama ini berperan mengatur lalu-lintas orang yang *masuk-keluar* Lapas, mengantisipasi gangguan keamanan dalam blok maupun kamar. Menjadi tamping keamanan lebih enak sebagaimana dikemukakan tamping **Pni**, seorang narapidana narkoba, terhukum penjara delapan tahun. Ia menceritakan suasana keamanan Lapas saat ini bagus, berbeda dengan dahulu. Sekarang, air minum hangat tersedia di tiap kamar saat malam hari, kalau dulu (sebelum tahun 2005) belum ada air hangat, nggak ada WC. Di blok hanya ada satu WC umum dan satu kran, mau mandi harus antri, mau masak harus angkut air dulu dalam dirijen (*bedeng*). **Pni** mengatakan, keadaan buruk ini mempengaruhi situasi keamanan di kamar dan blok, waktu itu masih suka ada *gulungan* (pemukulan) karena rebutan air, bisa merembet ke keributan lebih besar seperti perkelahian antar blok, antar kamar, sampai gesekan antar suku dan agama. Sekarang sudah berubah, perbaikan lingkungan fisik dan penyediaan kebutuhan air, listrik di kamar membuat jarang muncul keributan, kecuali perselisihan rutin seperti tidur yang sesak atau ribut kecil senggolan, saling ngotot. Berbagai perselisihan ini lebih sering diselesaikan di kamar, dan penyelesaiannya melalui cara salah satu dari yang berselisih dipindahkan ke kamar lain oleh *kepala kamar* (KM).

Tamping keamanan (KPLP) berjumlah lima orang, mereka tidur secara dipisah, tidak disatukan agar bisa memantau dan melaporkan berbagai kejadian keamanan di kamar masing-masing terutama bila ada kekacauan atau kerusuhan. Dalam hal ini, kesepakatan-kesepakatan informal berlangsung pada unit kerja keamanan (KPLP), dalam mengantisipasi keamanan, menyelesaikan persoalan, dan mengambil tindakan atas pelanggaran yang terjadi. Relasi relasi sosial petugas dan tamping memainkan peranan penting terutama dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan hukuman.

Relasi-relasi sosial pada unit kerja keamanan (KPLP) tidak saja berfungsi sebagai arena kerja sama antara tamping dan petugas KPLP, tapi seringkali dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan kedua belah pihak. Sebagai tamping KPLP, **Pni** seringkali menjadi penghubung narapidana di kamar dengan pihak keluarganya lewat besukan, untuk itu berlaku kesepakatan informal yang dikenal “86” (*uang damai*) yang dibayar pada petugas sebagai pertukaran antara aturan ketat dan kelonggaran yang diberikan petugas. **Pni** mengatakan, “*Soal 86 bukan sesuatu yang diberikan secara gratis, tapi berlangsung apa adanya tanpa dipaksa. Lebih jauh Pni mengatakan:*

“...Sebenarnya disini kalo soal duit bukannya kita asal ngasih ke petugas tapi karena kita udah dikasih keamanan dan kenyamanan dari petugas, misal kalo yang benar jengukan hanya 20 menit tapi ini bisa sampai 1 jam, ada juga yang bisa ketemu langsung didalam, terus kalo dikamar banyak diberi kemudahan, sehingga kita harus ngerti, sama aja kalo saudara kita datang harus dikasih uang juga sebagai rasa saudara...” (Wawancara **Pni**, tanggal 30 Juni 2009)

Uraian **Pni** ini menunjukkan mekanisme kesepakatan informal melandasi relasi-relasi sosial dalam unit kerja sebagai sesuatu yang normal. Tamping memberi uang atau imbalan pada petugas bukan secara gratis atau terpaksa, tapi sejalan dengan fasilitas keamanan, kebebasan dan kenyamanan yang diberikan petugas, sehingga timbul saling pengertian bersama dalam menjaga keutuhan dan keamanan Lapas.

Kelima, relasi sosial dalam unit kerja klinik (kesehatan). Tamping klinik atau tamping kesehatan ditugaskan membantu petugas dokter dan perawat untuk merawat narapidana sakit dalam klinik. Tamping ini merawat narapidana/tahanan dengan memaksa mereka yang tak mau minum obat untuk minum sesuai takaran (**Foto 6.5**). Tak jarang tamping juga membantu petugas dan keluarganya yang sakit dengan memberi nasehat kesehatan maupun obat-obatan. Tamping kesehatan berjumlah tiga orang, tugasnya bersifat darurat. Mereka ditempatkan di ruang kesehatan dan klinik,

tidak tidur di kamar untuk mengantisipasi sewaktu-waktu ada yang sakit maupun menderita penyakit tertentu. Relasi-relasi sosial petugas dan tamping klinik (kesehatan) mempunyai peran krusial di Lapas. Ketika ada yang sakit, tak ada petugas dokter, maka tamping klinik harus segera mengurus dan memberi tindakan pertama. Relasi sosial yang timbul berfungsi sebagai arena kerja sama dan mempermudah pekerjaan petugas. Seringkali kesepakatan informal disalahgunakan menjadi arena penjualan obat. Seorang tamping klinik **Ici**, menceritakan tak jarang mereka memanipulasi posisi dengan menjual obat ke sesama napi atau menawarkan jasa untuk dirawat di klinik, agar bisa bergerak lebih bebas, dengan resiko bila ketahuan langsung dipecat sebagai tamping dan digantikan orang lain.

Foto 6.5
Tugas Tamping Klinik



Sumber : Data Peneliti

Foto 6.5 menggambarkan suasana klinik yang menampung para narapidana sakit disaat petugas dokter dan pegawai kesehatan sudah pulang. Tamping kesehatan bertugas menjaga dan merawat mereka yang sakit sampai petugas dokter dan perawat datang kembali.

Keenam, relasi sosial dalam unit kerja ruang besukan. Relasi ini melibatkan tamping besukan luar dan dalam (**Foto 6.6**). Tamping ini membantu petugas menjaga ruang besukan saat pihak keluarga membesuk. Relasi-relasi sosial petugas dan tamping besukan selain berfungsi kerjasama, juga membantu petugas dalam menjaga ketertiban selama jam kunjungan. Relasi-relasi sosial ini mendukung kesepakatan-kesepakatan informal di ruang besukan. Saat kunjungan seringkali dimanfaatkan tamping sebagai

kesempatan mendapat sebungkus rokok, makanan kecil atau titipan dari pengunjung yang datang. Tamping besukan bisa ditugaskan saat besukan pagi dan siang, tamping besukan ada yang di luar area Lapas, tugasnya membantu petugas membeli keperluan kantor atau kebutuhan lain. **Hri**, seorang tamping besukan mengatakan, ia dan rekannya menjadi *penjaga pintu* masuk-keluar barang ke Lapas karena pihak keluarga atau pengunjung sering menitipkan sesuatu kepada mereka untuk disampaikan pada narapidana yang ada di dalam kamar maupun blok.

Foto 6.6
Tamping Besukan



Sumber : Data Peneliti

Foto 6.6 menggambarkan suasana *tamping besukan* bersiap menuju ruang besukan untuk melakukan tugas sehari-hari. Sebelum masuk dan keluar dari blok, dilakukan pencatatan oleh tamping keamanan (KPLP), siapa saja tamping yang keluar dan dalam rangka apa ia keluar.

Ketujuh, relasi sosial dalam unit kegiatan kerja (giatja). Tamping giatja melakukan kegiatan-kegiatan kerja di Lapas seperti membuat motor-motoran kertas, menjahit, membuat pola, membuat tas, dompet dan lukisan. Tamping ini bekerja di ruangan kantor bagian atas tempat petugas Giatja bertugas (**Foto 6.7**). Mereka menghabiskan waktu luang dengan aktif melakukan aktivitas kerja, membuat produk ketrampilan untuk dijual atau dipromosikan sebagai hasil karya narapidana. Ada pula tamping giatja yang bekerja di luar Lapas seperti di kebun belakang, empang ikan, isi ulang air minum. Mereka keluar pagi hari dan masuk lagi ke kamar saat sore hari.

Relasi-relasi sosial petugas dan tamping giatja berfungsi sebagai arena kerjasama dalam membina narapidana, dimana petugas menyediakan bahan baku bagi

kegiatan kerja, sebaliknya *tamping giatja* membuat dan menghasilkan produk tertentu, entah itu kerajinan gelang, cincin, dompet, cangklong dan tasbeh.

Seorang *tamping giatja* Uci mengatakan pada penulis, tak jarang mereka dijadikan tempat titipan barang antara narapidana di blok satu dengan lainnya maupun pihak keluarga narapidana. Keadaan ini melandasi berlangsungnya kesepakatan-kesepakatan informal demi memenuhi kebutuhan berbagai pihak terkait.

Foto 6.7
Tamping Kegiatan Kerja



Sumber : Data Peneliti

Foto 6.7 menggambarkan suasana kerja *tamping giatja* dengan berbagai macam kegiatan yang dilakukan. Tampak dalam foto ini kegiatan menjahit dan membuat motor-motoran yang dilakukan rutin oleh para *tamping giatja*.

Kedelapan, relasi sosial dalam unit kerja kesenian. *Tamping/pemuka kesenian* bertugas membantu petugas unit kerja bimpas dalam mengatur kegiatan-kegiatan kesenian menjelang acara-acara tertentu seperti tujuh belas agustus, keagamaan atau perpisahan pegawai (**Foto 6.8**). Bentuk kegiatan kesenian yang dilakukan adalah band, dangdut, organizer, marawis, dancer, yang terbentuk dalam wadah perkumpulan *elpale*. Relasi-relasi sosial petugas dan *tamping kesenian* berjalan rutin dan sudah terjadwal tetap tiap minggu. Bila ada permintaan manggung maka personil tim kesenian siap tampil, *tamping* membantu petugas mulai dari mempersiapkan acara, mencari pemain, penyanyi, penari, serta untuk berbagai kelengkapan acara lainnya. Relasi ini mendasari kesepakatan informal dalam hal rekrutmen dan waktu latihan intens yang seringkali menimbulkan keakraban tertentu, dan membangkitkan kerjasama untuk berbagi atau

menumpahkan perasaan (kekesalan) baik diantara sesama narapidana maupun dengan petugas.

Foto 6.8
Pemuka/Tamping Kesenian



Sumber : Data Peneliti

Foto 6.8 memperlihatkan suasana meriah salah satu acara Lapas, terselenggara atas relasi-relasi sosial tamping kesenian dan petugas di unit kerja Bimpas. Lancarnya acara ini selain menjadi keberhasilan unit kerja bimpas, membawa citra bagus bagi Lapas dan jajarannya.

Kedelapan relasi-relasi sosial aktor diatas, menampilkan upaya mempertahankan kesepakatan-kesepakatan informal yang berlangsung diantara tamping-dalam dan petugas, walau kesepakatan-kesepakatan informal ini mempunyai spesifikasi dan karakteristik berbeda tergantung unit kerja masing-masing. Keberadaan relasi-relasi sosial ini tidak saja memberikan fungsi kerja sama diantara tamping dan petugas, tapi juga berfungsi sebagai arena menjalin keakraban, saling berbagi (*curhat*), mendapatkan keamanan, mencari perlindungan, sampai menjadi tempat penitipan atau kurir.

6.2.2. Relasi Sosial Tamping-Luar dan Petugas

Relasi-relasi sosial berdasarkan unit kerja tidak hanya berlangsung pada tamping-dalam tapi juga tamping-luar yaitu tamping yang bekerja di luar Lapas atau halaman luar Lapas, biasanya tamping ini bekerja dari pagi sampai sore. Relasi ini dibentuk antara tamping dan petugas unit kerja giatja. Kegiatan tamping-luar sangat membantu pelaksanaan tugas Giatja terutama dalam mengurus kebun, empang,

showroom, parkir, kebersihan dan sampah. Menurut tamping **Zzi**, tidak mudah menjadi tamping luar karena harus memenuhi syarat sebagai berikut:

*“...Pertama, sudah menjadi napi, bukan tahanan. Kedua vonis pidananya sudah turun dari kejaksaan. Ketiga, narapidana dengan kasus kriminal bukan narkoba. Keempat, lama pidana tinggal 5 bulan kebawah atau sudah mau pulang. Kelebihan tamping luar yaitu pada saat-saat tertentu bisa pulang ke rumah masing-masing dengan syarat sudah harus kembali ke Lapas saat apel sore, biasanya dilakukan saat tertentu saja dan pada jam dimana tugas-tugasnya sudah selesai; bisa melihat dunia luar sebelum waktunya; bisa melakukan segala kegiatan yang dilakukan seperti orang sudah bebas pada umumnya; dapat menghasilkan pemasukan dengan berbagai cara sesuai bidangnya masing-masing seperti tamping parkir bisa dapat uang parkir, tidak harus uang bisa tips nasi bungkus, sebungkus rokok. Kekurangannya yaitu bisa menjadi tempat sarana melarikan diri, tempat masuknya barang-barang terlarang dan berbahaya, harus bisa “86” dengan petugas sesuai bidangnya, dan sering menimbulkan kesenjangan sosial, banyak napi iri dengan tamping luar karena memiliki berbagai macam kelebihan dan mempunyai penghasilan, disisi lain banyak napi yang mendekati...” (Wawancara **Zzi**, tanggal 10 Oktober 2009)*

Uraian **Zzi** ini memperlihatkan bagaimana sulitnya menjadi tamping luar, sejumlah persyaratan harus dipenuhi. Menjadi tamping luar mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, pada saat-saat tertentu mereka bisa pulang ke rumah dengan syarat semua tugas sudah selesai, dan harus kembali ke Lapas saat apel sore. Tamping luar bisa melihat dunia luar sebelum waktunya, melakukan kegiatan orang bebas, dan mencari pemasukan (uang) pada unit kerja tertentu seperti parkir. Kekurangannya, bisa menjadi sarana melarikan diri, tempat titipan dan masuknya barang-barang yang dilarang. Tamping-luar dibentuk terutama terkait dengan program asimilasi, tapi berbeda dalam kenyataannya dimana pendekatan terhadap petugas giatja yang diperlukan untuk mendapatkan posisi ini. Tamping **Zzi** mengatakan, “Harus bisa “86” dengan petugas sesuai bidangnya”. **Zzi** menambahkan identitas dan posisi tamping-luar seringkali menimbulkan kesenjangan di kalangan napi pada umumnya, banyak yang iri dengan keleluasaan yang diperoleh tamping luar ini.

Hasil telusuran penulis memperlihatkan relasi-relasi sosial tamping-luar dan petugas teridentifikasi mencakup: pertama, unit kerja parkir; kedua, unit kerja kebun; ketiga, unit kerja kebersihan (sampah); keempat, unit kerja showroom.

Pertama, relasi sosial pada unit kerja parkir. Terdiri dari lima orang tamping yang bertugas menjaga parkir (**Foto 6.9**), terkadang mereka bertugas merangkap

sebagai tukang cuci mobil dan motor petugas. Tamping ini bekerjasama dengan petugas dari unit kerja kegiatan kerja (Giatja) dan unit keamanan (KPLP).

Foto 6.9
Tamping Parkir



Sumber : Data Peneliti

Foto 6.9 memperlihatkan bagaimana tamping parkir bertugas menjaga parkiran motor yang ada di depan bangunan Lapas. Selain menjaga motor petugas mereka juga mengawasi keamanan motor dan mobil pengunjung. Relasi sosial tamping-luar dan petugas berfungsi sebagai arena kerja sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di areal parkiran. Fungsi lain sebagai sarana memperoleh pemasukan (pendapatan).

Kedua, relasi sosial pada unit kerja kebun, Terdiri dari tujuh orang tamping, mereka bertugas sebagai tukang kebun yang mengurus berbagai macam jenis tanaman yang ada di taman kebun di areal luar Lapas (**Foto 6.10**).

Foto 6.10
Tamping Kebun



Sumber : Data Peneliti

Foto 6.10 memperlihatkan kebun, usaha kolam ikan (empang), tanaman sayuran yang ditanam para tamping kebun di lahan milik Lapas. Relasi relasi sosial tamping kebun dan petugas Giatja berfungsi sebagai sarana kerja sama untuk mempersiapkan bibit, pupuk dan peralatan kebun lain dalam rangka pembinaan narapidana. Tak jarang tamping kebun menjadi tempat penitipan (kurir) yang menghubungkan narapidana yang ada di dalam kamar (blok) dan pihak keluarga (pihak lain) di luar Lapas.

Ketiga, relasi sosial pada unit kerja kebersihan (sampah). Terdiri dari sepuluh orang tamping, mereka bertugas mengurus semua jenis sampah baik di dalam maupun di luar Lapas. Tamping ini bertugas membantu petugas membawa segala macam jenis sampah dari dalam ke luar Lapas, untuk diteruskan ke tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) terdekat (**Foto 6.11**). Tamping sampah (lima orang) bekerja sama dengan tamping kebersihan (lima orang), bersama-sama membersihkan ruang luar Lapas. Relasi-relasi ini rentan disalahgunakan, salah satunya dimanfaatkan untuk memasukkan barang-barang yang dilarang. Selain itu relasi-relasi ini dipergunakan untuk memanfaatkan sampah buangan. Sesudah sebagian besar sampah dibawa ke tempat pembuangan, sisanya dipakai memberi makan hewan peliharaan petugas, sisa lainnya sampah-sampah plastik, botol aqua, dipisahkan tersendiri dan diborong petugas untuk dijual lagi ke pihak luar.

Foto 6.11
Tamping Sampah/Kebersihan



Sumber : Data Peneliti

Foto 6.11 menggambarkan tamping sampah bekerja setiap hari membawa keluar-masuk gerobak sampah yang berisi beragam sampah yang diambil dari kamar-kamar dan blok pada pagi hari. Relasi-relasi ini selain mengerjakan tugas-tugas dalam unit-unit kerja, juga diaktifkan dan dijadikan sarana dan jembatan memasukkan barang dari luar. Seorang napi **Lbi** mengatakan:

“...Keadaan mereka (tamping luar) selalu dimanfaatkan oleh penghuni Lapas, mulai dari mengambil uang di ATM, membeli barang untuk keperluan kamar, bahkan memenuhi kebutuhan para napi yang sedang ingin “mabuk”. Mereka pun sangat senang bila ada yang menggunakan jasanya karena setiap jasa yang diberikan sudah pasti ada imbalannya...”
(Wawancara **Lbi**, tanggal 5 Oktober 2009)

Lbi menguraikan relasi sosial tamping-luar dan petugas selain berfungsi sebagai arena kerja sama, dipergunakan membantu menyelesaikan tugas-tugas di unit kerja Giatja, dan sering dimanfaatkan sebagai sarana mendapatkan penghasilan (pemasukan) dan arena penitipan barang kebutuhan maupun barang terlarang lain.

Kempat, relasi sosial pada unit kerja showroom. Tamping pada unit kerja ini dua belas orang, mereka bertugas menjaga showroom (*outlet*) yaitu toko yang menjual segala macam hasil kerajinan tangan di Lapas. Para tamping dibantu petugas unit kerja Giatja. Hasil kerajinan tangan yang diperdagangkan antara lain berupa tas, dompet, ikat pinggang, miniatur mobil/motor dari kertas koran, gelang, kalung, baju, celana, sepatu, dan sandal. Letak showroom disamping Lapas (**Foto**

6.12). Tamping showroom adalah tamping luar yang bukan hanya berjualan di toko tapi terkadang melakukan pameran hasil-hasil karya napi ke *mall* maupun pusat perbelanjaan di sekitar wilayah Bogor.

Foto 6.12
Tamping Jaga Showroom



Sumber : Data Peneliti

Foto 6.12. menggambarkan showroom milik Lapas yang menjual beraneka ragam kerajinan yang dibuat narapidana. Tampak dalam foto 6.12 beberapa tamping-luar sedang menjaga toko dan berinteraksi dengan pembeli. Relasi-relasi ini berfungsi sebagai arena kerjasama menyelesaikan tugas pemasaran di unit kerja Giatja, seringkali dimanfaatkan sebagai sarana penitipan barang kebutuhan maupun barang terlarang dalam Lapas.

Keempat relasi-relasi sosial aktor tamping-luar dan petugas diatas, dibentuk dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan kedua belah pihak, mulai dari barang-barang kebutuhan sehari-hari sampai barang-barang yang dilarang dan berbahaya. Relasi ini dipergunakan tidak saja untuk pemenuhan kebutuhan, tapi juga sebagai sarana perlindungan, keamanan dan kerjasama. Bila tamping-luar hanya bisa menyalurkan, menerima dan membawa barang-barang kebutuhan pada siang hari, maka petugas bisa keluar-masuk baik siang maupun malam hari. Kesepakatan informal berlangsung antara aktor yang sudah saling kenal, saling berhubungan secara intens, dan tidak semua petugas begitu saja mengikuti keinginan narapidana, begitu juga sebaliknya. Hanya

bila kesepakatan itu saling menguntungkan maka disepakati kedua belah pihak. Tamping **Bai**, menggambarkan sebagai berikut:

“...Kalau petugas hanya mau disuruh oleh orang-orang yang dikenalnya saja dan juga 86 nya beda, mekanismenya tergantung kesepakatan bersama. Ada petugas yang meminta 86 saja atau meminta 1/2 dari barang yang dimasukkan tersebut. Para napi punya kedekatan dengan petugas tertentu dan melihat kelonggaran pada regu jaga tertentu. Bila ada barang yang ingin dimasukkan maka napi itu tinggal telp pada orang diluar Lapas untuk menghubungi Pak “X” dan memberikan barangnya, nanti pas jaga malam akan disampaikan...”
(Wawancara **Bai**, tanggal 15 September 2009)

Uraian **Bai** memperlihatkan relasi-relasi yang terbentuk bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang fungsional maupun disfungsional. Dikatakan fungsional, bila dilandasi hubungan kerja sama dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas operasional unit kerja tertentu. Sebaliknya disfungsional, karena dilandasi keinginan berlebihan individu untuk memasukkan barang yang dilarang dan terlarang lainnya. Seperti maraknya peredaran barang berbahaya dan dilarang bisa berjalan langgeng karena terjaganya relasi-relasi sosial aktor ini. Melalui relasi tamping luar dan petugas, berbagai pemeriksaan masuk-keluar terhadap barang dan orang menjadi sekedar formalitas saja. Tamping **Bai**, mengungkapkan keadaan ini membuat barang apa saja bisa masuk ke dalam Lapas, apakah itu barang berbahaya dan terlarang, HP, minuman keras sampai narkoba.

Posisi tamping sangat besar, baik tamping luar atau tamping dalam. Petugas biasanya tidak lagi memeriksa barang yang masuk karena percaya sudah diperiksa oleh tamping, walaupun diperiksa tak seketat pemeriksaan rutin biasa karena berlaku kesepakatan informal seperti sudah ada uang damai (86) yang diberikan oleh tamping. Tapi tak semua petugas mempercayai tamping seperti dikatakan petugas **Dfi**, berikut ini:

“...Sekarang jarang kedapatan tertangkap tangan penghuni yang pake HP, mereka juga pinter-pinteran dengan petugas, biasanya HP disimpan penghuni dalam kloset pada bagian lubangnya sehingga pada saat razia, petugas akan segan ngeceknnya atau didalam tempat sampah yang biasanya dijadikan tempat meludah penghuni, membuat petugas merasa jijik ngeceknnya...”
(Wawancara **Dfi**, tanggal 21 Januari 2008)

Uraian **Dfi** ini menegaskan tidak semua petugas percaya begitu saja pada tamping karena mereka sering *akal-akalan* dengan petugas agar tidak ketahuan membawa dan menyimpan barang terlarang. Keadaan ini membuat kehidupan sosial di Lapas sangat unik, dipenuhi kerjasama sekaligus ketidakpastian, tergantung kondisi situasional yang terjadi. Relasi-relasi sosial tamping dalam & luar menampilkan aktivitas dan perilaku yang secara fisik menjadi pemandangan lumrah dalam perkantoran Lapas. Relasi-relasi ini selain berfungsi sebagai sarana kerjasama, membantu operasional unit-unit kerja, juga berfungsi menjaga keamanan, dan perlindungan bagi aktor yang mendapat masalah.

6.2.3. Relasi Sosial Berdasar Kebutuhan Kamar dan Pribadi

Selain relasi-relasi sosial yang terbentuk berdasar unit-unit kerja, terbentuk pula relasi-relasi sosial berdasar atas kebutuhan kamar dan pribadi, yang melibatkan hubungan antara petugas, tamping, pengurus kamar, anak kamar di kamar dan blok masing-masing.

6.2.3.1. Relasi Pengurus Kamar dan Petugas

Pengurus kamar diwakili oleh kepala kamar (*KM*) adalah narapidana yang dipercayakan untuk menjadi pimpinan dalam kamar. *KM* bertugas mengurus segala keperluan kamar, mulai dari air, listrik, tempat tidur, kebersihan, mengatur isi kamar, sampai mengatur beragam perilaku narapidana dan kelakuannya, termasuk mengatur posisi tidur sekian banyak orang dalam satu ruangan yang sempit dan terbatas (**Foto 6.13**). Tugas *KM* dan pengurus kamar dalam memenuhi berbagai kebutuhan kamar, memerlukan dana yang tidak sedikit, dan untuk bisa melaksanakan hal itu, pengurus kamar bekerja sama dengan petugas blok, tamping dan *anak kamar*. Relasi sosial ini terbentuk atas dasar kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan kamar.

Foto 6.13
Tugas KM Mengatur Posisi Tidur



Sumber : Data Peneliti

Foto 6.13 memperlihatkan bagaimana sempitnya kamar yang ditempati sekian banyak narapidana. Pengurus kamar harus bisa mengatur dan mengelola kamar agar berjalan tertib dan aman. Dapat dikatakan sulit sekali bisa bergerak bebas saat malam hari bila waktu tidur telah datang, beberapa narapidana bahkan tidur jongkok dan berdiri karena terbatasnya ruangan. Bila bergerak sedikit saja maka perubahan posisi duduk atau tidur akan diserobot dan digantikan tempatnya oleh narapidana lain disampingnya.

Kepala kamar (*KM*) sering juga disebut perpanjangan tangan petugas, karena *KM* dipercaya mengurus kamar serta mengatasi persoalan yang timbul didalamnya. Untuk mengurus kamar dan kebutuhan kamar, seorang *KM* dibantu wakil yang dikenal dengan *buser*, seorang narapidana yang bertugas mencari dan mencairkan dana dari *anak kamar*, mengurus pemasukan, dan pengeluaran kamar. *Buser* mengelola uang *anak kamar*, uang kamar dan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kamar.

Banyak relasi sosial dijalin *KM* atau *buser* agar kamar tetap mendapat pemasukan dan membiayai pengeluaran yang besar. Dalam satu hari, pengeluaran kamar bervariasi antara Rp 100.000,00– Rp 200.000,00, terdiri dari setoran (*mel*) petugas, bayar air, listrik, membayar tamping blok, tamping unit kerja, tamping cucian, tamping makan maupun kebersihan kamar. Seorang *KM Asi*, mengatakan cara mendapatkan setoran kebutuhan kamar dilakukan dengan menjaga dan

mempertahankan hubungan dengan *buser*. Berbagai cara yang digunakan **Asi** dikemukakan sebagai berikut:

*“...Pake buser, mulai dari cara halus dengan cara diperhatiin, dienakin, bahkan sampai dimanja dan dibikin sahabat, sampai cara kekerasan seperti tidur jongkok (dipress), dibentak-bentak, sampai dipukuli bahkan dibikin sampai sakit bathin. Dari cara-cara ini kebanyakan kamar menggunakan yang kasar walau cara yang halus adalah cara yang terbaik.” Ini data iuran anak kamar: Kijang (hanya bayar lapak + air), Atas (mingguan 3000 bulanan 13000), Depan (mingguan 3000 bulanan 100.000), Kolong (mingguan 3000 bulanan 100.000), Bawah (mingguan 3000 bulanan 50.000), Dayak (mingguan 3000 bulanan gak ada)...” (Wawancara **Asi**, tanggal 20 Oktober 2009)*

Uraian **Asi**, menunjukkan berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan setoran dari penghuni kamar, untuk itu perlu menjaga kedekatan hubungan dengan *anak kamar*, *buser* dan *korve*, disamping *KM* harus menjaga terpeliharanya relasi social yang tetap dengan petugas. Bila kamar berada dalam situasi sulit, belum ada uang membiayai untuk keperluan kamar, maka *KM* menyuruh *buser* untuk mengusahakan mendapatkan uang untuk keperluan kamar. Untuk itu, menurut seorang *buser* **Hii**, menjelaskan cara mendapatkannya yaitu: *“...Mencarinya dengan cara meressing (meminta) atau dengan cara pinjam tanpa bunga atau meminjam bukan kepada rentenir, bila ke anak kamar sudah tidak bisa maka buser akan mencari pinjaman kepada buser atau KM lainnya yang suatu saat mereka juga bisa saling tolong menolong...”* (Wawancara **Hii**, tanggal 18 Oktober 2009)

Uraian **Hii**, menjelaskan, dalam menutupi kekurangan pengeluaran kamar maka *buser* mencari dana dengan cara memeras pihak lain, atau meminjam pada *buser* atau *KM* lain. Situasi ini menjadi alasan utama tumbuhnya relasi-relasi yang tetap dan kontinyu diantara sesama *KM* atau *buser*, atau pihak petugas dalam mengatasi persoalan di kamar masing-masing. Relasi-relasi sosial yang tetap dan kontinyu dimanfaatkan bila timbul masalah dalam kamar, dimana para *KM*, *buser*, *korve* dari kamar lain, dibantu petugas tertentu, berusaha menanggung terlebih dahulu kekurangan kebutuhan kamar yang ada.

Untuk memenuhi kebutuhan kamar, menurut **Asi** cukup menggunakan tenaga *buser*, tidak lagi seperti dulu mengandalkan otot besar, sekarang yang penting memiliki pemikiran cemerlang untuk menggalang dana kebutuhan kamar.

Adapun dalam pengaturan isi kamar, *KM (buser)* dibantu *Korve*,⁸ bertugas membersihkan kamar mulai dari *lapak pangeran*, baju pakaian, perlengkapan dan semua peralatan yang ada di kamar. Semua yang menjadi *milik* kamar adalah tanggung jawab *korve* untuk merapikan dan mengurusnya. Menurut seorang *korve* **Bci**: “...*Korve slalu diibaratkan dengan pembantu (babu) namun mereka selalu giat karena diberi jatah di kamar seperti uang box, gaulan dari pangeran/anak kamar yang dibesuk dan “86 “ bagi penghuni kamar yang meminta dibutukan kopi, mie rebus...*” (Wawancara **Bci**, tanggal 18 Oktober 2009).

Uraian **Bci**, mengungkapkan bahwa *korve* kebanyakan berasal dari *napi tak jelas* (tak mampu). Meski narapidana ini seringkali disamakan dengan pembantu, tapi menjadi *korve* bisa mendapat pemenuhan kebutuhan dan *jatah (gaulan)* dari para narapidana *pangeran* yang membutuhkan jasa mereka. *Korve* menjadi bagian dari relasi-relasi aktor dalam memenuhi kebutuhan kamar.

Relasi antar pengurus kamar diperlukan karena tugas kepala kamar (*KM*) begitu berat. Kepala kamar dianggap serba-tahu mulai dari yang urusan jelas sampai tidak jelas, urusan kecil sampai besar, masalah pribadi sampai masalah kamar, tetek bengek masalah A sampai Z, menjadi tanggung jawab kepala kamar. *KM* dibantu orang-orang yang menjadi kepercayaannya. Orang-orang kepercayaan *KM* baik dari kalangan narapidana maupun petugas menjadi bagian yang membentuk relasi-relasi sosial berdasarkan kebutuhan kamar. Seorang *KM*, **Asi** mengatakan:

“...*Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa jadi kepercayaan KM. Seperti soal HP, KM sudah beri tahu petugas, jadi kalo ada apa-apa bisa cepat diketahui KM. Ini merupakan kebijakan petugas lapangan tapi bukan melegalkan pengaturan ini. Penggunaan HP terutama pas malam hari marak karena wartel sudah dimatikan (tidak berlangsung 24 jam), fungsinya untuk komunikasi dengan keluarga untuk tahu ada berita apa. Kalo tugas dan tanggung jawab KM memang dari apa-apa yang tahu sampai tidak tahu, dari urusan kecil sampai besar, dari masalah apa saja dalam kamar itu tugas KM yang dibantu wakil dan korve dalam kamar...*” (Wawancara **Asi**, tanggal 20 Oktober 2009).

Uraian **Asi**, memperlihatkan bagaimana urgennya penataan relasi-relasi dalam menjaga ketenangan dan memenuhi kebutuhan kamar. Kepala kamar (*KM*) seperti **Asi** berkepentingan untuk menjaga relai-relasi ini tetap terpelihara,

⁸ *Korve* bertugas bantu-bantu, nyapu-nyapu, cukur rambut, dan beragam tugas lain, ada *korve pembina*, *korve kamar* sampai *korve pribadi* milik napi yang mampu membayar..

sebagai contoh bila ada masalah pemakaian *handphone* (*HP*) di kamar, maka *KM* harus memberitahu dan melaporkan kepada petugas blok, agar bila ada razia, *HP* tersebut bisa cepat disimpan dan diamankan. Bila tidak, maka semua penghuni akan tertangkap memakai *HP* di kamar. Kemampuan memelihara relasi hubungan melalui negosiasi ini, menjadi tanggung jawab *KM*. Dalam hal *KM* tidak memberitahu petugas, maka kalau saat razia terjadi penyitaan *HP*, maka semua akibat menjadi tanggung jawab *KM*, dan petugas pun akan lepas tangan.

Masalah pelik lain di kamar adalah sulit mengatur kamar bila diantara penghuni kamar sudah ada masalah pribadi, yaitu dendam yang disimpan sebelum masuk Lapas, entah itu sewaktu di rumah tempat tinggal sebelumnya, tempat kerja maupun di Polres terkait. Seorang *korve Bci* menjelaskan:

“...Yang sulit diatur kadang penghuni yang sewaktu di Polres menjadi KM pas masuk ke Lapas orang baru tapi petantang-petentang, belagu, ngerjain orang, dan orang yang dikerjain dendam dan nunggu akan balas pada waktu lain. Ini menjadi awal keributan dan perkelahian dalam Lapas, biasanya begitu, sudah ada dendam sebelumnya, kalo gak ya gak ada apa...” (Wawancara *Bci*, tanggal 18 Oktober 2009)

Uraian *Bci*, memperlihatkan bahwa mengurus kamar tidak mudah bila sudah ada dendam pribadi diantara sesama *anak kamar* semenjak di luar Lapas. Mengatasi hal ini, *KM* harus bisa menjaga relasi hubungan dengan petugas dan *anak kamar* lain. Petugas memang jarang memeriksa dan memonitor kondisi kamar, mereka mempercayakan pada *KM*, kecuali untuk urusan tertentu. *KM* menjadi kekuatan mempertahankan kesepakatan-kesepakatan informal dalam kamar dan blok. Terkait hal itu, seorang petugas pengamanan *Mdi* mengatakan secara terus terang:

“...Berbagai aturan dan disiplin yang ada tertulis dalam banner, spanduk, poster didepan Lapas basa basi aja, lipstik, slogan-slogan basa basi. Saya sudah puluhan tahun lebih disini, pernah ada tahanan lari tapi petugas yang jaminin malah dibelain, lalu dibikin alasan napinya lari kabur dari rumah sakit. Saya sadar belain napi karena saya pernah jadi napi akibat dikerjain jaksa yang kasih uang ke saya untuk keluarin napi nyatanya napinya lari...” (Wawancara *Mdi*, tanggal 15 Oktober 2009)

Apa yang diuraikan petugas *Mdi*, mengungkapkan kurang berjalannya ketentuan formal di Lapas, bahkan menurut *Mdi* aturan formal hanya menjadi hiasan basa-basi saja, saat ada masalah di blok dan kamar, maka berbagai resiko

dibebankan pada petugas Lapas. Resiko petugas pengamanan dan penyalahgunaan tugas menjadi dua sisi mata uang terkait satu sama lain. Seorang petugas pengamanan lain **Eli**, menambahkan, “*Lebih susah mengurus petugas daripada napi, karena petugas terdiri dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi Lapas. Petugas di bidang pengamanan maupun non-pengamanan bisa bikin macam-macam terhadap napi, karena itu sebagai petugas pengamanan, yang penting napi tidak lari dan tak ada keributan maupun perkelahian*”.

Uraian **Eii** menjelaskan bahwa petugas jaga di blok dan kamar bisa berbuat apa saja terhadap narapidana terutama bila terjadi konflik didalam kamar, antar kamar, maupun dalam blok. Bila terjadi keributan atau kekacauan, maka diantara petugas biasanya saling-lempar kesalahan, ujung-ujungnya narapidana menjadi sasaran pelampiasan kesalahan. Berbagai keadaan ini menjadi perhatian para *KM* dan pengurus kamar, agar bisa menjaga relasi-relasi sosial yang saling menguntungkan dengan petugas agar mereka tidak menjadi sasaran pelampiasan kesalahan sewaktu menggunakan berbagai cara dalam memenuhi kebutuhan kamar (blok) masing-masing.

6.2.3.2. Relasi Anak Kamar dan Petugas

Selain relasi-relasi sosial dalam pemenuhan kebutuhan kamar, terbentuk pula relasi-relasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan pribadi. Pemenuhan kebutuhan dan persoalan pribadi bisa berlangsung di dalam maupun di luar kamar. Sebagai *anak kamar*, seringkali terjadi persoalan pribadi dalam kamar antara lain mudah terjadi gesekan, atau persengketaan sesama narapidana, sehingga perlu pengawasan *KM*, dan pengurus kamar secara kontinyu (**Foto 6.14**).

Foto 6.14
Ruang Sempit di Depan kamar



Sumber : Data Peneliti

Foto 6.14 memperlihatkan ruangan sempit di depan kamar narapidana. Persoalan pribadi dalam kamar tak jarang ditindaklanjuti petugas Lapas dengan mengadakan razia (*sweeping*) terhadap narapidana yang memiliki alat alat atau barang-barang yang dilarang dalam kamar. Razia dilakukan untuk mengantisipasi tindakan dan perilaku mengganggu ketertiban dan keamanan dalam kamar dan blok, bisa diadakan secara reguler satu bulan sekali maupun dadakan. Menghadapi razia ini, para *anak kamar* membentuk relasi-relasi sosial diantara mereka, *KM* dan petugas blok, untuk mempersiapkan langkah-langkah agar tidak tertangkap-tangan memiliki barang yang dilarang. Melalui pemeliharaan relasi-relasi ini, cepat diketahui informasi tentang adanya razia, penangkapan atau penyimpanan atas barang-barang yang dilarang seperti *HP*, *charger* atau *MP3*, yang bagi narapidana, barang-barang ini dianggap sebagai bagian pemenuhan kebutuhan pribadi. Seorang narapidana **Adi**, mengatakan:

“...Tanda-tanda akan adanya razia biasanya semua napi dimasukkan terlebih dahulu dan yang ada diluar hanya korve dan beberapa pemuka saja, korve inilah yang menjadi celah bagi para napi menyembunyikan barang-barang tersebut keluar kamar ke tempat yang aman yang tidak diperiksa saat razia. Korve membuat napi bisa tetap menyembunyikan barang-barang kebutuhannya walaupun mereka terkurung dalam kamar...”
(Wawancara **Adi**, tanggal 20 Oktober 2009)

Uraian **Adi**, mengungkapkan bahwa relasi-relasi *anak kamar* dimunculkan untuk melindungi kepemilikan barang pribadi yang dipergunakan sehari-hari di

kamar. *Korve kamar* biasanya berada di luar kamar saat razia, dan menjadi tempat penyimpanan sementara berbagai barang-barang kebutuhan yang dilarang. Relasi juga terbentuk antara *korve*, *anak kamar*, berkoordinasi dengan petugas yang menjadi *pegangan* dalam mengamankan barang-barang milik pribadi. Pentingnya relasi-relasi dibangun dalam Lapas sebagai upaya mengantisipasi karena persoalan pribadi yang biasa dan remeh saja bisa menjadi besar dan menimbulkan keresahan. Seorang narapidana **Rzi**, menceritakan kasus sebagai berikut: Pada suatu senin di pertengahan Mei 2008 jam enam pagi mendadak terjadi *sweeping* atau razia di blok dan kamar. Razia ini terjadi karena seorang petugas kehilangan *HP* sewaktu dinas malam, petugas tersebut tertidur di depan kamar blok C. Kecurigaan petugas lalu mengarah pada kamar di sebelah **Rzi**, yang memang merupakan *kamar korve* yang tidak pernah dikunci. **Rzi** melanjutkan:

*“...Saya terkejut melihat kondisi ini dan setengah sadar karena baru bangun tidur, biasanya, sebelumnya saya tidak pernah bangun sepagi ini, saya bertanya kenapa ada razia, karena umumnya setahu saya tak ada razia yang mendadak disini, setiap ada razia pasti semua napi terutama kepala kamar pasti sudah diberitahu terlebih dahulu agar ada persiapan untuk mengamankan segala jenis macam barang yang dilarang. Di kamar sebelah saya banyak sekali yang tertangkap membawa HP tetapi anehnya petugas tidak mengambilnya hanya memeriksa saja. Ternyata menurut seorang petugas, razia hanya mencari HP petugas yang hilang saja. Saya juga berdebar-debar karena saya juga memiliki HP, gimana kalo besok atau lusa ada razia seperti ini dimana saya belum sempat menyimpan sama sekali barang-barang tersebut seperti HP, charger, mesin tato. Tiba tiba seorang korve berteriak 2 HP beserta kulitnya sudah ditemukan di tong sampah. Petugas langsung mengusut dan berkata siapa yang tadi malam terlihat mendekati tong sampah ini, coba ingat-ingat, ternyata ditemukanlah seorang pangeran berinisial "J" yang memang beberapa hari ini belakangan ini kalah judi dan banyak hutang.” (Wawancara **Rzi**, tanggal 15 Oktober 2009)*

Dari kasus diatas **Rzi** menyampaikan, untuk menyelesaikan persoalan pribadi petugas ini, maka relasi-relasi dan petugas dipergunakan mengungkap siapa pelaku pencurian *HP* milik petugas yang tertidur tersebut. Disini relasi-relasi *anak kamar* tidak hanya dipergunakan menyelesaikan persoalan pribadi para narapidana, tapi juga petugas yang memiliki masalah tertentu. Relasi-relasi ini sepiantas berlangsung rutin dan intens tapi sangat efektif mengatasi berbagai persoalan pribadi yang muncul.

Kehidupan Lapas tak menjamin terpeliharanya keamanan narapidana dan petugas itu sendiri. Lapas tetap saja merupakan arena yang beresiko tinggi seperti

dendam pribadi bisa timbul apabila petugas salah dan secara emosional memperlakukan narapidana. Ada beberapa contoh menggambarkan bagaimana rentannya petugas terhadap tindakan kriminal para narapidana. Petugas **Gni** menceritakan, pernah ada seorang petugas disini mempunyai masalah pribadi dengan seorang narapidana, sewaktu narapidana itu bebas, ia menculik anggota keluarga si petugas dan meminta uang tebusan, tapi akhirnya persoalan ini dapat diselesaikan, dan ditangani pihak kepolisian. Selain ancaman dan penculikan, petugas di Lapas bisa kehilangan barang-barang pribadi saat lengah bertugas seperti *HP*, jam tangan, cincin, uang dan perlengkapan lain. Menurut tamping **Lbi**:

*“...Pihak lapas dalam mengontrol/mengawasi tahanan/napi kurang optimal, terlebih pengawasan bagi tahanan bila berada di kamar hunian. Petugas lebih menyerahkan tugas pengawasan tahanan kepada tiap kepala kamar bila sudah waktunya berada di dalam kamar hunian saat malam hari-jam masuk kamar. Bila sudah berada di dalam kamar hunian masing-masing, tahanan/napi memiliki kebebasan untuk melakukan kepentingan-kepentingan pribadi. (Wawancara **Lbi**, tanggal 3 November 2009)*

Uraian **Lbi**, menjelaskan bahwa petugas Lapas harus bijak mempergunakan kewenangannya, bila tidak dapat membuat kesulitan bagi diri sendiri. Dalam kasus-kasus yang mengancam pribadi petugas, sulit mengandalkan kemampuan petugas itu sendiri. Dalam hal ini harus mempergunakan relasi-relasi sosial antara *KM*, *buser* dan *anak kamar* dalam mengantisipasi dan menindaknya (**Foto 6.15**).

Foto 6.15
Petugas Dibantu *Anak Kamar* Saat Pemeriksaan



Sumber : Data Peneliti

Foto 6.15 memperlihatkan relasi-relasi yang berlangsung antara petugas dan *anak kamar* dalam memeriksa dan menyelesaikan persoalan pencurian yang terjadi dalam blok. Seorang petugas blok **Dfi**, menguraikan beberapa relasi-relasi dalam menyelesaikan masalah atau kontradiksi-kontradiksi dalam blok sebagai berikut:

“...Masalah-masalah yang timbul dalam blok bervariasi, biasanya waktu mau mandi, nonton TV, si A mau chanel ini, si B maunya yang lain, waktu jemur pakaian. Ya itu, kalo tak bisa pake mulut, harus diambil tindakan. Disini, banyak yang modus (berbohong), makanya jadi petugas harus bisa tegas, udah tahu mana gerak-gerik ama gaya bicara modus, apalagi ada yang berpura-pura (modus) gila, sakit...” (Wawancara **Petugas Blok Mni**, tanggal 21 Januari 2009)

Uraian **Dfi**, menjelaskan bahwa sosok petugas harus tegas sehingga dapat dipakai menjadi ukuran dalam menentukan tindakan apa yang pantas atau tidak saat menyelesaikan masalah. Petugas di blok memang selalu berusaha agar masalah di blok tidak sampai keluar blok, sebab bila sampai keluar blok, maka penjaga blok akan dianggap tak bisa bekerja. Untuk itulah seringkali relasi-relasi *anak kamar* dimanfaatkan menjaga ketentraman dalam blok. petugas blok **D Ini**, menguraikan keadaan ini sebagai berikut:

“...Bagus kalo rumah tangga kita di blok tak usah diketahui orang lain atau blok lain, kalo ada masalah harus bisa diselesaikan kita sendiri, jika ada masalah dalam blok antar napi sebisa mungkin diselesaikan dulu oleh pembina blok tidak usah dibawa ke unit lain dulu, karena bisa menjatuhkan nama pembina blok yang dianggap tak mampu kerja dan tak becus mengatur napi/tahanan...” (Wawancara **Ini**, tanggal 27 Januari 2009).

Uraian **Ini**, menjelaskan relasi *anak kamar* dalam blok dipergunakan menyelesaikan berbagai kasus yang timbul dalam blok sehingga tak perlu diselesaikan di luar blok atau dicampuri petugas bidang lain. Lebih jauh, relasi *anak kamar* dipakai menyelesaikan kasus-kasus pribadi seperti perkelahian atau pemukulan. Pihak yang dekat dengan petugas seringkali mendapat perlindungan dengan tidak dimasukkan ke *sel pengasingan* atau *sel tikus (selti)*, padahal aturannya kalau terjadi perkelahian/pemukulan maka kedua belah pihak harus dimasukkan dalam *selti*. Narapidana **Rzi**, menguraikan hal ini sebagai berikut:

“...Saya pernah berkelahi dengan seorang napi di blok, saat itu saya mengalami luka pada tangan dan kaki saya sedangkan lawan saya kepalanya bocor dan harus dijahit sebanyak 7 jahitan, langsung saat itu juga saya ditangkap oleh petugas karena ada salah satu petugas yang melihat saya berkelahi, dia lalu mengancam membawa saya ke portir untuk diseltikan, tetapi saat itu juga saya mencoba menegosiasikan dengan petugas yang telah saya kenal agar tidak melaporkan ke pos jaga. Akhirnya saya gak dimasukkan ke selti sedangkan lawan saya dimasukkan ke selti dengan dalil bahwa dia bersalah...” (Wawancara Rzi, tanggal 30 Juni 2009)

Uraian **Rzi**, mengungkapkan adanya relasi dalam bentuk negosiasi dengan petugas yang menjadi *pegangan* pelaku, agar tidak dihukum *sel pengasingan* karena berkelahi. Negosiasi **Rzi** dan petugas menjadi bagian penting terpeliharanya relasi-relasi *anak kamar* yang diaktifkan manakala timbul kasus atau persoalan tertentu. Relasi-relasi ini secara spesifik diaktifkan menjadi sarana perlindungan bila seorang aktor mendapat masalah di Lapas. Relasi-relasi ini juga dipergunakan untuk perlindungan bagi mereka yang menjadi tahanan atau calon narapidana, sebagaimana diungkap seorang petugas keamanan **Xii**, sebagai berikut:

“...Tahanan disini bukan saja titipan polisi dan jaksa, tapi juga titipan pimpinan atau pegawai lain, titipan ini disampaikan ke pembina blok kemudian disalurkan ke kepala kamar (KM) agar titipan jangan diapa-apain. Ada buku catatan berisi titipan orang dalam. Di blok tahanan ini memang rawan pemerasan, pemukulan karena mereka tahanan baru yang masuk dari luar ke dalam, dipaksa menyatu dalam kamar yang tidak dikehendaki. Penghuni blok tahanan paling banyak di besuk, oleh keluarga maupun aparat hukum yang sedang menangani kasusnya, beda dengan penghuni blok B.C.D tinggal tunggu waktu pulang saja karena masa hukumannya sudah jelas...” (Wawancara **Petugas Xi**, tanggal 21 Januari 2009)

Ungkapan petugas **Xii** ini menjelaskan bahwa relasi yang terbentuk menjadi penting karena di blok tahanan begitu rawan terhadap pemerasan, pemukulan dan pemaksaan, apalagi bagi seorang tahanan baru dalam memenuhi kebutuhan pribadinya. Oleh karena itu calon narapidana harus mempersiapkan diri dengan memunculkan relasi *anak kamar* saat masih di luar Lapas atau menitipkan pengurusannya pada aktor petugas atau tamping tertentu.

Relasi *anak kamar* juga diaktifkan sebagai sarana perlindungan dalam kasus krusial utang-piutang, pinjam-meminjam dan pembayaran bunga pinjaman atas utang. Kenyataannya sebagian besar narapidana di Lapas mempunyai kebutuhan pribadi yang besar, sementara para narapidana ini tidak bekerja, sehingga terpaksa

meminjam untuk bisa memenuhinya, akhirnya utang menjadi menumpuk. Dalam beberapa kasus, pihak keluarga menjadi penyokong dan penanggung ekonomi utama narapidana selama menjalani masa hukuman penjara. Seorang pembina blok, **Bni** menceritakan keadaan ini sebagai berikut:

*“...Masalah yang sering dihadapi napi adalah soal utang piutang atau pinjam meminjam, jika sudah ramai persoalannya sampai ke wali, apalagi kalau omongan KM udah gak didengar, karena dianggap sama-sama napi juga, KM lapor ke wali blok. Lalu kita tanya kebenaran utangnya, sanggup membayarnya gimana? Nyicil? Misalnya utang 100 ribu, gimana, bisa nggak waktu kunjungan dibayar nyicil? Kalo bisa ya udah. Utang piutang ini sering sebut **sangkutan** dan biasanya terjadi dalam kamar tapi bisa juga antar kamar. Utangan atau pinjaman terkait dengan kebutuhan seperti **rokok, kopi, cemilan, roti, kue-kue**. Rokok yang dikenal disini rokok kretek sejati harganya 5000 per bungkus. Kalo kopi, biasanya plastikan, bisa kopi sendiri, gula sendiri, atau 1 mug kopi beramai-ramai, 1 hari bisa 4-5 kali untuk beberapa orang dalam satu kamar. Bisa juga ngopi di dalam kamar malam hari karena ada pembagian air panas. Masalah lain dalam kamar terkait dengan sandal untuk sholat, harus pake, atau untuk jaga lingkungan sendiri agar gak kotor...”* (Wawancara **Bni**, tanggal 5 Mei 2008)

Uraian **Bni** ini menjelaskan bahwa kasus hutang terjadi karena dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti roti, rokok, kue-kue, cemilan maupun minum kopi. Kasus kasus ini diusahakan diselesaikan pada tingkat *anak kamar* atau tingkat kamar, kalau tak bisa baru diserahkan pada petugas blok dan tamping membantu menyelesaikannya.

Secara garis besar, relasi-relasi antar aktor ini ikut membantu meredam konflik diantara sesama narapidana maupun petugas. Terkadang overkapasitas kamar dijadikan alasan petugas atau tamping memindahkan narapidana tertentu semata-mata karena narapidana tersebut tidak loyal membayar setoran, tetapi bila narapidana tersebut loyal pada petugas akan diperjuangkan dan dipertahankan, meskipun begitu di mata petugas lain narapidana tersebut dapat saja dianggap tidak loyal. Keadaan ini sering mendatangkan konflik internal terutama diantara para petugas yang mempunyai *napi pegangan* masing-masing. Seorang petugas pengamanan **Rai**, mengatakan:

”...Konflik antar petugas saling memanfaatkan kondisi kamar napi yang sudah overkapasitas dengan memberikan ijin boleh/tidak di kamar ini/itu, bisa memakai kekuasaan memaksa seseorang tahanan/napi pindah ke kamar ini/itu. Perselisihan terjadi antara petugas staf pengamanan, regu pengamanan dan wali blok. Saya sendiri tak cocok dengan kebijakan staf pengamanan. Seperti kasus napi bernama R, kepala kamar disini, telah diincar ama staf pengamanan karena dianggap lebih loyal sama saya wali blok daripada staf pengamanan, akhirnya R dipindahkan ke kamar lain, diturunkan dari jabatan kepala kamar. Perebutan ini terjadi karena soal setoran kamar yang dianggap staf pengamanan tak pantas...” (Wawancara **Rai**, tanggal XXX).

Uraian **Rai** memperlihatkan konflik pribadi tidak saja terjadi diantara sesama narapidana, tapi juga diantara para petugas (pengamanan dan non-pengamanan), lebih sulit mengatur konflik yang timbul diantara para petugas daripada narapidana, karena konflik diantara petugas bisa menimbulkan korban bagi para narapidana yang bermasalah.

Relasi-relasi *anak kamar* juga dibentuk dalam rangka menghabiskan waktu luang di Lapas seperti membuat cincin, gelang dan kerajinan lain. Kegiatan pembuatan kerajinan ini seringkali mempergunakan alat-alat tajam, berbahaya dan dilarang dalam Lapas misalnya gunting, paku atau pisau kecil (**Foto 6.16**).

Foto 6.16
Kegiatan Membuat Kerajinan



Sumber : Data Peneliti

Foto 6.16 ini memperlihatkan aktivitas pembuatan kerajinan yang dilakukan *anak kamar* dalam menghabiskan waktu luang mereka. Melalui dukungan relasi-relasi yang dibentuk dan dipelihara *anak kamar* dan petugas, maka berbagai peralatan ini tidak diambil (disita) karena ada kegunaannya. Begitu juga dengan

aktivitas pembuatan *tasbih* atau *tatoo* bisa disetujui dan didukung petugas karena adanya relasi-relasi ini, bahkan beberapa petugas menyediakan alat pembuatan tato (mesin tato) dan menjaga keamanannya selama dipergunakan dan dimanfaatkan narapidana dalam Lapas.

Relasi-relasi ini dipergunakan pula untuk mendapatkan penghasilan atau pemasukan, dengan melakukan usaha dagang kaki lima seperti menjual rokok dan barang kebutuhan lain, mulai dari rokok *a-mild merah* sampai *ji sam su*. Penulis mengamati rokok *a-mild merah* adalah simbol rokok para *pangeran* dan *petugas*, tidak dibeli satu per satu (*ketengan*), berbeda dengan *rokok sejati*, simbol rokok *napi tak jelas*, bisa *diketeng*. Aktor lain menjual makanan roti dan gorengan milik petugas, mulai dari harga Rp. 200 sampai Rp. 2000 per potong, maupun makanan ringan seperti kerupuk dan kue plastik.

Untuk Kebutuhan pribadi lain bisa didapatkan *anak kamar* dengan memesan melalui memunculkan relasi dengan *tamping* atau petugas tertentu, misal kebutuhan makan dan menu makanan berselera tinggi dapat dibeli di luar Lapas, bahkan barang kebutuhan lain yang melanggar hukum seperti menggunakan minuman keras dan narkoba. *Tamping Bai* mengungkapkan hal ini sebagai berikut:

“...Tidak sedikit *tamping* yang melakukan pelanggaran seperti membawa barang-barang illegal ke dalam lapas seperti miras, dan seterusnya. Mereka membawa barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan para penghuni masih terus ketagihan. Tapi tidak tiap hari mereka melakukannya pada hari-hari tertentu saja...” (Wawancara **Bai**, tanggal 30 September 2009).

Uraian **Bai** ini menunjukkan relasi-relasi anak kamar dan petugas dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan mendasar maupun kebutuhan lain dalam Lapas melalui negosiasi-negosiasi dan kesepakatan-kesepakatan informal diantara para aktor.

Seperti dikemukakan sebelumnya, relasi-relasi aktor ini seringkali secara disfungsi dimanfaatkan secara diam-diam untuk melakukan transaksi dan peredaran narkoba. Kasus ini terjadi di Lapas sebagaimana uraian cerita petugas **Gni** sebagai berikut: Pernah terungkap kasus peredaran/transaksi ganja di dalam Lapas yang dilakukan seorang narapidana. Narapidana ini awalnya memberitahu kalau dirinya dikunjungi pihak luar di ruang kunjungan yang dilansir kerabat dekatnya, tapi si pengunjung disinyalir sebagai *kurir narkoba* karena si napi yang

berada di Lapas merupakan narapidana narkoba bahkan diduga *bandar besar*. Setelah berjumpa dan bertemu, si pengunjung melakukan kontak dan menyerahkan sejumlah uang pada narapidana yang bersangkutan. Kurir tersebut lalu ditugaskan mengantar sejumlah *paket narkoba (ganja)* ke daerah-daerah yang sudah ditentukan. Tanpa sepengetahuan si pengunjung, pihak berwajib mengawasi dan mengamati gerak-gerik dirinya dan tindak-tanduk kegiatannya. Ketika akan meninggalkan ruang kunjungan, penyergapan dilakukan terhadap pengunjung tersebut, dan ia tertangkap lalu diinterogasi atas kepemilikan ganja seberat sebelas kilogram. Si pengunjung itu memberi keterangan bahwa dirinya hanyalah seorang pengantar ganja saja yang dikoordinir dan diatur peredarannya oleh narapidana yang bertemu tadi. Cerita petugas **Gni** menegaskan pada penulis bahwa terjadinya peristiwa ini didukung keberadaan relasi-relasi tertentu yang sangat kuat, intens dan kontinyu. Seorang narapidana **Bai** menambahkan:

"...Jual beli barang terlarang dilakukan dengan alat komunikasi berupa telepon genggam, dimana para penghuni yang melakukan bisnis tersebut mempunyai anak buah (kurir) diluar atau tangan kanan yang siap menjalankan/mengantarkan barang-barang pesanan. Pembayaran bisa melalui bank yang akan diambil melalui kartu ATM. Para pebisnis biasanya orang-orang jelas yang seringkali membantu tiap ada kegiatan dalam Lapas..."
(Wawancara **Bai**, tanggal 15 September 2009).

Uraian **Bai** ini menjelaskan bahwa jual beli barang yang dilarang bisa terlaksana karena ada bantuan dan komunikasi dari luar Lapas. Disini, relasi-relasi sosial tidak saja memberikan fungsi kerja sama, tapi berfungsi disfungsiional sebagai arena menambah pendapatan, tempat penitipan barang terlarang, sekaligus merangkap distributor barang-barang ke dalam Lapas.

Dalam kehidupan sehari-hari, relasi-relasi *anak kamar* begitu menonjol dimanfaatkan pada saat-saat pemberian remisi, pembebasan bersyarat (PB) dan pemindahan napi. Relasi-relasi ini digunakan aktor narapidana untuk mendapatkan informasi sekitar masa penghukuman seperti remisi umum, remisi khusus, pembebasan bersyarat (PB), cuti bersyarat (CB), penurunan (*turun vonis*) maupun pemindahan. Relasi ini membuat *anak kamar* dan *KM* dapat langsung berhubungan dengan aktor petugas bersangkutan, informasi yang disampaikan biasanya sekitar kondisi terakhir, apakah PB, CB nya diterima atau tidak, apakah vonis sudah turun

atau belum, atau akan dipindahkan kemana. Informasi ini diberikan atau dipertukarkan dengan imbalan tertentu baik berupa sebungkus rokok ataupun imbalan lain. Dalam satu kesempatan pemindahan narapidana, penulis saksikan di lapangan, ada kompetisi diantara sesama petugas, dimana seorang petugas, sebut saja **Rii** memprotes kenapa si narapidana A dan B dipindahkan. Rupanya A dan B adalah *narapidana pegangan* petugas **Rii** tersebut. Petugas **Rii** lalu mengatakan kepada petugas bagian pemindahan, “*Kenapa tidak tanya ke saya dulu memindahkan si A dan B karena itu titipan saya*”. Ternyata petugas **Rii** protes kepada petugas unit-kerja lain yang memindahkan narapidana *pegangannya* tanpa memberitahu kepadanya. Kasus ini memberi gambaran tentang terpeliharanya relasi-relasi sosial aktor dalam bentuk hubungan kerjasama, hubungan ekonomi atau hubungan emosional yang menjadi dasar terjaganya dan dipertahankannya relasi-relasi sosial antara petugas, pengurus kamar dan *anak kamar*.

6.3. Relasi Sosial Aktor & Jaringan

Temuan yang diperoleh penulis di lapangan menunjukkan semua relasi-relasi sosial yang terbentuk dalam Lapas Bogor tidak terjadi begitu saja tapi sudah berlangsung lama. Seorang petugas, **Dgi**, yang telah bertugas dua puluh tahun, mengatakan:

“...Hubungan tamping dan petugas tidak begitu saja tapi telah turun temurun, berbeda tiap bidangnya. Calon tamping baru biasanya ada yang membawa jika sudah ada tamping yang mau bebas, dan ada bayarannya. Untuk bayaran, berbeda-beda tiap petugas, ada yang minta duit, ada yang minta perlengkapan tertentu (seperti HP, perlengkapan rumah, perabotan), ada yang tidak minta apa-apa karena masih ada hubungan saudara atau tetangga rumah...” (Wawancara **Dgi**, tanggal 5 Oktober 2009)

Uraian **Dgi** menunjukkan relasi-relasi tamping dan petugas di Lapas telah berlangsung *turun temurun*, dimana narapidana boleh berganti tapi petugas tetap bekerja menjaga kesepakatan informal disamping keberlakuan aturan formal. Meningkatnya jumlah narapidana yang berulang kali masuk Lapas (*residivis*) ikut mengokohkan kesepakatan informal dan sanksi sosial dalam Lapas, karena *residivis* lebih dipercaya petugas untuk mengatur keamanan dan ketertiban di kamar dan blok. Petugas **Dgi** mengatakan, *residivis* tak perlu lagi diajarkan tentang aturan kesepakatan informal di Lapas karena ia sudah tahu dan mengerti, dan sering

dipakai membantu, memberitahu atau menjalankan kesepakatan informal beserta sanksinya pada narapidana baru.

Relasi sosial aktor dalam mempertahankan kesepakatan informal dilandasi relasi-relasi unik, intens dan kontinyu dalam rutinitas kehidupan sosial Lapas. Relasi sosial ini berlangsung diantara petugas dan tamping dalam, tamping luar, pengurus kamar serta *anak kamar*, menunjukkan adanya pola teratur, ajeg dan berkelanjutan dalam rangka mempertahankan kebutuhan dan kepentingan para aktor. Tak heran jika relasi-relasi sosial ini sejajar dengan kesamaan relasi-relasi dalam kegiatan masyarakat secara umum di luar Lapas, perbedaannya, relasi-relasi sosial di Lapas diperankan dan dilakukan beberapa narapidana atau petugas tertentu saja yang dikenal dengan aktor. Relasi-relasi aktor menjalankan dan mempertahankan kesepakatan informal menjadi acuan berperilaku secara umum di Lapas. Hal ini menguatkan keberadaan jaringan diantara para aktor dalam menentukan perlakuan yang sesuai atau tidak sesuai bagi narapidana dan petugas di area perkantoran, kamar maupun dan blok. Relasi jaringan sesuai uraian Mitchel (1969) adalah seperangkat hubungan khusus atau spesifik diantara sekelompok narapidana dan petugas yang dipergunakan menginterpretasi motif-motif perilaku sosial dari orang-orang yang terlibat termasuk dimensi-dimensi terselubung (*hidden dimensions*) didalamnya. Mengacu pada penjelasan Mitchel (1969), maka relasi-relasi sosial aktor yang berlangsung diantara petugas dan tamping dalam unit-unit kerja, kamar atau blok, bukan hubungan yang berlangsung apa adanya, tapi merefleksikan motif dan dimensi terselubung, fungsional dan disfungsional, demi pemenuhan kebutuhan sosial, ekonomi, emosional dan kepentingan lain. Dimensi lain eksisnya relasi sosial aktor di Lapas adalah dimanfaatkan membantu petugas secara keseluruhan menjaga keamanan Lapas, memastikan langkah pengamanan tidak menimbulkan gangguan, ketidaktertiban dan keributan. Seorang petugas pengamanan **Oti**, mengatakan:

“...Untuk napi kapital/berduit, napi birokrat, harus bisa dirangkul menjadi tamping/pemuka, kalo nggak bisa ngebiayain dan memprovokasi keributan atau keramaian dalam Lapas. Awalnya harus dibikin down dulu tapi juga harus dirangkul, karena kalau terlalu baik nanti digigit, tapi kalau terlalu galak nanti didendam, ada contoh petugas yang dicuri anggota keluarganya dan disuruh memberi jaminan untuk pembebasan. Bagi saya, yang penting buat napi: 1. Perutnya kenyang, 2. Bisa dikunjungi keluarga (gak kaya dulu hanya senin-kamis), 3. Menurut sama petugas. Ketiga hal ini bisa mengurangi pikiran macam-macam napi di dalam, juga kalo ada kunjungan 1 napi bisa bagi-bagi rokok ke temannya, 1 napi bisa mempengaruhi 10 napi untuk nggak macam-macam dalam Lapas...”
(Wawancara **Oti**, tanggal 18 Oktober 2009)

Uraian **Oti**, menegaskan bahwa ketertiban dan ketenangan di Lapas menjadi prioritas utama pelaksanaan tugas Lapas. Kesepakatan informal dibuat, dijalankan dan dipertahankan para aktor dalam relasi jaringan, mulai dari petugas, tamping (pemuka), KM, korve, pengurus kamar dan *anak kamar* demi menjaga keseimbangan di Lapas (**Diagram 6.3**). Kesepakatan informal dan relasi aktor menjadi pegangan bersama narapidana dan petugas dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan dalam Lapas.

Diagram 6.3. Relasi Sosial Aktor & Fungsi

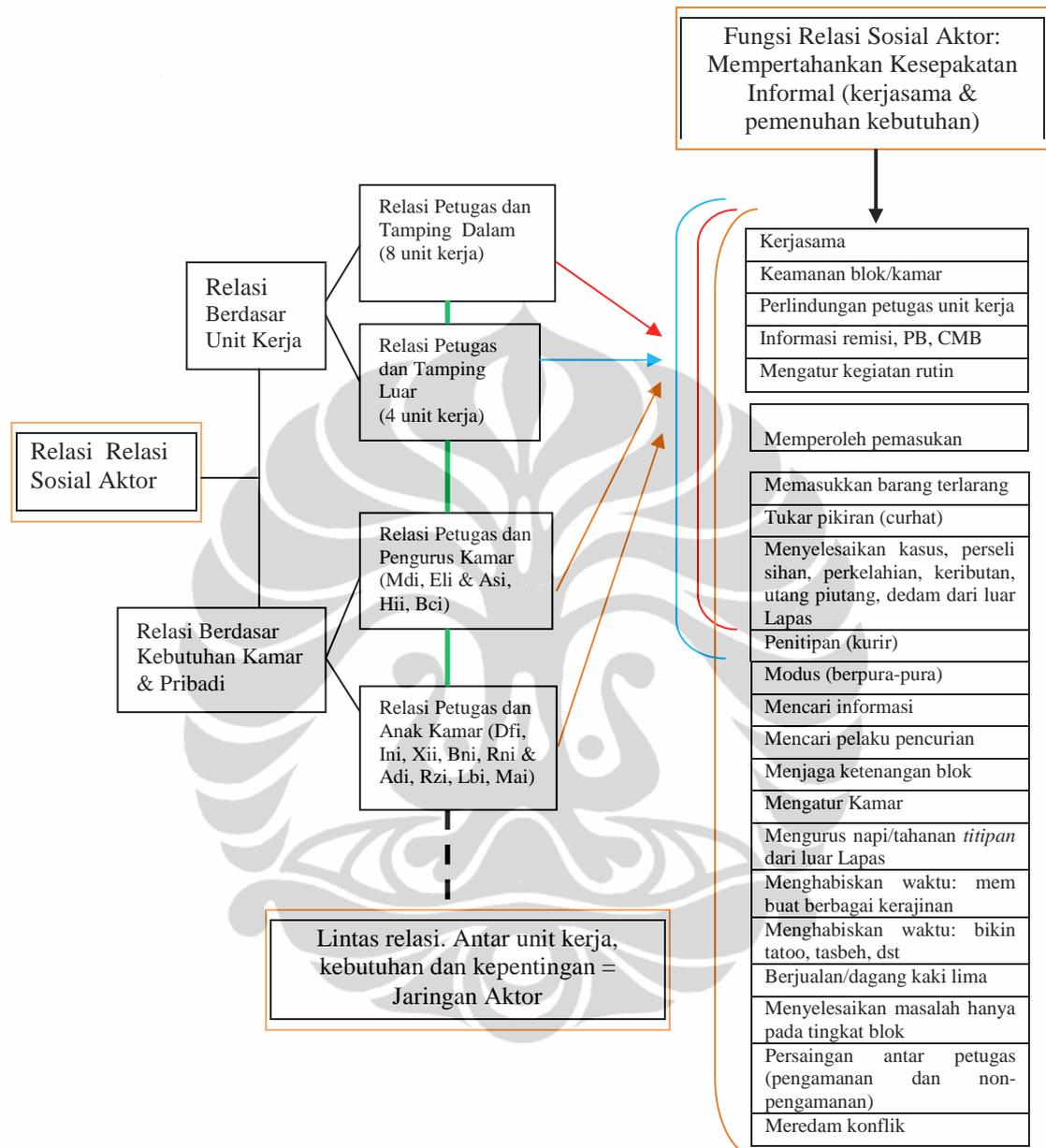


Diagram 6.3. melukiskan relasi-relasi sosial dalam unit kerja, blok dan kamar Lapas, yang secara garis besar terbagi atas dua bagian utama yaitu relasi-relasi sosial berdasar unit kerja dan relasi-relasi sosial berdasar kebutuhan kamar dan pribadi. Relasi-relasi pertama terdiri atas Relasi petugas dan tamping dalam dan tamping luar, sedangkan relasi-relasi kedua terdiri atas relasi petugas dengan pengurus kamar dan anak kamar. Relasi-relasi ini mewarnai kehidupan sosial di Lapas. Relasi-relasi ini lebih jauh menjadi landasan terbentuknya jaringan dalam

Lapas. Adapun terbentuknya jaringan ini didasari relasi-relasi sosial yang berlangsung intens, ajeg, kontinyu, dan diperlihara, dipertahankan, dilanggengkan, dalam unit kerja, kamar dan blok Lapas.

Relasi-relasi sosial secara khusus melibatkan aktor **Asi, Hii, Bci**, dan petugas **Mdi, Eli, Dgi, Oti**, berfungsi mempertahankan kesepakatan informal melalui sarana kerjasama di unit kerja tertentu, mengatur kegiatan rutin senam, registrasi, pendataan narapidana, sarana tukar pikiran (*curhat*), menyelesaikan kasus di unit-kerja, menjaga keamanan blok dan kamar, wadah memperoleh pemasukan, ditambah fungsi laten sarana tempat penitipan (kurir) dan memasukkan barang terlarang ke dalam Lapas.

Relasi-relasi sosial dalam bentuk relasi petugas dan *pengurus kamar* serta *anak kamar*, melibatkan aktor **Adi, Rzi, Lbi, Bni**, dan petugas **Dfi, Ini, Rii, Bai, Rai**, berfungsi selain mencakup fungsi sebelumnya, menjadi wadah mencari pelaku pencurian dalam Lapas, mengurus narapidana/tahanan *titipan* dari luar Lapas, menjadi sarana membuat berbagai kerajinan, menghabiskan waktu luang dengan membuat tato dan tasbeh, menjadi tempat berjualan/dagang kaki lima, sarana membereskan masalah di blok, menyelesaikan persaingan antar petugas pengamanan dan non-pengamanan serta meredam konflik.

Terkait keberadaan jaringan ini, Fukuyama (2000) menambahkan bahwa jaringan adalah sekelompok agen-agen individual dengan berbagai norma informal melampaui nilai-nilai atau norma-norma penting dalam transaksi-transaksi pasar biasa. Norma dan nilai ini berkembang mulai dari norma resprositias sederhana yang dimiliki bersama sampai sistim-sitim nilai kompleks. Apa yang dikemukakan Fukuyama mirip dengan kondisi di Lapas, dimana pertukaran terjadi diantara orang-orang tidak saling kenal secara dekat bahkan tidak saling menyukai atau berbicara dengan bahasa berbeda atau bisa terjadi secara anonim diantara aktor-aktor yang tidak pernah mengetahui identitas lengkap masing-masing. Hubungan pertukaran ini tidak bersifat simultan dan tidak tergantung pada kalkulasi *cost and benefit* kaku sebagaimana dalam transaksi pasar. Di Lapas, hubungan sosial dalam relasi atau jaringan berlangsung tidak begitu mementingkan identitas, latar belakang berbeda, bahasa berbeda maupun fisik berbeda, tapi menekankan pada kemampuan anggota (relasi) memenuhi kebutuhan dan kepentingan kedua belah

pihak. Hal ini dimungkinkan karena narapidana tak suka berbicara rinci tentang identitas pribadi dan tindak pidana yang pernah dilakukan, begitupun dengan petugas yang seringkali menganggap tugasnya sebagai rutinitas saja.

Hal dasar disampaikan Fukuyama ketika jaringan ditumpangkan diatas organisasi formal, hasilnya tidak selalu menguntungkan, bisa malah menjadi sumber disfungsi organisasi (Francis Fukuyama, 2000: 202). Dalam relasi dan jaringan aktor di Lapas, disatu sisi secara fungsional membantu tugas administratif dan operasional Lapas, disisi lain secara disfungsi seringkali dimanfaatkan dan digunakan narapidana atau petugas tertentu mencoreng citra Lapas di mata masyarakat luas, sebagai contoh dalam kasus kepemilikan dan peredaran narkoba di Lapas.

Keseluruhan uraian dalam bab ini menampilkan bentuk-bentuk relasi sosial diantara petugas, *tamping*, *pengurus kamar* dan *anak kamar*, yang berlangsung di kamar, blok maupun area perkantoran, dalam mempertahankan kesepakatan informal. Relasi-relasi ini bisa berlangsung secara fungsional maupun disfungsi. Untuk relasi-relasi yang sangat intim dan kuat, berlangsung lintas unit kerja, kebutuhan dan kepentingan, membentuk jaringan sendiri. Masing-masing relasi jaringan ini mempunyai fungsi dalam kehidupan sosial di Lapas.

BAB 7 PERUBAHAN DAN IMPLIKASI BUDAYA PENJARA

Bab ini menguraikan ulasan dan analisis penulis tentang budaya penjara secara khusus dalam Lapas. Budaya penjara yang dimaksud adalah pedoman standar berperilaku dalam kehidupan sosial sehari-hari, secara nyata berulang dan berlaku operasional bagi semua pihak dalam kamar dan blok Lapas. Mendiskusikan budaya penjara di Lapas, penulis lakukan dengan dua cara yaitu pertama, membahas perubahan cara pandang terhadap budaya penjara. Kedua, menelaah implikasi budaya penjara terhadap keseimbangan dan kesinambungan Lapas. Pada bagian pertama bab ini penulis menguraikan tentang budaya penjara statis, bagian kedua membahas budaya penjara sebagai upaya mempertahankan kesepakatan informal, bagian ketiga mengangkat realitas budaya penjara dinamis di Lapas, bagian keempat mengkaji kontradiksi-kontradiksi meneliti Lapas, bagian kelima mengkaji implikasi budaya penjara sebagai strategi *survive* dan menjaga kesinambungan Lapas, bagian keenam mengurai kontribusi studi ini bagi studi-studi ilmu sosial khususnya antropologi dan kriminologi.

Hasil penelitian memperlihatkan relasi sosial yang terbentuk dalam Lapas lebih didasarkan pada konteks kepentingan dan kebutuhan tertentu, dimana ikatannya sangat cair, mudah berubah dan ditentukan negosiasi antar personal (aktor). Para aktor ini menciptakan dan memelihara kesepakatan-kesepakatan informal disamping keberlakuan aturan formal, melalui relasi-relasi sosial yang dijalankan di kamar, blok maupun perkantoran Lapas. Memahami dualitas aturan dalam Lapas ini, penulis menetapkan kerangka *semi autonomous sosial fields* (SASF) sebagai cara efektif menelusuri masyarakat dibalik tembok Lapas.

Pemikiran utama dalam tulisan ini adalah budaya penjara dibentuk, dibangun atas dasar kesepakatan-kesepakatan informal sesuai konteks pemenuhan kebutuhan dan kepentingan, dijaga dan dipelihara dalam relasi-relasi sosial aktor petugas dan narapidana, demi keberlanjutan dan keseimbangan kehidupan sosial di Lapas. Pemikiran ini didukung penelitian etnografi yang dilakukan penulis selama tiga tahun, meskipun relasi-relasi sosial terbentuk tidak bersifat mutlak, tapi sebagai suatu proses, penelitian ini menjawab keberlakuan budaya penjara di Lapas Bogor berbeda dengan pemahaman budaya penjara sebagaimana diuraikan penelitian-penelitian terdahulu. Perbedaan ini didasari telaah pustaka (**Bab 2**) dan didukung telusuran lapangan (**Bab 3**). Berbagai

sudut pandang dan telaah tentang Lapas membuat penulis beberapa kali mengubah landasan berpikir mengikuti situasi lapangan yang terus berubah. Sebagai contoh, saat penulis melakukan penelitian di ruang besukan dan blok narapidana, suasana *rekayasa* dan keadaan dibuat-buat begitu menonjol dan ditutup-tutupi oleh tamping maupun petugas. Hal ini mempengaruhi cara pandang penulis sejalan dengan budaya penjara yang diuraikan penelitian-penelitian terdahulu. Perubahan mewarnai landasan berpikir, sewaktu penulis mendapatkan *akses, perijinan*, dan berpartisipasi langsung sebagai petugas pemasyarakatan. Jalinan relasi-relasi sosial secara langsung dan intens sebagai petugas pemasyarakatan memberi kenyataan berbeda memahami budaya penjara dalam Lapas.

Kenyataan berbeda ini bukanlah sesuatu yang baru karena telah diungkapkan secara terbatas beberapa penelitian yang dilakukan para pegawai Lapas seperti Fatayatin (2005), Samsun (2005), Mardi Santoso (2005) maupun Saifullah (2005). Partisipasi langsung membuat penulis melihat persoalan di Lapas bukan sekedar masalah dualitas aturan, tapi lebih jauh upaya mempertahankan kesepakatan-kesepakatan informal dalam rangka *survive* selama menjalani kehidupan sosial di Lapas, ditentukan relasi-relasi sosial aktor, konteks kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak. Menelusuri berbagai kesepakatan informal ini tidak mudah, berbagai hambatan harus dihadapi, apalagi cara meneliti seperti ini, sepengetahuan penulis, baru kali ini terjadi di Lapas Bogor, sehingga tak urung menimbulkan keraguan dan ketidakpastian bagi penulis maupun kondisi di Lapas.

7.1. Budaya Penjara Statis

Penelitian dan telaah sebelumnya menunjukkan pemahaman budaya penjara statis dimulai uraian Leinwald (1972), Donald Clemer (1940), Gresham M Sykes (1958), Irwin & Cressey (1964), John Dulilio (1987), Ellis Finskelstein (1993) sampai Lawrence M. Friedman (1977). Kenapa dikatakan statis, karena konsepsi yang dipergunakan mengacu pada perbedaan struktural kehidupan sosial narapidana dan petugas. Budaya penjara berlangsung dalam sistim tertutup. Narapidana dianggap mempunyai kehidupan sosial sendiri, begitu pula dengan petugas. Penjara hanya menjadi gudang degradasi sederetan manusia berbuat kesalahan dan menjadi kumpulan pelaku kriminal, yang dijaga petugas yang membuat mereka bertobat dan menjadi jera.

Uraian budaya penjara statis dipertanyakan, berangkat dari pertanyaan apa betul kehidupan sosial penjara membuat terhukum menjadi kumpulan manusia yang jera..

Donald Clemer (1965) menguraikan tidak ada jawaban yang tepat menggambarkan apa itu budaya penjara (*prison culture*), tapi keadaan ini menjelaskan adanya sikap dan opini yang eksis dalam penjara, karena itu perlu menggali sikap-sikap secara individual, struktur dan proses sosial secara resiprosikal (Clemer, 1940: 295). Uraian Clemer fisini menjadi dasar memahami kesepakatan-kesepakatan informal, tapi Clemer masih melihat penjara sebagai lingkungan tertutup dan sistim sosial narapidana (*inmate social system*) (John Dulilio, 1987: 15-19). Clemer menambahkan untuk mengerti budaya penjara diperlukan pengetahuan proses-proses fundamental interaksi manusia sebagaimana kelompok sosial lain di luar penjara yang mempunyai budaya (*culture*) tersendiri. Bagi Clemer, budaya adalah supra-individual, meskipun individu menjadi pembawa, pen-transmisi, pemodifikasi, tapi tak membuat perubahan apapun atas suatu kelompok dan terhadap budaya. Uraian Clemer berbasis pada cara pandang melihat budaya secara institusional. Senada dengan Goffman yang melihat penjara sebagai *total institution*, penjara merupakan lembaga formal dan tertutup, tak ada akulturasi budaya dalam penjara. Budaya penjara (*the prison culture*) tidak tampak atau bahkan sangat berbeda dengan budaya masyarakat bebas (Clemer, 1940:85-86). Dunia penjara adalah dunia keras, sebagian besar mereka yang masuk penjara mengalami kebingungan dan ketidakpastian, mereka hanya memikirkan diri sendiri dan pergumulannya, ini merupakan kesengsaraan-kesengsaraan dalam penghukuman atau *pains in punishment* (Clemer, 1940: 298).

Pengertian budaya penjara ini mengacu antropologi berada pada pemahaman budaya sebagai sesuatu yang terintegrasi (*integrated*), keseluruhan (*as a whole*), sistemik dan fungsional. Pengertian budaya ini secara tidak langsung melandasi cara pandang budaya penjara pada waktu itu dimana budaya meliputi keseluruhan unsur (pengetahuan, kepercayaan, kesusilaan, hukum, dan kebiasaan, yang dipelajari dan diwariskan sebagai gambaran kehidupan masyarakat umum. Masyarakat penjara (*prison community*) berlangsung dikarenakan kebingungan dan ketidakpastian serta kesengsaraan-kesengsaraan yang dialami dalam penjara.

Senada dengan Clemer, Gresham M Sykes (1958) mengemukakan budaya penjara sebagai *society of captives*, tidak hanya berupa pengaturan penjaga penjara tapi pengaturan informal sebagai interaksi bertemunya masalah-masalah dalam lingkungan spesifik. Sykes menjelaskan empat ciri penderitaan penjara yaitu pertama, adanya kehilangan kebebasan (*loss of liberty*), kedua, kehilangan barang dan jasa (*deprivation of goods and services*), ketiga, kehilangan hubungan heteroseksual (*deprivation of*

heterosexual relationship), dan keempat, kehilangan otonomi (*deprivation of autonomy*). Berbagai penderitaan ini timbul diakibatkan keterbatasan dan deprivasi yang dilaksanakan institusi. Lebih lanjut dijelaskan Sykes, masyarakat terhukum (*inmate society*) merupakan *a social microcosm*, yang mempunyai bahasa sendiri, kepemimpinan, aturan, upacara dan ritual-ritual (*ethos*). Masyarakat terhukum berbicara dengan ungkapan tersendiri, perbendaharaan kata untuk setiap peran yang dilakukan saat berhadapan dengan petugas (John Dulilio, 1987:16). Pemahaman budaya penjara statis juga dapat dilihat pada uraian Irwin dan Cressey, melalui konsep subbudaya penjara (*prison sub-culture*), subbudaya kriminal (*criminal sub-culture*) dan subbudaya yang sah (*legitimate sub-culture*) (Howard S. Becker, 1964: 230-233).

Clemer dan Sykes dapat dikatakan pioner mendefinisikan budaya penjara statis sebagai upaya menghadapi berbagai keterbatasan dan penderitaan dalam penjara, meskipun Clemer dan Sykes tak secara definitif menyebutnya sebagai budaya penjara, tapi uraiannya menunjukkan keberadaan penjara sebagai institusi akhir sistim peradilan pidana, tempat penampungan dan eksekusi vonis hukum yang diputuskan hakim.

Uraian budaya penjara statis (**Diagram 7.1**) tidak dimaksudkan untuk ditinggalkan tapi tetap dipakai penulis sebagai dasar melihat perubahan lebih lanjut. Tak dapat dipungkiri dalam proses penelitian awal di Lapas, mula-mula penulis berhadapan dengan bangunan tertutup dan kokoh sebagaimana gambaran kehidupan statis masyarakat di balik tembok Lapas. Mengacu budaya penjara statis, maka ketentuan normatif kelembagaan mau tidak mau harus diketahui dan dipahami sesuai prinsip-prinsip keterbatasan serta deprivasi yang dilaksanakan lembaga. Begitu pula memandang berbagai aturan-main atau kesepakatan informal (*inmate code* atau *argot*) merupakan bagian dari keterbatasan dan deprivasi yang dijalankan lembaga atau institusi. Kata *statis* mengacu pada pengertian *kebudayaan* penjara mengikuti dasar aturan kelembagaan yang menentukan perilaku anggota masyarakat didalamnya, menyalurkan tindakan-tindakan mereka dengan cara-cara tertentu. Aturan-aturan kelembagaan ini memstrukturkan perilaku melalui *sosialisasi* dalam menjamin keteraturan sosial (Pip Jones, 2003: 7-12). Budaya penjara statis memstrukturkan kelakuan masyarakat didalamnya secara sangat kaku, sangat mirip dengan tertutupnya bangunan fisik penjara bila dipandang luar penjara.

Penjara yang digambarkan secara statik ini, bertolak belakang dengan kehidupan sosial yang dialami penulis selama penelitian di Lapas. Hasil interaksi penulis di kamar dan blok Lapas menunjukkan aturan-aturan yang berlaku atau menjadi acuan perilaku

bukan ketentuan yang diberikan secara kelembagaan, juga bukan karena keterbatasan atau deprivasi yang diberlakukan lembaga, tapi merupakan tafsir aktor atas berbagai aturan normatif yang diberlakukan oleh institusi (struktur). Hal menarik yang diperoleh penulis, meskipun Lapas berada dalam kondisi overkapasitas sekalipun, dimana seharusnya keterbatasan dan deprivasi menjadi sangat besar, justru tidak menjadi persoalan utama, karena kesepakatan-kesepakatan informal diciptakan para aktor memenuhi kebutuhan dan kepentingan mengatasi kondisi overkapasitas tersebut. Overkapasitas diatasi melalui pengaturan relasi-relasi sosial aktor berdasar atas konteks tertentu. Sebaliknya dalam kondisi dimana Lapas berada pada kapasitas kurang dari seharusnya, aturan yang menjadi acuan tetap kesepakatan informal yang dijalankan dalam menjaga kelangsungan hidup sesuai konteks-konteks yang melingkupi aktor.

Berbagai kesepakatan informal dijalankan dalam rangka adaptasi dan resistensi, demi *survive* di Lapas. Aktor petugas dan narapidana berperan menentukan perilaku mana yang dapat atau tidak, menjadi pedoman atau acuan operasional sesuai konteks-konteks yang timbul di lingkungan Lapas.

7.2. Budaya Penjara: Mempertahankan Kesepakatan Informal

Mengacu hasil telusuran lapangan (**Bab 5** dan **Bab 6**), aturan yang menjadi acuan perilaku di Lapas bukan ketentuan formal tapi kesepakatan informal, sebagai tafsir aktor atas aturan normatif yang diberlakukan oleh institusi. Keadaan ini mempengaruhi cara pandang penulis melihat kehidupan sosial Lapas tidak saja pada deskripsi kesepakatan-kesepakatan informal, tapi bagaimana para aktor melanggengkan atau mempertahankan berbagai kesepakatan informal sesuai konteks-konteks tertentu (**Diagram 7.1**).

Kondisi lapangan ini cocok dengan tulisan Kiran Bedi (2003) bahwa relasi-relasi sosial penjara berlangsung antara petugas dan penghuni sebagai gambaran subkultur penjara sebagai pelanggaran kesepakatan informal (*aturan main*) dalam penjara itu sendiri. Kiran Bedi menggarisbawahi pelanggaran subkultur penjara dilakukan petugas dan *munshi* (pembantu petugas) sebagai ketidakmampuan implementasi sistim penjara di Tihar India. Ketidakmampuan sistim penjara ini disebabkan berbagai persoalan yang membelit, sehingga diperlukan kepemimpinan yang kuat untuk merubahnya. Dalam tulisannya Kiran Bedi fokus pada soal memperbaiki subkultur penjara dengan membenahi aturan formal atau institusional sesuai tugasnya sebagai pimpinan penjara di Tihar India. Berbeda dengan penulis yang lebih menekankan bahasan budaya penjara

pada pelanggaran kesepakatan informal sesuai konteks-konteks, dan dilanggengkan para aktor dalam relasi-relasi sosial tertentu di kamar dan blok.

Menurut Kiran Bedi (2003) relasi-relasi sosial di penjara memang unik, tidak begitu saja dibentuk narapidana, tapi ada persyaratan lain yang harus terpenuhi. Semakin tinggi posisi seseorang maka semakin besar pula bagian yang diterimanya (Kiran Bedi, 2003:53-57).

Begitu pula keadaan di Lapas, penulis melihat dan mengalami kehidupan sosial berlangsung konstan dan ajeg (berulang). Penulis memperhatikan perbedaan struktural antara sosok narapidana dan petugas sebagaimana diintrodusir Finkelstein (1993), tapi hal ini makin kabur dengan tumbuhnya relasi-relasi sosial memelihara dan melanggengkan berbagai kesepakatan informal melibatkan aktor petugas dan narapidana. Dalam kehidupan sosial sehari-hari, sulit membedakan mana perilaku yang seharusnya dilakukan petugas atau tamping, semua tampak sama, saling bekerja sama karena memang tidak dapat dilakukan sepihak.

Penulis melihat arti penting tulisan Foucault (1977), Lorne Rhodes (2001) dan Coggins (1996) dalam memahami budaya penjara secara berbeda. Pemikiran Foucault, Rhodes dan Coggins memperkuat argumen tentang perubahan budaya penjara dari basis lembaga/institusi ke basis individu atau aktor. Uraian Foucault dan Rhodes ini menguatkan argumentasi tentang keberadaan aktor melalui relasi-relasi sosial dalam masyarakat penjara (*carceral networks*) dan relasi-relasi ini mendasari pelanggaran *aturan main* dalam kehidupan sosial Lapas. Sedangkan Coggins menguraikan budaya sebagai ekspresi-ekspresi sosial tentang permukaan yang penuh teka-teki dari jaringan-jaringan (Geertz, 1992:5-6). Coggins mengutip definisi Geertz dalam *Interpretation of Cultures* (1973:5), bahwa “*Man is animal suspended in webs of significance that he himself has spun. I take culture to be those webs, and the analysis of it to be therefore not an experimental science in search of law but an interpretive one in search of meaning*”. Uraian Geertz bagi Coggins (1996) tidak hanya membicarakan terhukum dalam penjara, tetapi dipergunakan menggambarkan langkah seorang untuk sampai di penjara, dan mengurai jaringan makna penghukuman yang tidak hanya dialami terhukum sendiri tapi melibatkan peran aparat peradilan lain. Coggins (1996) menggunakan pengertian Geertz untuk mengerti kekuatan-kekuatan yang membentuk budaya penjara (*prison culture*), menelusuri respon terhukum atas keterbatasan serta ketidaknyamanan lingkungan penjara dimana mereka ditempatkan (Coggins, 1996: 3). Dalam hal ini,

Coggins (1996) memperkuat pemahaman budaya penjara sebagai pelanggaran kesepakatan informal, berbeda dengan budaya pada masyarakat umum.

Masyarakat di balik tembok penjara adalah masyarakat yang dibentuk, bukan terbentuk secara alami, masyarakat *non-voluntary, familiar* dengan tingkah laku dan norma-norma penjara itu sendiri. Semua partisipan dalam penjara adalah pendatang baru (*newcomers*) yang memasuki setting baru dengan membawa elemen budaya masyarakat mereka sendiri. Inti utama masyarakat penjara adalah para terhukum (*inmates*). Penulis sependapat dengan Kip Coggins, tapi tidak setuju dengan pendapatnya yang mengatakan semua partisipan adalah *newcomers* dan inti utama masyarakat penjara adalah terhukum (*inmates*). Hasil telusuran lapangan penulis memperlihatkan terhukum atau narapidana terus berganti, sedang petugas tetap itu saja, sehingga pemeliharaan atau pelanggaran budaya penjara bukan saja dilakukan aktor narapidana tapi bekerja sama dengan petugas.

Uraian Kiran Bedi, Foucault, Rhodes dan Coggins mendukung temuan penulis bahwa budaya penjara tidak lagi statis, tapi menampilkan masyarakat penjara yang mempunyai relasi-relasi sosial berkaitan erat dengan dunia di luar penjara. Nilai dan norma masyarakat di luar Lapas dibawa terhukum dan berkembang dalam masyarakat Lapas melalui interaksi, komunikasi dan pergaulan sesama terhukum. Keikutsertaan terhukum dalam pengelolaan Lapas menampilkan fenomena masyarakat didalamnya tidak lagi diam, terkurung dan tak berdaya dalam kamar dan blok. Hal ini melandasi pemahaman budaya penjara di Lapas terbentuk, dijalankan dan dipelihara dalam relasi-relasi sosial aktor petugas dan narapidana melalui kesepakatan-kesepakatan informal sesuai konteks-konteks tertentu.

Telusuran lapangan mendukung perubahan pemahaman budaya penjara statis ke arah budaya penjara dinamis, berdasar pada perilaku dan relasi-relasi sosial aktor. Memperkuat pemahaman perubahan ini, penulis mengutip tulisan Geoffrey Hunt & dkk (1993) yang mengangkat perdebatan melihat *inmate culture* (budaya narapidana) apakah merupakan produk dari lingkungan penjara ataukah perluasan dari subbudaya eksternal. Menarik, Geoffrey Hunt dan kawan kawan tidak begitu mempersoalkan dikotomi sumber perubahan budaya penjara tapi lebih mempersoalkan hubungan aktivitas di luar penjara dan kehidupan di dalam penjara saling berkaitan erat satu sama lain. Penulis sependapat dengan tulisan ini, untuk tidak masuk lebih jauh pada perdebatan dikotomi perubahan budaya penjara sebagai inti budaya penjara statis, tapi menelusuri relasi-relasi sosial yang dibentuk aktor sesuai konteks tertentu sebagaimana berlaku pada kehidupan masyarakat umumnya di luar Lapas.

7.3. Lapas: Institusi Semi Otonom & Melibatkan Aktor

Relasi-relasi sosial yang ditelusuri penulis (**Bab 6**) tak menampakkan perbedaan signifikan dengan kehidupan sosial masyarakat umum. Hal ini menjadi inti utama memahami realitas budaya penjara di Lapas. Penulis melihat kesepakatan-kesepakatan informal berjalan rutin dan dipelihara para aktor. Memang ada saling mempengaruhi antara aturan formal dan kesepakatan informal dalam praktek, tetapi para aktor membuat kesepakatan informal menjadi acuan operasional dan lebih kompetitif dibanding aturan formal. Diantara para aktor itu ada yang sangat “bergerak”, seperti KM, *buser*, *tamping-dalam* dan *tamping-luar* yang mencurahkan sebagian waktunya untuk membuat kesepakatan informal berjalan sesuai konteks, namun di lapangan terdapat orang-orang yang meskipun tidak bergerak, tetap menjadi penerima (*recipient*) dan terkadang “korban” dari kesepakatan informal yang bergerak. Mobilitas aktor menjadi media bagi lalu-lintas bergeraknya kesepakatan informal atau upaya mengadakan *hukum* yang bisa menjadi acuan (Sulistyowati Irianto, 2009: 38-40).

Upaya mempertahankan kesepakatan informal melalui pembentukan relasi sosial aktor dan berbagai konteksnya, menjadikan landasan melihat Lapas sebagai institusi semi otonom (SASF). Moore (1973) menegaskan SASF ditujukan menelaah suatu kondisi sosial untuk dipelajari seorang antropolog sebagai kenyataan yang menghasilkan aturan-aturan (*rules*), kebiasaan (*custom*) dan simbol simbol secara internal, meskipun rentan terhadap aturan-aturan dan kekuatan lain yang berasal dari luar (*larger world*). SASF di Lapas mencakup kamar narapidana, blok, maupun ruang perkantoran. Masing-masing ruang ini menerapkan sanksi bagi mereka yang tidak mengikuti aturan main yang telah disepakati berupa sanksi informal. SASF di Lapas mempunyai kapasitas membuat aturan (*rule-making*) dan cara-cara membujuk dan memaksa pemenuhan secara simultan (Moore, 1973:720, Moore, 1983:55). SASF tampak dalam relasi-relasi sosial aktor, dimana para aktor mempunyai kapasitas menghasilkan aturan-aturan, kebiasaan dan simbol-simbol tersendiri, baik membujuk atau memaksa individu untuk memenuhi secara simultan meskipun dibayangi aturan formal berlaku dalam Lapas.

Moore melanjutkan problem analitis lapangan otonomi adalah eksis dalam *tribal society*, tetapi saat ini berubah, menjadi isu sentral bagi antropologi sosial memahami *complex society*. Tak ada bidang sosial (*social field*) dalam dunia modern yang betul-betul otonom dari aturan hukum, dominasi absolut sulit diperoleh, bahkan dalam institusi tentara dan penjara yang ketat sekalipun, mempunyai sejumlah otonomi. Oleh karena itu

Moore berargumentasi secara metodologis SASF adalah cara yang cocok (*a suitable way*) menentukan area studi antropologi dalam *complex societies*, SASF mendisain suatu *social locale* dimana teknik-teknik penelitian dan observasi antropologi dapat diterapkan dalam meneliti masyarakat. Mengutip pendapat Moore, penjara yang ketat sekalipun tetap mempunyai otonomi sebagaimana lembaga ini merupakan bagian dari *complex society*. SASF secara metodologis memberi cara yang tajam menggambarkan setting sosial suatu penelitian, termasuk di Lapas, dimana dalam arena tersebut sekelompok orang saling berinteraksi dan membentuk relasi-relasi sosial, dan dari proses tersebut muncullah aturan-aturan yang mereka ciptakan dan pertahankan sendiri, yang kemudian dimodifikasi, diubah, atau ditinggalkan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan kepentingan masing-masing, termasuk bagaimana aturan-aturan diluar SASF masuk dan memberi pengaruh terhadap interaksi dan relasi-relasi sosial mereka (Sulistiyowati Irianto, 2005: 70). Hal ini mempengaruhi penulis menelaah dan menetapkan relasi-relasi sosial aktor di kamar, blok dan ruang perkantoran sebagai SASF-SASF yang tumbuh dalam kehidupan sosial Lapas. Arena semi otonom yang ditemukan dalam berbagai relasi sosial batas-batasnya bukan ditentukan oleh aturan formal tetapi oleh karakteristik prosesual (*processual characteristic*) yang membentuk *complex chains* melalui relasi-relasi jaringan individual (*the social network of individuals*) (Moore, 1973:722, Moore, 1983: 57).

Perilaku-perilaku individu dalam berbagai SASF menentukan perkembangan budaya masyarakat di balik tembok Lapas, sehingga terjadi hubungan dua arah antara individu dan kebudayaannya. Hal ini terkait dengan wacana pergeseran kebudayaan sebagai sistim yang membentuk kelakuan dan pikiran manusia, menjadi kebudayaan sebagai sistim yang turut dibentuk oleh kelakuan dan pikiran manusia sebagaimana dikutip dalam tulisan Wacana Antropologi tahun 1998 (Sulistiyowati Irianto, 2005: 68-69).

Pengetahuan kebudayaan disini mengkondisikan, membatasi atau memberi ketidakleluasaan (*constraint*) atas tindakan manusia dalam masyarakatnya. Kebudayaan mengoperasionalkan model-model pengetahuan yang dimilikinya ke dalam pranata-pranata sosial dan individu diberi ruang bebas memilih alternatif-alternatif yang tersedia, tetapi kebudayaan tetap tidak bisa mencegah para pendukungnya tidak keluar dari ruang yang disediakan. Individu berada diantara lingkungan-lingkungan sosial yang masing-masing memiliki struktur sosial berbeda satu dengan lain (Agusyanto, 2007: 19-39).

Pengertian kebudayaan lambat laun bergeser. Geertz mengatakan kebudayaan adalah: “*historically transmitted pattern of meanings embodied in symbols, a system of inherited conceptions expressed in symbolic forms by means of which men communicate, perpetuate, and develop their knowledge about and attitudes toward life* (Geertz, 1973: 89). Kebudayaan merupakan konsep yang terdiri atas dua bagian utama yaitu kebudayaan sebagai sistem pengetahuan dan sistem makna yang disebut aspek kognitif (*model of*), dan kedua, kebudayaan sebagai sistem nilai yang disebut aspek evaluatif (*model for*) (Geertz, 1998: XIV). Mengacu Geertz, kebudayaan diartikan sebagai *model of* (model dari) dan *model for* (model untuk) seperti peta. Dengan peta kita dapat membayangkan (*model of*) kondisi wilayah tempat tinggal kita yang sebenarnya maupun sebaliknya peta dapat dipergunakan untuk menuntun kita menemukan wilayah tempat tinggal kita (*model for*). Dialektika *model of* dan *model for* adalah kebudayaan, Geertz mendefinisikan kebudayaan sebagai seperangkat makna yang ditransmisikan dalam sejarah, dijemakan dalam simbol-simbol yang berfungsi membantu orang mengkomunikasikan, melestarikan dan menentukan sikap terhadapnya (Kleden, 2007: 1).

Berbicara tentang budaya, penulis mengikuti Kip Coggins yang mengutip pengertian budaya Geertz dan pemahaman perubahan budaya penjara Geoffrey Hunt dan kawan-kawan. Pengertian budaya Geertz dipergunakan mengakomodasi struktur ideal (*model of*) dan mengacu kenyataan (*model for*) kehidupan sosial Lapas, masyarakat penjara dapat dipandang pada satu sisi mengikuti aturan lembaga, disisi lain memenuhi kesepakatan-kesepakatan informal yang disepakati bersama. Dialektika dua sisi ini mewarnai kehidupan sosial Lapas, sebagai contoh ditetapkan kebutuhan makan dengan makanan cadong, tapi prakteknya banyak naarapidana tidak mengambil nasi cadong malah memesan makanan dari luar penjara. Aturan berikut, tidak boleh membawa, memiliki atau menggunakan *handphone* (HP), tapi kenyataannya HP digunakan untuk kepentingan menghubungi keluarga dan pemenuhan kebutuhan kamar. Dualitas ini disadari dan dilakukan terhukum demi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan daripada taat aturan kelembagaan. Begitu pula dengan petugas, melaksanakan aturan normatif menjadi tugasnya, tapi dalam pelaksanaan disesuaikan pemenuhan kebutuhan pribadi dan kepentingan unit kerja tertentu.

Apa yang seharusnya dan yang senyatanya, membuat perilaku-perilaku melanggar aturan kelembagaan dilakukan tidak kasat mata atau secara diam-diam, bekerjasama dengan petugas tertentu. Sebagai contoh pemesanan makanan diluar *nasi*

cadong, dilakukan bekerjasama dengan petugas yang bersedia membelikan di luar penjara. Contoh lain, pemakaian HP dilakukan di kamar secara diam-diam, hanya sepengetahuan petugas tertentu, disembunyikan saat berinteraksi dengan narapidana atau petugas secara bersama. Aturan normatif tampak hanya untuk diketahui dan dipahami (*model of*), tapi dalam praktek, semua terduduk berkeinginan tak mentaati aturan normatif, tapi hanya aktor tertentu saja yang mampu tidak mematuhi (*model for*), didukung relasi-relasi sosial yang dibentuk dengan petugas, *tamping dalam*, *tamping luar*, *pengurus kamar* dan *anak kamar*.

Aturan kamar dan lingkungan blok membuat narapidana *pangeran* mengatur pemenuhan kebutuhan di kamar memanfaatkan relasi-relasi *pengurus kamar* dan relasi-relasi *anak kamar* sebagai sesama teman tidur, teman makan atau teman seperkara. Relasi-relasi sosial ini dibentuk dan dijaga agar mereka mendapat kepastian, keamanan dan kenyamanan melakukan aktivitas di kamar dan blok. Aktivitas di kamar dapat dimulai dari duduk, makan, minum, memakai handphone, bermain catur, karambol, gitar, dapat dilakukan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Berbeda dengan narapidana *dayak* yang menerima saja ditempatkan pada posisi lantai ubin kamar, makan nasi *cadong*, tidur di lantai bawah kamar dan tak boleh menginjak tempat tidur *pangeran*. Pada kesempatan lain, narapidana *pangeran* maupun *dayak* menggunakan relasi-relasi aktor untuk meminta pasokan dana dari keluarga atau pihak luar, mencari pemasukan, berjualan asongan, memeras atau menipu (*modus*), sampai mengutang atau meminjam pada teman atau rentenir. Hal sama penulis saksikan pada sikap petugas pengamanan maupun unit kerja tertentu, mereka saling berkomunikasi akrab di blok maupun kamar dengan narapidana tertentu, mulai sekedar ngobrol (*curhat*), menyelesaikan persoalan, memantau situasi blok, sampai meminta atau menerima setoran pada tiap kamar atau individu-individu tertentu.

Telusuran lapangan menampilkan kenyataan rutin dan kontinyu, interaksi sesama narapidana maupun petugas lebih didasarkan pada konteks-konteks tertentu dan mudah berubah. Konteks-konteks ini menjadi acuan relasi-relasi sosial aktor petugas dan narapidana, bukan mengacu pada struktur ideal maupun aturan lembaga yang berulang kali disosialisasikan pada acara resmi, acara khusus atau pada berbagai spanduk dan banner dalam Lapas. Realitas ini mendorong perubahan pemahaman penulis untuk tidak sepenuhnya setuju dan sepakat dengan uraian Kip Coggins. Penjelasan budaya Geertz yang menggambarkan dialektika *model of* dan *model for* dalam masyarakat penjara, ternyata tidak dapat sepenuhnya dijadikan acuan berperilaku oleh para aktor. Didukung

apa yang diamati dan dirasakan penulis selama meneliti Lapas, membuat penulis menetapkan bahwa bukan keterbatasan dan deprivasi lembaga yang dijadikan acuan oleh masyarakat penjara, tapi konteks-konteks, relasi-relasi sosial aktor, berdasarkan kebutuhan dan kepentingan yang mendasari kehidupan sosial di Lapas. Hal ini senada dengan perkembangan konsep kebudayaan itu sendiri, yang saat ini berubah cakupannya mulai dari struktur, simbol, konstruksi, sampai kata (*word*), wacana (*discourse*) dan teks (Richard G Fox, 1991:195).

Penulis menyaksikan bagaimana Lapas menjadi institusi semi otonom, dimana tak semua pelanggaran-pelanggaran aturan formal terkena sanksi formal, karena adanya kesepakatan-kesepakatan informal yang dibangun dan disepakati para aktor. Telusuran lapangan memperlihatkan budaya penjara dijadikan acuan bukan lagi berdasar aturan lembaga, tapi mekanisme pemenuhan kebutuhan pribadi, kebutuhan kamar maupun kepentingan para aktor. Mekanisme ini tidak hanya berhenti pada pembentukan kesepakatan-kesepakatan informal tapi berlanjut pada upaya memelihara dan mempertahankan atau melanggengkannya melalui relasi-relasi sosial dalam Lapas.

Relasi-relasi sosial yang terbentuk, menurut Mitchel (1969), tidak terjadi secara acak tapi menunjukkan suatu keteraturan. Ada tiga jenis keteraturan relasi sosial, pertama, keteraturan struktural (*structural order*), dimana perilaku orang-orang ditafsirkan dalam tindakan-tindakan yang sesuai dengan posisi yang mereka duduki, seperti perusahaan, keluarga, atau asosiasi-asosiasi sukarela. Kedua, keteraturan kategorikal (*categorical order*), berkaitan dengan perilaku orang-orang yang berada dalam situasi-situasi tidak terstruktur, dapat ditafsirkan dengan stereotipe, kelas, ras dan kesukubangsaan. Ketiga, keteraturan personal (*personal order*), dimana perilaku orang-orang, dalam situasi-situasi terstruktur ataupun tidak, dapat ditafsirkan dalam kerangka relasi-relasi antar individual dalam suatu kelompok atau hubungan antara suatu kelompok dengan kelompok lain (J.C. Mitchel, 1969: 9-10).

Mengikuti uraian Mitchel ini, maka keteraturan relasi-relasi sosial dalam Lapas dapat dideskripsikan sebagai berikut: *Pertama*, ada keteraturan struktural yang membentuk hubungan-hubungan formal antara narapidana dan petugas sesuai penempatannya pada kamar atau blok masing-masing. *Kedua*, keteraturan kategorikal, tampak pada kumpulan narapidana dari berbagai tingkatan, baik berdasarkan kasus (teman seperkara), asal Polres sama, teman sekamar, teman mengisi waktu luang, atau teman pembuat kerajinan. *Ketiga*, keteraturan personal, ditentukan personal itu sendiri dalam membuat hubungan-hubungan sosial secara pribadi, apakah si narapidana mau

mencari banyak teman atau secukupnya, atau sebaliknya menjadi cepu atau mata-mata bagi petugas. Berdasarkan keteraturan ini, maka relasi-relasi sosial aktor di Lapas terkandung struktur sosial berupa pola-pola yang relatif bertahan dalam rangkaian hubungan-hubungan sosial, dimana terdapat aturan-aturan rekrutmen anggota, tipe-tipe hubungan sosial, posisi-posisi sosial, regularitas-regulatitas serta saling keterhubungan didalamnya.

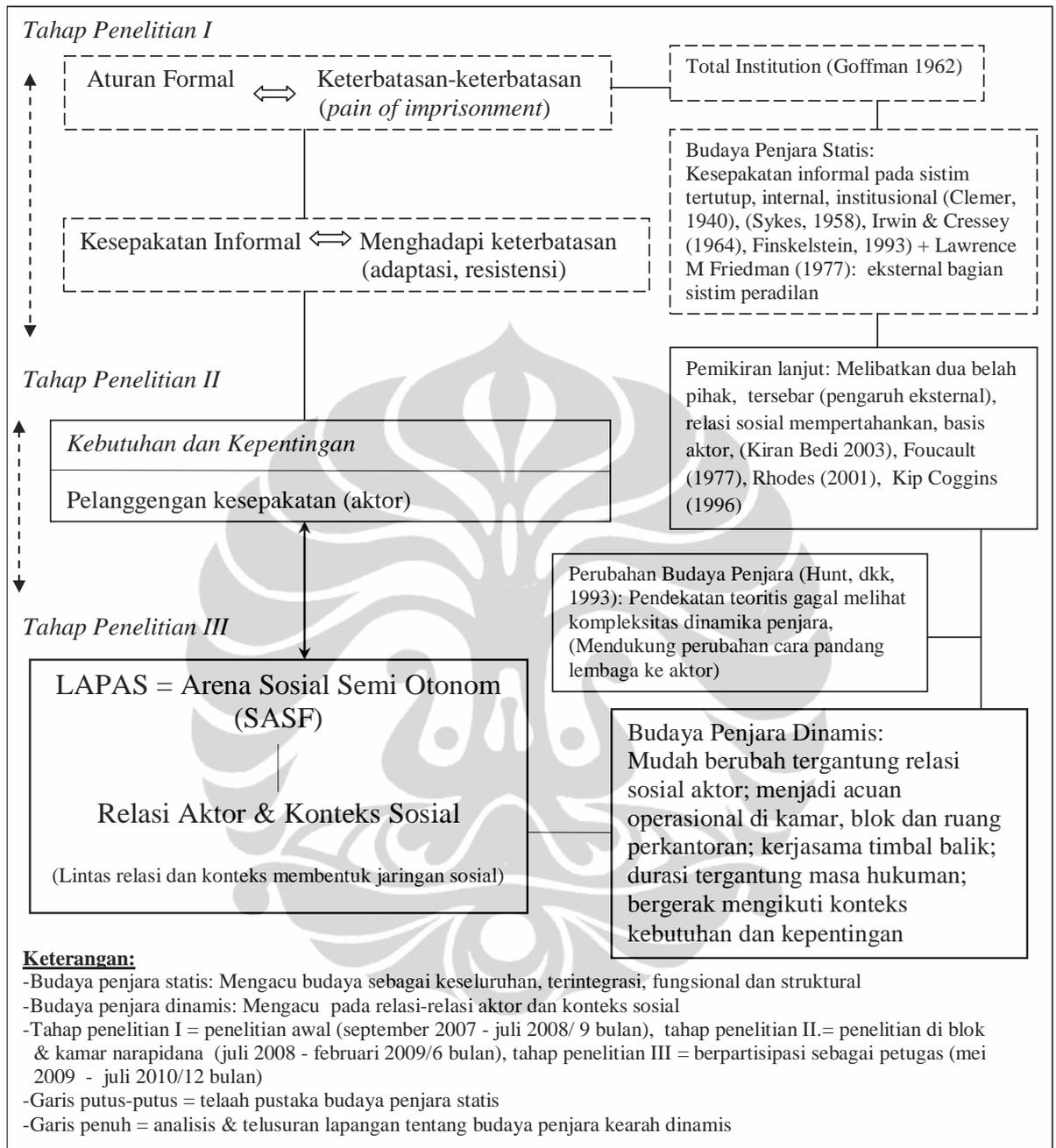
Lapas sebagai arena sosial semi otonom memperlihatkan relasi sosial yang beragam dan unik. Menurut K. Dhimi, Peter Ayton & Loewenstein (2007) kualitas kehidupan sosial di penjara adalah masalah penggunaan waktu di penjara, tergantung lama hukuman dan tingkat keamanan penjara serta perilaku di penjara. Sebagian besar perilaku dibawa dan merefleksikan gaya hidup narapidana sebelum di penjara (K. Dhimi, Peter Ayton & Loewenstein, 2007: Vol. 34 No.8). Lama hukuman membuat relasi-relasi yang dibentuk aktor tak begitu memikirkan bagaimana hidup di Lapas, tapi mereka menjalani saja sampai masa hukuman selesai.

Selain beradaptasi, kehidupan di Lapas diwarnai resistensi atau perlawanan, terhadap kekangan kebebasan bergerak dan pemenuhan kebutuhan terbatas. Resistensi dilakukan mulai dari berpura-pura taat, mengelabui (*modus*), mencuri kecil-kecilan, pura-pura bodoh, sampai membuat keributan, memasukkan barang terlarang, melarikan diri atau melawan petugas. Resistensi timbul karena tekanan-tekanan yang dialami individu dan keterbatasan-keterbatasan memenuhinya. Perlawanan dilakukan dengan cara melanggar protap formal seperti larangan memiliki HP, menggunakan barang terlarang, sampai pelanggaran prosedur rutin seperti tak ikut kegiatan dijadwalkan. Dalam rangka adaptasi dan resistensi ini (**Bab 5**), relasi-relasi sosial aktor dipergunakan menjembatani berbagai kesepakatan informal yang berlangsung dalam kamar, blok dan ruangan perkantoran Lapas.

7.4. Budaya Penjara Dinamis: Relasi Aktor & Konteks

Lapas sebagai institusi semi otonom mendukung penulis memahami realitas budaya penjara dan menimbulkan cara pandang berbeda melihat kehidupan sosial Lapas. Hasil penelitian menunjukkan budaya penjara dibentuk dan dibangun atas dasar kesepakatan-kesepakatan informal sesuai konteks pemenuhan kebutuhan dan kepentingan, dijaga dan dipelihara dalam relasi-relasi sosial aktor (petugas dan narapidana), demi keberlanjutan dan keseimbangan kehidupan sosial di Lapas (**Diagram 7.1**).

Diagram 7.1. Perubahan Cara Pandang Budaya Penjara



Sumber: Hasil Analisis Penulis

Diagram 7.1 memaparkan landasan perubahan budaya penjara statis kearah dinamis, didukung berbagai telaah literatur mulai dari Goffman (1962) sampai Hunt dan kawan-kawan (1993), dan telusuran lapangan yang memunculkan Lapas sebagai SASF dan menetapkan relasi-relasi aktor serta konteks sosial sebagai gambaran realitas budaya penjara yang berlangsung di Lapas. Realitas ini didukung berbagai tahapan penelitian

mulai dari penelitian awal mengamati di ruang besukan sampai berperan serta sebagai petugas pemasyarakatan.

Berdasar studi kasus di Lapas Bogor, penulis menemukan budaya penjara yang dibangun dari relasi-relasi sosial aktor (petugas dan *tamping*), terbentuk atas dasar kesepakatan-kesepakatan informal sesuai konteks-konteks kebutuhan dan kepentingan masing-masing (**Diagram 7.2**). Budaya penjara disini tidak lagi sekedar menjadi model berperilaku sebagaimana diuraikan Geertz, dimana ada dialektika perilaku yang seharusnya dan senyatanya, tapi sangat ditentukan relasi-relasi dan konteks-konteks pemenuhan kebutuhan dan kepentingan para aktor. Hal ini memperlihatkan kehidupan sosial Lapas dan interaksi masyarakat didalamnya bukan lagi sebagai budaya penjara statis, yang diam dan tak bergerak dalam melaksanakan kehidupan rutin sehari-hari.

Hasil penelitian penulis mengidentifikasi relasi-relasi sosial aktor secara garis besar terbagi atas dua relasi utama yaitu relasi-relasi sosial berdasarkan unit kerja dan relasi-relasi sosial berdasarkan kebutuhan kamar dan pribadi. Relasi sosial pertama berlangsung antara petugas, *tamping dalam* dan *tamping luar*, sedangkan relasi sosial kedua berlangsung antara petugas, pengurus kamar dan *anak kamar*. Adapun relasi-relasi sosial pertama berfungsi sebagai sarana kerjasama, menyelesaikan tugas unit kerja, mengatur kegiatan rutin (senam, registrasi, pendataan narapidana), sarana tukar pikiran (*curhat*), menyelesaikan kasus, menjaga keamanan blok dan kamar, maupun sebagai wadah memperoleh penghasilan. Selain itu, berfungsi pula secara disfungsi seperti menjadi wadah memasukkan barang tidak diperbolehkan, barang-barang dilarang. Selanjutnya relasi sosial kedua, selain berfungsi mencakup fungsi-fungsi diatas, mempunyai fungsi supportif, sebagai wadah mencari pelaku pencurian (kriminal), membantu mempersiapkan narapidana/tahanan *titipan* luar Lapas, sarana membuat berbagai kerajinan, tempat berjualan atau berdagang kaki lima, menyelesaikan masalah di blok, menengahi persaingan antar petugas (petugas pengamanan versus non-pengamanan), maupun meredam konflik di kamar atau blok narapidana.

Keadaan ini menunjukkan memahami kehidupan sosial Lapas tidak lagi semata menatapnya sebagai penjara tradisional (*total institution*), tapi telah terjadi perubahan signifikan orientasi teoritis maupun praktis. Orientasi teoritik budaya penjara berubah dari landasan budaya statik (struktural/sistemik) kearah mengutamakan konteks (dinamis), begitu juga dalam praktek, budaya penjara menjadi acuan berperilaku sesuai kebutuhan dan kepentingan para aktor, bukan mengikuti aturan-aturan disosialisasikan institusi.

Adapun konteks-konteks kebutuhan dan kepentingan para aktor teridentifikasi melandasi kesepakatan informal. Konteks-konteks ini dapat dipilah berdasarkan pemenuhan kebutuhan, meliputi kebutuhan makan, berkomunikasi, memperoleh penghasilan, seksual dan hiburan. Dan konteks-konteks berdasarkan kepentingan meliputi suasana penerimaan terhukum baru, saat berinteraksi rutin, kepemilikan barang-barang terlarang, pelanggaran prosedur tetap & rutin, serta pelaksanaan tugas administratif dan operasional unit kerja di Lapas.

Untuk konteks kebutuhan makan, pemenuhannya sangat bervariasi dan banyak pilihan, mulai dari nasi cadong, makanan di kantin, sampai pesanan dari rumah makan di luar Lapas (**Bab 5**). Kebutuhan membeli makanan dari luar Lapas dilakukan aktor *tamping-luar* atau petugas, asalkan mampu membeli dan membayar saja. Makanan bisa diperoleh juga dari dapur melalui negosiasi dengan tamping atau petugas dapur. Makanan bisa dipesan dari dapur, diperjualbelikan, tanpa ketahuan petugas, ada petugas pura-pura tak tahu karena menyangkut kebutuhan primer (*perut*) narapidana. Aktor narapidana (*pangeran*) bisa memesan makanan apa saja sesuai keinginan dan kemampuannya, layaknya makanan yang dinikmati masyarakat di luar Lapas. Berbeda dengan narapidana biasa (*dayak*), tak bisa memilih makanan yang diinginkan, hanya bisa menikmati nasi cadong yang disediakan Lapas.

Untuk konteks kebutuhan komunikasi, pemenuhan dilakukan melalui penggunaan alat-alat komunikasi dalam Lapas. Kebutuhan berkomunikasi ini dimungkinkan karena tersedianya alat komunikasi seperti warung telekomunikasi (*wartel*). Aturan normatif Lapas secara tegas melarang penggunaan handphone (HP) dan diberi sanksi berat bagi mereka yang melanggar. Tapi dalam keseharian, sanksi formal bisa dinegosiasikan sesuai kesepakatan yang diinginkan. Aktor petugas maupun tamping memahami aturan formal ini, tapi pelaksanaannya malah menjadi pengaman dan pelindung para pelanggar aturan ini. Pada kesempatan lain, aktor memanfaatkan pemenuhan kebutuhan berkomunikasi dengan menyewakan HP (*rental HP*) meskipun berulang kali tertangkap (*kegep*) petugas. Penggunaan HP marak saat malam hari, pemakai HP kebanyakan para *pangeran*, mereka bisa *berlama-lama* menggunakan HP, sambil didengar semua *anak kamar*. Bahkan *anak kamar* pun ikut menelepon ke sesama temannya di kamar atau blok lain. Para *pangeran* sendiri menelepon bisa sambil tiduran, ngobrol, berbaring atau jongkok di lapak tempat tidur masing-masing (**Bab 5**).

Untuk konteks kebutuhan memperoleh penghasilan, pemenuhannya dilakukan dengan ikut berjualan atau berdagang kopi, rokok, mie, atau sebagai penjual asongan.

Mereka dikenakan uang damai (86) oleh para korve blok sebagai bagian kesepakatan informal yang berlaku di kamar dan blok. Bisnis dagangan di blok tak hanya berasal dari modal narapidana, beberapa lainnya dimodali petugas. Meskipun hanya berjualan asongan, tapi dagangan tetap laku karena menyediakan barang-barang pemenuhan kebutuhan sehari-hari narapidana. Fakta lain, banyak kasus utang piutang diantara para narapidana, setiap kali makan atau merokok dapat di hutang dahulu dan dibayar nanti. Pengutang dan *pemberi hutang* melakukan kesepakatan-kesepakatan yang didasari kepercayaan semata tanpa ada kesepakatan tertulis. Soal hutang dalam Lapas menciptakan sosok aktor atau *figur tempat peminjaman uang*, bisa diperankan oleh tamping, *pangeran* atau narapidana biasa yang mempunyai relasi sosial luas di Lapas. Tempat peminjaman uang melekat pada sosok narapidana yang mempunyai masa hukuman lama, dan sering disebut napi *elit* di blok, yang mempunyai dukungan perlindungan dari aktor petugas. Ruang pengasingan (*sel tikus*) disiapkan sebagai sanksi bagi para pengemplang utang yang pelaksanaannya diatur aktor petugas sebagai *backing* para pemberi hutang tersebut (**Bab 5**).

Untuk konteks kebutuhan seksual, pemenuhannya dilakukan dengan cara-cara informal karena adanya larangan melakukan hubungan heteroseksual dalam Lapas, yaitu dengan melakukan *sex by phone (SBP)* atau bercinta lewat telepon, dimana penelepon dan yang ditelepon berimajinasi seolah-olah sedang melakukan hubungan intim. *SBP* umumnya dilakukan dengan orang yang telah dikenal, pasangan atau lewat jasa pelayanan telepon sex (**Bab 5**). Selain *SBP*, narapidana laki-laki melakukan pemenuhan kebutuhan seksual dengan masturbasi di kamar mandi, kebetulan hampir semua kamar narapidana telah dilengkapi kamar mandi sendiri sebagai upaya swadana *anak kamar* sendiri. Masturbasi (*ngeloco*) dilakukan memakai gambar-gambar wanita seksi yang dijual di kamar, narapidana lain menggunakan waria untuk menyalurkan kebutuhan seksualnya baik sengaja dibawa masuk ke dalam Lapas ataupun menggunakan waria yang berstatus narapidana/tahanan.

Untuk konteks kebutuhan hiburan, pemenuhan berlangsung dalam kegiatan-kegiatan olahraga atau kesenian. Peristiwa-peristiwa ini seringkali dimanfaatkan narapidana menjadi ajang taruhan, arena judi atau *berpacaran*. Salah satu hiburan yang sering dimanfaatkan dan menjadi arena adu untung adalah olah raga volley, futsal dan basket. Pertandingan-pertandingan olah raga ini dimanfaatkan untuk mencari uang tambahan memenuhi kebutuhan pribadi dan kebutuhan kamar. Berbagai peristiwa olah

raga dan kesenian membuat Lapas tidak lagi digambarkan sebagai tempat suram atau seram, malah menjadi tempat hiburan dan mengadu untung (**Bab 5**).

Berikutnya, konteks-konteks berdasarkan kepentingan, dapat diuraikan mulai dari konteks kepentingan *penerimaan narapidana/tahanan baru*, pemenuhannya dilakukan dengan mempersiapkan kedatangan terhukum sebelum masuk Lapas agar mendapat perlakuan baik atau dikenal dengan mekanisme *titipan*. Para terhukum berstatus *titipan* dapat dengan mudah melewati berbagai prosedur penerimaan, dan langsung ditempatkan di kamar tanpa melewati berbagai ritual penerimaan *orang baru* yang biasanya dilakukan petugas pengamanan dan tamping (**bab 5**). Keadaan ini tak terlepas dari relasi kerjasama aktor petugas, tamping, kepala kamar, keluarga terhukum, dan aparat penegak hukum lain, saling berperan melancarkan pelaksanaan *aturan main* ini.

Untuk konteks kepentingan *berinteraksi dalam Lapas*, pemenuhannya dilakukan narapidana dan petugas menggunakan *bahasa pergaulan lokal* yang mengandung istilah-istilah dimengerti narapidana atau petugas saja. Bahasa gaul dalam berinteraksi dipergunakan disesuaikan status sosial masing-masing, kemampuan dan kewenangan yang dimiliki, tugas pada unit-unit kerja tertentu, dan karakteristik ruangan kamar narapidana. Melalui penguasaan *bahasa penjara* ini, kehidupan sosial dalam Lapas berlangsung dan dimengerti hanya oleh kedua belah pihak. Hal ini mempererat relasi dan tak membuat perbedaan spesifik antara aktor petugas dan narapidana, tak seperti dahulu dimana posisi petugas digambarkan lebih superior daripada narapidana. Saat ini relasi-relasi dan konteks sosial menentukan superioritas dalam Lapas.

Untuk konteks kepentingan *kepemilikan barang-barang terlarang*, pemenuhannya dilakukan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Aturan formal secara tegas melarang kepemilikan barang yang dilarang, berulang kali disosialisasikan dalam Lapas. Beredarnya barang-barang yang dilarang seperti *HP*, pisau (*sikim*), gunting, paku, alat tato, minuman keras bahkan narkoba sudah berlangsung kontinyu dan diam-diam. Razia atau *sweeping* dilakukan petugas mengatasi hal ini, tapi seringkali pula tidak maksimal karena bocornya kegiatan ini. Beberapa tamping sering memberikan informasi kepada narapidana lain untuk mengamankan barang-barangnya, tak jarang petugas tertentu diajak kerja sama menyembunyikan barang-barang ini. Kenapa barang-barang ini sulit dicegah peredarannya, karena beberapa barang tertentu dimanfaatkan secara fungsional seperti jarum, pisau, paku, gunting rambut, untuk membuat kerajinan

tangan atau mengisi waktu luang, sebaliknya bisa dimanfaatkan secara disfungsi seperti menggunakan minuman keras dan narkoba.

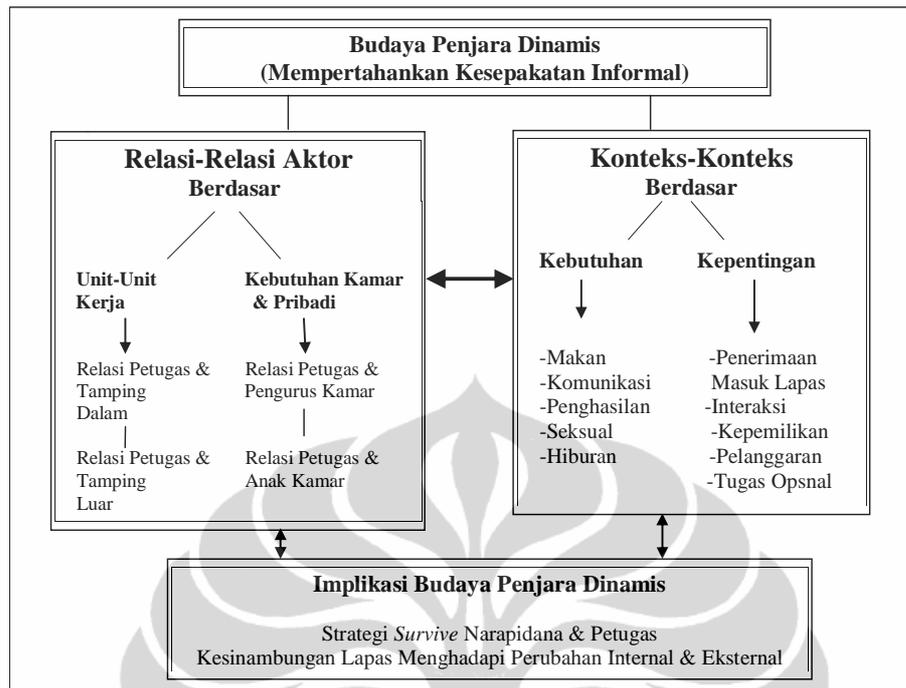
Untuk konteks kepentingan *pelanggaran prosedur tetap & rutin*, pemenuhannya menonjol pada pelanggaran aturan formal *bebas peredaran uang (BPU)*, meskipun tertera aturan resmi tak diperbolehkan memberi uang pada petugas, tapi kenyataannya *uang (86)* menjadi alat menyelesaikan masalah sehari-hari. Beredarnya uang berlangsung pada semua aspek kehidupan sosial di Lapas. Pelanggaran prosedur tetap dan rutin tampak juga dari keberadaan jualan kaki lima, arena judi atau adu untung, perkelahian dalam kamar, pemukulan (*ngebata*), berbohong (*modus*) sampai pelarian narapidana.

Untuk konteks kepentingan *pelaksanaan tugas administratif dan operasional* unit kerja, pemenuhannya dilakukan petugas dibantu tamping (*korve*). Hampir semua unit-kerja di Lapas tugasnya dibantu tamping atau pemuka. Tamping dianggap kepanjangan tangan petugas, membuat persetujuan-persetujuan lokal dengan petugas. Pelaksanaan tugas ini berbeda kepentingannya pada tiap unit kerja, seperti unit kerja KPLP menempatkan tamping pada kamar terpisah di malam hari untuk memantau kekacauan dan ketidaktertiban di kamar, sedangkan unit kerja dapur justru sebaliknya menyatukan tampingnya dalam satu-kamar, agar pagi subuh secara bersama bisa mempersiapkan, memasak makanan dan minuman *cadong* untuk semua penghuni Lapas.

Berbagai konteks ini melandasi penafsiran para aktor memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan mereka, walaupun sering tak sejalan atau bahkan bertentangan dengan aturan formal. Konteks-konteks ini mendasari kelangsungan budaya penjara dinamis yang mudah berubah dalam Lapas.

Budaya penjara dinamis memperlihatkan ciri unik yaitu realistik mengikuti kesepakatan informal; mudah berubah tergantung relasi-relasi sosial aktor; menjadi acuan operasional dilakukan di kamar, blok dan perkantoran (*office*); mengutamakan kerjasama timbal balik; berdurasi tergantung masa hukuman, serta bergerak mengikuti konteks kebutuhan dan kepentingan (**Diagram 7.2.**).

Diagram 7.2. Budaya Penjara Dinamis



Sumber: Hasil Analisis Penulis

Gambar 7.2 menampilkan gambaran budaya penjara dinamis dalam Lapas. Budaya penjara dinamis lebih mengutamakan pelaksanaan kesepakatan-kesepakatan informal dibanding aturan formal (statis). Realitas budaya penjara ini ditentukan relasi-relasi sosial yang dibentuk aktor dan konteks-konteks berdasarkan kebutuhan dan kepentingan aktor. Lebih jauh budaya penjara dinamis berimplikasi pada strategi *survive* narapidana dan petugas serta mempengaruhi kesinambungan Lapas menghadapi perubahan eksternal dan internal.

7.5. Kontradiksi-Kontradiksi Etnografik Dalam Meneliti Lapas

Pengalaman lapangan penulis memperlihatkan kontradiksi-kontradiksi dalam meneliti Lapas. Hal sama dialami Rhodes (2001 : Vol. 20) yang mengungkapkan persoalan metodologi dalam antropologi penjara, yakni timbul kontradiksi-kontradiksi dalam konteks etnografik saat melakukan observasi penjara, seperti laporan Feldman dalam tulisan Rhodes, menemukan hubungan erat antara *informant* (informan) dan *informer* (pengadu) sebagai bahaya eksplisit kehidupan penjara. Kontradiksi sama penulis temukan saat penelitian awal di Lapas, informan narapidana sering memberi jawaban membingungkan, dimana saat tertentu menyampaikan informasi dapat dipercaya, saat lain memberikan pengaduan atas keterbatasan individual dan

kekurangan-kekurangan kelembagaan secara sepihak. Penulis sendiri menyadari terhukum atau narapidana adalah orang-orang yang telah mengalami proses tanya-jawab berulang kali pada proses peradilan pidana, mulai dari kepolisian, kejaksaan dan kehakiman, sehingga terbiasa mendengar dan menjawab pertanyaan. Oleh karena itu pengalaman penulis menunjukkan pentingnya keterusterangan dan membina rasa saling percaya yang seimbang, tidak meromantisasi keadaan agar diperoleh data yang akurat bukan hiasan belaka.

Rhodes lebih jauh mengutip Feldman, mencatat kebudayaan pengawasan (*culture of surveillance*) di penjara, membuat seorang peneliti terlibat sebagai *outsider*, karena itu Feldman menambahkan pentingnya memperoleh *oral histories*, menelaah kewenangan dan dominasi struktur diekspresikan ke dalam atau dilawan pada level individu. Mengatasi hal ini, penulis berusaha menjadi *insider* dengan berperan sebagai petugas pemasyarakatan. Rhodes juga mengutip laporan berbeda dibuat Fleischer & Thomas yang melakukan penelitian dengan turun lapangan menjadi *correctional officer*, mereka melakukan partisipasi observasi di penjara, mengidentifikasi penghuni (*inmates*) secara berbeda, dan banyak informan menjadi teman dekat mereka. Fletcher & Thomas mengatakan berbahaya meromantisasi narapidana. Penulis pun sepakat dengan pendapat Fleischer & Thomas dibanding Feldman, karena dengan meneliti sebagai petugas membuat penulis merasa lebih dekat dengan narapidana dan tak diduga ikut menjadi tempat berbagi (*curhat*) narapidana maupun petugas.

Kedekatan penulis dengan narapidana diungkap salah satu informan kunci di lapangan, dengan mengatakan sebenarnya keberadaan penulis telah diterima dengan baik saat pertama kali masuk Lapas, tapi karena telah ada pemberitahuan sebelumnya dari petugas pengamanan sekaligus peringatan bagi tamping agar mengerti kalau penulis itu orang luar, maka penulis dianggap tak perlu tahu apa yang terjadi di Lapas. Hal ini membuat penulis mengalami kesulitan berhadapan dengan petugas maupun narapidana saat tahap penelitian mula-mula. Sikap ini berubah saat penulis mengenakan baju seragam, penulis dianggap orang-dalam yang sudah tahu semua yang terjadi di dalam Lapas. Dengan penulis dianggap sebagai orang dalam, maka penelitian lapangan bisa dilakukan tanpa merasa curiga atau takut pada para narapidana maupun petugas. Posisi orang luar dan orang dalam menjadi landasan penting melakukan penelitian secara etnografis dalam Lapas.

Ditambahkan Rhodes, etnografer penjara harus sadar bagaimana subyek di posisikan, menunjuk formasi diri dan orang lain (*self & "others"*) dalam struktur hirarki

penjara. Etnografer melihat posisi-posisi ini tidak perlu investasi kumulatif dibangun berulang dalam praktek, seperti Fleischer & Thomas kaya dalam kesadaran *local act*, tidak melibatkan ketegangan hukum formal dalam melegitimasi dan menyembunyikan ketidakstabilan yang terjadi. Bagi Rhodes (2001: 65-83), etnografer penjara harus melewati *tour* memperluas pemahaman penjara, tapi melupakan posisi *outsider* adalah berbahaya. Uraian Rhodes menjadi pijakan penulis bahwa meskipun penulis berusaha menjadi *insider* tapi tetap tak boleh melupakan posisi *outsider* sehingga tingkah laku penulis di lapangan tak melanggar atau terikat dengan aturan informal, apalagi terlibat penuh dalam pembentukan kesepakatan informal.

Kesulitan-kesulitan meneliti penjara juga dialami para peneliti penjara di Amerika Serikat, sebagaimana diuraikan Wacquant (2002) yang menceritakan pernah dalam tahun 1970, etnografi penjara menjadi pudar saat dibutuhkan sebagai kajian ataupun landasan politik, bahkan *ethnography of prison* dianggap spesies berbahaya yang secara nyata mati. Kondisi waktu itu hanya ada tulisan para jurnalis tentang penjara yang muncul, tapi tak ada lagi penelitian-penelitian yang dapat menjadi panduan bagi penghuni penjara sehingga mau tak mau mereka harus belajar langsung dan mengalami sendiri kehidupan di kamar (*sel*) tempat mereka ditahan atau dihukum. Oleh karena itu, diperlukan penelitian etnografi penjara berdasarkan *participant observation*, untuk menumbuhkan sirkulasi substansi penelitian penjara, termasuk mendorong kelengkapan sumber dan penjelasan lapangan dari sekedar naratif ke fotografi, video, interview intensif, dan terpenting menggunakan narapidana sebagai informan (*inmates as informants*) dibanding sebagai responden (Loic Wacquant, 2002: 371-391).

Mengacu uraian ini, dalam melakukan penelitian di Lapas, penulis melaksanakan turun lapangan, berpartisipasi langsung, menjadikan narapidana sebagai informan bukan responden, dan menyertakan gambar-gambar atau foto-foto terkait relasi-relasi sosial dan konteks-konteks dalam Lapas, yang diperoleh dari informan-informan kunci di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan budaya penjara di Lapas merupakan mekanisme yang dibangun relasi-relasi aktor petugas dan narapidana, disepakati dan dilaksanakan bersama, menjadi acuan berperilaku yang nyata dan rutin. Relasi-relasi sosial antara petugas dan tamping, *KM*, *buser*, *korve* mendasari pengelolaan dan pengawasan kegiatan Lapas, mulai dari pelaksanaan tugas unit-unit kerja, rutinitas blok, sampai aktivitas di kamar narapidana. Relasi-relasi sosial berkembang menjadi pengelola, pengatur dan pengawas (*panoptikon*) dalam Lapas, karena jumlah narapidana tak seimbang dengan

jumlah petugas menyebabkan keterlibatan narapidana menjadi suatu kewajiban dalam Lapas.

7.6. Implikasi Budaya Penjara: Strategi *Survive* & Kesenambungan Lapas

Implikasi budaya penjara tampak pada langgengnya strategi *survive* narapidana dan petugas memenuhi kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Budaya penjara dinamis melandasi kesinambungan Lapas menghadapi perubahan secara internal (meningkatnya fragmentasi terhukum/narapidana, ketidakteraturan pengelolaan, kebijakan memanfaatkan narapidana/terhukum) dan secara eksternal (overkapasitas, tempat penampungan sementara, perubahan aturan perundangan). Hubungan erat kegiatan di luar Lapas dan di dalam Lapas merupakan faktor penting dan akurat melihat berlakunya budaya dan pengaturan Lapas saat ini.

Mengacu budaya penjara dinamis, hasil penelitian menunjukkan interaksi antar narapidana di kamar dan blok tidak menampakkan warna kontras dengan keadaan di masyarakat umum, suasana akrab dan riang tampak terlihat, yang berbeda hanya sumber material yang dimiliki, ada narapidana berpakaian seadanya dan kumal, tapi sebaliknya ada yang rapi dan modis. Hubungan antar sesama narapidana pun sangat beragam, mulai dari relasi cari kawan sampai cari lawan, saling menegur, saling sapa, saling bantu, sampai saling tuduh, saling gertak dan saling peras. Senioritas, status sebelum masuk Lapas, stempel residivis, sumber dana, dan pekerjaan sebelum di Lapas, mempengaruhi keberadaan seorang narapidana menjalani masa hukuman dan berinteraksi di Lapas. Hubungan dengan petugas sama seperti fenomena keseharian di masyarakat, sebagai contoh saat membuat surat kependudukan, biar cepat maka pemohon melakukan pendekatan kepada petugas agar secara administratif urusannya lebih mudah dan cepat selesai, begitu juga saat mengurus surat izin usaha biar cepat beres, maka petugas perijinan diberi *hadiah*. Sama halnya dalam Lapas, aturan formal kaku dan bertele-tele "memaksa" timbulnya kesepakatan-kesepakatan informal diantara kedua belah-pihak. Pemenuhan hak dan kewajiban narapidana dan petugas selama berbenturan dan berlawanan aturan formal, justru semakin memberi jalan masuk (akses) bagi kesepakatan informal untuk mengikat mereka agar lebih mematuhi. Kondisi-kondisi ini membentuk budaya penjara dinamis. Budaya penjara ini cerminan kultur masyarakat luas, Lapas merupakan miniatur masyarakat sehingga berbagai pelanggaran yang berkembang di masyarakat umum pun ikut terbawa dan mewarnai kehidupan sosial Lapas.

Relasi-relasi sosial petugas dan narapidana berlangsung terus menerus, bahkan tidak lagi seperti hubungan orang yang mengawasi dan diawasi, atau orang yang menjaga dan dijaga, tapi berlangsung timbal balik, saling menjaga dan mengawasi. Banyak kisah, cerita dan pengalaman dialami narapidana melukiskan buruknya sistim peradilan pidana yang diikutinya. Tuturan beberapa napi menyebut mereka menjadi korban penyidikan kejar target, penuntutan komersial, vonis ringan harga mahal, dan sebagai komoditas diperjual-belikan. Cerita dan kisah ini di Lapas dianggap *angin-lalu* karena yang menceritakannya seorang kriminal yang tidak dapat dipercaya, apalagi kalau ditanyakan bukti tentang kebenaran cerita itu. Terhukum menjadi tidak berkulit terhadap diskriminasi dalam proses peradilan pidana, karena itu petugas pemasyarakatan sebagai bagian sistim peradilan, selain melakukan tugas pembinaan dan keamanan, menjadi teman berbagi atau tempat *curhat* atas berbagai persoalan yang dihadapi narapidana, meskipun petugas Lapas sebenarnya tak dapat berbuat banyak karena dalam praktek mereka hanya menemani terhukum secara fisik saja sebagai kiriman atau titipan proses peradilan kecuali telah menjadi narapidana. Mantan narapidana Rahardi Ramelan pernah mengemukakan saat ini perlu pengkajian kembali masalah penghukuman, mengingat banyak kesemerawutan dalam proses peradilan di Indonesia, dimana suap, pemerasan, kekerasan, mafia peradilan, tebang pilih, dan intervensi politik lebih berperan menetapkan penghukuman, sehingga menimbulkan keraguan apakah seorang narapidana adalah benar-benar harus dipidana atau dipaksa menjadi terpidana (*Lembaga Pemasyarakatan Bukan Penjara*, 2007).

Implikasi budaya penjara dinamis mempertahankan strategi *survive* yang dilakukan narapidana dan petugas, tak berbeda dengan upaya *survive* di luar penjara. Strategi *survive* dalam Lapas dipelihara mengikuti lama vonis hukuman, dipertahankan dari tamping satu ke lain, narapidana lama ke narapidana baru, dan petugas lama ke petugas baru. Semakin erat relasi-relasi sosial terbentuk antara aktor maka semakin *survive* keamanan dan kenyamanan diperoleh narapidana termasuk petugas.

Kedinamisan hubungan antar aktor mengingatkan penulis pada tulisan Wacquant (2002) yang menguraikan pentingnya menelusuri institusi penjara sebagaimana ada dan berjalan, menangkap proses, nuansa dan kontradiksi, serta membuktikan ketidakcukupan mempelajari penjara sebagai suatu dunia dalam dirinya sendiri (*as a world unto itself*) dan mengurangi dugaan kerusakan meluas (*collateral damage*). Wacquant menyampaikan *collateral damage*, menyiratkan pengaruh penjara yang distortif dan negatif, padahal penjara bertindak tegas sebagai kekuatan menstabilkan dan restoratif

melawan tekanan kehidupan, sebagai contoh penjara meredam kekerasan antar penghuni di ruang domestik, menghentikan tingkat ketagihan, menyediakan pemeliharaan kesehatan bagi gelandangan tak mampu. Senada dengan Wacquant, Rhodes menguraikan pentingnya mengungkap berbagai ketertutupan dalam Lapas (*collateral damage*), meskipun opini negatif penjara demikian adanya. Rhodes (2001) mengemukakan opini berkembang selama ini hanya menyorot satu sisi penjara saja, sehingga menciptakan tafsir dan opini negatif padahal persoalan-persoalan penjara kompleks.

Keberadaan budaya penjara dinamis mendukung pengaturan kelembagaan secara formal. Penulis mengamati persoalan-persoalan internal dan eksternal Lapas membuat petugas tidak terlalu memikirkan *treatment* terhadap narapidana (*pembinaan*) tapi mengutamakan keamanan dan ketertiban. Beberapa pimpinan Lapas mengaku terpaksa mencari cara untuk memenuhi kebutuhan dana demi keberlangsungan lembaga termasuk memungut biaya pengunjung dari narapidana, keluarga dan pungutan-pungutan biaya lainnya (Laporan Penelitian Puslitbang Departemen Hukum & HAM, 2008: 14-19). Kesenambungan Lapas menjadi salah satu implikasi budaya penjara dinamis menghadapi berbagai perubahan internal dan eksternal. Dilema institusional membuat realitas budaya berlaku sebaliknya. Situasi ini sejalan dengan cara pandang institusional memandang kinerja Lapas hanya diukur dari parameter tak ada keributan, gangguan dan pelarian, bukan menekankan pada pertimbangan relasi-relasi sosial yang melandasi, mendukung atau menghambat pembinaan atau *treatment* yang dilaksanakan.

Studi kasus di Lapas Bogor memperlihatkan jumlah petugas dan terdakwa tidak berimbang, minimnya petugas jaga dan pengawas blok, rentan terhadap gangguan keamanan dan kerusakan. Mengatasi persoalan ini, narapidana dilibatkan secara informal membantu petugas menciptakan dalam keamanan dalam Lapas. Tak ada pilihan lain, keterlibatan narapidana menjadi suatu kewajaran dalam operasionalisasi Lapas. Kepemilikan sumber daya para aktor ikut membantu keterlibatan intens dalam relasi-relasi sosial yang dibentuk, seperti materi, ketrampilan dan keahlian, selain kedekatan, seleksi petugas, yang menjadi persyaratan. Petugas yang memiliki pangkat dan jabatan tertentu sering lebih mudah mengakses narapidana *pangeran* (*kelas atas*) dibanding petugas biasa (*pangkat rendah*). Petugas mempunyai ketergantungan, warga binaan dipandang sebagai peluang menjanjikan bagi pencapaian sumber daya ekonomi sehari-hari (Saifulah, 2005). Sumber daya petugas dan status sosial narapidana mempengaruhi kehidupan, pertukaran sosial dan persaingan (Fatayin, 2005). Selain faktor internal, perubahan eksternal di Lapas ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah narapidana

narkoba, tingginya jumlah terhukum narkoba, membuay pembinaan menjadi tidak efektif karena melayani jumlah narapidana yang besar, diperparah jumlah petugas sedikit, sarana dan prasarana minim serta anggaran terbatas.

Menghadapi keterbatasan-keterbatasan secara internal dan eksternal, keberlakuan budaya penjara dinamis mendasari strategi *survive* menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul, membangun proses keseimbangan, meredam kekuatan besar narapidana, disisi lain membantu tugas operasional unit-unit kerja. Keseimbangan ini dijumpatani kehadiran aktor petugas memberi kelonggaran implementasi aturan formal, bersamaan kehadiran aktor narapidana ikut memelihara kesepakatan-kesepakatan informal sesuai kapasitas lingkungan Lapas.

Persoalan eksternal berikut adalah jumlah tahanan dan narapidana hampir berimbang. Ketidakseimbangan komposisi ini membuat petugas lebih fokus pada pengamanan tahanan dibanding narapidana. Kondisi ini tak sesuai fungsi Lapas sebagai tempat pembinaan narapidana. Hasil penelitian lapangan memperlihatkan komposisi tidak seimbang tahanan dan narapidana ikut memperkuat peran sosial aktor dalam mengatur, mengawasi dan mengendalikan kehidupan sosial tahanan melalui relasi *pengurus kamar, anak kamar* dan petugas. Dalam kenyataan, pengaturan *maximum, medium* dan *minimum security* dijalankan bukan mengikuti ketentuan ideal, tapi didasarkan relasi dan kesepakatan informal yang disepakati bersama.

Implikasi budaya penjara dinamis mempertahankan relasi sosial yang dijalin atas dasar kondisi-kondisi situasional bukan kondisi mutlak. Strategi *survive* dalam rangka pemenuhan kebutuhan, sebagian besar merefleksikan gaya hidup narapidana sebelum masuk Lapas. Beberapa perilaku tersebut sangat ekstrem, mulai gaya rentenir meminjamkan uang dengan bunga tinggi, sampai gaya petugas mengeksekusi pengemplang hutang. Strategi *survive* ini bertahan seiring besarnya bayaran, imbalan atau bunga yang diterima aktor yang terlibat.

Implikasi budaya penjara dinamis selain melandasi strategi *survive* para aktor, ikut pula menjaga kesinambungan Lapas mensikapi berbagai perubahan internal dan eksternal. Budaya penjara dinamis identik dengan budaya masyarakat umum di luar Lapas karena relasi-relasi yang terbentuk mudah berubah, tergantung aktor, sesuai konteks kebutuhan dan kepentingan (**Diagram 7.1** dan **Diagram 7.2**). Hanya bedanya, dalam Lapas sebagaimana ditekankan Coggins, merupakan masyarakat yang dibentuk, bukan terbentuk secara alami, masyarakat *non-voluntary*, mempunyai tingkah laku, norma-norma dan relasi-relasi sosial tersendiri.

7.7. Kontribusi Pemikiran Bagi Antropologi dan Kriminologi

Secara antropologis kehidupan sosial di Lapas mencerminkan masyarakat khas terdiri dari relasi-relasi sosial aktor narapidana dan petugas, saling berinteraksi berdasar konteks-konteks tertentu. Perilaku masyarakat terhukum dalam Lapas merupakan cerminan kehidupan masyarakat di luar Lapas, hanya berbeda konteks-konteks dan pemenuhannya. Studi kasus di Lapas Bogor menjadi gambaran keberadaan masyarakat lokal, unik dan khas, sebagaimana obyek studi antropologi. Hal ini diungkap Lorna A. Rhodes (2001), etnografi (Lapas) mendukung dan menjadi bahan masukan terwujudnya kajian antropologi penjara (*anthropology of prison*) secara lebih kompleks, sebagaimana ide Rhodes mewujudkannya.

Secara kriminologis, hasil penelitian ini memperdalam bahasan tentang kehidupan sosial di Lapas, meskipun tidak dapat digeneralisir pada keseluruhan Lapas. Dikatakan memperdalam, karena penelitian-penelitian kriminologi sudah sampai membahas karakteristik Lapas berdasar pada kategori Lapas Anak, Lapas Perempuan, Lapas Narkoba maupun Lapas Terbuka, tetapi landasan konsepsi dan pemikiran yang dipergunakan masih mengacu pemahaman budaya penjara yang menekankan keterbatasan dan deprivasi didasarkan acuan institusional, sehingga tak begitu memperhatikan realitas budaya yang tidak lagi berdasarkan cara pandang institusional. Hasil penelitian ini mendorong penelitian-penelitian kriminologi untuk tidak terlalu kaku mengkaji Lapas secara institusional atau mengabaikan keberadaan aktor dan konteks-konteks, dalam kehidupan sosial Lapas. Pentingnya relasi sosial aktor ini memperlihatkan bahwa semakin suatu aktivitas yang menjadi kebutuhan atau kepentingan dasar individu dibatasi, maka semakin dimungkinkan aktivitas tersebut dilaksanakan secara terselubung atau diam-diam. Relasi-relasi aktor dan berbagai konteks membuat aturan formal hanya menjadi hiasan dinding, yang sesudah dipakai lalu disimpan kembali dalam lemari. Realitas budaya penjara dinamis menjadi dasar kajian kriminologi untuk berani mendorong perubahan perundangan atau merevisi berbagai aturan atau larangan yang tidak relevan dengan dinamika kehidupan dalam Lapas saat ini.

Situasi ini sejalan dengan pemikiran kriminologi mengenai wacana pergeseran pemidanaan penjara dan menggantinya dengan jenis pidana lain yang sifatnya non-institusional. Disini, pidana perampasan kemerdekaan dianggap kontra produktif baik atas pertimbangan kemanusiaan, filosofis maupun pertimbangan ekonomis. Pemenjaraan dianggap tidak efektif merehabilitasi dan mereintegrasi pelaku kejahatan terutama

kejahatan spesifik, walau pemenjaraan tetap merupakan upaya terakhir (*last resort*) memerangi pelaku tindak kejahatan (UNODC, 2007: 3-6). Bersamaan dengan itu, berkembang pemikiran-pemikiran baru mengkritisi pelaksanaan hukuman penjara seperti *community based corrections*, *restorative justice* maupun bentuk-bentuk pidana alternatif lain (Cetak Biru, 2008: 15). Intinya, semua pihak (*stakeholder*) diharapkan terlibat mencegah dan mengatasi tindak pidana tertentu, ikut bersama-sama memikirkan akibatnya di masa mendatang, lebih menuntut pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya (tidak hanya menjalani hukuman penjara), melibatkan partisipasi korban dan masyarakat umum (*Laporan Restorative Justice System*, 2004: 13). Kebijakan non-pemenjaraan atau deinstitutionalisasi penghukuman menjadi kebutuhan yang berkembang saat ini di masyarakat luas. Hasil penelitian ini pun ikut memperkuat landasan deinstitutionalisasi penghukuman, tapi bukan berarti menghapuskan hukuman penjara di Lapas. Temuan dan analisis budaya penjara dinamis mendukung pelaksanaan hukuman penjara dengan menekankan titik berat pada keberadaan aktor dan konteks-konteks. Keberadaan budaya penjara dinamis memperlihatkan kedinamisan mempertahankan kesinambungan Lapas menghadapi perubahan internal dan eksternal.

Uraian-uraian dalam bab ini secara garis besar menampilkan landasan perubahan budaya penjara dalam Lapas, dari statis menjadi dinamis. Dan implikasinya terhadap kesinambungan Lapas yang serba kekurangan dan terbatas, menghadapi berbagai perubahan internal dan eksternal saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agusyanto, Ruddy. (2010). *Fenomena Dunia Mengecil: Rahasia Jaringan Sosial*. Jakarta: Institut Antropologi Indonesia.
- Agusyanto, Ruddy. (2007). *Jaringan Sosial dalam Organisasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Alan Barnard & Jonathan Spencer (ed).(1996). *Encyclopedia of Social & Cultural Anthropology*. USA: Routledge.
- Allen, Harry A dan Clifford E Simonsen. (1989). *Corrections In America: An Introduction*. New York : Macmillan Publising Company.
- Atmowiloto, Arswendo. (1996). *Hak-Hak Narapidana*. ELSAM.
- Atmowiloto, Arswendo. (1993). *Kisah Para Ratib*, Jakarta: Penerbit Grafiti.
- Barnes, Harry Elmer & Negley K Teeners. (1996). *New Horizons In Criminology*. New Delhi: Prentice-Hall of India Private Ltd.
- Becker, Howard S, (ed) (1994). *The Other Side. Perspectives On Deviance*. New York: A Free Press Paperback-The Macmillan Company.
- Benda-Beckman, Franz, Keebet von Benda-Beckman, Anne Griffith (ed). *Mobile People, Mobile Law*. (2005).England: Ashgate Publishing Limited.
- Bedi, Kiran. (2003). *It's Always Possible*. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
- Brown, Radcliffe. (1980). *Struktur dan Fungsi dalam Masyarakat Primitif*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementrian Pelajaran Malaysia,
- Bonella, Kathryn. (2009). *Hotel Kerobokan: The Shocking Inside Story of Bali's Most Notorious Jail*. Sydney: Pan McMillan Australia Pty Ltd.
- Butcher, Hugh. (1993). *Intruduction: Some Examples & Definition dalam Community and Public Policiy*. USA: Pluto Press.
- Carleton, Mark T. (1971). *Politics and Punishment: The History of The Louisiana State Penal System*. USA: Louisiana State University Press.
- Carney, Louis P. (1979). *Introduction To Correction Science*. USA: McGraw-Hill Inc.
- Cavadino, Michael & James Dignan. (1997). *The Penal System: An introduction*. London England: Sage Publication Inc.
- Clemer, Donald. (1965). *The Prison Community*. USA: Holt, Rinehart & Winston.

- Coyle, Andrew. (2005). *Understanding Prisons*. New York: Open University Press.
- Collin, Finn. (1997). *Social Reality*. New York: Routledge
- Creswell, John W. (2003). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. USA: Sage Publication.
- Dilulio, John J. (1987). *Governing Prisons: A Comparative Study of Correctional Management*. New York : The Free Press.
- Dorpat, Theodore L. (2007). *Crimes of Punishment: America's Culture of Violence*. USA: Algora Publishing.
- Eisenstadt, S.N. & L Roniger. (1984). *Patrons, Clients and Friends: Interpersonal Relations and The Structure of Trust in Society*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Emerson, Role M, Rachel I. Fretz, Linda L. Shaw. (1995). *Writing Ethnography Fieldnotes*. USA: University of Chicago Press.
- Fetterman, David, M. (1989). *Ethnography: Step By Step*. California: Sage Publications.
- Finkelstein, Ellis. (1993). *Prison Culture: An Inside View*. England: Avebury Ashgate Publishing.
- Foucault, Michel. (1977). *Discipline & Punish: The Birth of The Prison*. London: Pinguin Books.
- Fox, Richard G. (ed). (1991). *Recapturing Anthropology*. USA: School of American Research Press.
- Friedman, Lawrence M. (1977). *Law and Society*. New Jersey: Prentice Hall.
- Fukuyama, Francis. (2000). *The Great Disruption: Human Nature And The Reconstitution of Social Order*. USA: Profile Books.
- Geertz, Clifford. (1973). *Deep Play: Notes on The Balinese Cockfight* dalam *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. New York: Basic Books, Inc, Publishers.
- Geertz, Clifford. (1992). *Tafsir Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Geertz, Clifford. (1998). *After The Fact*. Jogjakarta: LKIS
- Glaser, Daniel. (1964). *The Effectiveness of A Prison and Parole System*. New York: The Bobbs Merrill Company, Inc.
- Goffman, Erving. (1962). *Asylums: Essay on The Social Situation of Mental Patients and Other Inmates*. Chicago: Aldine Publishing Company.

- Gottlieb, Benyamin H. (ed). (1981). *Social Networks and Social Support*. London: Sage Publications
- Hagan. (1999). *Modem Criminology*. New York: Mac Millan Publishing Co.Inc.
- Hammersley, Martin & Paul Atkinson.(1995). *Ethnography*. New York: Routledge.
- Hardiyanto, Petrus Sunu (ed). (1997), *Michel Foucault: Bengkel Individu modern Disiplin Tubuh*. Yogyakarta: LKIS.
- Hegman, Gregg. (1972). *Taking Cars: Ethnography of A Car Theft Ring* dalam Spradley, James P dan McCurdy, David W., *The Cultural Experience: Ethnography in Complex Society*. USA: Science Research Associate, Inc.
- Houston, James G. (1999). *Correction Management: Function, Surveillance Systems*. Chicago USA, Nelson-Hall Publisher.
- Hume, Lyme dan Jane Mulcock (ed). (2004). *Anthropologist in The Field: Cases in Participant Observation*. New York: Columbia University Press.
- Scheper-Hughes, Nancy. (1992). *Death Without Weeping: The Violence of Everyday Life in Brazil*. California: University of California Press.
- Ihromi, T.O (ed). (1994). *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Irianto, Sulistyowati & Shidarta (ed). (2009). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Irianto, Sulistyowati (ed). (2009). *Hukum Yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jacobson, David. (1991). *Reading Ethnography*. USA: State University of New York Press.
- Jones, Pip. (2003). *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Fungsionalisme hingga Post-modernisme*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kaplan, David & Albert A. Manners. (1999). *Teori Budaya*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Keesing, Roger M. (1980). *Antropologi Budaya I, Suatu Perspektif Kontemporer*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Keesing, Roger M. (1980). *Antropologi Budaya II, Suatu Perspektif Kontemporer*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Koentjaraningrat. (1990). *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Koentjaraningrat. (1990). *Sejarah Teori Antropologi II*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

- Koentjaraningrat. (1990). *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta. PT Dian Rakyat.
- Leinwald, Gerald. (1972). *Prisons*. New York: Pocket Books.
- Marcus, George E & Michael M.J. Fischer. (1986). *Anthropology as Cultural Critique: An Experimental Moment in The Human Sciences*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Marshall, Catherine & Gretchen B Rossman. (1989), *Designing Qualitative Research.*, USA: Sage Publication.
- Martin, Carol. (2000). *Doing Research in a prison setting, dalam Doing Criminological research*. Victor Jupp, et.al., USA: Sage Publications.
- Miethe, Terance D, & Hong Lu. (2005). *Punishment: A Comparative Historical Perspective*. New York: Cambridge University Press./
- Mitchel, J.C. (1969). *Social Network in Urban Situations*. England: Manchester University.
- Moore, Sally F. (1983). *Law As Process, An Anthropological Approach*. London : Routledge & Kegan Paul Ltd.
- Morselli, Carlo. (2009). *Inside Criminal Networks*. Montreal: Springer.
- Nembrin, Pier Giorgio. (2007). *Air, Sanitasi, Higiene dan Habitat Di lingkungan Lapas dan Rutan*. Jakarta: ICRC.
- Olwig, Karean Fog & Kirsten H (ed). (1997). *Sitting Culture: The Shifting Anthropological Object*, New York: Routledge.
- Peluso, Nancy Lee & Michael Watts (ed). *Violent Environments*. New York: Cornell University Press.
- Priyatno, Dwija. (2006). *Sistim Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Poernomo, Bambang. (1986). *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistim Pemasyarakatan*. Jogjakarta: Penerbit Liberty.
- Ramelan, Rahardi. (2008). *Cipinang Desa Tertinggal*. Jakarta: Penerbit Republika.
- Rhodes, Lorna A. (2004). *Total Confinement: Madness and Reason in The Maximum Security Prison*. London: University of California Press.
- Ritzer, George & Douglas J. Goodman. (2003). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media,
- Saifuddin, Achmad Fedyani. (2005). *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*. Jakarta: Prenada Media.

- Sanjek, Roger. (1990). *Fieldnotes: The Making of Anthropology*. New York: Cornell University Press.
- Scott, James C. (1985). *Weapons of The Weak : Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven: Yale University Press.
- Scott, John. (1991). *Social Network Analysis*. London: Sage Publications.
- Siegel, Larry J. (1983). *Criminology*. USA: West Publishing CO.
- Simon, Josias A. & Thomas Sunaryo. (2011). *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: PT Lubuk Agung.
- Snarr, Richard W. (1996). *Introduction To Corrections*. USA: Times Mirror Higher Education. Inc.
- Spradley, James F., & David W Mc Curdy. (1972). *The Cultural Experience: Ethnography in Complex Society*. USA : Science Research Associates.
- Spradley, James P. (1979). *The Ethnographic Interview*. USA: Holt, Rinehart & Winston.
- Spradley, James P. (1980). *Participant Observtion*, USA: Holt, Rinehart & Winston.
- Stack, Carol B. (1975). *All Our Kin, Strategies for Survival in a Black Community*. USA: Harper Paperback Pub.
- Sudirman, Didin. (2007). *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistim Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (Pusjianbang) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Sujatno, Adi. (2008). *Pencerahan Dibalik Penjara: Dari Sangkar Menuju Sanggar untuk Menjadi Manusia Mandiri*. Jakarta : Penerbit Teraju.
- Sujatno, Adi. (Didin Sudirman). (2008). *Pemasyarakatan: Menjawab Tantangan Zaman*. Jakarta: Vetlas Production Humas Ditjen Pemasyarakatan.
- Sujinah. (2000). *In a Jakarta Prison: Life History of Women Inmates*. Jakarta: The Lontar Foundation.
- Syahrir, Kartini. (1995). *Pasar Tenaga Kerja Indonesia, Kasus Sektor Konstruksi*. Jakarta: Grafiti.
- Sykes, Gresham. (1958). *The Society of Captives: A Study of A Maximum Security Prison*. Princeton: Princeton University Press.
- Tim Penyusun. (2008). *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan sistem Pemasyarakatan*. Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

- Tongat. (2001). *Pidana Kerja Sosial dan Pembaruan hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Tsing, Anna Lowenhaupt. (2005). *Friction: An Ethnography of Global Connection*. New Jersey: Princeton University Press.
- Wacquant, Loic. (2009). *Punishing The Poor: The Neoliberal Government of Social Insecurity*. USA: Duke University Press
- Wellman, Barry & Berkowitz., S.D. (ed). (1988). *Social Structures, A Network Approach*. USA: Cambridge University Press
- Widodo, Joko. (2008). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Boymedia Publishing.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2007). *Handbook of Principles and Promising Practices on Alternatives to Imprisonment*.

DOKUMEN

- Departemen Kehakiman RI. (1964). *Surat Keputusan Direktorat Jendral Bina Tuna Warga No. J.H.1/2049 tertanggal 16 Desember 1964 tentang pengangkatan "pemuka" dan penunjukkan "tamping"*. Jakarta.
- Departemen Kehakiman & hak Asasi Manusia RI Direktorat Jendral Pemasyarakatan. (2003). *PROTAP: Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan*. Jakarta.
- Departemen Kehakiman dan HAM RI Direktorat Pemasyarakatan . (2000). *Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI no. M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, dalam Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemasyarakatan 6 Bidang Pembinaan*. Jakarta.
- Departemen Kehakiman dan HAM RI Direktorat Pemasyarakatan . (2000). *Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*. Jakarta.
- Departemen Kehakiman dan HAM RI Direktorat Pemasyarakatan. (2000). *Peraturan Pemerintah RI no. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP, dalam Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemasyarakatan 1 Undang-Undang & Peraturan Pemerintah*. Jakarta.
- Direktorat Kehakiman dan HAM RI Direktorat Jendral Pemasyarakatan. (2000). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemasyarakatan Buku 1*. Jakarta.
- Departemen Hukum dan HAM RI, Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang). (2008). *Laporan Penelitian tentang Sub-Kultur Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Indonesia*. Jakarta.

- Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Kehakiman & HAM. (2003). *Pokok-Pokok ORTA dan Renstra Direktorat Jendral Pemasyarakatan 2001-2005*. Jakarta.
- Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum & HAM RI. (2008). *Modul Pelatihan Bagi Petugas Pemasyarakatan: Implementasi Sistim Pemasyarakatan dan Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners*. Jakarta.
- International Committee of The Red Cross (ICRC). (2009). Working Paper: Visit to Persons Detained in The Custody of The Ministry of Law and Human Rights at LP klas II A Bogor. Jakarta.
- Keputusan Menteri Kehakiman RI (1990) no. M.02-PK.04.10.
- Keputusan Menteri Kehakiman RI (1999) no. M.01.PK.04-10
- Laporan Tahunan Pelaksanaan Tugas Tahun 2008 & Rencana Kerja Tahun 2009 Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bogor*. (2008). Bogor.
- Laporan Restorative Justice System: Sistim Pembinaan Narapidana Untuk Pencegahan Residivisme*. (2004). Jakarta: Kerjasama AusAID dan Departemen Kriminologi Universitas Indonesia.
- Pusat Penelitian & Pengembangan Departemen Hukum dan HAM, (2005). *Laporan Hasil Penelitian Sub kultur Penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Indonesia*. Jakarta.
- Standar minimum rules for the treatment of prisoners*. (1955). Jenewa: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
- Undang Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

ARTIKEL

- Kleden, Ignas. (2007). Clifford Geertz, “Sistem Simbolik dan Sistim Budaya”, Makalah dalam diskusi Kompas, Jakarta, 30 November 2007.
- Menteri Hukum dan HAM (2008). Sambutan Pada Hari Bhakti Pemasyarakatan ke 43 tanggal 27 April 2007, dalam <http://napi1708.wordpress.com/2007/04/27>. Diakses 5 Januari 2008 Pukul 04.34.
- Ramelan, Rahardi. (2007). *Lembaga Pemasyarakatan Bukan Penjara*. Harian Kompas, 19 Mei 2007.
- Simon, Josias A (2009). *Penegakan Hukum & Dilema Lembaga Pemasyarakatan*. Suara Pembaruan, Rabu, 19 Agustus 2009.
- Suhardi, Mohamad. (2005). *Nasib Penjara Kita*. Harian Kompas, 2 Oktober 2005

JURNAL

- Cochrane, Glynn (1980). *Policy studies and Anthropology* dalam *Current Anthropology* Vol. 21 No. 4.
- Davern Michael (1007). *Social Networks and “Economic Sociology: A Proposed Research Agenda for a More Complete Social Science”*, dalam *American Journal of Economics and Sociology*, Vol. 56 No.3.
- Dhami, K, Peter Ayton & Loewenstein. (2007). *Adaptation to Imprisonment: Indigenous or Imported* dalam *Criminal Justice* Vol. 34 No.8.
- Hadisuprpto, Paulus. (2002). *Pembinaan Narapidana Manusiawi: Tantangan Sistim Pemasarakatan di Indonesia* dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 2.
- Hunt, Geoffrey, Stephanie Riegel, Tomas Morales, Dan Waldorf. (1993). *Changes in Prison Culture: Prison Gangs and The Case of The “Pepsi Generation”*, dalam *Social Problems*, , Vol.40, No.3.
- Moore, Sally F. (1973). *Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study*, dalam *Law & Society*, Vol. 7, No.4
- Rhodes, Lorne A. (2001). *Toward an Anthropology of Prisons* dalam *Annual review of Anthropology*, Vol. 20.
- Rowley, Timothy J. (1997). *Moving beyond Dyadic Ties: A Network Theory of Stakeholder Influences* dalam *The Academy of Management Review*, Vol 22 No. 4.
- Wacquant, Loic. (2002). *The Curious Eclipse of Prison Ethnography in The Age of Mass Incarceration* dalam *Ethnography* vol. 3.
- Wellman, Barry. (1983). *Network Analysis: Some Basic Principles*, dalam *Sociological Theory*, dipublikasi oleh *American Sociological Association*, Vol. 1.
- Wolfe, Alfin. W. (1978). *Social Network*, dalam *An International Journal of Structural Analysis*, Switzerland : Elsevier Sequoia.
- Wolff, Nancy dan Jeffrey Draine. (2004). *Dynamics of Social Capital of Prisoners and Community Reentry: Ties that Bind?* dalam *Journal of Correctional Health Care*, Vol 10, No. 3.

KARYA AKADEMIS

- Ardianto, Eka. (2006). *Etnografi Dialogik Naratif: Studi Kasus Pengalaman Imajinatif Slankers*. **Disertasi**. Universitas Indonesia.
- Coggins, Kip. (1996). *Life In A Soutwest Prison: A Study of The Culture of The Penitentiary of New Mexico*. **Disertasi**. University of Michigan.

- Fatayatin, Catur. B. (2005). *Kendala Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Warga Binaan Di Rutan Negara Salemba*. **Tesis**. Universitas Indonesia.
- Fansuri, Mochamad (1992). *Pola Adaptasi dan Penyesuaian Diri Narapidana Sebagai Faktor Penentu Dalam Proses Pembentukan Identitas Sebagai Penyimpang*. **Tesis**. Universitas Indonesia.
- Irianto, Sulistyowati (2000). *Perempuan Diantara Berbagai pilihan Hukum: Studi mengenai Strategi Perempuan Batak Toba Untuk Mendapatkan Akses Kepada Harta Waris Melalui Proses Penyelesaian Sengketa*. **Disertasi**, Universitas Indonesia.
- Kakiay Agustina Christina. (2009). *Relasi Kekuasaan dalam Pelayanan Publik: Studi tentang Hubungan Pelaku-pelaku dalam Pengelolaan Terminal Terpadu Kota Depok*. **Disertasi**, Universitas Indonesia.
- Kurniawan, Hendra. (2009). *Kebijakan dan Kekuasaan: Kajian Kasus Pelayanan Publik dan Penegakan Hukum di Wilayah Kepolisian Resor Depok*. **Disertasi**, Universitas Indonesia.
- Paramarta, Ambeg Y. (2005). *Community based corrections dalam Pelaksanaan Pidana Penjara di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang*. **Tesis**. Universitas Indonesia.
- Saefullah (2005). *Jaringan Sosial Petugas Pemasyarakatan*. **Tesis**. Universitas Indonesia.
- Saifuddin, A.F. (1992). *Stability & Change : A Study of The Social Network and Household Flexibility Among The poor of Jakarta Indonesia*. **Disertasi**, University of Pittsburg.
- Samsun (2005). *Kebijakan dan Manajemen Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Antar Kelompok Etnis Narapidana Di Lapas Klas I Cipinang*. **Tesis**. Universitas Indonesia.
- Santoso, Mardi. (2005). *Stratifikasi Sosial Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang*. **Tesis**. Universitas Indonesia.
- Siagian, M.P. (2007). *Strategi Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pengaruh Negatif Sub Kebudayaan Penjara: Studi Kasus Lapas Klas IIA Bogor*. **Tesis**. Universitas Indonesia.
- Simon, Josias A. (2000). *Jaringan Sosial Sebagai Strategi Pekerja dalam Menghadapi Otoritas: Studi terhadap Resistensi Pekerja Di Kawasan Industri Pulogadung*. **Tesis**. Universitas Indonesia.
- Sudarsa, Agun Gunanjar. (2006). *Peran Tunjangan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Dalam Menunjang Peningkatan Kinerja Petugas Pembinaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan: Studi Pada Lapas Klas II A Bogor Dan Lapas Anak Klas II A Blitar*. **Tesis**. Universitas Indonesia.
- Suseno, Yudi. (2006). *Progam Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana Di Lapas Klas IIA Bogor Dalam Konteks Persepsi Narapidana Dan Residivisme*. **Tesis**. Universitas Indonesia.

LAMPIRAN

Tuturan Beberapa Informan Kunci

Penulis mendeskripsikan penggalan kisah kehidupan yang diceritakan informan **Cpi**, **Rzi**, dan **Lbi** mulai dari masa kecil sampai tiba di Lapas Paledang Bogor. Uraian ketiga informan ini berjalan searah dengan tahapan pertama dan kedua dari penelitian lapangan. Tidak hanya itu, masih ada sebelas informan lagi dari pihak napi dan dua belas informan dari pihak petugas, yang menjadi informan dalam penelitian ini. Tetapi pada subbab ini penulis hanya menguraikan ketiga informan ini saja karena mereka telah penulis kenal sebelum masuk ke Lapas Paledang Bogor dan menjadi penghubung utama dunia luar penulis dan dunia dalam Lapas. Selain itu ketiga informan mendasari pengumpulan data awal dan mengajarkan pada penulis bagaimana cara meneliti di Lapas secara tepat dan mudah. Hal ini tak berarti penggalan cerita informan lain tak penting, sama substansinya, hanya penggalan cerita informan lain dirangkai dalam narasi bab atau sub bab berikutnya.

Informan Cpi

Informan ini biasa dipanggil Cpi, lahir di Malang tahun 1982, bertempat tinggal di Malang Jawa Timur. Cpi adalah anak bontot dari 7 bersaudara, tinggal bersama orang tua dari SD sampai SMP dan selalu mendapat sekolah negeri. Kehidupan Cpi dari masa kecil dan remaja tinggal di Malang. Bersekolah tingkat sekolah dasar sampai SMA di kota Malang. Cpi melanjutkan studi di UI Depok dan berhasil menyelesaikan kuliah.

Sewaktu di SD-SMP, Cpi sering menjadi juara kelas, minimal ranking 3 di kelas, tidak pernah lewat dari lima besar, karena itu Cpi dipercaya orang tuanya, bahkan Cpi bilang, "*Mau bandel kaya apapun yang penting sekolahnya benar, kata orang tua*". Semasa kecil Cpi tinggal bersama orang tua dan menjadi anak yang penurut. Pada akhir SMP, Cpi mulai kenal dekat dengan teman-teman yang suka bolos, minum, termasuk kakak-kakak maupun Bapaknya yang seringkali membawa minuman keras, dan menawari kepada Cpi, untuk disimpan di lemari es. Kakak Cpi juga memperkenalkan ganja (gele) pada Cpi tapi hanya untuk tahu saja tidak lebih dari itu. Selanjutnya tidak banyak memori masa kecil yang disampaikan Cpi karena ia termasuk anak yang penurut dan baik.

Setelah lulus SMP, Cpi masuk ke SMA di Malang, ia tak tinggal lagi bersama orang tua, tapi dengan 4 kakaknya. Ia diurus oleh kakak-kakaknya. Semasa di SMA, Cpi

Universitas Indonesia

menjadikan rumah kakaknya sebagai tempat bermain teman-teman sekolahnya. Kebetulan rumah kakanya terletak di tengah kota, jadi gampang mau kemana-mana, terutama tempat ngumpul kalau lagi bolos di sekolah. Semasa SMA prestasi belajar Cpi tidak se-cemerlang di SD & SMP, tapi masih termasuk diatas rata-rata kelas. Di SMA, Cpi dekat dengan teman-teman sekolah yang suka minum, narkoba, ikut-ikutan anak-motor, anak-mobil, anak-malam, anak-nongkrong. Kalau semasa SMP, Cpi hanya tahu dan kenal minuman dan narkoba, di SMA mulai ikut-ikutan memakai, tak hanya mencoba. Keadaan ini didukung kenyataan minuman keras sudah menjadi hal yang biasa di keluarganya, siapa saja boleh ambil dan minum. Orang tua Cpi bilang, “*Mendingan minum di rumah tapi enggak buat masalah diluar, jadi gak aneh lagi.*” Sebenarnya sewaktu di SMA Cpi pernah ikut kegiatan Paskibra di sekolah satu tahun lebih, tapi dikeluarkan karena berantem dengan kakak kelas, saat latihan saling *ledek-ledekan, ceng-cengan*. Cpi merasa kakak kelas tak suka dengan dia, sehingga Cpi memukul kakak kelasnya itu. Sesudah keluar dari kegiatan Paskibra Cpi tidak ada kegiatan lain, mulailah Cpi ikutan balapan mobil, motor, nongkrong di bengkel-bengkel, dekat dengan obat-obatan (*drugs*).

Setelah Cpi menyelesaikan SMA, ia sempat menganggur satu tahun, karena diterima di jurusan yang tidak disenanginya di Bali, sehingga tak diambil. Lalu Cpi masuk salah satu universitas di Malang tapi tak sampai satu semester, kebetulan karena rektor di universitas tersebut adalah teman bapaknya. Tahun berikut Cpi ikut UMPTN lagi dan diterima di FISIP UI. Cpi *ngekost* di Depok. Selama menganggur setahun Cpi ikut membantu bapaknya menjadi supir mengantar barang dari Salatiga - Malang bolak balik. Tapi karena diterima di UI, Cpi berangkat ke Depok dan *ngekost* ditempat saudaranya yang masih kerabat keluarga besar. Cpi dianter dari Malang ke Depok oleh saudaranya bernama C yang kuliah di UI juga. Pertama kali masuk kost Cpi membayar kamar Rp. 200.000, sampai keluar Cpi tetap bayar Rp.200.000 saja karena pemiliknya masih kerabat Cpi. Tempat kost ini letaknya disamping kampus UI sehingga cukup jalan kaki saja kalau hendak kuliah. Saat awal kuliah Cpi mulai bandel, ikut minum bersama teman-teman seangkatan, tapi Cpi lebih banyak bergaul bersama teman di luar kampus, terutama teman-teman di kost. Cpi mempunyai beberapa teman akrab (A, K & B) yang sudah saling percaya tapi justru teman-teman inilah yang menjerumuskan C masuk ke tahanan Polres Depok. Bagi Cpi suasana di tempat kos tak beda jauh dengan kondisi dirumahnya di Malang yang bebas, bisa minum, *ngobat*, sama seperti jaman sekolah SMA dahulu. Mulai dari sini, Cpi mencari barang (*gele*) dengan berbagai cara. Berawal dari

pertemuan dan informasi seorang tukang kakso asal Malang yang berjualan di belakang rektorat UI, Cpi mencari barang ke tempat yang diberikan penjual bakso tersebut. Cpi lalu pergi sendiri tanpa ditemani teman-teman seangkatan, setelah mendapat barangnya Cpi tawarkan dan bagi ke teman-temannya. Ternyata beberapa teman-teman seangkatannya juga sudah tahu kalau lokasi itu tempat mendapatkan barang, dan sering berhubungan kesana. Sewaktu kuliah Cpi pernah ikut penelitian tentang narkoba untuk mencari dan mengenal informan penelitian secara lebih dekat. Ada beberapa informan penelitian yang Cpi percaya dan dekat dengan dia (sebut saja A dan K). Teman-teman ini makin membawa Cpi dalam dunia narkoba, tapi Cpi hanya suka minum sama *gele* (ganja) saja, Cpi mengatakan, *“Pernah coba suntik tapi gak terus karena gak ketemu enakya, bagi gue soal drugs tergantung enakya gak, masuknya enak gak, juga kalo ganja kan gak sampe sakaw, efeknya paling bikin santai, nggak ada OD (over dosis) ama ketagihan, lagian daunnya enak di pakai lalapan, kalo soal uang gak terlalu masalah, ganja berapa sih paling 20.000, putaw juga gak mahal, bisa patungan, tapi kalo gak enjoy buat apa, kalo dulu ada botol (BK) gua nggak enjoy, makanya tergantung enak gak barangnya.”* Cpi menambahkan sekarang untuk mendapatkan barang mudah saja tinggal nongkrong pasti ada yang datang membeli atau menawarin. Terkait dengan narkoba yang dibawa, Cpi mengatakan, *“Sampe sekarang kalo di kost, bawa barang cuek aja, paling banyak satu ons, paling harganya Rp.400-500 ribu yang kering dan padat, gue nggak pernah jual, tapi nyetok. Juga kalo mau beli banyak tinggal cari siapa yang mau ikutan, cari satu sampai tiga orang patungan 100-100 ribu kebeli barangnya, gue sendiri gak dagang, kita yang beli pake sama-sama, lalu punya duit lagi, nyetok, untuk keperluan teman-teman sediri saja.”*

Pada suatu hari teman dekat Cpi si A menitip barang (*gele*) di kost Cpi, karena sudah kenal dekat Cpi tidak curiga dan terima barangnya, beberapa saat kemudian teman Cpi yang lain (K) datang dan mau beli barang, tapi Cpi bilang gak ada barang, lalu dia pergi dan balik lagi membawa polisi, rupanya ada teman lain (B) yang biasanya mendapat barang dari Cpi ketangkap polisi dan ngaku dapat barangnya dari Cpi, lalu polisi masuk ke kamar kost Cpi dan mencari barang bukti narkoba. Pada waktu itu tidak ada barang bukti di kamar, jadi Cpi hanya ditangkap melanggar undang-undang narkoba tentang pemakai narkoba, bukan pengedar, oleh hakim Cpi dikenakan vonis satu tahun, lalu dikirim ke Lapas Paledang.

Informan Rzi

Informan ini biasa dipanggil Rzi, lahir di Jakarta 6 Februari tahun 1983. Ia anak ke-2 dari 2 bersaudara, tapi belum lama ini kakaknya meninggal dunia karena sakit paru-paru

sehingga Rzi menjadi anak tunggal saat ini. Kedua orang tuanya bernama Abdul MH dan Efie FT, beragama Islam. Rzi semasa kecil bersekolah di SD dan SMP Kembangan Jakarta Barat, lalu melanjutkan ke SMA 46 di Jakarta Selatan, sempat kuliah di perguruan tinggi UI Depok tapi tidak selesai studinya.

Semasa kecil Rzi tinggal berpindah-pindah, pertama kali ia tinggal di daerah Kebon Sirih Jakarta Pusat, lalu pada umur 3 tahun bersama keluarga pindah ke Tanjung Duren Jakarta Barat. Pada umur saya 5 tahun pindah lagi ke daerah Kembangan Jakarta Barat dan sampai akhirnya umur 22 tahun sampai sekarang tinggal di daerah Ciledug Tangerang, tepatnya di kompleks perumahan Puri Ciledug Tangerang. Rzi bercerita, "*Kehidupan keluarga saya sederhana dan biasa-biasa saja, ayah saya seorang pegawai swasta dan ibu adalah seorang ibu rumah tangga.*" Rzi mengatakan pada masa kecilnya ia tergolong anak yang biasa saja, tidak terlalu menonjol dalam segi pelajaran, tapi cenderung mudah bergaul dan gampang menerima sesuatu misalnya kegiatan musik, berteman, tempat bergaul (nongkrong). Sosok dan pembawaan Rzi tampak seperti seorang yang luwes dan mudah bergaul, sejak taman kanak-kanak, Rzi adalah anak yang periang dan banyak teman. Berlanjut ke SD ia mempunyai banyak teman pergaulan, Rzi mengatakan, "*Saya termasuk anak yang normal, biasa saja dimata teman se-umurannya*". Masa kecil Rzi banyak dilewatkan dengan bermain seperti layaknya anak-anak se-umurannya, teman-teman SD dari Rzi rata-rata berdomisili dekat rumah, sehingga teman sekolah Rzi adalah teman rumah Rzi juga. Keadaan seperti inilah yang membuat hubungan Rzi dan teman-teman makin erat, situasi ini membuat Rzi dan teman-teman sering melakukan kegiatan bersama-sama, dalam hal positif contohnya belajar, dalam hal negatif contohnya merokok. Karena persahabatannya dan teman-teman rela melakukan apa saja, saat itu kami memang sangat dekat seperti layaknya saudara, kehidupan seperti itu terus berlanjut sampai ke tingkat SMP.

Pada masa remaja atau SMP, Rzi dan teman-teman makin dekat dari hari ke hari karena kebetulan teman-teman di SMP rata-rata bekas teman-teman di SD juga, segala macam kegiatan dilalui bersama, positifnya banyak, negatifnya juga banyak. Contoh hal-hal positif dilakukan bersama adalah *camping*, ekstrakurikuler, pesantren kilat dan sebagainya, sedangkan hal-hal negatif misalnya merokok, bolos sampai coba-coba narkoba jenis ganja. Kegiatan positif dan negatif Rzi pada masa remaja atau SMP masih seimbang, Rzi dan teman-teman masih tahap coba-coba dan masih tahap pencarian jati diri. Rzi dan teman-teman mudah sekali menerima sesuatu seperti contohnya, musik, pacaran, gaya hidup, gaya

berpakaian dan sebagainya. Tetapi sayangnya kata Rzi, *"Semua itu tidak berlanjut sampai masa dewasa atau SMA, karena di masa SMA kami terpisah, ada yang di jakarta barat, pusat, timur dan Rzi sendiri terpisah ke jakarta selatan, hal ini membuat Rzi dan teman-teman agak jauh dan jarang bertemu, kita asyik dengan kehidupan dan pergaulan di SMA masing-masing"*.

Berlanjut ke masa dewasa atau SMA, Rzi benar-benar merasa orang baru dan asing karena ia satu-satunya anak yang pindah rayon dari SMP Jakarta Barat ke SMA Jakarta Selatan. Rzi mengatakan ia mulai adaptasi dari awal, tidak ada satupun anak yang dikenal. Rzi masuk SMA negeri di daerah Blok A Fatmawati atau lebih dikenal SMA Texas 46. Di SMA ini Rzi benar-benar awam dan tidak tahu apa-apa. Setelah beberapa hari melewati ospek SMA perlahan-lahan Rzi mulai tahu jati diri menjadi anak SMA 46, ternyata SMA 46 adalah SMA yang sering kali tawuran, setiap hari selalu saja tawuran, waktu pulang maupun berangkat sekolah. SMA 46 juga terkenal daerah 'sarang' narkoba. Rzi menceritakan, *"Hari demi hari saya lewatkan, makin hari makin menikmati hari-hari bersama tawuran dan narkoba di SMA, walaupun intensitasnya banyak ke tawuran, tiap hari ikut tawuran yang pada masa itu menjadi 'trend' yang diminati pelajar di SMA ini. Saya mulai berani membawa senjata tajam bahkan bom molotov, hari-hari benar-benar dipenuhi dengan tawuran dan kekerasan"*. Rzi mengatakan perilaku kekerasan dan narkoba banyak dipelajarinya semasa di SMA, untung saja kehidupan seperti itu tidak berlanjut ke masa kuliah. karena di kehidupan kuliah Rzi mengalami masa-masa hampir sama seperti pada masa awal di SMA, tidak ada satu pun yang dikenal. Pada masa kuliah di kampus UI Depok, Rzi lebih banyak berinteraksi dengan anak-anak yang dikenal di kost-an daripada anak-anak di kampus, mungkin karena di kost-an Rzi merasa lebih akrab dan senasib, sedang di kampus susah beradaptasi karena banyak anak baru yang datang dari luar Jakarta sehingga Rzi sulit saling mengenal kepribadian mereka. Di kost-an Rzi merasa bebas dan tidak ada yang mengawasi, karena jauh dari orang tua, keadaan ini membuat Rzi kembali mencoba-coba hal-hal negatif bahkan cenderung berbahaya. Rzi mulai berani memakai narkoba bahkan menjual atau minimal sebagai perantara, Rzi sering melakukan *free sex*, malas kuliah, hari-hari dilewatkan dengan mabuk-mabukan di kampus, kost-an dan tempat-tempat lain, beberapa tahun Rzi lewatkan masa kuliah dengan hal-hal negatif tapi herannya semua hal negatif yang dilakukan menyangkut narkoba terbilang aman-aman saja dan benar-benar tidak ada yang tahu bahkan ibu dan bapak kost. Hal ini membuat Rzi makin nyaman dengan narkoba, Rzi menambahkan sejauh ini di kost-an aman sekali dari gangguan orang lain apalagi polisi. Lama-lama ada kejadian dimana seorang teman Rzi menawarkan berjualan narkoba jenis ganja dalam partai besar, mula-mula Rzi agak takut,

Universitas Indonesia

tetapi melihat kondisi kost-an yang aman dan cocok berjualan narkoba akhirnya Rzi pun mencoba tawaran temannya itu. Rzi mengakui kalau berjualan narkoba sangat besar untungnya dan membuat ia semakin lupa. Setelah beberapa bulan menjalankan kegiatan ini, pembeli Rzi semakin banyak, mulai kalangan pemuda sekitar kost-an, anak kuliah sampai supir-supir angkot.

Pada suatu hari ada seorang pembeli yang juga seorang supir angkot tertangkap menghisap ganja di daerah Terminal Depok. Setelah di usut akhirnya si supir buka mulut menyebut nama Rzi walau supir tersebut tidak langsung beli dari Rzi tapi melalui kaki tangan Rzi. Lama kelamaan penyelidikan polisi menuju ke Rzi, pada saat itu Rzi dijebak, seorang pelanggan Rzi kaki tangannya yang saat itu sudah tertangkap, menghubungi dan memesan ganja, tanpa curiga Rzi langsung meng-iya-kan pesannya, Rzi berjanji bertemu di Stasiun UI, saat itu Rzi sampai duluan, sempat menunggu sekitar sepuluh menit, tetapi bukan kaki tangan Rzi yang datang melainkan dua orang polisi berpakaian preman. Rzi ditangkap dan disuruh menunjukkan tempat kost-an yang tidak lain sebagai tempat penyimpanan ganja, setelah sampai di kost-an, polisi langsung menggeledah kamar Rzi dan ditemukan lima belas paket ganja siap edar. Akhirnya Rzi ditangkap dan dibawa ke Polres Depok diusut selama dua bulan, singkat cerita Rzi di jebloskan ke penjara Paledang Bogor selama dua setengah tahun dengan dakwaan melanggar undang-undang narkoba. Selepas menjalani masa hukuman di Lapas Paledang Bogor, “Rzi” menjadi seorang pegawai swasta di perusahaan telekomunikasi yang cukup terkenal di Jakarta sampai saat ini.

Informan Lbi

Informan ini biasa dipanggil Lb, lahir di Jakarta tahun 1983. Anak pertama dari tiga bersaudara, bersekolah di SD Pondok Cina Depok, SLTP di Pejaten Pasar Minggu, SMA di Jakarta Barat, sempat kuliah di D3 UI, tapi tak selesai karena orang tua tak sanggup membiayai, Lbi tumbuh dan besar di daerah Depok dan Jakarta.

Lbi tinggal bersama kedua orang tua dan dua orang adik, pada usia belum genap 6 tahun ia disekolahkan di SD Depok. Lbi juga belajar membaca Al-Quran (mengaji) di TPA Al Furqon dengan guru mengaji adalah pengurus masjid dekat rumah. Waktu di SD, Lbi pernah mendapat piagam penghargaan lomba menggambar se kota Depok, tapi Lbi sudah lupa menyimpan piagam tersebut dimana. Prestasi Lbi selama di sekolah dasar tidak terlalu jelek, beberapa kali menjadi juara kelas tapi hanya sampai di kelas empat saja. Waktu itu Lbi

tinggal di perumahan yang banyak teman sebaya, masa kecil Lbi penuh permainan. Orang tua Lbi cukup keras mendidik anak-anak agar menjadi pintar, selesai pulang sekolah Lbi hanya diperbolehkan main di luar rumah sampai shalat ashar lalu harus belajar mengaji. Dari kelas 1-6 juga belajar mengaji bersama ustad di mesjid dekat rumah. Lbi suka mainan, uang yang diberikan orang tua seringkali Lbi kumpulkan untuk membeli mainan yang digemari, uang jajan itu jarang dibelikan makanan dan minuman. Setelah tamat sekolah dasar, Lbi melanjutkan sekolah di SLTPN Pasar Minggu Jakarta Selatan. Kelas satu, Lbi ikut berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka dan beladiri taekwondo. Kelas dua, tidak pernah lagi ikut kegiatan ekstrakurikuler, lebih fokus untuk belajar. Kelas tiga, mengikuti les komputer di sekolah, mulai bergaul dengan teman-teman sekolah, sering ikut perkelahian pelajar (tawuran), ikut-ikutan teman membolos sekolah dan kenal merokok juga narkoba jenis putaw pertama kali. Waktu itu Lbi tidak pernah mencoba menggunakan *putaw*, meskipun teman-teman memakai di ruang khusus Pramuka & PMR. Lbi pernah ditawarkan untuk mencoba dengan cara dihirup (*drag*) tapi Lb tidak tertarik. Saat kelas tiga SMP, Lbi mulai menyukai rokok tetapi tidak berkelanjutan, baru menjadi perokok pada kelas tiga SMA. Soal sekolah Lbi mengatakan, "*Saya ingat betul saya kurang cakap di pelajaran matematika tapi di mata pelajaran biologi dan sejarah nilai ujian saya dapat nilai memuaskan.*"

Masa SMP ke SMA merupakan masa transisi bagi Lbi. Setelah tamat SLTP, Lbi melanjutkan ke SLTA di Jakarta Barat, sekolah ini merupakan sekolah khusus percontohan ketertiban belajar waktu itu. Di sekolah ini pribumi menjadi minoritas, sebagian besar etnis tionghoa/keturunan cina. Semua itu tidak menjadi hambatan bagi Lbi untuk belajar dan bergaul. Lbi lebih sering bergaul dengan pribumi. Kelas satu, Lbi fokus dalam belajar, walau tidak pernah juara kelas tapi nilai-nilai di rapor tidak pernah mengecewakan. Kelas dua, Lbi mulai berontak dan kabur dari rumah, jarang pulang, sering bolos sekolah. Ini disebabkan ketidakharmonisan rumah tangga orang tuanya waktu itu. Kelas tiga, sering dipanggil wali kelas dan guru BP, dicap anak bandel bersama beberapa murid pribumi lain karena kerap kali kepergok sedang merokok di belakang halaman sekolah. Disini Lbi mengenal *dugem* sebab jarak tempat hiburan tidak jauh dari sekolah. Pertama kali mengenal ekstasi waktu itu sekitar tahun 2001, Pernah menggunakan tetapi tidak terlalu ketagihan (*addict*) terhadap ekstasi tersebut. Waktu SMA Lbi sering bolos bersama teman-teman untuk bermain billiard, sepak bola dan diskotik (*dugem*). Lulus SMA, Lbi tidak masuk perguruan tinggi yang diinginkan.

Setelah lulus SLTA, Lbi sempat vakum selama setahun (tahun 2001-2002) karena tidak diterima UMPTN, pada tahun 2002 Lbi mendaftarkan diri di lembaga pendidikan ketrampilan mengambil jurusan manajemen informatika, tapi Lbi tidak serius dalam bidang ini. Lbi kemudian mendaftar dan mengikuti ujian diploma UI dan diterima, tepatnya Lbi masuk tahun 2003, sayang Lbi tidak menyelesaikan kuliah, meskipun ia sadari betul arti pendidikan bukan sekedar mendapat ijazah tapi pengalaman belajar dan teman pergaulan. Waktu kuliah Lbi lebih sering bergaul bersama teman-teman, bersenang-senang dan bermabuk-mabukan, minuman keras, shabu, putaw terutama ganja. Lbi menggunakannya tidak setiap hari tetapi ganja tidak pernah ketinggalan tiap hari untuk keperluan pribadi. Pada waktu jam kuliah di lorong-lorong lantai gedung kampus, di kantin, maupun di halaman, Lbi dan teman-teman sering berkumpul beramai-ramai bercengkerama sambil menghisap ganja dan minuman, tapi tidak pernah sampai mabuk. Lbi kuliah hanya sampai semester 4 karena tidak ada biaya lagi dari orang tua, Lbi lalu menjadi pengangguran yang acap kali sering begadang, kebut-kebutan, nongkrong sama teman di parkiran, Lbi mengatakan, *“Kebut-kebutan motor di malam hari sangat menyenangkan bagi saya.”* Lbi mudah bergaul dan mendapatkan teman, Lbi mengetahui dan mengikuti teman narkoba, Lbi sangat menyukainya, tetapi hanya beberapa, tidak semua jenis narkoba. Lbi pernah mencoba beberapa jenis diantaranya ganja/mariyuana (ketagihan), dan shabu (tidak terlalu ketaguhan), Lbi mengatakan, *“Hanya ganja/marijuana yang membuatnya kecanduan, bahkan sangat, pikiran tenang, tubuh terasa lebih rileks saat menikmatinya.”* Sampai disini, Lbi mengingat masa remaja dimana ganja/mariyuana pertama kali dicicipi, karena diberikan teman dekat rumah. Untuk mendapatkannya terbilang cukup mudah dan harganya relatif terjangkau (Rp 5000-Rp10.000), Lbi melanjutkan, “Sewaktu kuliah ia kerap menggunakan dan menghisap ganja/mariyuana bersama teman-teman kampus, karena mudah mendapatkan teman dengan memakai narkoba, lingkungan kampus juga mendukung tempat para “user” (istilah pengguna narkoba) berkumpul.”

Lbi menceritakan dia ingat betul malam hari saat ditangkap polisi, Lbi mengatakan. *“Saya disuruh membeli ganja sebanyak Rp.200.000 oleh teman yang bekerja sebagai penjaga counter HP didepan gang rumah. Saya sudah kenal betul dengan teman saya dan tidak mempunyai firasat buruk mengenai teman saya ini, lalu saya belikan ganja sebanyak 4 paket, per paket seharga Rp.50.000, saya serahkan ke teman saya yang adalah penjaga counter HP tadi. Tak disangka ternyata ganja 4 paket itu bukan untuk dia tapi untuk temannya di Depok Dua, yang sedang mabuk-mabukan dan pesta. Kebetulan ada warga melapor ke polisi dan ditindaklanjuti, tertangkaplah teman*

Universitas Indonesia

saya ini.” Berawal dari tertangkapnya teman Lbi ini, akhirnya ia menceritakan ganja tersebut didapat dari Lbi, Lbi ditangkap dan diinterogasi pihak kepolisian, pukul 09.00 pagi polisi tiba di rumah Lbi, Lbi tidak habis pikir kenapa teman dekatnya itu bisa bertindak sebodoh itu, Lbi pernah melarang temannya untuk tidak memberikan ganja kepada orang lain selain teman di dekat rumah, tapi semua sudah terjadi, Lb ditahan, diproses hukum dan divonis 4 tahun penjara dan mendekam di Lapas Paledang Bogor.



